

Serial Buku Bunga Rampai 3

# COVID-19 DAN TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN

**Hamdan Daulay - Khoiro Umatin - Zaen Musyrifin**  
**Mikhriani - Hikmah Endraswati - Rahadiyand Aditya**  
**Istiqomah - Muhammad Irfai Muslim - Muhammad Izzul Haq**  
**Casmini - Bayu Mitra A. Kusuma**  
**Theresia Octastefani - Aris Risdiana**

Editor:  
Irsyadunnas

Co-Editor:  
Andy Dermawan  
Aris Risdiana  
Bayu Mitra A. Kusuma



## **COVID-19 DAN TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN**

*Serial Buku Bunga Rampai 3*

@2020, Pusat Studi Dakwah Dan Transformasi Sosial (PSDT)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xvi + 230 hlm; 16 x 24 cm

ISBN: 978-623-6600-30-6

Cetakan Pertama: November 2020

Penulis : **Hamdan Daulay, dkk.**

Editor : **Irsyadunnas**

Cover : **Diah Ayu**

Layout : **R. Hidayat**

Diterbitkan oleh:

**Lembaga Ladang Kata**

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,

D.I. Yogyakarta

Email: [cetakbukudiladangkata@gmail.com](mailto:cetakbukudiladangkata@gmail.com)

## SAMBUTAN DEKAN

### Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Salah Satu tugas dunia perguruan tinggi adalah melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah, di samping dua tugas lainnya mengajar dan mengabdikan kepada masyarakat. Kewajiban akademis ini bahkan menjadi ukuran kemajuan sebuah perguruan tinggi. Berbagai sistem ranking yang digunakan untuk mengukur kredibilitas sebuah perguruan tinggi kerap merujuk pada tingkat produktivitas penelitian dan publikasinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika saat ini banyak kampus yang berlomba-lomba untuk bertransformasi dari *Teaching University* menuju *Research University*. Tidak ketinggalan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang berproses menuju *World Class University* secara lebih presisi ditekankan pada *Islamic Studies* sebagai kekhasan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai bagian dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ikut berproses dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas akan riset dan publikasi para civitas akademiknya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi secara kontinyu terus mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang ada dan aktif mendorong peningkatan kapasitas civitas akademika khususnya dosen melalui eksistensi pusat studi, dimana salah satunya adalah Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT). Keberadaan PSDT merupakan sebuah langkah nyata dalam memacu akselerasi perkembangan serta kebaruan-kebaruan dari riset *da'wah studies* yang diharapkan dapat menawarkan solusi-solusi aplikatif. Problematika masyarakat membutuhkan ide-ide segar dalam merekonstruksi nalar berpikir yang lebih kontekstual, solutif, dan mampu menjawab perkembangan zaman serta menarik bagi generasi milenial.

Khususnya saat ini dalam situasi pandemi covid 19 yang sedang merebak menjadi persoalan yang begitu kompleks di tengah-tengah masyarakat, yang membutuhkan solusi penanganannya.

Akhirnya, mewakili jajaran pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN unan Kalijaga, saya mengucapkan selamat dan sukses atas buku ketiga yang diluncurkan oleh PSDT ini. Semoga melalui buku bunga rampai ini gagasan-gagasan baru dari para penulis dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan berbagai problematika sosial kontemporer. Berbagai isu yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan khususnya dalam konteks covid 19 ini bisa dianalisis dari berbagai keilmuan lainnya secara interdisipliner. Hal ini sesuai dengan *tagline* yang terus dikumandangkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk terus menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga perlu kami sampaikan kepada segenap pengelola dan para peneliti PSDT yang telah bekerja keras atas terbitnya buku bunga rampai ini. Tentu kami semua berharap PSDT tidak cepat berpuas diri dan terus memacu segala potensinya untuk menjadi lebih baik. Harapan kami semoga PSDT dapat semakin produktif menghasilkan karya-karya berkualitas dalam lingkup *Islamic studies* secara umum dan *da'wah studies* secara lebih khusus. Selamat Membaca!

Yogyakarta, November 2020

Dekan FDK,

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd

## KATA PENGANTAR

### Ketua Pusat Studi Dakwah Dan Transformasi Sosial (PSDT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Puji syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah sekalian alam. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan syukur ini perlu disampaikan karena keberhasilan tim divisi penerbitan buku Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dalam menerbitkan buku ini tidak lepas dari hidayah dan taufik dari Allah SWT.

Buku yang berjudul “*Covid 19 dan Transformasi Keberagamaan*” ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh PSDT, setelah buku pertama yang terbit pada tahun 2017 dan buku kedua tahun 2019 yang lalu. Buku ini merupakan sebuah buku jenis bunga rampai. Sebagaimana biasa buku bunga rampai memuat beberapa tulisan dari beberapa penulis. Dalam buku ini ada sebelas penulis yang sudah berkontribusi mengirimkan tulisannya untuk bisa diterbitkan. Pemilihan sebelas tulisan tersebut sudah mengalami proses yang cukup panjang. Mulai dari penentuan tema dan *grand tema*, penawaran kepada para dosen, pengumpulan tulisan, penyeleksian, pengeditan, dan percetakan sekaligus penerbitan memakan waktu lebih kurang 5 bulan. Untuk itu perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berkontribusi demi terbitnya buku ini.

Pertama kepada Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan kepercayaan dan juga dana kepada kami untuk mengelola Lembaga PSDT ini dengan dua agenda utama yakni diskusi dwi bulanan dan penerbitan buku. Kedua kepada seluruh pengurus PSDT yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menyelesaikan agenda penerbitan buku ini sampai selesai. Ketiga kepada para tendik yang sudah ikut terlibat dalam proses penyelesaian penerbitan buku ini. Keempat kepada para penulis yang sudah berkontribusi mengirimkan tulisannya kepada kami untuk bisa diterbitkan dalam buku ini. Kelima khusus kepada tim editor dan co-editor yang sudah bersedia menyeleksi dan mengedit beberapa tulisan yang masuk untuk bisa diterbitkan. Selain kepada pihak yang sudah kami sebutkan di atas, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang mungkin ikut terlibat dalam proses penerbitan buku ini, yang tidak sempat kami sebutkan namanya di sini.

Terakhir kami berharap bahwa penerbitan buku ini bisa memberikan sebuah alternatif bacaan bagi para pembaca secara umum, dan bagi para peminat dalam bidang dakwah secara khusus terkait dengan pandemi covid 19. Semoga melalui buku ini dengan beberapa tulisan di dalamnya mampu memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dalam konteks situasi dan kondisi pandemi covid 19 saat ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih ada kekurangannya. Mohon masukan dan kritikan dari pembaca semuanya untuk perbaikan atau revisi nantinya jika diperlukan. Terima kasih.

Yogyakarta, November 2020

Ketua PSDT

Dr. Irsyadunnas

## KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur *Alhamdulillah* buku yang berjudul “Covid 19 dan Transformasi Keberagamaan” ini akhirnya bisa diterbitkan. Buku ini merupakan karya para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kehadiran buku ini tidak lepas dari kontribusi ide-ide dan pikiran-pikiran cerdas dari para dosen FDK dalam merespon berbagai problematika yang muncul di masyarakat berkaitan dengan pandemi covid 19. Penerbitan buku ini merupakan hasil kerja keras dari tim Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Sejak awal munculnya covid 19 di berbagai belahan dunia berbagai macam persoalan muncul di tengah masyarakat, yang menuntut perlunya sentuhan kelimuan dakwah di dalamnya. Seorang ilmuwan tidak cukup hanya berdebat dan berdiskusi di kampus semata terkait covid 19 ini, namun perlu turun ke tengah-tengah masyarakat untuk bisa memahami kondisi dan situasi masyarakat serta menghadirkan solusi bagi penyelesaian masalah. Apalagi ilmuwan yang bergerak dalam bidang dakwah tentu tuntunan demikian lebih kuat lagi. Dalam rangka itulah buku ini hadir ke hadapan para pembaca untuk memberikan beberapa jawaban, respon atau solusi bagi berbagai macam problem covid 19 yang muncul di masyarakat.

Semua tulisan dalam buku ini merupakan hasil pikiran, ide, penelitian, olah data, dan observasi lapangan yang dilakukan oleh para penulisnya. Sehingga diharapkan sedikit banyak bisa memberikan tambahan bacaan dan bahkan ilmu bagi para pembaca semuanya dalam menghadapi pandemi

covid 19. Berikut adalah narasi keilmuan dari 11 tulisan yang ada di buku ini.

Bagian pertama buku ini, **pertama**, memuat tulisan *Hamdan*, yang menulis tentang peran media dalam mencegah berita bohong berkaitan dengan covid 19. Media massa memiliki empat fungsi utama dalam menjalankan tugas mulia menyampaikan informasi kepada masyarakat. keempat fungsi tersebut yaitu, fungsi informasi dan pendidikan, kontrol sosial, hiburan dan fungsi komersial (ekonomi). Menyampaikan berita yang jujur kepada masyarakat adalah merupakan tugas utama wartawan. Terlebih berita tentang covid-19, pihak media massa senantiasa berusaha agar jangan sampai muncul berita bohong (hoaks) yang bisa menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. **Kedua**, tulisan *Khoiro Umatin* yang mengkaji tentang local wisdom untuk menghadang penyebaran covid 19 di masyarakat. Dalam pencegahan covid 19 kesadaran kolektif dan tindakan bersama masyarakat memiliki posisi strategis menyumbangkan kontribusinya dalam menangani pandemi virus corona. Perpaduan norma sosial dan norma yang memiliki daya paksa kepada setiap individu untuk mematuhi protokol kesehatan dalam lingkungan yang lebih luas sudah menjadi keharusan, mengingat bahaya penyebaran virus corona masih tetap menjadi ancaman sementara kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan kondisinya makin memprihatinkan. **Ketiga**, naskah yang ditulis *Zaen Musyrifin* yang berbicara tentang strategi bimbingan spiritual dalam menghadapi covid 19. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami kondisi yang tidak normal. Ada dua tahapan yang perlu diperhatikan yakni potensi untuk melawan (resisten) terhadap kondisi dan tahapan komitmen untuk menerima kondisi dengan mengikuti aturan yang diberlakukan. Keduanya sangat dipengaruhi aspek spiritual seseorang karena banyak manusia yang mengalami disorientasi kehidupan. Manusia modern lebih berfikir tentang materi dan kedudukan yang telah dimiliki, bukan pada tujuan hidup yang hakiki. Spiritual hadir untuk menyeimbangkan antara tujuan hidup yang bersifat materi dengan tujuan hidup yang hakiki. Agar kondisi spiritual seseorang stabil, maka diperlukan bimbingan spiritual. **Keempat** adalah tulisan *Mikriani* yang menulis tentang manajemen stres dalam menghadapi penyebaran covid 19.

Pemberlakuan WFH selama masa pandemi covid 19 menyebabkan sebagian besar aktivitas dilakukan melalui online, tidak terkecuali proses belajar mengajar. Kondisi demikian menimbulkan kebosanan dan kejenuhan sehingga menimbulkan stres akademik. Akan tetapi sisi positif yang bisa diambil adalah memaksa guru/dosen dan siswa/mahasiswa melek IT dan terbiasa memanfaatkan media online. Kondisi tersebut memunculkan ide-ide kreatif yang produktif. Kemampuan menyesuaikan diri dan menikmati kondisi yang ada akan mengalihkan stres dari *distres* menjadi *eustres*.

Bagian kedua buku ini, **pertama**, tulisan *Hikmah Endraswati* yang mengkaji tentang strategi UMKM dalam menghadapi pandemi covid 19. Selama masa pandemic Covid-19 hasil survey yang dilakukan secara nasional maupun internasional menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha UMKM tidak siap dalam menghadapi pandemic Covid-19. Strategi bertahan di masa pandemic Covid-19 bagi UMKM dari perspektif marketing yang dapat ditawarkan adalah melakukan digitalisasi pemasaran. Pemasaran *online* seperti menggunakan platform yang berbeda, menggunakan *content media*, menggunakan kata kunci yang menarik, *membership pricing*, program *bundle* dan menjelaskan tentang keamanan produk serta memiliki perencanaan bisnis. Selain itu dari perspektif keuangan, beberapa hal yang dapat dilakukan UMKM di masa pandemic Covid-19 adalah melakukan restrukturisasi, *rescheduling* dan relaksasi hutang, memperhatikan arus kas dengan melihat kesehatan keuangan dan melakukan perencanaan keuangan. Dengan melakukan perencanaan keuangan pengusaha dapat menghitung seberapa besar kebutuhan dana darurat dan melakukan pengendalian pengeluaran dengan cermat. **Kedua** adalah tulisan dari *Rahadiyand Aditya & Istiqomah* yang membahas tentang kolaborasi peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi pandemi Covid-19. Indonesia merupakan masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) yang diikat oleh hubungan batin yang murni serta bersifat nyata dan organis perlu pendekatan yang berbeda dengan negara-negara maju lain dalam penanganan pandemi ini. Masyarakat memiliki modal hubungan batin yang kuat ditambah saat ini dihadapkan dengan kondisi risiko kesehatan yang perlu ditanggung bersama. Meskipun demikian, peluang yang dimiliki oleh Indonesia harus diimbangi dengan memperhatikan tantangan yang

ada secara realistis. Perlu digarisbawahi akan pentingnya sinergitas antar berbagai pihak dalam menangani krisis. Penanggulangan membutuhkan keterlibatan dan sinergitas bersama. Meskipun saat ini setiap pihak telah memberikan kontribusinya tetapi perlu kiranya membangun kolaborasi yang lebih strategis antar pihak dalam menentukan langkah yang akan diambil. Sehingga nantinya akan dapat menentukan langkah besar bersama.

**Ketiga** tulisan dari *Muhammad Irfai Muslim* yang membahas tentang SDM dan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama. Keluarga merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi kemajuan suatu negara. Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia bagi bangsanya. Di masa wabah pandemi ini, ketahanan keluarga sedang diuji. Boleh jadi ketahanan keluarga menghadapi pandemi ini menjadi isu nasional yang harus dicarikan solusinya. Ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan pada masa sulit ini menjadi hal yang dipertaruhkan. Apalagi jika sebelumnya peran keluarga pada ke empat bidang tersebut sangat lemah dan minim modal insani. Keluarga merupakan salah satu benteng bangsa, maka ketahanan keluarga dari ke empat bidang tersebut mesti diupayakan dengan baik. Salah langkah mengelola keluarga bisa jadi preseden buruk bagi kemajuan masyarakat. Oleh karenanya di masa pandemi ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun dan menyadarkan masyarakat kembali akan kemandirian keluarga secara penuh dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Di manapun anda berperan, pasti akan kembali kepada keluarga. Sesulit apapun kondisi anda, seberapa banyak masalah anda, barangkali tempat ternyaman untuk kembali adalah kepada keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap insan yang lahir dari kedua orang tuanya.

**Keempat** adalah artikel yang ditulis oleh *Muhammad Izzul Haq* yang menulis tentang konsep negara Kanada dalam menangani covid 19 dengan transformasi kongregasi keagamaan dan konsolidasi negara kesejahteraan. Dalam penanganan covid 19 negara Kanada punya strategi sendiri yang cukup signifikan memberi ketenangan kepada masyarakat. Tradisi negara kesejahteraan yang sudah berjalan menemukan kembali relevansinya dengan dominannya peran negara, dimana pemerintah sebagai representasi negara dalam waktu cepat mengkonsolidasikan potensinya untuk menjadi penyedia

manfaat dan pelindung pendapatan warga Kanada melalui serangkaian program seperti CERB, CESB, CEWS dan sebagainya. Meski pemerintah harus mengalami defisit namun pilihan itu berpotensi menjadi investasi sosial demi stabilitas sosial ekonomi Kanada yang terdampak Covid-19. Di samping itu juga adanya kepatuhan dan ketaatan kelompok agama terhadap regulasi kesehatan pemerintah telah menjadikan kongregasi agama menjadi tempat berisiko rendah dalam penularan Covid-19, hal ini sekaligus membebaskan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan dari potensi kambing hitam klaster penyebaran Covid-19. Adaptasi dalam pelayanan keagamaan menunjukkan transformasi keberagamaan yang terjadi secara kreatif dan alternatif seperti melalui digitalisasi ceramah, *virtual sermon*, registrasi atau cek-in sebelum masuk rumah ibadah. Selain itu, ketaatan komunitas agama terhadap petunjuk otoritas kesehatan telah mengubah kongregasi agama menjadi kelompok yang paling taat terhadap regulasi pemerintah Kanada, misal dalam hal kewajiban bermasker ketika masuk rumah ibadah, batasan jumlah jamaah yang boleh masuk tempat ibadah, juga aturan jaga jarak (*social distancing*) yang diterapkan dengan ketat.

Bagian ketiga dari buku ini, **pertama** ditulis oleh *Casmini* yang membahas tentang orientasi keberagamaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia. Dalam tulisannya Casmini menjelaskan bahwa respon masyarakat atas transformasi keberagamaan pada pandemi covid-19 dipengaruhi oleh orientasi keberagamaan, yaitu orientasi keberagamaan intrinsik, orientasi keberagamaan ekstrinsik dan orientasi keberagamaan pencarian. Masing-masing tipe orientasi keberagamaan berkontribusi pada kesehatan psikologis dengan corak sesuai kondisi individu dalam merespon transformasi keberagamaan yang terjadi pada saat pandemi covid-19. Individu dapat melakukan penyesuaian diri terhadap transformasi keberagamaan yang terjadi dengan tingkatan keimanan yang dimiliki masing-masing berdasarkan tipe orientasi keberagamaannya. Keberagamaan memberikan kenyamanan individu dan masyarakat meskipun terjadi beberapa perubahan ritual namun bukan tataran hakikat peribadahan, akan tetapi lebih pada tata cara peribadahan. **Kedua** adalah tulisan yang ditulis oleh *Bayu Mitra A. Kusuma*

✧ *Theresia Octastefani* yang membicarakan tentang hak beragama bagi masyarakat dan kaitanya dengan kebijakan asimetris, dan *Sense of Crisis* pada masa pandemi Covid-19. Menurutnya bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas ritual peribadatan di rumah ibadah sama sekali bukanlah pelanggaran HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena pada dasarnya dalam kebijakan tersebut pemerintah tetap berusaha memenuhi tiga kewajiban generiknya yaitu *respect*, *protect*, dan *fulfill* atas hak-hak warga negara. Perlu dipahami bahwa melakukan ritual peribadatan di rumah bukanlah metode yang baru dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Masyarakat terdahulu juga pernah melakukannya kala dunia diterjang pandemi dan musibah lainnya. Adalah kurang tepat dan kurang bijak rasanya jika kemudian kita mengaitkan secara brutal hal tersebut dengan kualitas iman seseorang. Justru kebijaksanaan kita untuk menjaga diri dan orang lain pada situasi pandemi ini seharusnya dilihat sebagai respons keimanan yang tepat dan menjadi cerminan penggunaan akal sehat yang kita miliki. Di sinilah perlunya *sense of crisis* dalam beragama. Dengan *sense of crisis* kita tidak akan lagi merasa menjadi hamba yang paling benar, paling rajin beribadah, ataupun paling dekat dengan Tuhan sehingga wabah tak akan berani menyentuh kita. Kita akan semakin menyadari bahwa agama dan sains adalah dua hal yang saling melengkapi. **Ketiga** adalah tulisan dari *Aris Risdiana* yang menulis tentang dampak fatwa agama terkait covid 19 serta perubahan yang terjadi di ruang kultural. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang keberadaan fatwa-fatwa agama tentang Covid-19 baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia merupakan representasi bahasa hukum yang memiliki konsekuensi-konsekuensi kebudayaan, salah satunya berupa terbentuknya ruang kultural (*cultural space*) dalam hal ini pengelolaan masjid. Di dalam ruang kultural ini berlangsung segala macam fenomena sosial keagamaan, aktivitas dan rutinitas ibadah, yang sesuai dengan spirit dalam fatwa-fatwa agama tersebut. Pengaruh bahasa hukum/agama dalam kasus manajemen masjid oleh DMI selama masa Covid-19 sangat besar. Namun begitu, faktor lain di luar agama yang turut serta mempengaruhi pola manajemen masjid oleh DMI adalah persoalan-persoalan masyarakat yang situasional, faktual, dan dinamis. Hal lain yang ikut mewarnai dinamika ini adalah anomali. Ketika DMI mengupayakan pola dan model manajemen masjid yang ideal

selama pandemi Covid-19, anomali-anomali muncul. Salah satu bentuk anomali yang paling mencolok adalah disintegrasi para takmir masjid. Pada saat sebagian takmir menaati protokol kesehatan, sebagian yang lain di beberapa lokasi melakukan penolakan. Anomali ini menunjukkan adanya persoalan akut di dalam tubuh DMI secara umum dan dalam manajemen masjid secara khusus.

Narasi keilmuan telah dijelaskan untuk menjawab dan merespon berbagai macam persoalan dan pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Hidangan buku ini diserahkan sepenuhnya kepada para pembaca untuk mencernanya. Tentu kehadiran buku ini tidak luput dari kekurangan di sana sini. Namun demikian sebagai editor kami berharap karya yang sederhana ini bisa menjadi persembahan intelektual dari para dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi melalui PSDT. Akhirnya tentu saja semuanya dikembalikan kepada pemilik Ilmu Semesta Allah SWT, semoga dicatat sebagai bagian dari amal jariyah bagi para penulisnya, Aamiinn.

Yogyakarta, November 2020

Editor,

Dr. Irsyadunnas

## DAFTAR ISI

### SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta iii

### KATA PENGANTAR

Ketua Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi ..... v

KATA PENGANTAR EDITOR..... vii

DAFTAR ISI..... xiv

- ⌘ PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH  
BERITA BOHONG TENTANG COVID-19..... 1  
*Hamdan Daulay*
- ⌘ MENGHADANG COVID 19 DENGAN *LOCAL WISDOM*  
DAN SEDEKAH ..... 23  
*Khoiro Umatin*
- ⌘ STRATEGI BIMBINGAN SPIRITUAL DI ERA  
NEW NORMAL..... 43  
*Zaen Musyrifin, S.Sos.I.,M.Pd.I*
- ⌘ MANAJEMEN STRES PADA MASA PANDEMI COVID-19 56  
*Mikhriani*
- ⌘ PANDEMI COVID-19 DAN STRATEGI BAGI UMKM:  
PERSPEKTIF MARKETING DAN KEUANGAN  
(Stuid Kasus UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta)..... 76  
*Hikmah Endraswati*

⌘ SINERGITAS ANTAR AKTOR: KOLABORASI PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19	105
<i>Rahadiyand Aditya &amp; Istiqomah</i>	
⌘ MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUMBUHKAN KETAHANAN KELUARAGA DI BIDANG PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19..	126
<i>Muhammad Irfai Muslim, M. Si.</i>	
⌘ ANTARA TRANSFORMASI KONGREGASI KEAGAMAAN DAN KONSOLIDASI NEGARA KESEJAHTERAAN: EKSPLOKASI PENGALAMAN KANADA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 .....	145
<i>Muhammad Izzul Haq</i>	
⌘ ORIENTASI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.....	167
<i>Casmini</i>	
⌘ HAK BERAGAMA, KEBIJAKAN ASIMETRIS, DAN <i>SENSE OF CRISIS</i> DI MASA PANDEMI COVID-19 ....	184
<i>Bayu Mitra A. Kusuma &amp; Theresia Octastefani</i>	
⌘ DAMPAK FATWA AGAMA TENTANG COVID-19 \	
PADA PERUBAHAN RUANG KULTURAL	
⌘ (Studi Manajemen Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia) .....	204
<i>Aris Risdiana</i>	
BIOGRAFI PENULIS DAN EDITOR.....	224



# PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH BERITA BOHONG TENTANG COVID-19

Hamdan Daulay

## Pendahuluan

**M**edia massa merupakan salah satu faktor penting dalam mewarnai suasana psikologis masyarakat. Dampak pemberitaan media massa bisa membuat masyarakat bahagia dan senang atau cemas dan panik. Media massa sebagai salah satu unsur *civil society* memiliki kekuatan dalam membentuk opini masyarakat (Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, 2017: 197). Berita yang disajikan media massa memiliki nilai yang mampu mempengaruhi wawasan masyarakat.

Pemberitaan media massa tentang Covid-19 misalnya, bisa menambah wawasan sekaligus bisa menjadi kepanikan bagi masyarakat. Apalagi kalau informasi tentang Covid-19 mengandung unsur berita bohong (hoaks), bisa menimbulkan kecemasan dan kepanikan luar biasa. Ketika masyarakat saat ini banyak menggunakan media baru (*new media*) yang berbasis internet, membuat berita lepas kontrol. Hampir semua pengguna media baru juga sekaligus berperan sebagai wartawan yang bebas menyebarkan berita tanpa seleksi dan kontrol yang ketat. Akibatnya berita yang muncul terkadang sulit dibedakan mana berita yang jujur, fitnah, ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks. (Fifi Noviyanti, *Pemanfaatan Komunikasi Media Baru di Tengah Pandemi Covid-19*, 2020: 68)

Fungsi media massa sebagai media informasi dan pendidikan juga ikut andil dalam pengauatan wawasan masyarakat tentang covid-19. Pemberitaan media tentang Covid-19 diharapkan jangan sampai membuat

masyarakat semakin takut, cemas dan panik karena ada unsur berita bohong. Ketika ada berita bohong tentang covid-19, baik tentang jumlah warga yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh, penolakan pemakaman jenazah yang positif covid-19, hingga lokasi warga yang positif covid-19, akan memberi dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Untuk mencegah munculnya berita bohong, tidak bisa tidak wartawan harus melakukan kroscek pada setiap berita yang disebar. Selain itu juga harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dari wartawan untuk menjaga kualitas berita, agar terhindar dari berita bohong.

Demikian pula fungsi media massa sebagai kontrol sosial, diharapkan memiliki keberanian untuk mencegah berbagai persoalan negatif dalam kehidupan sosial (Rosihan Anwar, *Wartawan dan Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Media*, 2009:73) Fungsi media dalam aspek kontrol sosial ini merupakan fungsi penting dan strategis yang diharapkan bisa dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hal penting yang menjadi perinsip media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial adalah pada nilai kejujuran (Rosihan Anwar, 2009 : 73). Karena dengan kejujuranlah bisa muncul kontrol yang sehat. Sebaliknya kalau berita bohong (hoaks) dan fitnah yang disajikan media, membuat kontrol tidak berfungsi dengan baik dan bahkan menyesatkan bagi masyarakat.

## **Media dan Informasi dalam Islam**

Dari perspektif agama (Islam), sesungguhnya menjadi perhatian serius tentang pentingnya mencegah berita bohong dan fitnah, karena dianggap sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam ayat berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. al Hujurat: 6)*

Pesan utama dalam ayat di atas, supaya setiap orang yang bertugas menyebar berita agar hati-hati, cermat dan teliti, jangan sampai berita yang disebar mengandung fitnah yang bisa merugikan bagi orang lain. Sejarah mencatat bahwa penyebaran berita bohong sudah ada sejak

zaman dahulu. Pada masa Nabi Muhammad SAW juga sudah ada orang yang suka menyebarkan berita bohong, sehingga diingatkan dalam al Qur'an, bahwa penyebaran berita bohong itu berbahaya. Untuk itu perlu *tabayyun* (diteliti/diperiksa) sebelum disebar ke masyarakat. Dengan demikian perlu ketelitian dan kehati-hatian wartawan dalam membuat berita agar jangan sampai terjadi berita yang menyesatkan yang dampaknya akan merugikan bagi masyarakat. Apalagi saat ini ujaran kebencian dan fitnah sangat mudah terjadi karena perbedaan politik. Ketika wartawan tidak teliti dalam menyebarkan berita, akan membuat muncul berita yang tidak jelas kejujuran dan keobektifannya (Wahdan Wahyudi, 2011: 92).

Kode etik jurnalistik sebagai pedoman penting bagi wartawan, juga menekankan betapa pentingnya memperhatikan berita yang jujur, obyektif dan berimbang. Media massa yang menyajikan berita yang jujurlah yang mampu menjalankan fungsi mencerdaskan masyarakat. Sebaliknya media massa yang menyebarkan berita bohong (hoaks) justru menyesatkan karena media tersebut telah membodohi masyarakat. Ketika saat ini tidak ada lagi pembredelan media massa yang dianggap melakukan kesalahan, maka masyarakatlah yang diharapkan memberi kontrol kepada media massa yang dianggap menyimpang (Krisna Harahap, *Rambu-rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, 2016): 128).

Masyarakat bisa menghukum media yang suka menyebarkan kebohongan dengan memboikot media tersebut, sehingga media tersebut bisa gulung tikar. Selain itu ada juga lembaga resmi seperti KPI/KPID dan dewan pers yang diharapkan bisa memberi pengawasan serius pada media massa yang dianggap menyimpang dalam pemberitaan. Untuk mencegah munculnya berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian, hendaknya lembaga pengawas pers bisa memberi sanksi tegas bagi media yang melanggar aturan.

Ketika media massa saat ini memasuki era kebebasan pers, membuat berita yang disajikan terkesan agak bebas dan kurang kontrol. Termasuk dalam pemberitaan tentang covid-19, tidak semua media memberitakan dengan jujur. Ada media yang membuat berita berlebihan, selalu memuji pemerintah tanpa ada kritik dan kontrol, tidak akurat bahkan masuk kategori berita bohong (hoaks). Dampak berita bohong bagi masyarakat

tentu sangat menyesatkan, terutama berita tentang covid-19 yang kurang jujur bisa membuat masyarakat cemas dan galau.

Padahal sejatinya media massa haruslah berusaha menyajikan berita yang jujur, obyektif, kritis dan berimbang agar bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat. (Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, 2016 : 66) Kalau media massa menyajikan berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian, justru akan menyesatkan dan bahkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Wartawan sebagai orang yang terdepan dalam meliput dan menulis berita memiliki tanggung jawab yang besar tentang kualitas berita yang disajikan. Kejujuran wartawan dalam menyampaikan berita tentang covid-19 adalah bagian dari tugas mulia sebagai bentuk kepedulian media pada persoalan kesehatan masyarakat. Tugas mulia tersebut bisa dimaknai sebagai tugas dakwah untuk mengajak masyarakat pada kebaikan dan mencegah dari kejahatan (*amar makruf nahi munkar*).

### **Wartawan dan Penyebaran Berita**

Ketika media massa saat ini memasuki era kebebasan pers, membuat berita yang disajikan terkadang agak bebas dan kurang kontrol. Akibatnya bisa muncul berita yang kurang jujur dan bahkan masuk kategori berita bohong atau hoaks. Padahal sejatinya wartawan haruslah berusaha menyajikan berita yang jujur, obyektif dan berimbang agar bisa mencerdaskan kehidupan banagsa. ( Hamdan Daulay, 2016: 69). Wartawan sebagai orang yang terdepan dalam meliput dan menulis berita memiliki tanggung jawab yang besar tentang kualitas berita yang disajikan. Setiap wartawan hendaknya menyadari bahwa tugas mereka sangat mulia dalam memberi informasi kepada masyarakat.

Dalam sejarah tercatat bahwa penyebar berita bohong sudah ada sejak masa nabi Muhammad SAW. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul, tercatat sebagai penyebar berita bohong yang memfitnah istri nabi (Aisyah) berselingkuh dengan Shafwan karena berduaan pulang dari medan perang menuju Madinah. Waktu itu Aisyah tertinggal di lokasi medan perang dan ditemukan oleh Shafwan. (Achmad Mubarok, *Jiwa Dalam Al-Qur'an*, 2000: 138). Model penyebaran berita bohong pada waktu itu bukan melalui media massa, melainkan dari mulut ke mulut. Namun esensi berita yang

sumbernya bisa dari seseorang atau masyarakat, bisa mengandung kejujuran atau kebohongan. Penyebar berita (wartawan) harus cermat dan teliti dalam menyebarkan informasi, sehingga muncul berita bohong dan fitnah.

Demikian pula dengan model penyebaran informasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, menjadi sangat mudah dan dalam waktu singkat bisa diketahui oleh masyarakat di berbagai penjuru. Wartawan sebagai orang terdepan dalam penyebaran informasi diharapkan bisa melakukan kontrol untuk membedakan mana berita yang jujur dan berita yang bohong. Wartawan terkadang sering disalahkan kalau ada informasi (berita) yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Padahal sejatinya wartawan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada dan disampaikan dengan jujur dan obyektif (Wahdan Wahyudi, 2011 : 68)

Media massa memiliki peran penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran penting tersebut melekat dalam fungsi media massa, yaitu sebagai media informasi (pendidikan), media kontrol sosial, media ekonomi, dan media hiburan. Dalam fungsi informasi (pendidikan), manakala media massa memberi informasi yang jujur dan obyektif, akan bisa menambah wawasan dan sekaligus mencerdaskan masyarakat. Namun sebaliknya, manakala media massa menyajikan berita bohong (hoaks), akan bisa menyesatkan dan membuat masyarakat terjebak pada kebodohan dan bahkan konflik sosial.

Penyebaran berita yang seharusnya untuk mencerdaskan masyarakat akan bisa berubah menjadi menyesatkan manakala berita tersebut mengandung unsur bohong dan ujaran kebencian. Untuk itu perlu pencegahan berita bohong agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu cara mencegah maraknya berita bohong bisa melalui peningkatan kualitas wartawan. Ketika wartawan diberi wawasan yang luas tentang kualitas berita, maka dengan sendirinya para wartawan akan berusaha maksimal membuat berita yang berkualitas dan menghindari munculnya berita murahan, seperti berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian (Hamdan Daulay, 2015: 112)

Ketika demokrasi semakin kuat di setiap negara, membuat kontrol dari rezim penguasa berkurang, sehingga kekuatan *civil society* (termasuk

media massa) menjadi semakin kuat. Kebebasan pers semakin terasa seiring dengan kuatnya demokrasi, sehingga tidak ada lagi kontrol yang ketat dari penguasa dan tidak ada pembredelan bagi media massa yang tidak sejalan dengan pemerintah. Namun dalam kondisi seperti ini bukan berarti media massa bebas melakukan kontrol secara jujur dan obyektif. Berikutnya yang mempengaruhi dan mengendalikan kontrol pada media massa beralih kepada pemilik modal media tersebut.

Jujur tidaknya berita yang disampaikan oleh media massa sangat tergantung pada peran yang dilakukan oleh wartawan. Dengan demikian peran wartawan sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah berita. Tidak jarang saat ini muncul wartawan yang kurang memiliki idealisme, sehingga mereka terjebak dengan kepentingan pragmatis. Ketika idealisme wartawan sudah luntur membuat nilai-nilai kejujuran pun sering diabaikan. Dalam kondisi seperti ini sangat mudah terjadi berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah. Banyak faktor yang membuat kualitas wartawan menjadi lemah dan terkikis idealismenya.

Kode etik jurnalistik juga menekankan betapa pentingnya setiap wartawan memperhatikan berita yang jujur, obyektif dan berimbang. Media massa yang menyajikan berita yang jujur yang mampu menjalankan fungsi mencerdaskan masyarakat. Sebaliknya media massa yang menyebarkan berita bohong (hoaks) justru menyesatkan karena media tersebut telah membodohi masyarakat. Ketika saat ini tidak ada lagi pembredelan media massa yang dianggap melakukan kesalahan, maka masyarakatlah yang diharapkan memberi kontrol kepada media massa yang dianggap menyimpang (Arwan Tuti Artha, 2012: 45)

Masyarakat bisa menghukum media yang suka menyebar kebohongan dengan memboikot media tersebut, sehingga media tersebut bisa “gulung tikar”. Selain itu ada juga lembaga resmi seperti KPI/KPID dan dewan pers yang diharapkan bisa memberi pengawasan serius pada media massa yang dianggap menyimpang dalam pemberitaan. Untuk mencegah munculnya berita bohong, fitnah dan ujaran kebencian, hendaknya lembaga pengawas

media tersebut bisa memberi sanksi tegas bagi media yang melanggar aturan.

Pada dasarnya dunia pers, sejak dari pers itu lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Seorang wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, diantaranya :

1. Otonomi, dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertimbangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
2. Komitmen, yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
3. Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial. Titik berat pada teknik intelektual, periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian.
4. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntunan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik ( Santana, 2006:207).

Atribut moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan. Dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers Indonesia menjadi lebih maju. Namun aspek moral saja tidak cukup, wartawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan intelektual. Dengan demikian antara kedua unsur tersebut bisa saling melengkapi.

Melalui kode etik jurnalistik yang ada diharapkan berbagai keinginan yang muncul dari organisasi kewartawanan bisa terakomodasi. Intisari dari kode etik jurnalistik tersebut sesungguhnya adalah membuat aturan main yang mengikat bagi semua insan pers di tanah air agar memiliki etika yang luhur dalam menjalankan tugas kewartawanan. Hal ini tentu relevan dengan ajaran Islam yang senantiasa mengajarkan kejujuran dan kebenaran dalam setiap ucapan dan perbuatan. Islam juga mengajarkan agar jangan

menyebarkan berita bohong, apalagi fitnah, karena sesungguhnya fitnah itu tergolong perbuatan yang sangat keji ( Sutirman Eka Ardhana, 1994:66).

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongres, sehingga keputusan dan kesepakatan yang lahir dari kongres tersebut mengikat bagi anggota organisasi tersebut. Melalui kode etik tersebut diharapkan ada kesadaran yang datang dari wartawan sendiri untuk mengatur dirinya dalam menjalankan profesi kewartawanan sebaik-baiknya. Wartawan Indonesia juga sadar, bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka banyak menghadapi resiko, baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers. Guna menghindari resiko itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar tugas kewartawanan dapat berjalan dengan baik. Keberadaan dari kode etik jurnalistik sebagai aturan yang mengikat bagi wartawan dalam menjalankan profesinya ( Ashadi Siregar, 2013: 73).

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan juga bisa diartikan sebagai profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Tidak jarang, wartawan menghadapi resiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan tugas kewartawanan. Idealnya wartawan memiliki komitmen yang kuat pada nilai kejujuran dan kebenaran, dan selalu berusaha mencegah kebohongan, fitnah dan berbagai bentuk kejahatan.

Rosihan Anwar (2009: 12) menjelaskan bahwa wartawan sejati adalah mereka yang memiliki kejujuran, keberanian, keuletan dan tidak mengenal lelah. Jiwa wartawan tidak mau berhenti mencari kebenaran. Mencari kebenaran adalah ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sebelum jerami ditemukan, seorang terlebih dahulu dengan susah payah harus mampu mengoyak tumpukan jerami tersebut. Bahkan karena sulitnya mengoyak jerami tersebut, tidak jarang pelaku (wartawan) mati kelelahan. Akan tetapi tidak perlu khawatir, sebuah kebenaran akan muncul dengan usaha dan kerja keras. Bagaimana pun juga tantangan yang muncul, kalau

wartawan selalu memiliki komitmen pada kebenaran dan kejujuran, maka citra wartawan akan semakin baik dan harum di tengah masyarakat.

Pada dasarnya dunia pers, sejak dari pers itu lahir sampai sekarang, telah mulai menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan. Setiap wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, yaitu:

1. Otonomi, dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertimbangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
2. Komitmen, yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
3. Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial. Titik berat pada teknik intelektual, periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian.
4. Tanggungjawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntunan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik (Santana, 2006:207).

Atribut moral merupakan kewajiban dasar yang harus dimiliki wartawan, dengan demikian, ketika jiwa dasar kewartawanan telah tertanam dengan baik, diharapkan masa depan pers menjadi lebih maju dan berkualitas. Namun aspek moral saja tidak cukup, wartawan juga harus memiliki kecakapan intelektual. Sehingga antara kedua unsur tersebut bisa

saling melengkapi. Lebih lanjut Septiawan Santana menjelaskan bahwa ada sepuluh ciri intelektual profesionalisme wartawan di era milenium :

1. *Writing competencies* ialah kapasitas untuk melaporkan secara akurat jelas, kredibel dan reliabel. Kemampuan menulis yang mudah dipahami pembaca.
2. *Oral performance competencies* yakni kemampuan menyampaikan pengertian, respons yang baik, secara percaya diri dan bertanggung jawab.
3. *Research and investigative competencies* adalah kemampuan menyiapkan berbagai bahan, pengembangan, akurasi kisah atau mengidentifikasi topic-topic potensial.
4. *broad-based knowledge competencies* ialah kemampuan memiliki pengetahuan dasar seperti ekonomi, statistik, sejarah, sains, perawatan kesehatan, bisnis dan struktur pemerintahan.
5. *Web-Based Competencies* yaitu kemampuan menguasai *internet, e-mail, mailing list, newgroups*, dan pemberitaan dalam format *on the web*.
6. *Audio Visual Competencies* adalah kemampuan menggunakan peralatan seperti kamera 55 mm, kamera video, men-scan foto dalam komputer, serta audio tape recorder.
7. *Skill-Based Computer Application Competencies* ialah kemampuan mengaplikasikan komputer dalam kegiatan melaporkan pemberitaan; seperti *word processing*, pengembangan *database* (terutama bagi *investigative report*) dan aplikasi multimedia, termasuk *pagemaker, Quark Xpress*, dan *Printshop*.
8. *Ethics Competencies* yaitu kemampuan memahami tanggung jawab profesi, seperti; kode etik.
9. *Legal Competencies* yakni kemampuan memahami ihwal undang-undang kebebasan berpendapat, seperti *The Freedom of Information Act (FOIA) The First Amendment*, hak cipta dan sebagainya.
10. *Career Competencies* adalah kemampuan memahami dunia karir profesional dalam jurnalisme. Kemampuan bekerja di dalam

manajemen pers, dan bersikap positif di dalam kerja peliputan. (Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, 2013 : 128).

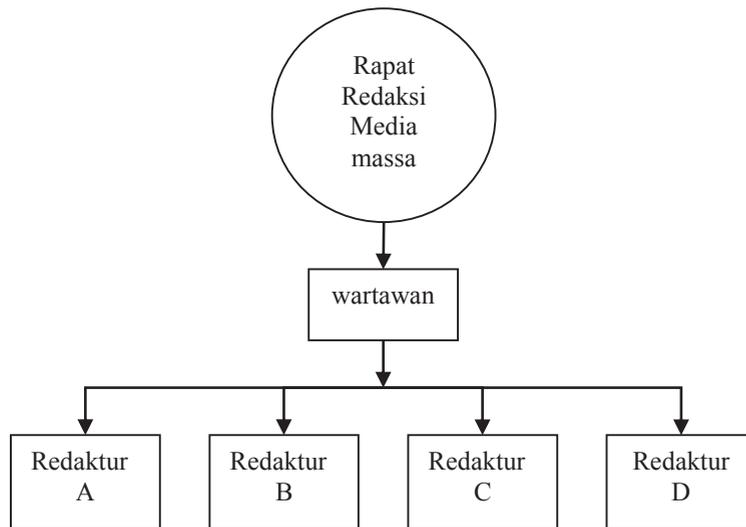
Kesepuluh ciri wartawan profesional tersebut terkandung pesan kuat pada aspek kejujuran. Jujur tidaknya wartawan dalam menyampaikan berita di media massa sangat tergantung pada peran yang dilakukan oleh wartawan. Dengan demikian peran wartawan sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah berita. Tidak jarang saat ini muncul wartawan yang kurang memiliki idealisme, sehingga mereka terjebak dengan kepentingan pragmatis. Ketika idealisme wartawan sudah luntur membuat nilai-nilai kejujuran pun sering diabaikan. Dalam kondisi seperti ini sangat mudah terjadi berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah.

### **Mencegah Berita Bohong tentang Covid-19**

Secara teoritik ada dua kekuatan yang sering mempengaruhi pemberitaan media massa, yaitu rezim penguasa dan pemilik modal media. Ketika sistem politik negara otoriter, rezim penguasa mempengaruhi pemberitaan media massa dengan adanya kontrol yang ketat. Bahkan berbagai ancaman dan pembredelan dilakukan oleh penguasa kepada media massa yang tidak sesuai dengan kebijakan politik penguasa. Kondisi pers di negara yang otoriter sangat terbelenggu dan tidak muncul fungsi kontrol sosial yang sehat dari media massa. Pemberitaan yang dipublikasikan media massa di negara yang otoriter hanya pemberitaan sepihak yang mendukung rezim penguasa. Dalam istilah politik, model ini disebut dengan politik *culutive*, di mana media massa dengan rezim penguasa berkolusi. Media tidak berani melakukan kontrol sosial secara jujur dan obyektif. ( Surono, 2016: 84).

Mencegah berita bohong di media massa sesungguhnya bisa dilakukan dengan sisten kerja dan struktur manajemen yang ada di masing-masing media. Pada umumnya sistem kerja di media massa ada rapat redaksi harian yang membahas berbagai persoalan tentang keredaksian, termasuk kualitas berita agar jangan sampai muncul berita bohong. Selanjutnya masing-masing wartawan ditugaskan untuk meliput berita di lapangan. Hasil kerja wartawan di lapangan dilaporkan lagi ke masing-masing redaktur untuk

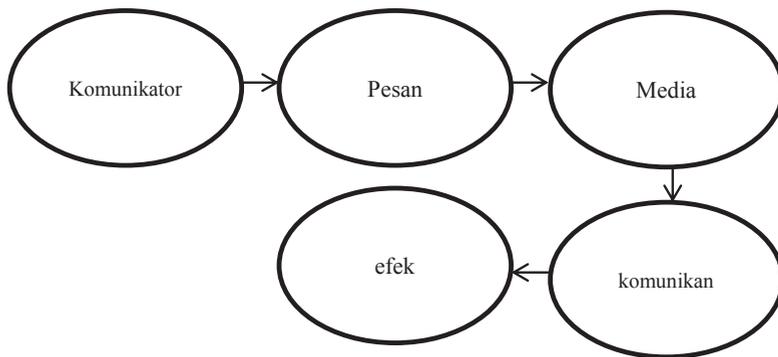
dinilai apakah layak atau tidak untuk dipublikasikan (Arwan Tuti Artha, 2012: 57) Berikut ini peta konsep pengelolaan berita di media massa:



Peta konsep pengelolaan berita di media massa tersebut menggambarkan bahwa ada proses panjang yang dilalui oleh wartawan dalam menjaga kualitas berita. Diawali dengan rapat redaksi untuk menentukan tema yang akan dibahas, pembagian tugas, hingga kontrol masing-masing redaktur pada setiap berita yang ditulis oleh wartawan sebelum dipublish di media massa. Dari alur tersebut kontrol pada nilai kejujuran berita agar jangan muncul berita bohong dijaga dengan maksimal.

Selain itu tuntutan profesionalisme terhadap para wartawan, bukan hanya berupa ketekunan bekerja, kecakapan intelektual, penguasaan pers, melainkan yang terpenting adalah bagaimana wartawan berupaya dalam penyajian fakta, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada pembaca. Para wartawan dituntut bukan hanya menyajikan fakta, melainkan juga menjaga kebenaran tentang fakta itu. Secara garis besar, wartawan harus memhamai proses peliputan berita yang dilakukan terkait dengan proses komunikasi, yang mencakup komunikator, pesan, media, komunikan dan

efek (Rosihan Anwar, 2009: 103). Berikut ini peta konsep model kerja wartawan dalam mengolah pesan:



Dalam peta konsep tersebut, wartawan berperan sebagai komunikator yang mengolah informasi dengan baik. Pesan atau informasi tersebut harus dikelola dengan baik dan jujur karena akan dipublikasikan di media massa. Pesan tersebut akan dibaca oleh masyarakat, dan tentu akan memberi respon (efek) bisa positif atau negatif. Berita yang jujur dan obyektif akan bisa memberi efek positif bagi masyarakat. sebaliknya manakala muncul berita bohong (hoaks) akan memberi efek negatif bagi masyarakat.

Profesi Wartawan sering disebut sebagai profesi mulia yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan obyektif serta berimbang. Wartawan memiliki keahlian khusus dalam bidang jurnalistik, sehingga mereka bisa menjalankan profesi mulia itu dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Wartawan menurut Rosihan Anwar (2009: 173), memiliki idealisme yang tinggi dan selalu berusaha meningkatkan kualitas diri dengan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Wartawan harus mampu mengikuti perkembangan zaman, sebagai bagian penting dari profesi pengelolaan informasi. Seorang wartawan yang tak mau mengembangkan kualitas diri akan tertinggal dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Namun yang lebih penting dari profesi wartawan adalah kejujuran, sehingga ia bisa menyampaikan informasi yang mencerdaskan

bagi masyarakat. Sebaliknya, kalau wartawan tidak jujur akan muncul berita bohong yang akan memberi dampak negatif bagi masyarakat.

Demikian pula halnya dengan pemberitaan tentang covid-19, kejujuran wartawan sangat penting bagi masyarakat. Ketika wartawan jujur dalam menyampaikan informasi tentang covid-19 bisa menambah wawasan yang mencerdaskan. Sebaliknya manakala wartawan membuat berita bohong (hoaks) tentang covid-19, justru akan menyesatkan dan bahkan membuat kepanikan bagi masyarakat. Informasi tentang jumlah warga yang positif covid-19 misalnya menjadi berita yang ditunggu masyarakat. Demikian pula dengan model penanganan warga yang positif covid-19, hingga penolakan sebagian warga terhadap pemakaman jenazah yang positif covid-19, haruslah disampaikan secara jujur dan obyektif.

Ada dua persoalan penting yang dihadapi wartawan dalam pencegahan berita bohong tentang covid-19. *Pertama*, dari aspek kebijakan politik pemerintah yang tidak menginginkan informasi tentang covid-19 diberikan secara terbuka karena kekhawatiran menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. *Kedua*, karena sumber informasi yang kurang akurat, sehingga berita yang disajikan wartawan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berikut ini analisis lebih mendalam terkait dengan pencegahan berita bohong tentang covid-19, yang dilakukan wartawan pada dua tantangan yang sering dihadapi di lapangan.

### **Menyikapi Kebijakan Politik Pemerintah**

Pemerintah melalui Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa informasi tentang covid-19 sengaja tidak disampaikan secara terbuka untuk menghindari ketakutan dan kepanikan masyarakat. (Republika, 18 April 2020). Informasi yang tidak terbuka (tidak jujur) untuk menghindari kepanikan masyarakat di satu sisi ada positifnya. Alasan pemerintah untuk menghindari kepanikan masyarakat karena informasi covid-19 yang menakutkan karena banyak korban yang terpapar, bisa dimaklumi. Namun di sisi lain ada juga aspek negatif dari informasi yang kurang jujur. Dari aspek jurnalistik, informasi yang tidak terbuka atau tidak jujur disebut dengan berita bohong dan cenderung menyesatkan bagi masyarakat (Hamdan Daulay, 2016: 73). Ketidakterbukaan informasi yang diberikan pemerintah

tentang covid-19 menyalahi nilai jurnalistik yang selalu mengutamakan nilai kejujuran dan keobyektifan dalam penyampaian informasi.

Dalam kondisi seperti ini wartawan dituntut untuk mampu melaksanakan tugas jurnalistik dengan cerdas, agar bisa menyesuaikan pemberitaan dengan kebijakan pemerintah, namun tetap konsisten dengan nilai kejujuran. Jangan sampai wartawan berkolusi dengan pemerintah untuk menyampaikan berita bohong kepada masyarakat. Justru wartawan diharapkan bisa tetap berani dan kritis melakukan kontrol sosial dengan mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Media massa sebagai salah satu unsur *civil society* mengemban tugas mulia untuk melakukan kontrol sosial yang sehat, melalui pemberitaan yang jujur dan obyektif. Karena dengan berita yang jujurlah fungsi media untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat bisa teraktualisasikan.

Aspek yang kurang jujur dari pemberitaan media massa terkait dengan kebijakan pemerintah tentang covid-19, memberi dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Demikian pula dengan keluhan masyarakat di lapangan terkait dengan begitu mudahnya pihak rumah sakit menyebut setiap warga yang sakit dan yang meninggal dengan vonis terpapar covid-19 cukup meresahkan. Antara jumlah warga yang positif dan meninggal dengan yang diberitakan di media massa juga sering kurang sesuai. Bahkan dalam kasus di DKI Jakarta, Gubernur Anis Baswedan menyebut ada informasi yang kurang jujur antara realita di lapangan dengan yang diberitakan pemerintah di media. Menurut Anis Baswedan, realita warga Jakarta yang meninggal karena covid-19 jauh lebih besar dibanding dengan yang diberitakan di media massa dari sumber pemerintah.

Demikian pula dengan pemberitaan media massa tentang kebijakan Anis Baswedan di DKI Jakarta terkait penanganan covid-19, sering dibenturkan dengan kebijakan istana (Jokowi). Seolah setiap kebijakan yang dibuat oleh Anis Baswedan selalu salah di mata pemerintah pusat. Sehingga ada kesan bahwa muncul permainan politik di tengah penderitaan warga dengan musibah covid-19. Sejatinya, media massa sebagai kekuatan

*civil society* yang melakukan kontrol sosial, tidak boleh ikut permainan elit politik terlebih dalam penanganan covid-19.

Media massa hendaknya konsisten dengan nilai kejujuran dan keobyektifan, sehingga berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah (Mudji Sutrisno, 2014: 125). Dalam kasus pemberitaan penanganan covid-19, media massa terkesan ikut berpolitik dengan menghakimi Anis Baswedan. Padahal banyak pihak yang menyebut justru apa yang dilakukan Anis Baswedan justru sangat tepat dan cepat dalam mencegah penyebaran covid-19.

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan keobyektifan, sesungguhnya bisa dilawan oleh media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika media bisa menjalankan fungsinya secara kritis, secara teoritis media tersebut dikatakan *competitive*, yaitu membuat berita secara sehat dengan mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sebaliknya ketika media massa selalu membela rezim, baik salah atau benar yang dilakukan rezim, maka media tersebut disebut *colutive*, yaitu media yang berkolusi dengan rezim penguasa, atau menjadi corong kepentingan rezim penguasa. Media seperti ini tidak bisa menjalankan fungsi kontrol secara sehat, karena ia hanya selalu memberitakan informasi yang menguntungkan bagi pemerintah. Model media massa seperti sangat berbahaya, karena berita yang disampaikan tidak konsisten dengan nilai kejujuran dan bahkan menyesatkan bagi masyarakat. (Deborah Norden, *The Theory of Politics*, 2005: 117)

Peran media massa yang begitu mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa hendaknya harus konsisten dengan nilai kejujuran. Media harus berani menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang akan merusak kejujuran berita, walau pun pemerintah sendiri yang akan dihadapi. Ketika iklim demokrasi semakin kuat dan kebebasan pers dijamin undang-undang, maka tidak ada alasan bagi pengelola media untuk takut pada pemerintah dalam menjalankan kejujuran dan keobyektifan dalam menyampaikan berita. Berbeda pada masa orde baru, ketika kebebasan pers dibelenggu, bahkan pers akan dibredel kalau berani melawan arus (melakukan kritik pada rezim penguasa). Suasana demokratis dan kebebasan pers saat ini

menjadi kesempatan penting bagi media massa untuk mempertajam kontrol sosial dengan nilai kejujuran dan keobyektifan.

### **Menyikapi Sumber Informasi**

Sumber informasi menjadi bagian penting bagi wartawan untuk menentukan kualitas berita (Eriyanto, *Analisis Wacana*, 2012: 116). Ketika sumber informasi yang dipilih wartawan bisa dipercaya, maka akan muncul berita yang jujur dan obyektif. Sebaliknya manakala sumber informasi yang dipilih wartawan kurang dipercaya, bisa melahirkan berita bohong (hoaks). Demikian pula dengan pemberitaan tentang covid-19, sumber informasi yang dipilih wartawan menentukan kualitas berita. Berbagai berita yang disampaikan media massa tentang covid-19, mulai dari jumlah warga yang terpapar, yang meninggal, yang sembuh, dampak bencana covid-19 bagi masyarakat, hingga penolakan masyarakat pada pemakaman jenazah terpapar covid-19, memiliki tingkat nilai berita yang bervariasi. Ada yang memiliki nilai berita tinggi dengan sungguh-sungguh menjaga nilai kejujuran dan keobyektifan. Namun di sisi lain ada juga berita tentang covid-19 yang memiliki nilai berita rendah dan bahkan masuk kategori berita bohong (hoaks).

Ketika media massa tidak menyampaikan data yang akurat tentang jumlah warga yang terpapar, yang sembuh dan meninggal, maka media tersebut sudah ikut andil dalam penyampaian berita bohong. Munculnya berita jujur dan berita bohong sangat erat terkait dengan sumber informasi yang dipilih wartawan. Sumber informasi yang relevan terkait dengan covid-19, bisa dari pemerintah, dan juga dari masyarakat yang terlibat langsung dengan penanganan covid-19. Wartawan yang cerdas dan terampil selalu berusaha untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya, sehingga mereka terhindar dari penyebaran berita yang tidak akurat.

Peran media massa dalam mencegah berita bohong tentang covid-19 terkait erat dengan aktualisasi fungsi media massa. Secara teoritik ada empat fungsi utama media massa (Alex Sobur, 2012: 93). Keempat fungsi tersebut adalah fungsi informasi dan pendidikan, fungsi kontrol sosial, fungsi hiburan, dan fungsi ekonomi (komersial). Sebagai fungsi

informasi dan pendidikan, media massa harus mampu mencegah berbagai informasi bohong yang berkembang di masyarakat dengan memilih dan meneliti informasi yang sehat dan jujur untuk dipublikasikan. Informasi tentang dampak covid-19, jumlah warga yang positif, yang sembuh, yang meninggal, hingga kepercayaan masyarakat pada keberadaan covid-19, diinformasikan dengan jujur dan obyektif.

Melalui pemberitaan yang jujur dan obyektif tersebut, diharapkan bisa mencerdaskan wawasan masyarakat. Dengan demikian fungsi informasi dan pendidikan dari media massa sudah teraktualisasikan. (Hamdan Dauly, *Tantangan Dakwah di Era Kebebasan Pers*, 2015: 85). Tidak jarang, masih banyak masyarakat yang belum percaya dengan keberadaan covid-19, sehingga masih abai dengan pencegahannya. Melalui pemberitaan media massa tentang pentingnya mencegah penyebaran covid-19, mulai dari pakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan massa, adalah bagian dari usaha nyata yang dilakukan media massa dalam mencegah penyebaran covid-19. Informasi yang jujur harus terus disampaikan oleh media massa secara kontiniu, sangat positif untuk mencegah banyaknya informasi menyesatkan (bohong) yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui informasi jujur tersebut media sudah menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan pendidikan bagi masyarakat.

Fungsi kontrol sosial yang dilakukan media massa terkait dengan pemberitaan covid-19, bisa dilihat dengan keberanian mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kalau misalnya ada yang salah dari kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19, media massa harus berani melakukan kritik yang sehat. Demikian pula sebaliknya, kalau ada kebijakan pemerintah yang baik bagi masyarakat, media harus memberi dukungan. Keberanian media massa mendukung yang baik dan mengkritik yang kurang baik adalah aktualisasi dari kontrol sosial yang sehat. Terkadang fungsi kontrol sosial media massa sering kurang maksimal (lemah) karena berbagai tekanan, baik dari rezim penguasa dan juga tekanan dari pemilik modal media massa. Akibatnya pemberitaan media massa sering hanya memuji semua kebijakan pemerintah, tanpa ada keberanian melakukan

kritik. Padahal dalam realitanya, tidak semua kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya fungsi ekonomi (komersial) dari pemberitaan media massa terkait dengan covid-19 bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Media massa dikelola untuk mencari keuntungan bisnis, sehingga mereka membutuhkan iklan dari berbagai pihak sebagai sumber dana bagi media. Iklan terkait dengan penanganan covid-19 juga banyak dipublikasikan di media massa yang merupakan aspek komersial media massa. Namun terkait dengan covid-19, media massa tidak semata mencari keuntungan. Media massa juga memiliki kepedulian sosial dengan menggalang dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak media massa yang mampu mengumpulkan dana sosial sampai milyaran rupiah, dan secara nyata disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19 yang sangat membutuhkan.

Berbagai usaha bisa dilakukan oleh media massa dalam mencegah berita bohong tentang covid-19. Peran media massa dalam mencegah berita bohong tersebut merupakan bagian dari fungsi media dalam menyajikan berita sebagai media informasi dan pendidikan, sebagai kontrol sosial, hiburan hingga fungsi komersial dan juga kepekaan sosial. Kegiatan media massa menggalang dana dari masyarakat dan disalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak covid-19, adalah bagian dari mencegah berita bohong. Karena dengan terjun langsung ke masyarakat yang terdampak, pihak media mengetahui langsung bagaimana kondisi masyarakat. Dengan demikian pihak media bisa menyajikan informasi yang jujur dan obyektif, sehingga terhindar dari berita bohong yang menyesatkan.

## **Kesimpulan**

Menyampaikan berita yang jujur kepada masyarakat adalah merupakan tugas utama wartawan. Terlebih berita tentang covid-19, pihak media massa senantiasa berusaha agar jangan sampai muncul berita bohong (hoaks) yang bisa menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Berikut kesimpulan yang

perlu disampaikan terkait dengan peran media massa dalam mencegah berita bohong tentang covid-19:

Media massa memiliki empat fungsi utama dalam menjalankan tugas mulia dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keempat fungsi tersebut yaitu, fungsi informasi dan pendidikan, kontrol sosial, hiburan dan fungsi komersial (ekonomi). Ketika media massa menyampaikan informasi secara jujur, termasuk informasi tentang covid-19, dengan sendirinya media massa sudah menjalankan fungsi informasi dan pendidikan yang bisa menambah wawasan masyarakat. Berita tentang covid-19, sering disampaikan media sebagai usaha mencegah penyebaran covid-19 dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Informasi ini sangat mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula dengan keberanian media massa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, adalah bagian dari fungsi kontrol sosial. Sejatinya media massa harus melaksanakan fungsi kontrol sosial, termasuk dalam pemberitaan covid-19. Kalau ada kebijakan pemerintah yang baik terkait covid-19 didukung oleh media. Sebaliknya kalau ada kebijakan pemerintah tentang covid-19 yang dianggap kurang tepat, media massa harus berani melakukan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

Ada dua kekuatan penting yang sering mempengaruhi pemberitaan media massa, sehingga muncul berita yang kurang jujur (berita bohong). Kedua kekuatan itu adalah rezim penguasa dan pemilik modal media. Kebijakan politik rezim penguasa terkadang sulit dihadapi oleh media, sehingga idealisme wartawan tidak bisa ditegakkan ketika berhadapan kebijakan politik rezim penguasa. Dalam kasus penanganan covid-19 di Jakarta misalnya, media massa ikut andil memberitakan kebijakan politik penguasa yang terkesan selalu menyalahkan Gubernur Anis Baswedan. Padahal kalau mau jujur, banyak kebijakan Anis Baswedan yang sangat baik dalam penanganan covid-19. Namun karena persoalan politik, pemerintah pusat terkesan tidak suka dengan kebijakan Anis Baswedan. Media massa hendaknya jangan ikut membuat berita bohong, karena sejatinya media massa yang sehat adalah ketika mereka berani mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan rezim penguasa.

## Daftar Pustaka

- Achmad Mubarak, *Jiwa Dalam Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2000
- Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Anaalisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Rosdakarya, Bandung, 2012
- Arwan Tuti Artha, *Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers*, AK Group, Yogyakarta, 2012
- Ashadi Siregar, *Memahami Fungsi Kontrol Sosial Media di Tengah Persaingan Politik Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Deborah Norden, *The Theory of Politics*, Routledge, London, 2005
- Duane Bradley, *The Newspaper: Its Place in A Democracy*, New York, Pyramid Communications Inc., 2011
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS, Yogyakarta, 2012
- Fifi Novianty, *Pemanfaatan Komunikasi Media Baru di Tengah Pandemi Covid-19*, Fatawa Publishing, Semarang, 2020
- Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Rosdakarya, Bandung: 2016
- , *Tantangan Dakwah di Era Kebebasan Pers*, Jurnal Hikmah, IAIN Padangsidimpuan, 2015
- Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Rosdakarya, Bandung, 2017
- Krisna Harahap, *Rambu-rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Grafiti Budi Utamai, Jakarta, 2016
- Mudji Sutrisno, *Cultural Studies Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, Koekoesan, Yogyakarta, 2014
- Rosihan Anwar, *Wartawan dan Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Media*, Cahaya Ilmu, Jakarta: 2009

Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013

Surono, *Menuju Pers Demokratis Kritis atas Profesionalisme Wartawan*, Yogyakarta, LSIP, 2016

Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Wahdan Wahyudi, *Dampak Media Sosial bagi Hubungan Kekeluargaan*, Tesis Kajian Media dan Budaya UGM, Yogyakarta, 2011

# MENGHADANG COVID 19 DENGAN *LOCAL WISDOM* DAN SEDEKAH

Khoiro Umatin

## Pendahuluan

**V**irus corona seakan menjadi tanda pengingat kepada dunia, betapa pentingnya menjaga kesehatan pada ranah individu dan kolektif seluruh warga masyarakat. Dimana secara alamiah dan sudah diamini oleh ahli virus dan penyakit menular, bahwa virus corona ini menular berbarengan dengan pergerakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, merupakan hal penting dan logis ketika membahas virus corona mengharuskan pula menyertakan pendekatan sosiologis tentang pentingnya kesadaran kolektif dan tindakan kolektif manusia diikutkan untuk dapat memutus atau meminimalisir mata rantai penularan virus corona.

Bahwa dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia di muka bumi, untuk bisa menjaga eksistensinya dalam melanjutkan tata kelola kelangsungan kehidupan, ada pranata sosial yang sama-sama harus dipatuhi. Pranata sosial paling baru berkaitan dengan pandemi virus corona yang harus dihadapi manusia adalah apa yang dikenal dengan istilah *new-normal*. Tentunya ada sejumlah tahapan yang berhasil dilalui, betapapun tahapan itu amat sulit diwujudkan, mengingat begitu ganas dan cepatnya penyebaran virus, dari pusat virus pertama kali ditemukan hingga di masyarakat Indonesia. Posisi manusia sebagai makhluk sosial mesti akan bersinggungan dengan sesama manusia, yang sama-sama rumit ketika menghadapi persoalan kehidupan yang amat pelik. Hal itu bisa

dibuktikan, dengan masih adanya tingkat kesadaran yang masih rendah bahkan cenderung mengabaikan terhadap protokol kesehatan. Padahal dalam konteks penyebaran corona virus, protokol kesehatan ini yang masih menjadi andalannya.

Secara sosilologis, manusia sebagai individu dihadapkan pada pilihan-pilihan, antara paksaan di satu sisi agar bisa terhindar dari serangan virus corona yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga pilihan mempertahankan hidup, dan keberlangsungannya dengan mematuhi protokol kesehatan, juga menjadi pranata baru yang mesti dipatuhi walaupun masih berada pada tahap himbauan-himbau. Kemauan dan kesadaran untuk bisa melakukan perubahan dengan sistem sosial baru, bisa beradaptasi dengan peradaban baru, dan pada akhirnya bisa terhindar dari virus corona, tentu akan menjadi harapan kolektif kita bersama. Menuntut sama-sama rela menjalani tata kehidupan baru, yang tidak terbiasa dilakukan, dipaksa untuk dilakukan dengan argumen untuk menjaga kesehatan dan memutus penularan virus corona. Sejauh penulis mengikuti pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik, virus ini belum ada obatnya, belum ditemukan vaksinnnya. Oleh karena itu, langkah antisipatif secara kolektif menjadi pilihan utama dengan istilah populer mematuhi protokol kesehatan.

Fakta atas keberadaan dan keganasan virus ini sudah ada di hadapan kita. Jumlah orang yang terpapar virus ini, setiap hari terus bertambah. Bias informasi tentang keberadaan virus dan cara penularannya, antara murni persoalan medis dan hoax serta kecurigaan terhadap virus sebagai sebuah hasil konspirasi sama-sama tidak bisa dihindarkan. Akibatnya, berbagai pemahaman spekulatif terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan ketidakpercayaan sebagian masyarakat atas kenyataan adanya virus itu sendiri yang menjadikan sebagian cuek, acuh tak acuh atas himbauan menerapkan protokol kesehatan. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang ketakutan luar biasa atas virus corona sehingga cenderung menjadi paranoid, hal ini yang melahirkan akibat lanjutan seperti penolakan pemakaman jenazah positif covid yang hanya dilandasi ketakutan yang berlebihan tersebut. Fakta lain adalah adanya penolakan dari keluarga dan anggota masyarakat atas pemakaman jenazah dengan

menggunakan protokol kesehatan. Langkah kontradiktif lain adalah pengambilan paksa jenazah positif covid 19 oleh warga masyarakat untuk dimakamkan sendiri tanpa mengindahkan akibat buruk yang terjadi.

Di luar drama sosial yang sarat dengan nuansa kesehatan dan problematikanya tersebut, di masyarakat masih memunculkan perilaku sosial yang sama sekali tidak mengindahkan apa yang disebut dengan istilah protokol kesehatan sebagaimana penulis paparkan di atas. Memakai masker sebagai salah satu langkah untuk memutus penyebaran viruspun sulit terwujud, istilah menjaga jarak hampir-hampir sudah mulai sulit ditemukan. Semua ini diakibatkan karena persoalan lahirnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi virus corona yang masih rendah. Oleh karena itu, sanksi hukum dan sosial sampai-sampai harus dilaksanakan, seperti diterapkannya sanksi denda dan menyapu di jalanan, guna menekan dan memberi efek jera kepada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesadaran kolektif dalam menghadapi virus corona tersebut.

### **Dinamika Covid-19 dan Problematikanya**

Para ahli virus dan penyakit menular, telah melakukan penelitian dan kajian kaitan dengan corona virus ini, dan hasil penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa virus corona tidak bisa ditanggulangi secara sporadis, individual oleh seseorang yang hanya pingin selamat sendiri dari virus. Kerja kolektif dan kesadaran bersama dari semua pihak menjadi kata kunci untuk bisa menekan merebaknya penyebaran virus. Kebijakan pemerintah baik yang sifatnya himbauan-himbauan maupun yang sifatnya memaksa dengan berbagai peraturan, adalah wujud betapa pentingnya argumentasi penanganan pandemi virus corona ini harus dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan oleh semua pihak. Kita semestinya harus benar-benar menyadari bahwa mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari daerah satu ke daerah lain, bahkan dari negara satu ke negara lain memiliki kontribusi besar terhadap penyebaran virus corona ini. Karena memang penularan virus ini melalui kontak-kontak baik secara langsung maupun tidak langsung dari manusia satu kepada manusia yang lain. Pembatasan pergerakan manusia, mengurangi jumlah kerumunan orang, atau bahkan melakukan karantina wilayah atau negara, semata-mata untuk tidak

menjadikan pandemi corona ini menjadi menyebar lebih banyak dan kondisi semakin lebih buruk.

Relevan dengan laporan yang dibahas oleh kompas.com dengan mengutip dari dr. Pandu Riono, M.PH., Ph.D, bahwa pemerintah harus mengevaluasi seluruh strategi yang saat ini diterapkan. Evaluasi itu mesti dilakukan supaya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin tinggi. “Masalahnya kan ada di testing, surveilans, promosi, juga tentang kepatuhan masyarakat untuk pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Rendah sekali,” lanjut Pandu, “ Pemerintah harus mencari pendekatan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik tanpa harus ada sanksi yang berat”. Pandu menyebut, sebaik apapun pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur sanksi, tanpa pendekatan yang tepat, masyarakat tetap tidak akan mematuhi regulasi tersebut, artinya, regulasi itu sia-sia (Kompas.com, edisi 21 juli 2020)

Selain kompas.com, Republika.co.id juga memaparkan tentang upaya pencegahan penyebaran virus corona ini dengan mempertimbangkan hal yang terpenting, adalah memberikan edukasi, mengajak masyarakat lebih luas bisa memahami dan membuat perubahan perilaku yang sesuai dengan kondisi yang ada dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari agar kebutuhan ekonomi tetap tercukupi, namun tetap aman dari wabah Covid-19 (Republika. co.id, edisi 19 Juni 2020).

Masih dalam upaya pencegahan penularan virus corona berbasis masyarakat, ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D., dengan mengamati perkembangan penanganan virus covid 19 di Indonesia, memastikan betapa pentingnya sistem kewaspadaan dini harus berjalan dengan baik. Kerja jajaran Kementerian Kesehatan perlu dihargai dan masyarakat tidak akan panik jika ada keterbukaan. Syahrizal mengajak dan terus mengajak kepada masyarakat untuk tidak panik. Masyarakat diharapkan tetap harus menjaga kebersihan diri, kebiasaan cuci tangan dan menggunakan masker. Ancaman wabah masih terus berlangsung dan terus perlu diamati perkembangannya (Syahrizal, <https://www.fkm.ui.ac.id/> 30 Januari 2020).

Ahli penyakit dalam Herlina Burhan mengingatkan dua hal yang sama-sama bahayanya. Pertama, tentang bahayanya penyebaran virus corona. Karena virus ini menyebar begitu cepat dan sangat mudah menular. Kedua, soal berita hoax yang berkait dengan virus ini akan menimbulkan kepanikan dan ini sangat berbahaya juga bagi masyarakat. Menghadapi pandemi yang sangat mengerikan dan bias membuat panic semua orang ini, masih menurut Herlina dalam tayangan live ILC TV ONE 4 Februari 2020 bahwa memang virus corona ini membuat banyak orang panik. Berita hoax yang memberitakan tentang virus corona ini juga membikin orang panik, namun substansinya ada pada kecepatan transmisi yang bisa membikin orang resah. Oleh karena itu dHerlina mengusulkan perlu *kedisiplinan perilaku masyarakat dan ketegasan pemerintah untuk menekan penyebaran virus.* (Herlina pada tayangan ILC TV One, edisi 4 Februari 2020)

Mencermati paparan pemikiran dan rekomendasi dari ahli penyakit dalam dan penyakit menular di atas, semakin mempertegas sebuah argumentasi bahwa persoalan pandemi virus corona ini, pengurusannya diakui bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis saja. Tanggung jawab dalam menanggulangi pandemi corona menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing, serta hak dan tanggung jawab masing-masing. Kalau kerja kolektif ini bisa terwujud, upaya menekan merebaknya virus corona akan berhasil. Sebab kalau tidak bisa diupayakan, semua ahli sama-sama tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi penyebaran wabah corona ini di Indonesia.

Dengan masih meningkatnya angka kasus terkonfirmasi positif corona, angka kesadaran mematuhi protokol kesehatan juga masih menghawatirkan, dan masih terjadinya bias pemberitaan pandemi virus corona yang diwarnai dengan derasnya berita hoax, maka paparan berbagai pilihan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan tindakan bersama merupakan langkah yang patut diacungi jempol. Setting sosial masyarakat dusun Bintaran Srimulyo Piyungan Bantul, dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan menonjolkan pilihan sosiologis dengan membangun kesadaran kolektif dan perilaku bersama menjadi menarik untuk dicermati, karena langkah-langkah yang diwujudkan masyarakat tersebut bisa menjadi

alternatif model, sebagai wujud berkontribusi masyarakat terhadap upaya menekan angka terkonfirmasi positif virus corona.

### **Refleksi Atas Peristiwa Pandemi Covid 19**

Masyarakat dunia pada awal tahun 2020, dikejutkan problematika medis dengan mewabahnya virus baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara tanpa kecuali Indonesia. Korban terus berjatuhan, ada korban yang dinyatakan positif terkena virus corona dan setelah mendapat perawatan berangsur-angsur mereka dinyatakan sembuh. Mereka yang kurang beruntung, meski sudah mendapat perawatan medis, akhirnya mereka tetap tidak bisa terselamatkan. Mereka-mereka yang positif terjangkit virus corona, ada yang jatuh sakit, dan ada pula yang nampak tetap sehat. Fenomena OTG (orang tanpa gejala) yang secara terus menerus memproduksi virus dan menularkannya kepada orang lain dengan tanpa sadar. Dengan fenomena baru ini, maka kampanye protokol kesehatan dilancarkan secara besar-besaran oleh pemerintah bersama berbagai komponen masyarakat.

Wabah yang tidak mengenal batas teritori, kelas sosial, dan iklim suatu negara ini, pada fase awal dikenal dengan sebutan virus Wuhan. Dalam perkembangannya, virus ini diberi nama corona virus disease 2019 (COVID-19). Virus yang memiliki titik singgung dengan kesehatan manusia ini, setelah menyebar ke berbagai belahan dunia, berikutnya telah memberikan dampak luas secara sosial, budaya, dan lebih-lebih pada sektor ekonomi. Perputaran titik singgung virus dengan berbagai dampaknya ini telah membawa peradaban manusia kepada sebuah tatanan kehidupan baru. Hal ini menjadi landasan keluarnya deklarasi darurat kesehatan masyarakat secara Global (*Global Public Health Emergency*) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020.

*Corona virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Penelitian terkait penyakit ini masih sedikit. Diperlukan informasi yang berbasis bukti (evidence base) tentang perawatan, pengobatan, maupun informasi lainnya terkait penyakit COVID-19 ini. Dunia menjadi panik dan nampak tidak siap menghadapi pandemi ini. Indonesia sendiri melalui pemerintah telah

memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk memaparkan mengapa sebagian masyarakat memunculkan perilaku tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Tulisan ini merujuk pada literatur kepustakaan. Hasil pengamatan dan pencermatan melalui data dari pendapat para pakar kesehatan sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh sebagian masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain mengamati dan menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan keberagamaan.

Seperti dilaporkan Merdeka.com, kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020, dimana secara langsung diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona terus bertambah dari hari ke hari. Dilihat dari angka kasusnya, sejalan dengan beriring waktu mulai dari deret angka puluhan kasus hingga menembus angka ribuan kasus. Ada pasien yang meninggal dunia dari yang dinyatakan positif, dan banyak juga yang melalui proses karantina akhirnya dinyatakan sembuh dari covid 19.

Virus corona memiliki masa inkubasi bervariasi setiap korban, ini sangat tergantung dengan kondisi ketahanan tubuh korban, akan tetapi angka rata-rata masa inkubasinya antara 2-14 hari. Menurut laporan teraktual, bahwa orang yang terinfeksi virus corona dapat menularkan kepada orang lain sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Ini artinya, orang tidak menunggu sakit parah baru bisa menularkan virus. Menurut berbagai penjelasan tem medis dan ahli penyakit menular, penularan virus covid 19 ini diyakini terjadi melalui droplet orang yang terinfeksi (batuk, bersin) yang bisa terhirup atau dengan cara lain dengan mengusapkan virus ke mata, hidung dan mulut. Dalam laporannya, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Universitas Indonesia Jakarta bahwa saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien

simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin (Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Vol 1. No. 1 Tahun 2020).

Media online Republika.co.id 5 april 2020 juga melaporkan dari ahli penyakit dalam, bahwa ada dua cara penularan covid, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung menurutnya melalui droplet atau percikan air liur. Orang yang terinfeksi virus ketika sedang batuk atau bersin bisa menularkan virus langsung mengenai orang dengan jarak 1 meter. Sedang droplet dari penderita virus jatuh ke tanah atau tangan seseorang menyentuh barang yang terkena droplet, maka tangan menjadi terkontaminasi, sehingga tangan penyentuhnya tercemar. Model penularan virus corona tersebut dipaparkan dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Erlina Burhan, bahwa penularan Covid-19 secara cara langsung, melalui droplet atau percikan air liur. “Artinya, orang yang terinfeksi virus ini ketika sedang batuk dan bersin dengan jarak lebih dari 1 meter mengeluarkan droplet. Droplet ini mengandung virus Covid-19,” kata Erlina.

Sudah sangat jelas tentang tata cara penyebaran virus ini dari satu orang terpapar positif ke orang-orang di sekelilingnya, baik orang tersebut didahului dengan gejala sakit maupun orang tanpa gejala. Rekomendasi pemerintah dan para ahli kepada masyarakat yang sudah mendapatkan berbagai informasi tentang penyebaran virus corona, dengan mengacu pada kondisi jatuhnya korban yang terus bertambah tersebut, maka kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan untuk mencegah dan meminimalisir penularan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO.
2. Hindari kerumunan/ keramaian.
3. Jaga posisi jarak dengan orang lain, dengan jarak kurang lebih satu meter.
4. Hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit terpapar virus corona
5. Konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit

6. Gunakan masker saat keluar rumah
7. Membersihkan dengan disinfektan secara berkala barang-barang yang sering disentuh.

Sedangkan CNN Indonesia secara teknis melaporkan apa yang perlu dilakukan ketika orang hendak atau sudah melakukan perjalanan ke suatu tempat yang terjadi kasus virus corona, dengan model pencegahan sebagai berikut (CNN Indonesia, edisi 27 Januari 2020):

1. Hindari menyentuh hewan atau burung.
2. Hindari mengunjungi pasar basah, peternakan, atau pasar hewan hidup.
3. Hindari kontak dekat dengan pasien yang memiliki gejala infeksi saluran pernafasan.
4. Patuhi petunjuk keamanan makanan dan aturan kebersihan.
5. Jika merasa kesehatan tidak nyaman ketika di daerah outbreak terutama demam atau batuk, gunakan masker dan segera kunjungi layanan kesehatan terdekat.
6. Setelah kembali dari daerah *out break*, konsultasi ke dokter jika terdapat gejala demam atau gejala lain. Jangan lupa untuk menginformasikan ke dokter soal riwayat perjalanan serta gunakan masker untuk mencegah penularan penyakit.

Ketika informasi penting tentang transmisi virus corona dan tata cara menghindari atau memutus mata rantai penyebaran virus corona, sudah sampai di masyarakat, memang akhirnya tertumpu pada kesadaran masyarakat mulai dari tingkatan individu sampai pada tingkatan kolektif dengan dilandasi sebuah kesadaran agar dirinya sehat, bisa terhindar dari virus corona dan lingkungan tetap sehat juga terbebas dari pandemi virus corona. Kementerian Kesehatan melalui laman <https://www.alodokter.com> memberikan arahan dengan Cara terbaik untuk memutus mata rantai penularan yang bisa diterapkan adalah (1) lakukan *physical distancing*, (2) lakukan cuci tangan secara rutin, (3) jaga daya tahan tubuh, (4) batasi pergi ke luar rumah (5) lakukan isolasi mandiri bila kamu mengalami demam

dan batuk yang disertai dengan sesak napas, terlebih bila dalam 2 minggu terakhir kamu berada di daerah endemis COVID-19.

### **Kearifan Lokal dan Pendekatan Agama: Upaya Menghadang Virus Corona**

Penyebaran virus corona yang begitu cepat di masyarakat, satu sisi membuat masyarakat menjadi gelisah. Puncak gelisah masyarakat benar-benar memuncak, ketika di lingkungan mereka tinggal ada kasus positif. Dengan menyadari begitu cepatnya tingkat penyebaran, dalam lingkup masyarakat ada sisi baiknya, yaitu munculnya kesadaran kolektif warga masyarakat dalam wilayah tertentu untuk menjaga agar warga masyarakat di wilayah tersebut tidak ada yang terpapar virus corona.

Secara faktual, kita sering disodori pemberitaan bahwa kehadiran virus corona ini bisa menjadi bahan pemicu adanya konflik di masyarakat. Dari sebuah pengakuan pejabat di Kementerian Agama Jawa Timur dalam sebuah dialog terbatas, dia merasa menjadi pesakitan dan menjadi orang yang terasing di rumah dan lingkungannya sendiri setelah dirinya dinyatakan positif terpapar virus corona. Menurutnya, respon masyarakat dalam menyikapi terhadap orang yang terpapar corona akan menimbulkan beban psikologis baik si penderita maupun keluarganya. Kondisi tekanan psikis, sosiologis dan medis karena memang mengalami gejala sakit, benar-benar dia alami dan rasakan, (Huda, 9/9/2020).

Dari perspektif sosiologis, covid-19 ini benar-benar menjadi potensi konflik jika tidak mendapat penanganan dengan baik. Masyarakat menyadari betul bahwa virus korona menjadi masalah bersama. Korban terus berjatuhan, berita dan isu tentang virus corona menjadi bahan pemberitaan di berbagai media. Reaksi masyarakat memang beragam, dari yang biasa-biasa saja dalam merespon kasus covid 19, hingga over reaktif terhadap korban, seperti penolakan pemakaman covid 19 dan pengucilan terhadap korban. Realitas sosial masyarakat dalam merespon penyebaran virus corona tersebut merupakan bentuk-bentuk tindakan sporadis di masyarakat yang bisa menimbulkan sebuah ketegangan sosial.

Narasi sosiologis reaksi masyarakat terhadap penyebaran virus corona tersebut menjadi menarik karena ada plus minus di tengah-tengah

masyarakat. Satu sisi bisa menguatkan daya tahan institusi masyarakat yang terkelola dengan baik, meski kecemasan masyarakat memang merupakan bagian lain yang tidak bisa dielakkan. Virus corona bisa menjadi daya dorong dan dinamika masyarakat yang melahirkan sebuah kebersamaan, yaitu meunculnya kesadaran kolektif dan tindakan sosial di masyarakat dengan sama-sama menempatkan virus corona sebagai problem sosial yang harus diantisipasi secara bersama.

Virus corona yang ditempatkan sebagai sumber masalah bersama ini mampu mengubah dari berpeluang menjadi pemicu lahirnya konflik sosial menjadi kohesi masyarakat untuk saling bekerjasama. Dengan merujuk pada empat elemen dalam perspektif teori konflik sosial bahwa (1) setiap komunitas masyarakat kapan saja akan mengalami perubahan sosial. (2) setiap masyarakat dalam setiap waktu, menunjukkan adanya konflik sosial, sehingga konflik terjadi dimana-mana dan tidak dapat dihindari. (3) setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan terjadinya perubahan dan (4) setiap masyarakat didasarkan atas tekanan para anggotanya oleh pihak lain yang itu membuka ruang terjadinya konflik (Johnson, 1986:194; Dahrendorf dalam Etzioni, 1973:105; Ritzer, 1992:31; Turner, 1986:152; Zeitlin, 1998:174-175; Nasikun, 1995:16).

Melihat kepanikan masyarakat dalam menghadapi virus corona, memang diperlukan adanya upaya strategis baik secara individu maupun kolektif. Dalam rangka mencapai hubungan sosial yang serasi antar masyarakat ke dalam sebuah sistem sosial yang harmonis. Langkah kolektif ini sangat membantu tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam menekan penyebaran virus hingga di titik nol atau dalam bahasa populer berhasil mempertahankan wilayah dalam zona hijau. Oleh karena itu, perlu mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu sistem yang dapat membuat warga masyarakat selalu menjunjung nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang ada untuk menyosialisasikan sistem pengendalian sosial dengan tetap menempatkan virus corona sebagai problem bersama. Tidak kalah pentingnya juga adalah mengajak masyarakat untuk mengorganisasikan potensi warga masyarakat guna mencapai tujuan bersama yang biasanya dianggap sebagai aspek paling krusial di masyarakat. Adalah penting memiliki kesadaran bersama

bahwa masih berpotensi setiap masyarakat terpapar virus corona dalam konteks kapan pun dan dimana pun. Langkah antisipasi secara kolektif menjadi kebutuhan yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga semakin memperteguh keyakinan perlunya optimalisasi pengelolaan ancaman virus corona berbasis masyarakat. Kepeloporan tokoh lokal bersama masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, kepatuhan atas pembatasan interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dan lahirnya kesepakatan di tingkat lokal oleh masyarakat terbukti telah berhasil mengelola potensi setiap orang terpapar virus menjadi tidak terpapar virus corona.

Dinamika masyarakat menjadi lebih progresif, ketika banyak kreasi budaya dan norma sosial baru yang dijalankan dalam kehidupan bersama. Langkah-langkah antisipatif bernuansa kesepakatan lokal semakin memperkokoh kesadaran kolektif di masyarakat, ketika dikaitkan dengan penyebaran virus corona yang dikenal ganas dan cepat. Menguatnya perilaku sosiologis ini memiliki korelasi dengan simbol-simbol sosial di tingkat lokal, seperti kuatnya tradisi dan ketokohan masyarakat lokal yang masih dijunjung tinggi keberadaannya.

Sejauh pelacakan yang penulis lakukan di media dan di masyarakat, ada potret lain pelaksanaan upaya menghadang penyebaran virus corona yang ada di masyarakat Bintaran Wetan Srimulyo Bantul dengan mengambil langkah melakukan penguncian wilayah “lockdown” dalam lingkungan kecil yang berbasis padukuhan. Pranata sosial dan protokol kesehatan benar-benar mendapat pengawasan dari dan oleh masyarakat sendiri. Bahkan yang lebih penting adalah timbulnya kesadaran kolektif yang menempatkan virus corona adalah menjadi masalah bersama dan mengharuskan kebersamaan dalam menghadang penyebarannya.

Menghawatirkannya penyebaran virus corona di beberapa tempat, ada titik temu yang bisa menghubungkan dengan langkah strategis menghadang virus corona secara kolektif ini. Langkah kolektif menghadang dan meminimalisir penyebaran virus corona di dusun Bintaran desa Srimulyo kecamatan Piyungan kabupaten Bantul ini sudah tentu bukan terjadi secara tiba-tiba. Perilaku sosial yang sudah mentradisi di masyarakat tersebut, posisinya bisa dikategorikan sebagai daya pengikat yang dalam pandangan Emile Durkheim mampu menimbulkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial

ini digunakan untuk menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan solidaritas sosial ini lebih mendasar dari pada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional antar elemen-elemen yang ada di masyarakat (Johnson, 1986: 181).

Pencapaian tujuan mewujudkan sistem sosial yang serasi dalam menghadapi sejumlah persoalan, mengharuskan masyarakat secara kolektif terlibat menghadapi fakta yang menjadi persoalan bersama yaitu ancaman virus corona, sehingga dalam setiap diri orang muncul rasa malu ketika perilakunya mengganggu kesepakatan yang sudah dibangun di masyarakat. Dari sini kemudian melahirkan sebuah kesadaran kolektif dan tindakan sosial yang didasarkan kepada norma-norma lokal yang sudah disepakati bersama di lingkungan masyarakat dusun Bintaran Srimulyo Piyungan Bantul.

Dihidupkannya kembali istilah rembuk dusun yang di sebagian daerah sudah hilang, kini kembali ditumbuhkan untuk menjaga agar warganya tidak terpapar virus corona. Rembuk dusun dimulai dengan pertemuan informal tokoh-tokoh formal, informal dan tokoh agama. Rapat koordinasi membahas dari yang teknis hingga yang strategis dalam lingkup padukuhan. Menurut relawan yang terlibat langsung dalam proses pertemuan menjelaskan, bahwa hasil pertemuan ini diharapkan bisa ditaati oleh semua warga masyarakat walaupun tidak ada sanksi yang dituangkan dalam keputusan rembuk dusun. Meski tidak ada sanksi, kesepakatan yang diharapkan bisa menekan atau bahkan memutus mata rantai penyebaran virus corona di dusun Bintaran bisa terwujud. “Kami tidak menekankan adanya sanksi hukuman, baik berupa sanksi denda maupun sanksi masyarakat. Yang ditekankan adalah sebuah kesadaran bersama, agar diantara satu warga dengan warga lain sama-sama menjaga dan mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang menjadi kesepakatan warga masyarakat melalui tokoh masyarakat, (Tukiran, wawancara 29/08/2020).

Secara dinamis, efektifitas norma sosial ini memang masih bisa diperdebatkan untuk mengukur tingkat keberhasilan menekan penyebaran virus corona di tingkat masyarakat. Namun dengan melihat tingkat

kesadaran warga dalam mengikuti protokol kesehatan di unit lingkungan paling kecil tersebut, menjadi nilai plus yang patut diapresiasi. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa virus corona ini penyebarannya beriringan dengan pergerakan manusia dari satu titik ke titik yang lain dengan tanpa memperhatikan protokol kesehatan harus diakui masih menjadi problem bersama. Kondisi ini tentu tidak bagi masyarakat dusun Bintaran, secara faktual justru masyarakat secara suka rela berhasil membangun kesepakatan bersama, menjaga kesepakatan secara bersama, dan kesepakatan terakhir menjalankan secara bersama-sama.

Posisi kerarifan lokal dalam proses sosial ini berhasil dijaga oleh masyarakat, sehingga masa-masa sulit penuh dengan kepanikan menghadapi pandemi corona berhasil dilewatinya. Rumusan norma sosial yang menjadi arahan perilaku lokal berhasil disepakati menjadi bagian dari norma yang dijalankan. Hasil rembuk dusun tersebut, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat untuk diketahui, dipahami dan ditaati bersama, meski di dalam kesepakatan itu tidak berbicara sanksi bagi para pelanggarnya. Namun demikian, tingkat kepatuhan warga dapat diwujudkan dengan kerelaan menjalankan protokol kesehatan yang sudah mereka rumuskan dengan mengadopsi protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO. Mereka bahkan rela menjaga posko pemantauan pergerakan orang secara bergantian. Rembuk warga yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat dan difasilitasi oleh kepala dukuh Bintaran telah menghasilkan 13 kesepakatan warga (Dokumen Kesepakatan Warga dusun Bintaran Wetan Srimulyo Piyungan Bantul, 27 Maret 2020) sebagai berikut:

1. Warga Bintaran wetan yang merantau untuk tidak pulang kampung.
2. Warga Bintaran wetan dilarang keluar dari wilayah DIY.
3. Masyarakat di dusun Bintaran wetan diminta kesadaran di dalam mensikapi covid 19 dengan menerapkan pola hidup sehat.
4. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.
5. Mencuci tangan dengan sabun.
6. Olah raga dan pola makan sehat.
7. Berjemur 10 menit.
8. Bila ada warga yang merasa sakit, segera periksakan ke puskesmas/ rumah sakit sampai benar-benar sembuh.

9. Segala bentuk pertemuan dan kumpulan ditiadakan
10. Penyemprotan desinfektan rutin dilakukan secara berkala.
11. Ronda malam ditingkatkan dan tetap menjaga jarak.
12. Warga yang bekerja dan kegiatan sehari-hari di luar Bintaran Wetan agar menjaga diri.
13. Warga diharapkan tidak menyebarkan berita hoax terkait covid 19

Masyarakat dengan kesadaran sendiri, menaati norma dan aturan yang sudah dirumuskan bersama. Begitu pula bagi warga masyarakat Bintaran yang sudah berhasil merumuskan norma penting untuk dijadikan acuan dalam menghadapi pandemi corona, oleh warga masyarakat dusun Bintaran kemudian dilakukan sosialisasi, dan mulai melakukan pembatasan pergerakan orang baik orang yang masuk maupun orang keluar dusun Bintaran dengan membatasi akses pintu masuk ke dusun melalui penjagaan 24 jam secara bergantian. Orang luar ketika mau masuk ke dusun Bintaran harus melalui pos pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan, termasuk ditanyakan mau ketemu siapa. Hal ini untuk memudahkan pelacakan kontak antara orang Bintaran dengan orang di luar Bintaran.

Sebagai pengingat warga atas norma yang sudah disepakati untuk mengantisipasi pandemi corona di dusun Bintaran, maka kemudian warga masyarakat membuat baliho berukuran besar berisi kesepakatan warga untuk dijalankan secara bersama. Baliho tersebut di pasang di beberapa titik strategis di wilayah dusun Bintaran. Warga masyarakat menempuh berbagai langkah tersebut sebagai upaya bentuk kesadaran bersama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan kecil. Prosedur pencegahan virus corona di lingkup kecil ini searah dengan yang menjadi perhatian presiden Joko Widodo yang justru menjadi arahan model pencegahan dengan istilah “Mini Lockdown”. Pelaksanaan PSBB sebaiknya diperketat di tingkat lokal, desa RW, RT dan tingkat perkantoran, karena menurutnya itu jauh lebih efektif, (detiknews, 28/09/2020).

Menarik untuk mencermati upaya yang dilakukan warga dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona adalah tingkat kebersamaan yang dibangun secara terpadu di tingkat warga. Proses sosial ini

menghasilkan kesadaran kolektif warga dan tindakan bersama di dalam menghadapi pandemi. Proses karantina mandiri bagi orang-orang berisiko tinggi dijalankan dengan penuh kesadaran. Terbukti dua jama'ah tabligh yang mengikuti kegiatan di lur kota, sepulangnya langsung melakukan karantina dan mendapat pengawasan dari warga sekitar. Begitu pula satu warga yang pulang dari kota Jakarta, dengan penuh kesadaran langsung melakukan karantina mandiri di sebuah gedung pertemuan milik warga.

Temuan di atas menunjukkan bahwa dalam hubungan masyarakat ada organisasi sosial dan moral yang memiliki peran strategis dalam mengelola kebersamaan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tokoh formal dan informal serta adat istiadat yang sudah menjadi tradisi masyarakat perlu dipertahankan, untuk mengelola setiap persoalan kolektif masyarakat, agar persoalan-persoalan yang kemungkinan bisa terjadi tidak sampai merusak struktur sosial masyarakat. Realitas ini bisa disandingkan dengan apa yang disebut Saifuddin bahwa ada peran penting dan keterkaitan aspek-aspek dalam kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Setiap menghadapi masalah yang berpotensi menjadi persoalan, ketika dikelola dengan baik masyarakat bisa penegakan kembali kohesi sosial berupa tatanan masyarakat dalam arti yang lebih luas (Saifuddin, 1986: 68).

Realitas sosial masyarakat di dusun Bintaran Wetan Srimulyo Piyungan Bantul, hanya merupakan gambaran dimana persoalan penyebaran virus corona yang kian cepat bisa menjadi jawaban sementara, dan bisa menjadi salah satu model penanganan. Karena masyarakat memiliki kesadaran bersama, memiliki pandangan yang sama tentang bahaya virus corona setelah proses sosial dikelola dengan baik. Bahkan mereka memandang perlu melakukan tindakan bersama untuk menghadang virus corona, agar tidak masuk ke dusun Bintaran. Dan hasilnya sangat bagus menurut kepala dusun. "Tidak ada warga Bintaran yang terpapar virus corona dan masyarakat bisa bersama-sama bergotong royong dan saling membantu", kata Tukiran selaku kepala dusun (wawancara dengan kepala dukuh, Tukiran : 29/8/2020).

Apa yang terjadi di dusun Bintaran ini hanya merupakan potret kecil dari penanganan kasus penyebaran virus corona di Yogyakarta. Lahirnya

realitas sosial masyarakat dusun yang memiliki kebersamaan, kesadaran dan kemauan secara terpadu dalam upaya menghadang virus corona agar tidak menular kepada warga masyarakat Bintaran merupakan tatanan sosial yang dihasilkan setelah melalui proses sosiologis di masyarakat. Penulis berkeyakinan, setiap wilayah pasti memiliki potensi yang bisa dikelola dengan baik, untuk bisa menggerakkan kesadaran kolektif dan tindakan bersama di tingkatan masyarakat. Keberhasilan model ini kata kuncinya ada pada kepentingan bersama harus lebih diutamakan dan orang bersedia menurunkan sedikit kepentingan individualnya guna mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

Selain pentingnya upaya yang dilakukan masyarakat untuk menekan penyebaran virus corona melalui *local wisdom* yang berbentuk rembuk dusun, juga pendekatan dari sisi agama. Dalam terminologi agama Islam, ketika manusia dihadapkan pada kesulitan hidup, baik ketika mengalami musibah, wabah maupun kesulitan yang lain, maka mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi langkah yang efektif. Salah satu bentuk pendekatan diri kepada Sang Kholiq adakah dengan selalu mengingat kepadaNya dan melaksanakan apa yang diperintahkanNya. Salah satu keutamaan amalan yang memiliki fadhilah luar biasa, termasuk dapat menyembuhkan penyakit adalah dengan mengamalkan sedekah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Santosa, bahwa sedekah memiliki multi manfaat pada kita, salah satunya adalah Allah SWT memberikan kesembuhan pada sakit yang kita derita dengan bersedekah. Sedekah menjadi obat yang mujarab dan dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Obatilah penyakitmu dengan sedekah”. Hadis ini memberi penjelasan pada kita, bahwa dengan bersedekah, dapat menjadi sebab kesembuhan dan obat bagi sakit yang kita derita (Santosa, 2013: 45).

Dengan mewabahnya virus corona di tengah masyarakat kita, sedekah merupakan pilihan yang tepat untuk diamalkan. Sebenarnya sulit dinalar dengan pikiran, ada korelasi yang signifikan antara kesembuhan dari derita sakit dengan sedekah yang dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan (Ummatin, 2019:47)

## **Akhir Sebuah Paparan Pemikiran**

Paparan singkat hasil interaksi teori sosiologi yang menempatkan kesadaran kolektif dan tindakan bersama untuk meminimalisir penularan virus corona di masyarakat dalam skala kecil menunjukkan tingkat efektifitasnya. Norma sosial yang lahir dari proses rembuk dusun menjadi kerangka acuan atas pentingnya menempatkan virus corona sebagai musuh bersama yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat memandang perlu untuk mengambil langkah secara bersama dan terpadu demi sebuah nilai kebersamaan dan pilihan hidup kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dipandang sangat penting oleh ahli penyakit dalam dan penyakit menular, karena angka kasus penularan virus akan tetap tinggi bahkan tidak bisa diprediksi jika masyarakat mengabaikan kesadaran mematuhi protokol kesehatan ini.

Inilah argeumentasi penting mengapa kesadaran kolektif dan tindakan bersama masyarakat memiliki posisi strategis menyumbangkan kontribusinya dalam menangani pandemi virus corona. Perpaduan norma sosial dan norma yang memiliki daya paksa kepada setiap individu untuk mematuhi protokol kesehatan dalam lingkungan yang lebih luas sudah menjadi keharusan, mengingat bahaya penyebaran virus corona masih tetap menjadi ancaman sementara kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan kondisinya makin memprihatinkan.

Sampai tulisan ini dibuat, dengan mencermati pendapat para ahli medis bahwa virus corona belum ditemukan obatnya dan juga belum ditemukan vaksinya. Dengan demikian, pilihannya memang jatuh pada kesadaran individu dan kolektif untuk sama-sama mau menjaga protokol kesahatan dan bersedia menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat meski pada lingkup kecil. Usaha membangun kesadaran kolektif dalam lingkungan masyarakat luas yang jumlah individu yang terlibat menjadi lebih besar, tentu perlu kerja keras dari semua komponen bangsa untuk mampu menggerakkan tingkat

kesadaran mereka. Semoga kerja keras semua pihak mampu melewati masa sulut akhirnya pandemi corona berhasil diminimalisir jatuhnya korban.

### **Daftar Pustaka**

- Burhan, Erlina, 2020. (dokter spesialis paru dan dari divisi infeksi Departemen Polmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, *ILC TV ONE*, 24 Maret 2020.
- Coser, Lewis A., 1956. *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press
- CNN Indonesia* edisi 27/01/2020.
- Dahrendorf, Ralf, 1973. "Toward a Theory of Social Conflict", dalam Armitai Etzioni and Eva Etzioni-Halevy, (ed.), *Social Change, Sources, Pattern and Consequences*, New York: Basic Book Publishers
- Duverger, Maurice, 1998. *Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dokumen Kesepakatan Warga dusun Bintaran Wetan Srimulyo Piyungan Bantul*, 27 Maret 2020
- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention>, 2 Mei 2020.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Republika.co.id* 5 april 2020
- Riono, Pandu, *Kompas.com* edisi 21/07/2020.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 1986. *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta: Rajawali
- Santosa, Ippho, 2010. *Percepatan Rezeki dalam 40 hari dengan Otak Kanan*, Jakarta: Gramedia
- Syarif, Syahrizal, <https://www.fkm.ui.ac.id/> 30 Januari 2020)
- Tempo.co*, 16 September 2020
- Tukiran, *wawancara* 15 September 2020.

- Turner, Jonathan H., 1986. *The Structure of Sociological Theory*, Chicago: The Dorsey Press
- Ummatin, Khoiro, 2019. “Kedahsyatan Sedekah” dalam *Berkah Serkileran Umrah*, Jakarta: DeeJay Training Center
- Widodo, Joko, *Detiknews*, edisi 28/09/2020.
- Zeitlin, Irving M., 1998. *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

# STRATEGI BIMBINGAN SPIRITUAL DI ERA NEW NORMAL

Zaen Musyrifin, S.Sos.I.,M.Pd.I

## Pendahuluan

Negara-negara di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan yang sama yaitu pandemi covid 19. Corona atau yang sering disebut covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru saja ditemukan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan covid-19 menjadi sebuah pandemi karena menyebar secara lebih luas ke berbagai negara di dunia. Penyakit covid-19 adalah virus baru dan penyakit yang disebabkan ini pertama muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Saat ini, Covid-19 menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan telah mempengaruhi roda kehidupan banyak negara di dunia ini termasuk Indonesia. Virus ini juga telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, seperti kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, dan keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang kompleks karena tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia saja, tapi juga mempengaruhi dan merubah pola kehidupan manusia di banyak negara.

Belakangan ini, kita sering mendengar istilah New Normal, terutama dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang sedang kita alami, setelah sebelumnya muncul berbagai istilah seperti *Lockdown*, *Physical Distancing*, *Work From Home (WFO)*, *Social Distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). New normal merupakan kebijakan terbaru dan dianggap terbaik oleh pemerintah untuk menjalankan kehidupan

di tengah pandemi Covid-19. Beberapa istilah tersebut menjadi suatu kebijakan dari pemerintah untuk diterapkan oleh masyarakat agar tidak berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan new normal merupakan kebijakan untuk beradaptasi dengan sesuatu yang tidak atau belum dapat diubah dan memperbolehkan manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sembari menunggu obat virus corona ditemukan, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat saat ini.

*New normal* merupakan tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid19-. Menjalani kehidupan di era new normal tentunya berkaitan dengan aspek spiritual. Spiritualitas merupakan faktor penting yang membantu individu mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan, serta beradaptasi dengan penyakit (Potter & Perry, 2010). Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa spiritual merupakan energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk beradaptasi dengan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Karena kehidupan new normal menekankan kepada masyarakat agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

Dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Sardjito, dr. Probosuseno, SpPD, K-Ger, SE saat mengisi seminar daring bertajuk “Resiliensi Kunci Mengokohkan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19” menjelaskan bahwa wabah Covid-19 menimbulkan situasi yang tidak biasa, satu di antaranya banyak orang mengalami trauma psikis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik-integratif dalam penanganan dampak Covid-19 bagi setiap individu, yakni meliputi medis dan spiritual (Maruti, 2020). Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada fisik manusia tapi berdampak pada psikis manusia. Salah satu aspek yang berkaitan dengan psikis manusia yaitu spiritual. Aspek spiritual juga dibutuhkan dalam proses penanganan suatu penyakit.

Dukungan akan kebutuhan spiritual tidak jarang dianggap hal yang kurang penting. Namun, hasil penelitian tentang kebutuhan spiritual keluarga dengan anak penderita penyakit kronis, ditemukan informasi bahwa keluarga pasien melaporkan belum terpenuhinya kebutuhan spiritual selama menunggu anak di rumah sakit. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dimensi dengan kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan terhadap keyakinan (57,4%), diikuti oleh kebutuhan terhadap kekuatan (57,1%), kebutuhan terhadap *family's preference* (52,3%), kebutuhan terhadap spiritual anggota keluarga (41%), kebutuhan terhadap makna dan tujuan (39%), dan kebutuhan terhadap hubungan (37,8%) (Elva, dkk, 2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dimensi kebutuhan spiritual dibutuhkan dalam proses penanganan suatu penyakit.

*Spiritual care* merupakan hal yang penting bagi pasien, terutama pasien penderita penyakit kronis seperti kanker. Namun pelayan keperawatan masih terfokus pada aspek fisik, sehingga data mengenai kebutuhan spiritual pasien kanker di Indonesia belum komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian tentang kebutuhan spiritual pada pasien kanker, menunjukkan bahwa pada aspek religi, berdoa dengan orang lain dan seseorang berdoa untuk responden memiliki persentase paling tinggi (96,05%). Pada aspek kedamaian, tinggal di tempat yang tenang dan damai serta menemukan kedamaian batin memiliki persentase paling tinggi (89,47%). Pada aspek eksistensi diri, menemukan makna dalam sakit dan penderitaan memiliki persentase paling tinggi (94,74%). Adapun pada kebutuhan untuk memberi, beralih menjadi orang yang penuh cinta kasih memiliki persentase paling tinggi (89,47%) (Nuraeni, dkk, 2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua dimensi kebutuhan spiritual sangat dibutuhkan oleh pasien, dan kebutuhan religi merupakan kebutuhan yang paling banyak dipilih dan dirasakan paling dibutuhkan.

Berkaitan dengan setting layanan bimbingan dan konseling, bimbingan spiritual juga dibutuhkan dalam proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza, diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi pasien napza juga dapat di bentuk kepribadiannya dengan memberikan bimbingan dan konseling pada aspek spiritualnya yang mencakup aspek pengamalan ibadah (*Prayer Fulfillment*), keyakinan hidup (universalitas) serta tanggung jawab terhadap kehidupannya (keterkaitan). Terdapat adanya perubahan sikap dan mental dari pasien yang sebelumnya ketergantungan menjadi pribadi yang dapat mengelola dirinya dengan baik dan lebih menghargai arti kehidupan (Ridho, 2018). Secara umum,

penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa bimbingan spiritual dapat membentuk perilaku dan mental seseorang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis tertarik mengkaji tentang bimbingan spiritual di era new normal karena pandemi Covid-19 menjadi realitas penyakit yang mengubah perilaku sosial masyarakat. Terlepas dari perdebatan istilah, tatanan new normal secara sosiologis dengan istilah adaptasi hidup darurat pandemi. Namun pada intinya, new normal dimaksudkan agar berbagai sektor kehidupan yang tadinya tersendat bahkan berhenti, dapat (sedikit) bergerak kembali. Dengan kata lain, adaptasi hidup darurat pandemi sebagai upaya meredam laju tingkat kerentanan sosial di masyarakat yang tidak menentu. Menurut dosen Sosiologi FIS UNJ, dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Syaifudin, 2020). Oleh karena itu, bimbingan spiritual dibutuhkan di era new normal untuk menghindari kerentanan sosial di masyarakat.

### **Tinjauan Makna Spiritual**

Sebelum membahas konsep bimbingan spiritual secara spesifik, kita perlu memahami definisi spiritual dan spiritualitas. Istilah “spiritualitas” berasal dari kata spirituality, yang merupakan kata benda, turunan dari kata sifat spiritual. Dalam bentuk kata sifat, spiritual mengandung arti “yang berhubungan dengan spirit”, “yang berhubungan dengan yang suci”, dan “yang berhubungan dengan fenomena atau makhluk supernatural” (Hendrawan, 2009). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedua istilah tersebut berasal dari satu kata yang sama yaitu spirit.

Spiritual adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan bahkan pada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan (Ellison, 2002). Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya *Spiritual Capital* mengemukakan bahwa Spiritual “*The spiritual in human beings makes us ask why we are doing what we are doing and makes us seek some fundamentally better way of doing it*” (Zohar dan Marshall, 2010). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa spiritual dalam diri manusia membuat seseorang bertanya mengapa harus melakukan

sesuatu dan membuat seseorang mencari beberapa cara fundamental yang lebih baik untuk melakukannya.

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan sang pencipta (Achir Yani, 2000). Menurut Caroline Young dan Cyndie Koopsen sebagaimana dikutip dari Sanerya Hendrawan mengartikan spiritualitas sebagai daya semangat prinsip hidup atau hakikat eksistensi manusia yang diungkapkan melalui hubungan dengan diri sendiri, sesama, alam, dan Sang Pencipta atau sumber hidup dan dibentuk melalui pengalaman kultural, spiritualitas merupakan pengalaman manusia yang universal (Young dan Koopsen, 2011). Spiritual diartikan kepercayaan yang berhubungan dengan kekuasaan tertinggi, pemilik kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan.

Penjelasan tentang spiritual di atas dapat disimpulkan bahwa spiritual fokusnya lebih ke jiwa/rohani seseorang. Sedangkan spiritualitas fokusnya lebih ke kepercayaan/agama. Istilah yang digunakan dalam artikel ini yaitu spiritual karena spiritualitas merupakan puncak dari suatu kepercayaan terhadap agama. Spiritual menjadi jalan untuk mencapai spiritualitas. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mempertahankan dan mengembalikan keyakinan dalam spiritual keagamaan, serta untuk menjalin kedekatan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Menjalinkan kedekatan dengan Sang Maha Pencipta dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ritual keagamaan.

Perkembangan spiritual seseorang tidak selalu sama. Menurut Westerhooff's (dalam Hidayat dan Uliyah, 2014) menjelaskan ada empat tingkatan perkembangan spiritual berdasarkan kategori umur. Tingkat perkembangan spiritual yang pertama mulai pada usia anak-anak, pada tingkat ini keyakinan yang ada mungkin hanya meniru atau mengikuti ritual orang lain. Tingkat perkembangan spiritual yang kedua terletak pada usia remaja akhir, di mana pada masa ini seseorang sudah mulai pada keinginan akan pencapaian kebutuhan spiritual seperti keinginan atau berdoa kepada sang pencipta, yang berarti sudah mulai membutuhkan pertolongan melalui kepercayaan atau keyakinan. Tingkat perkembangan spiritual yang ketiga terletak pada usia awal dewasa, pada masa ini seseorang akan berfikir rasional dan kepercayaan atau kepercayaan terus dikaitkan dengan rasional. Tingkat perkembangan spiritual yang keempat terletak

pada usia pertengahan dewasa, tahap perkembangan ini biasanya diawali dengan semakin tingginya keyakinan diri yang dipertahankan meskipun menghadapi perbedaan keyakinan yang lain dan lebih mengetahui akan keyakinan dirinya.

Penjelasan tentang tingkatan perkembangan spiritual berdasarkan kategori umur tersebut menegaskan bahwa karakter spiritual seseorang juga berbeda-beda. Menurut Hamid (2009) terdapat empat karakteristik dari spiritual yaitu:

1. Hubungan diri sendiri

Seseorang yang memiliki spiritual yang baik mengetahui siapa dirinya, apa yang bisa dilakukannya, mempunyai sikap percaya pada diri sendiri, mempunyai ketenangan pikiran, percaya pada masa depan dan harmoni dengan diri sendiri.

2. Hubungan dengan alam harmonis

Kita dapat menilai tingkat spiritual seseorang dengan melihat hubungannya dengan alam. Seseorang akan mengetahui tentang iklim, margasatwa, pohon, tanaman, cara berkomunikasi dengan alam, cara melindungi alam dan cara mengabadikan alam apabila memiliki spiritual yang baik.

3. Hubungan dengan orang lain harmonis

Menciptakan hubungan harmonis dengan orang lain adalah karakteristik pada seseorang yang memiliki spiritual yang baik. Berbagai waktu pengetahuan dan sumber secara timbal balik dengan orang lain, mengasuh anak, mengasuh orang tua, mengasuh orang sakit, mengunjungi orang lain dan melayat ke rumah orang yang meninggal untuk meyakini kehidupan dan kematian adalah cara seseorang yang baik secara spiritual untuk menciptakan hubungan harmonis dengan orang lain.

4. Hubungan dengan ketuhanan

Melaksanakan kegiatan sembahyang dan berdoa dengan perlengkapan keagamaan, serta bersatu dengan alam adalah cara

berhubungan dengan Tuhan pada seseorang memiliki spiritual yang baik.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa karakter spiritual seseorang meliputi beberapa aspek yaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan alam, hubungan dengan orang lain (*hablum minannas*) dan hubungan dengan Sang Maha Pencipta (*Hablum minaallah*). Sehingga karakter spiritual lebih kompleks tidak hanya *hablum minannas* dan *hablum minallah* saja. Namun seseorang yang memiliki tingkat spiritual yang baik berarti mampu meningkatkan rasa percaya pada diri sendiri dan mampu merawat alam sekitar dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga dan merawat spiritual seseorang agar tetap berkembang dengan baik, maka dibutuhkan bimbingan spiritual.

### **Konsep Bimbingan Spiritual**

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami kondisi yang tidak normal. Ada dua tahapan yang perlu diperhatikan yakni potensi untuk melawan (*resisten*) terhadap kondisi dan tahapan komitmen untuk menerima kondisi dengan mengikuti aturan yang diberlakukan. Keduanya sangat dipengaruhi aspek spiritual seseorang karena banyak manusia yang mengalami disorientasi kehidupan. Manusia modern lebih berfikir tentang materi dan kedudukan yang telah dimiliki, bukan pada tujuan hidup yang hakiki. Spiritual hadir untuk menyeimbangkan antara tujuan hidup yang bersifat materi dengan tujuan hidup yang hakiki. Agar kondisi spiritual seseorang stabil, maka diperlukan bimbingan spiritual.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” yang kata dasarnya “*guide*” memiliki beberapa arti (a) menunjukkan jalan (*showing the way*), (b) memimpin (*leading*), (c) memberikan petunjuk (*giving instruction*), (d) mengatur (*regulating*), (e) mengarahkan (*governing*), dan (f) memberi nasehat (*giving advice*) (Tohirin, 2014). Pengertian bimbingan secara terminologi adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia dalam membantunya mengatur kegiatan

hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan memikul bebannya sendiri (Prayitno, 2004). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami secara umum bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan secara psikologis kepada seseorang atau kelompok orang yang memiliki permasalahan hidup.

Secara lebih spesifik, Winkel (2005) mendefinisikan bimbingan: pertama, usaha melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri. Kedua, cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya. Ketiga, sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan tempat mereka hidup. Keempat, proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan.

Bimbingan spiritual merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing secara teratur untuk membina dan mengarahkan seseorang atau sekelompok orang agar memiliki aqidah yang mantap, kepercayaan diri yang kuat, mampu merawat alam dengan baik, memiliki hubungan sosial yang baik sehingga dapat membina seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi permasalahan dan jauh dari rasa cemas. Bimbingan spiritual dapat dilaksanakan dengan cara mengajak orang agar taat beribadah agar ketaqwaan kepada Allah SWT semakin meningkat.

### **Bimbingan Spiritual Era New Normal**

Karena pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam kesehatan saja tapi mengancam perkembangan spiritual seseorang, maka perlu dilakukan muhasabah diri saat new normal ini. Manusia sebagai makhluk spiritual berkedudukan sebagai *abdullah* dan sebagai khalifatullah di muka bumi. Sebagai *abdullah*, manusia diharuskan untuk tunduk dan patuh hanya

kepada Allah SWT., mengandung arti bahwa keseluruhan jiwa dan aktifitas manusia haruslah sejalan dengan izin dan perintah Allah swt. Sebagai Khalifah Allah SWT, manusia diharapkan mampu untuk memimpin. Dalam hal ini, manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kepemimpinan dan fungsi kepribadian muslim.

Secara lebih detail, bagi yang mendapat amanah jadi pemimpin, ia harus menjalankan amanah Allah SWT dalam wujud merealisasikan hukum-hukum Allah SWT, menerapkan keadilan, kebenaran dan melindungi seluruh masyarakat dan wilayah yang dipimpinnnya. Fungsi kepribadian muslim mewajibkan seluruh muslim tak terkecuali untuk menjaga melestarikan dan mengembangkan kemakmuran di bumi sebagai hajat hidup bagi semua. Kealpaan menjalankan fungsi-fungsi tersebut berarti kealpaan dalam menunaikan amanah Allah SWT di atas bumi, yang sesungguhnya amanah tersebut adalah amanah terpokok yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam hidup manusia (Yusuf, 2016).

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk Allah SWT yang di samping memiliki sejumlah kekurangan, juga memiliki kelebihan. Manusia punya potensi berkembang dan membangun peradaban serta kebudayaannya, karena manusia dianugerahi akal. Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19 manusia dituntut untuk bermuhasabah diri sebagai hamba Allah SWT. Terutama di era new normal ini manusia harus mampu menciptakan peradaban dan kebudayaan baru. Sehingga spiritual merupakan aspek yang penting dalam menjalani era new normal. Menurut Hawari (2002), kebutuhan spiritual adalah harmonisasi dimensi kehidupan. Dimensi ini termasuk menemukan arti, tujuan, menderita, dan kematian, kebutuhan akan harapan dan keyakinan hidup, dan kebutuhan akan keyakinan pada diri sendiri, dan Tuhan.

Bimbingan spiritual dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek, dimensi spiritual manusia serta kebutuhan dasar spiritual. Spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut: berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian alam kehidupan; menemukan arti dan tujuan hidup; menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri; serta mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Maha Tinggi (Hamid, 2000). Sedangkan

berkaitan dengan dimensi sipirtual, Hawari menjelaskan spiritual sebagai suatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama, dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Penguasa. Spiritual sebagai konsep dua dimensi. Dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau Yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang, sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Terdapat hubungan yang terus menerus antara dua dimensi tersebut (Hawari,2002).

Setelah seseorang memahami tentang aspek dan dimensi sipirtual, selanjutnya adalah mengimplementasikan bimbingan spiritual berbasis kebutuhan. Dalam hal ini, perlu pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dasar spiritual manusia. Hal tersebut karena Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Terdapat 10 butir kebutuhan dasar spiritual manusia (Cineball dalam Hawari, 2002), yaitu:

1. Kebutuhan akan kepercayaan dasar (*basic trust*), kebutuhan ini secara terus menerus diulang guna membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini adalah ibadah.
2. Kebutuhan akan makna dan tujuan hidup, kebutuhan untuk menemukan makna hidup dalam membangun hubungan yang selaras dengan Tuhannya (vertikal) dan sesama manusia (horizontal) serta alam sekitarnya.
3. Kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan keseharian, pengalaman agama integratif antara ritual peribadatan dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kebutuhan akan pengisian keimanan dengan secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan, tujuannya agar keimanan seseorang tidak melemah.
5. Kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan dosa. Rasa bersalah dan berdosa ini merupakan beban mental bagi seseorang dan tidak baik bagi kesehatan jiwa seseorang. Kebutuhan ini mencakup dua hal

yaitu pertama secara vertikal adalah kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah, dan berdosa terhadap Tuhan. Kedua secara horizontal yaitu bebas dari rasa bersalah kepada orang lain.

6. Kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri (*self acceptance dan self esteem*), setiap orang ingin dihargai, diterima, dan diakui oleh lingkungannya.
7. Kebutuhan akan rasa aman, terjamin dan keselamatan terhadap harapan masa depan. Bagi orang beriman hidup ini ada dua tahap yaitu jangka pendek (hidup didunia) dan jangka panjang (hidup diakhirat). Hidup di dunia sifatnya sementara yang merupakan persiapan bagi kehidupan yang kekal diakhirat nanti.
8. Kebutuhan akan dicapainya derajat dan martabat yang makin tinggi sebagai pribadi yang utuh. Di hadapan Tuhan, derajat atau kedudukan manusia didasarkan pada tingkat keimanan seseorang. Apabila seseorang ingin agar derajatnya lebih tinggi di hadapan Tuhan maka dia senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanannya.
9. Kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama manusia. Manusia hidup saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, hubungan dengan orang disekitarnya senantiasa dijaga. Manusia juga tidak dapat dipisahkan lingkungan alamnya sebagai tempat hidupnya. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam ini.
10. Kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan nilai- nilai religius. Komunitas keagamaan diperlukan oleh seseorang dengan sering berkumpul dengan orang yang beriman akan mampu meningkatkan iman orang tersebut.

## **Kesimpulan**

Era new normal bisa memunculkan peradaban dan budaya baru. Dalam menjalani kehidupan di era new normal, pada dasarnya manusia membutuhkan aspek spiritual. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena kebutuhan spiritual adalah harmonisasi dimensi kehidupan. Namun, tidak semua manusia

memahami pentingnya spiritual dalam menjalani kehidupan di era new normal. Sehingga upaya bimbingan spiritual dalam menjalani kehidupan di era new normal perlu dilakukan. Karena manusia merupakan makhluk spiritual, maka bimbingan yang dilakukan harus fokus pada 3 hal yaitu aspek spiritual, dimensi spiritual dan kebutuhan dasar spiritual bagi manusia.

### **Daftar Pustaka**

- George, L.K., Ellison, C.G., & Larson, D.B. (2002). "Explaining the Relationship Between Religious Involvement and Health". dalam "*Psychological Inquiry*", Vol 13 : 190-196.
- Hamid, A. Y. (2009). *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta : EGC.
- Hamid, Achir Yani. (2000). *Buku Pedoman Askep Jiwa-1 Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Hawari, Dadang. (2002). *Dimensi Religi Dalam Praktek Psikiatri Dan Psikologi*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- Hendrawan, Sanerya. (2009). *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*. Bandung: Mizan.
- Husna, Maruti Asmaul. (2020). "Menguatkan Spiritualitas Keluarga Menghadapi Covid-19". diakses dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/05/05/menguatkan-spiritualitas-keluarga-menghadapi-covid-19> pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Nuraeni, Aan, dkk. (2015). "Kebutuhan Spiritual pada Pasien Kanker". *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*. Vol. 3, No. 2.
- Patricia A. Potter & Perry, Anne G. (2010). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan* Buku 3 Edisi 7. Jakarta : EGC.
- Prayitno, dkk. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridho, Muhammad Hafiz. (2018). "Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza". *Jurnal Studia Insania*, Vol. 6, No. 1.

- Sujana, Elva, dkk. (2017). "Kebutuhan Spiritual Keluarga dengan Anak Penderita Penyakit Kronis". *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, Vo. 3, No. 1.
- Syaifudin. (2020). "Negara, Masyarakat dan Era New Normal". Diakses dalam <https://kolom.tempo.co/read/1351996/negara-masyarakat-dan-era-new-normal>. Terbit pada 10 Juni 2020.
- Tohirin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet.ke-6.
- Winkel, WS. (2005). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Young, Caroline dan Cyndie Koopsen. (2011). *Spirituality, Health, and Healing: An Integrative Approach*, Sadbury: Jones and Bartlett Publishers.
- Yusuf, Burhanuddin, "Manusia dan Amanahnya Kajian Teologis Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Aqidah-Ta* UIN Alauddin Makassar, Vol. 11, No. 2, 2016.

# MANAJEMEN STRES PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mikhriani

## Pendahuluan

**K**ondisi pandemi seperti saat ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan melakukan hampir semua aktivitas kesehariannya dari rumah masing-masing, mulai dari belajar, mengajar, bekerja, kegiatan keagamaan dan lainnya. Merujuk pada kebijakan pemerintah pada tanggal 16 Maret 2020 dalam konferensi pers di Istana Bogor tentang kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)). Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan data penyebaran Covid-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan efek domino di masyarakat serta berdampak pada berbagai sektor perekonomian. Misalnya saja efek dari kebijakan pembatasan sosial memaksa setiap masyarakat untuk mengurangi segala macam aktivitas di luar rumah, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena kelaparan ([liputan6.com](http://liputan6.com)). Selain itu, dampak dari pembatasan pemerintah juga berdampak besar pada sektor perekonomian yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, melemahnya rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang minus

yang dapat berakibat pada resesi (finance.detik.com). Efek domino yang ditimbulkan dari pembatasan sosial sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui stimulus dan bantuan langsung untuk masyarakat yang terdampak (kurang mampu), tetapi faktanya tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Selain itu, pandemi Covid-19 yang berlangsung lama membuat sebagian masyarakat yang awalnya tidak stres menjadi stres karena biaya hidup dan beban hidup yang semakin berat. Stres sebenarnya dapat dikelola atau dimanajemen dengan baik dan tepat jika masyarakat mengetahui caranya.

### **Stres dalam Kajian Teoritis**

Penting untuk menjelaskan istilah dalam kajian ini, hal itu dimaksudkan agar kajian dapat dipahami secara sistematis. Istilah stres berasal dari bahasa Inggris *Stress*. Menurut Kamus Oxford stres diartikan sebagai *pressure or worry caused by the problems in somebody's life*, yang bermakna tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang (oxfordlearnersdictionaries.com). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stres diartikan sebagai gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan (kbbi.web.id).

Goliszek (2005) mendefinisikan stres sebagai suatu respon adaptif individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan meliputi: gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Sedangkan menurut Robbins (2001) menyatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai sesuatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Stres bisa didefinisikan sebagai reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan terhadap tekanan atau tuntutan yang sedang dihadapi. Stres dapat pula diartikan sebagai reaksi fisik yang dirasakan oleh individu tidak enak akibat dari persepsi yang kurang tepat terhadap sesuatu yang dianggapnya sebagai ancaman bagi keselamatan. Menurut Richard (2010) stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level

fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif (misalnya merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh : kematian keluarga). Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (stressful event) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Stres sebagai pengalaman emosional yang negatif yang disertai dengan perubahan-perubahan biokimia, fisik, kognitif, dan tingkah laku yang diarahkan untuk mengubah peristiwa stres tersebut atau mengakomodasikan dampak-dampaknya.

Stres merupakan suatu kondisi jiwa dan raga, fisik dan psikis seseorang yang tidak dapat berfungsi secara normal. Stress juga dapat terjadi setiap saat terhadap seseorang tanpa mengenal jenis kelamin. Selain itu, stres juga merupakan sesuatu yang menyangkut interaksi antara individu dan lingkungan, yaitu interaksi antara stimulasi respon. Sehingga dapat dikatakan stres merupakan konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik pada seseorang. Usia seseorang dalam rentangan juga bukan menjadi sebuah klasifikasi stres. Kedudukan dan jabatan turut menyumbang keberadaan stres dalam kehidupan seseorang. Dari berbagai definisi stres di atas dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang secara non-spesifik meliputi keadaan yang mengancam seseorang baik secara fisik maupun psikis. Dari sudut pandang psikologis stres dapat diartikan sebagai suatu keadaan internal yang disebabkan oleh kebutuhan psikologis tubuh atau disebabkan oleh situasi eksternal seperti keadaan lingkungan atau sosial yang berpotensi bahaya, memberikan tantangan, menimbulkan perubahan-perubahan atau memerlukan mekanisme pertahanan.

Stres adalah respons emosional seseorang yang disebabkan masalah eksternal atau ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam kadar tertentu, stres dibutuhkan untuk bisa siaga menghadapi ancaman permasalahan. Stres seperti ini disebut eustress atau stres yang normal. Namun, kalau stresnya berkepanjangan dan menimbulkan penderitaan akan berubah menjadi distress dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental, ini yang harus dihindari. Cemas salah satu reaksi kita terhadap stres tersebut. Bentuk reaksi kecemasan itu seperti kekhawatiran terhadap sesuatu yang berlebihan, pikiran negatif, dan terkadang pikiran yang tidak

masuk akal, tidak bisa rileks, sakit kepala, otot menjadi kaku, kepala pusing, dada berdebar, napas pendek, mual, buang air kecil menjadi lebih sering, diare, susah buang air besar, kewaspadaan meningkat, mudah terkejut, emosi tidak stabil, sensitif, susah tidur, dan sulit konsentrasi. Jika gejala-gejala ini berlangsung hampir sepanjang hari dan mulai menimbulkan gangguan pada aktivitas kita sehari-hari atau sudah ditemukan distress dan hendaya, sudah bisa disebut mengalami gangguan kecemasan dan perlu penanganan lebih lanjut untuk menemui profesional yang bergerak di bidang kesehatan jiwa.

Pada masa pandemi ini, banyak perubahan yang terjadi yang bisa juga menimbulkan gangguan penyesuaian jikalau kita tidak bisa beradaptasi. Pada gangguan penyesuaian, ditemukan keadaan-keadaan stres yang subyektif dan gangguan emosional yang biasanya mengganggu kinerja dan fungsi sosial. Gejala gangguan ini bervariasi mencakup afek depresi, cemas atau campuran keduanya. Gangguan penyesuaian ini biasanya terjadi satu bulan setelah terjadi peristiwa yang merupakan stres atau perubahan dalam hidup dan lamanya gejala tidak melebihi 6 bulan. Jika melebihi, diagnosis harus disesuaikan dengan kondisi klinis yang ada sekarang.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lama baik di Dunia maupun di Indonesia, memunculkan berbagai pemicu baru stres yang mungkin sebelumnya tidak banyak dialami oleh masyarakat, tetapi sekarang dialami oleh masyarakat, antara lain: stres akademik, stres kerja, dan stres dalam keluarga.

## **Ruang Lingkup Stres di Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Stres Akademik**

Akademik identik dengan dunia Pendidikan, yang dimaksud dengan akademik adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya sehingga hasilnya dapat diukur. Stres akademik adalah tekanan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian Stres akademik merupakan suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki

siswa sehingga mereka semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah.

Stres akademik adalah respons yang muncul karena terlalu banyaknya tuntutan dan tugas yang harus dikerjakan siswa/mahasiswa. Kondisi stres disebabkan adanya tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang semakin meningkat sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Stres akademik yang dialami siswa merupakan hasil persepsi yang subyektif terhadap adanya ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa.

Masalah yang dihadapi siswa/mahasiswa ada masa pandemi Covid-19 ini selain tuntutan-tuntutan yang dibebankan dengan model belajar mengajar secara daring. Proses belajar menggunakan media online lebih melelahkan dan membosankan, karena mereka tidak dapat berinteraksi langsung baik dengan guru maupun teman lainnya. Dengan demikian mengakibatkan frustrasi bagi siswa/mahasiswa, dan bila terus berlanjut dapat menimbulkan stres.

Stres akademik juga dialami oleh mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Tugastugas lapangan tidak dapat dilakukan secara langsung, membuat mahasiswa harus mengganti topik pembahasan, bahkan tidak sedikit yang menunda untuk menyelesaikan tugas akhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi keuangan yang dalam beberapa kasus bermasalah, yang menyebabkan mahasiswa harus mengambil cuti. Dampak yang terjadi akan mengakibatkan mahasiswa mengalami frustrasi dan stres.

## 2. Stres Kerja

Di masa pandemi Covid-19 diterapkan social distancing dan pekerja beraktivitas dari rumah (WFH). Semua kantor dan tempat usaha tutup. Pabrik-pabrik juga ikut tutup. Bagi pekerja yang dapat beraktivitas di rumah tidak menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi bagi pekerja di bidang jasa dan produksi yang mengharuskan di lokasi tempat kerja akan menimbulkan masalah. Tidak adanya kepastian kapan masa pandemi covid ini berakhir menimbulkan ketidakpastian bagi para pengusaha dan para pekerja. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK, karena mandeknya

kegiatan. Sementara yang terus melakukan usaha mengalami penurunan produktivitas. Inilah antara lain yang menimbulkan stres kerja di masa pandemi Covid-19. <https://www.liputan6.com/news> Secara teoretis, stres kerja menurut Beehr dan Franz (Bambang Tarupolo 2002:17) adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Menurut Pandji Anoraga (2001) stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Kondisi stres akan mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan tempat individu tersebut berada.

Apabila melihat kondisi yang ada, stres kerja pada masa pandemi covid ini disebabkan social distancing yang mengakibatkan aktivitas masyarakat berkurang. Dampaknya adalah menurunnya produktivitas. Pada sisi lain, bagi pekerja yang mulai menerapkan WFO (Work From Office) juga diliputi kecemasan yang menimbulkan stres tersendiri, khawatir terkena virus corona, karena beberapa berita menyebutkan munculnya klaster baru di perkantoran. Kondisi demikian terjadi antara lain adanya karyawan tidak disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan.

Manusia adalah makhluk sosial, yang biasa berinteraksi dengan orang lain akan mengalami ketidaknyamanan apabila harus terus menerus ada di rumah. Kondisi demikian apabila berlarut akan menimbulkan tekanan jiwa tersendiri. Pada sisi lain, Banyaknya berita terkait dengan pandemi Covid-19 yang sering tidak jelas sumbernya membuat pekerja semakin khawatir dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah, sementara kebutuhan hidup dan desakan ekonomi keluarga mengharuskan beraktivitas di luar rumah. Kondisi demikian akan menimbulkan konflik. Kecemasan berpadu dengan konflik akan memperparah tekanan jiwa seseorang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa ketidakpastian situasi, masalah ekonomi, gaji yang dipangkas, atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi faktor yang memicu terjadinya stres dalam kerja.

### 3. Stres dalam Keluarga

“Ibu Rumah Tangga Berpotensi Alami Stres Saat Pandemi Covid-19”, demikian berita yang ada di media online. ([ayosemarang.com/read/](http://ayosemarang.com/read/)). Kondisi demikian sangat mungkin terjadi mengingat budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat Indonesia. Mengurus rumah tangga adalah pekerjaan ibu rumah tangga, yang secara formal tertulis pada KTP seorang ibu rumah tangga.

Saat diterapkan WFH di masa pandemi Covid-19, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat berkumpul dalam rumah. Dengan demikian Ibu rumah tangga yang mendapatkan beban terbesar dalam melakukan pekerjaannya. Selain mengerjakan pekerjaan rutin mengurus rumah tangga, ibu juga harus mendampingi anaknya belajar di rumah, dan tidak jarang ibu rumah tangga mengambil peran sebagai guru bagi putra putrinya. Beban yang ditanggung oleh ibu rumah tangga tidak hanya double burden, akan tetapi bisa banyak beban yang ditanggungnya. Dapat dikatakan tiba-tiba semua urusan dibebankan kepada ibu rumah tangga. Inilah potensi yang dapat menyebabkan stres dalam keluarga.

Stres dalam keluarga bisa dialami oleh anak yang bosan dengan model pembelajaran secara online, tanpa dapat bermain dan berinteraksi dengan temannya. Demikian juga dengan suami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, menganggur di rumah, berdampak pada penurunan produktivitas dan pemasukan, dapat pula memicu stres dalam keluarga.

Dengan demikian, stres dalam keluarga merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami anak, stres kerja yang dialami orang tua (ayah atau ibu), diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis, semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Stres memang tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diminimalisir dengan bertindak positif. Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen stres yang komprehensif dan holistik.

## **Mengelola Stres di Masa Pandemi Covid-19**

Sebelum mengelola stres perlu diketahui terlebih dahulu gejala-gejala Stres pada masa Pandemi Covid-19. Di antara tanda-tandanya antara lain:

1. Memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional
2. Memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita
3. Mencari berita mengenai covid-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat dan dapat memunculkan kecemasan yang membuat seseorang mengalami sulit tidur
4. Sakit kepala, serta sakit fisik lainnya.

## **Beberapa Langkah dalam Mengelola Stres di Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Mengenali Penyebab Stres di Masa Pandemic Covid-19**

Di saat pandemi ini yang menjadi sumber stres (stresor) adalah berita mengenai Covid-19 dan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk bijak dalam membaca berita. Harus dari sumber yang valid karena sering kali berita hoax yang ada. Informasi yang ada harus dipilih dan dipilah. Mencari informasi dari sumber yang terpercaya, adalah salah satu solusi, tidak gampang percaya berita-berita yang mengakibatkan semakin cemas, khawatir dan gelisah. Karena mempercayai berita yang membuat kecemasan, kekhawatiran dan kegelisahan menjadi salah satu pemicu stres.

Dalam mengelola stres perlu diketahui faktor penyebab stres. Dalam buku Kesehatan Mental karya Prof Dr. Zakiah Daradjat (2003) disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan kondisi tidak stres seseorang, yaitu: frustrasi, konflik dan kecemasan.

#### **a) Frustrasi**

Yang dimaksud dengan frustrasi yaitu kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kondisi demikian sangat mungkin dialami oleh siswa/mahasiswa. Dalam kondisi pandemi Covid-19 semua serba terbatas. Hampir seluruh proses belajar mengajar dilakukan secara daring (online). Bagi siswa/mahasiswa

yang mempunyai fasilitas untuk dapat mengakses PBM secara online tidak ada masalah. Akan tetapi faktanya tidak seluruh wilayah di bumi Nusantara ini dapat mengakses fasilitas berbasis IT tersebut. Anak akan stres, karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Tidak ada alat komunikasi (HP) dan paket data atau jaringan internet yang bagus dapat menjadi penyebab tidak lancarnya proses belajar mengajar, sehingga harapan siswa/mahasiswa tidak sesuai dengan kenyataan.

Frustrasi bisa juga dialami oleh mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Kondisi Covid-19 mengharuskan social distancing, sehingga penelitian yang harusnya bisa dilakukan harus ditunda atau harus ganti topik penelitian.

Sosial distancing juga dapat memicu frustrasi para pekerja atau pengusaha. Harapan akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan, malah merugi. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi proses PHK, yang sangat mungkin akan menimbulkan frustrasi seseorang. Kondisi tersebut dapat terjadi dalam keluarga, sehingga memicu stres dalam keluarga.

b) Konflik

Adanya pertentangan antara dua kepentingan atau lebih dapat membuat orang mengalami kecemasan. Sebagai contoh bagi pekerja, apakah dia harus WFH atau WFO, keduanya bisa memunculkan konflik.

c) Kecemasan

Perpaduan antara konflik dan frustrasi dapat mengakibatkan kecemasan. Kondisi inilah yang ditemukan pada beberapa kasus pemicu stres. Sebagai contoh adanya deadline tugas yang harus diselesaikan membuat siswa/mahasiswa merasa tertekan dalam menghadapi kesehariannya yang akan berakibat timbulnya stres.

*The National Institute of Mental Health* (NIMH) menyebutkan beberapa hal yang pada umumnya menyebabkan stres di kalangan pelajar mahasiswa:

- a) Meningkatnya tuntutan akademik
- b) Sendiri dalam lingkungan yang baru

- c) Perubahan dalam hubungan keluarga
- d) Tanggung jawab keuangan
- e) Perubahan dalam kehidupan sosial
- f) Menghadapi orang asing, ide-ide dan cobaan yang baru
- g) Kesadaran akan identitas dan orientasi seksual
- h) Persiapan untuk kehidupan setelah wisuda

Menurut Robbins (2008) ada tiga kategori potensi pemicu stres kerja yaitu:

- a) Faktor-faktor Lingkungan

Selain mempengaruhi desain struktur sebuah perusahaan, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dalam perusahaan. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kondisi pandemi covid saat sekarang relevan bila disebutkan sebagai salah satu faktor penyebab stres. Perubahan lingkungan kerja yang biasanya WFO menjadi WFH, dan kemudian perpaduan antar keduanya menjadikan kerja tidak optimal yang terjadi.

- b) Ketidakpastian politik juga merupakan pemicu stres di antara karyawan.

Sebagaimana wawancara Najwa Shihab kepada Presiden Jokowi, memilih Kesehatan atau ekonomi. Kebijakan WFH yang ambil oleh pemerintah berisiko pada perkembangan ekonomi. Akan tetapi kesehatan yang buruk mengakibatkan orang tidak produktif dan membebani ekonomi, oleh karena faktor kesehatan yang diutamakan, meskipun bidang ekonomi tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

- c) Perubahan teknologi

Perubahan teknologi adalah faktor lingkungan ketiga yang dapat menyebabkan stres, karena inovasi-inovasi baru yang dapat membuat bentuk inovasi teknologi lain yang serupa merupakan ancaman bagi banyak orang dan membuat mereka stres. Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan yang bergerak di bidang IT mengalami perkembangan yang

sangat pesat,. Sementara para karyawan dituntut untuk lebih melek dan menguasai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

d) Faktor-faktor Perusahaan

Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Tuntutan peran adalah beban peran yang berlebihan dialami ketika karyawan diharapkan melakukan lebih banyak daripada waktu yang ada. Ambiguitas peran manakala ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Saat diterapkan WFH dan social distancing tuntutan peran dan beban peran dirasakan oleh karyawan/pekerja. Tuntutan antarpribadi yaitu tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, tidak adanya dukungan dari kolega dan hubungan antarpribadi yang buruk dapat menyebabkan stres.

e) Faktor-faktor Pribadi

Faktor-faktor pribadi ini terutama menyangkut masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Berbagai kesulitan dalam hidup berumah tangga, retaknya hubungan dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak merupakan masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan yang lalu terbawa sampai ke tempat kerja. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang adalah kendala pribadi lain yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja mereka. Masalah pribadi semakin rumit dimasa pandemi Covid-19, bahkan berdampak pada keretakan dalam rumah tangga. Sebagai contoh: selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan perceraian 5% di Kota Tangerang Selatan.(kompas TV, 2020)

Ada banyak sumber stres, dan untuk mengelola stres dengan baik, perlu memahami penyebab stres, sumber-sumber stres dan memahami akar masalahnya. Stres terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Pemicu stres biasa disebut dengan *stresor*. Meskipun beberapa kejadian dapat dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi stres seperti perceraian, bencana alam, meninggalnya sanak saudara, namun respons dan reaksi orang yang mengalaminya berbeda-beda sesuai dengan daya tahan dan kemampuannya dalam menghadapi stres. (Sumampouw & Mundzir: 2011)

a) Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah sumber-sumber stres di dalam diri seseorang, antara lain:

- 1) Kesakitan: tingkatan stres yang muncul tergantung pada keadaan rasa sakit dan umur individu.
- 2) Penilaian dari kekuatan motivasional yang melawan, bila seseorang mengalami konflik. Konflik merupakan sumber stres yang utama. Menurut teori Kurt Lewin, kekuatan motivasional yang melawan akan menyebabkan dua kecenderungan yang berlawanan, yaitu pendekatan dan penghindaran.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal antara lain sumber-sumber stres di dalam keluarga di antaryainteraksi di antara para anggota keluarga, seperti perselisihan dalam masalah keuangan, perasaan saling acuh tak acuh, hingga tujuan yang saling berbeda. Di samping itu, pengalaman stres orang tua bersumber dari pekerjaannya dan lingkungan yang sifatnya *stressful*.

- 1) Pekerjaan dan stres, hampir semua orang di dalam kehidupan mereka mengalami stres sehubungan dengan pekerjaan mereka. Faktor-faktor
- 2) Tuntutan pekerjaan dapat menimbulkan stres dalam 2 cara, yaitu pekerjaan terlalu banyak dan jenis pekerjaan itu sendiri sudah lebih *stressful* daripada jenis pekerjaan lain.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan yang menuntut tanggung jawab bagi kehidupan manusia. Contohnya, tenaga medis yang mempunyai beban kerja yang berat dan harus berhati-hati supaya tidak membuat kesalahan sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Menurut Sarafino, stres kerja dapat disebabkan karena lingkungan fisik yang terlalu menekan, kurangnya kontrol yang dirasakan, kurangnya hubungan interpersonal, hingga kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Sementara itu, Sutherland dan Cooper menyatakan bahwa sumber stres yang berasal dari interaksi lingkungan sosial dengan pekerjaan, meliputi stresor

yang ada di dalam pekerjaan itu sendiri, konflik peran, masalah dalam hubungan dengan orang lain, perkembangan karier, iklim dan struktur organisasi, hingga adanya konflik antara tuntutan kerja dengan tuntutan keluarga.

- 4) Stres yang berasal dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik, seperti: kebisingan, suhu yang terlalu panas, kesesakan, dan angin badai. Stresor lingkungan mencakup stresor secara makro, seperti migrasi, dan kerugian akibat teknologi modern seperti kecelakaan lalu lintas, bencana nuklir. Sementara pada masa pandemi Covid-19 lingkungan kerja yang sepi karena semua diberlakukan WFH memberikan nuansa yang berbeda, bukan tenang dengan kedamaian, akan tetapi sepi dengan kegelisahan.

## 2. Mengendalikan Stres

Tekanan yang dihadapi seseorang tidak hanya menimbulkan stres yang negatif (*distres*), akan tetapi bisa juga menjadi stres yang positif (*eustres*). Butuh pengendalian jiwa yang matang (dewasa) agar kondisi yang ada menjadi hal yang positif. Stres dapat dikonseptualisasikan dari berbagai macam sudut pandang, yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respons, dan stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungan.

### a) Stres sebagai 'stimulus'

Pendekatan ini menitikberatkan pada lingkungan dan menggambarkan stres sebagai suatu stimulus dengan keseluruhan perlawanan perilaku  *coping*  Kondisi pandemi Covid-19 menjadi stimulus seseorang mengalami stres. Akan tetapi tidak sedikit dijumpai kondisi tersebut sebagai titik awal yang mendorong untuk berpikir kritis, logis dan realistis, sehingga muncul ide-ide cemerlang dan menciptakan karya-karya inovasi.

### b) Stres sebagai 'respons'

Pendekatan ini memfokuskan pada reaksi seseorang terhadap stresor dan menggambarkan stres sebagai suatu respons (atau stres sebagai variabel tertentu). Kondisi pandemi covid ini direspons dengan positif oleh sebagian orang. Dalam dunia pendidikan, misalnya,

muncul sebagian model pembelajaran dengan menggunakan media online. Guru dan siswa “dipaksa” menjadi melek IT dan memanfaatkan media online untuk belajar.

c) Stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan.

Pendekatan ini menggambarkan stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan *strain* dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut sebagai hubungan transaksional. Di dalam proses hubungan ini termasuk juga proses penyesuaian. Kemampuan adaptasi menjadi prasyarat untuk bertahan di masa pandemi Covid-19. Daya tahan masyarakat Indonesia kuat, karena dibarengi dengan keyakinan agama yang kuat. Kondisi Covid-19 dapat dimaknai positif sebagai ujian dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Stres bukan hanya suatu stimulus atau sebuah respons saja, tetapi juga suatu proses di mana seseorang aktif mempengaruhi stresor melalui strategi-strategi perilaku, kognitif dan emosional. Di sinilah pentingnya mengelola stres, tidak menjadi distress akan tetapi menjadi eustres.

3. Mengatasi stres (*stres coping*)

Stres dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental dan emosi seseorang. Maka dari itu penting bagi setiap orang untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi stres. Dengan memahami teori dan konsep stres, seseorang dapat memiliki kuasa penuh dalam mengontrol diri dan emosinya sehingga ia dapat mengoptimalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. (In The Know:2014) Yang perlu ditekankan juga dalam mengatasi stres ialah bahwa kita tidak memiliki kendali terkait penyebab stres, tetapi kita mampu mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap stres tersebut. (U.S. Department of Veteran Affairs,; 2014)

Menurut Lazarus dan Folkman, *coping* stres merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan (baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi penuh tekanan. Secara umum, stres

dapat diatasi dengan melakukan transaksi dengan lingkungan di mana hubungan transaksi ini merupakan suatu proses yang dinamis. (Lazarus & Folkman:1984). Terdapat dua macam fungsi, *coping* stres, yaitu:

a) *Emotion-focused coping*

Digunakan untuk mengatur respons emosional terhadap stres. Pengaturan ini melalui perilaku individu, seperti penggunaan obat penenang, bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, melalui strategi kognitif. Bila individu tidak mampu mengubah kondisi yang *stressful*, individu akan cenderung untuk mengatur emosinya.

b) *Problem-focused coping*

Untuk mengurangi stresor, individu akan mengatasi dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini bila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi. Metode atau fungsi masalah ini lebih sering digunakan oleh orang dewasa.

Ada delapan strategi *coping* yang berbeda yang secara umum dikenal dalam psikologi, yaitu:

- 1) Konfrontasi
- 2) Mencari dukungan sosial
- 3) Merencanakan pemecahan masalah dikaitkan dengan *problem-focused coping*
- 4) Kontrol diri
- 5) Membuat jarak
- 6) Penilaian kembali secara positif
- 7) Menerima tanggung jawab, dan
- 8) Lari atau penghindaran.

Tidak ada satu metode pun yang dapat digunakan untuk semua situasi stres. Tidak ada strategi *coping* yang paling berhasil. Strategi *coping* yang paling efektif adalah strategi yang sesuai dengan jenis stres dan situasi. Keberhasilan *coping* lebih tergantung pada penggabungan strategi *coping*

yang sesuai dengan ciri masing-masing kejadian yang penuh stres, daripada mencoba menemukan satu strategi *coping* yang paling berhasil.

Penyesuaian yang sifatnya *problem solving* terhadap stres, merupakan jenis penyesuaian terhadap stres yang bersifat disadari, berupaya menghilangkan sumber stres, tidak tergesa-gesa atau lebih terarah, ada strategi tertentu, dan lebih efektif. Ini dapat dilakukan dengan memodifikasi diri agar lebih toleran terhadap stres atau memodifikasi situasi yang menimbulkan stres.

PMI menyebutkan 5 teknik manajemen stres dalam buku Panduan Manajemen Stres.

a) Mengetahui diri sendiri.

Mengetahui kekuatan, kelemahan, hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai dapat membantu kita memetakan ke arah mana kehidupan akan kita bawa. Dengan mengenal diri sendiri, akan lebih mudah untuk menentukan cara dan strategi apa yang tepat untuk meringankan stres.

b) Peduli diri sendiri.

Setelah mengetahui diri secara mendalam, maka kebutuhankebutuhan dan kewajiban juga akan tampak. Memenuhi kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang dihadapi. Peduli akan diri sendiri dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi dengan teman dan sanak saudara, merencanakan kegiatan yang realistis dan menjalani hobi.

c) Perhatikan keseimbangan.

Sebagaimana manusia yang dianugerahi beberapa aspek dalam dirinya, maka kelima aspek ini harus dipelihara dan dipenuhi secara seimbang. Lima aspek pemeliharaan diri ini adalah: Aspek Mental Emosional, Aspek Intelektual, Aspek Fisik, Aspek Spiritual dan Aspek Rekreasional

d) Bersikap proaktif

Bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres dengan merawat kelima aspek di atas dengan baik dan rutin agar menjadi sosok yang resilien dan memiliki kemampuan dan kekuatan lebih dalam menghadapi stres.

e) Sinergi

Langkah-langkah sebelumnya ialah satuan proses yang perlu dilakukan secara berurutan dan terpadu dengan kehendak dan kesadaran penuh untuk bangkit dari keterpurukan dan stres. (Palang Merah Indonesia: 2015)

WHO merumuskan strategi untuk menghadapi stres selama pandemi Covid-19:

- a) Merasa sedih, tertekan, bingung, takut dan marah adalah hal yang lumrah selama krisis terjadi. Berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercaya bisa membantu mengurangi rasa tertekan yang dialami.
- b) Selama pandemi ini, berdiam di rumah lebih dianjurkan untuk meminimalisir penyebaran virus dan kontak fisik dengan orang banyak. Menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur yang baik, olahraga dan berinteraksi dengan orang-orang yang disayang bisa dilakukan selama berdiam di rumah.
- c) Menghindari rokok, alkohol dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi.
- d) Mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat dan menghindari berita-berita yang tidak valid dan kredibel.
- e) Mengurangi kecemasan dengan membatasi media yang menyebarkan informasi yang membuat semakin cemas dan takut.
- f) Mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengatur emosi selama masa pandemi ini.

Setiap orang memiliki cara mengatasi stres yang berbeda-beda, cara ini perlahan berubah menjadi kebiasaan jika dilakukan terus menerus. Ada yang menghadapi stres dengan cara yang sehat, atau justru memperburuk keadaan dengan melakukan hal-hal di luar batas. Diana Ballesteros dan Janis Whitlock mengemukakan dua jenis cara mengatasi stres, yakni:

- a) Strategi yang baik dalam menghadapi stres: berolahraga secara rutin, memiliki alokasi waktu untuk beristirahat dan perawatan

diri, menyeimbangi antara bekerja dan bermain, membuat manajemen waktu dan meditasi.

- b) Strategi yang tidak baik dalam menghadapi stres: Mengonsumsi alkohol dan narkoba, melakukan kejahatan dan kriminal, menunda-nunda pekerjaan, menyakiti diri sendiri dan makan/minum berlebihan. (Ballesteros & Whitlock 4:2009)

Masyarakat Indonesia yang religius memandang Covid-19 sebagai ujian yang harus dilalui. Berpikir positif dengan selalu menjaga imunitas tubuh dan spiritualitas menjadi salah satu cara agar terhindar dari stres. Memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk beraktivitas secara positif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan menjadi solusi dalam menghadapi stres di masa pandemi Covid-19.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beragam respons terhadap kondisi pandemi Covid-19. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan WFH (Work From Home) dan Sosial Distancing. Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan orang harus menjalankan semua aktivitasnya di dalam rumah. Suasana sungguh mencekam, hiruk pikuk kehidupan manusia seakan mati, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Kondisi tersebut membuat sebagian orang mengalami stres.

Kondisi stres pada masa pandemi Covid-19 diklasifikasikan menjadi 3 stres, yaitu stres akademi, stres kerja dan stres dalam Keluarga. Stres yang ada harus dikelola dengan baik, agar tidak menjadi distress, akan tetapi bisa menjadi eustres. Sebagian stres yang muncul diakibatkan adanya berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, malah membuat kegelisahan dan ketakutan pada masyarakat. Oleh sebab itu perlu memilih dan memilah informasi dengan cermat dan baik.

Pemberlakuan WFH menyebabkan sebagian besar aktivitas dilakukan melalui online, tidak terkecuali proses belajar mengajar. Kondisi demikian menimbulkan kebosanan dan kejenuhan sehingga menimbulkan stres akademik. Akan tetapi sisi positif yang bisa diambil adalah memaksa guru/

dosen dan siswa/mahasiswa melek IT dan terbiasa memanfaatkan media online. Kondisi tersebut memunculkan ide-ide kreatif yang produktif. Kemampuan menyesuaikan diri dan menikmati kondisi yang ada akan mengalihkan stres dari *distres* menjadi *eustres*.

### **Daftar Pustaka**

- Anoraga, Panji, 2001. *Psikologi Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ballesteros, Diana & Janis Whitlock. 2009. *Coping Stres Management Strategies*. The Fact
- Bambang Tarupolo. 2002. *Warta Keseharan Kerja Media Komunikasi Kesehatan Kerja Edisi 2*
- Beehr, T.A., & Newman J.E. 1988. *Psychological Stres in the Workplace*, London: Routledge Dale, Yoder and Paul D Staudohar. 1982. *Personal Management and Industrial Relations*.
- Davis, Martha, Elizabeth Robbins Eshelman, Matthew M'Kay. 2008. *The Relaxation & Stres Reducation Workbook*, Oakland: New Harbinger Publications
- Goliszek, A. 2005. *60 Second Manajemen Stress*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu.
- Lazarus, RS, Folkman S. 1984. *Stres, Appraisals and Coping*. New York: Springer
- Muslim, Muhammad, Manajemen Stres Upaya Mengubah Kecemasan menjadi Sukses, *Journal Esensi*, Vol. 18 No. 2/2015
- Palang Merah Indonesia (PMI) Editor: Herry Prasetyo. 2015. *Panduan-Manajemen Stres*, Jakarta: PMI.
- Pandji Anoraga. 2001. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid I, Edisi 8, Prenhallindo Jakarta
- Robbins, Stephen P. Dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*. Jakarta: Salemba Empat
- Richard. (2010). *Coping with Stress In a Changing World*. New York: McGraw-Hill

- Sarafino, E.P. 1994. *Health Psychology Biopsychosocial Interaction*. USA: John Wiley & Sons.
- Sari, Puspita. 2014. "Strategi Manajemen Stres Kerja pada Karyawan Melalui Pendekatan Individual, Organisasional dan Dukungan Sosial," *Managemen Insight*, Vol. 9 no 1 2014, Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
- Sheet Series. Conell Research Program on Self-Injury and Recovery. Cornell University, Ithaca. NY Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey
- Sumampouw, Nathanael & Ibnu Mundzir. 2011. *Manajemen Stres Bagi Pekerja Kemanusiaan*, Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI
- Waluyo, Minto. 2013. *Psikologi Industri*. Jakarta: Akademia Permata
- Weinberg RS, Gould D. 2003. *Foundations of Sport & Exercise Psychology*. Champaign, IL: Human Kinetics
- Website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4353026/jakarta-kembali-psbb-phk-massal-tak-terbendung>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/19203191/satgas-angka-kematian-akibat-Covid-19-di-indonesia-masih-lampau-persentase>.
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/06/26/1256093/5.Jenis.Stres.yang.Perlu.Anda.Tahu>.
- <https://www.alodokter.com/stres>
- [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/stres\\_1?q=stres](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/stres_1?q=stres)
- <https://www.pelajaran.co.id/2018/17/pengertian-stres-akademik.html>.
- <https://psikologihore.com/definisi-stres-menurut-para-ahli/>

# PANDEMI COVID-19 DAN STRATEGI BAGI UMKM: PERSPEKTIF MARKETING DAN KEUANGAN (Studi Kasus UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Hikmah Endraswati

## Pendahuluan

Sektor UMKM berperan besar dalam menggerakkan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan sektor UMKM dalam menyerap 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. Selain itu, sektor UMKM mampu menyumbang 14,17% dari total ekspor dan 58,18% dari total investasi nasional (www.kompas.com, 2019). Berikut ini tabel perkembangan UMKM di Indonesia:

**Tabel 1 Perkembangan UMKM di Indonesia 2016-2019**

PERKEMBANGAN UMKM				
Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah	61,7 juta unit	62,9 juta unit	64,2 juta unit	64,2 juta unit

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM*

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat jumlah UMKM mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia ditunjang oleh keberadaan UMKM baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan pada PDB.

Situasi Pandemic Covid-19 pada akhir tahun 2019 telah memberikan dampak yang luar biasa pada ekonomi dunia. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* dan *World Food Programme (WFP)* pada bulan Mei 2020 pada 17 negara dengan 363 responden menyatakan bahwa 94% responden terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan penjualan sebesar 82%, kesulitan memperoleh input (49%) dan kesulitan membayar karyawan (44%) serta keterbatasan cadangan keuangan 42%. Sejumlah 84% dari responden telah mengubah volume produksinya (menurun) dan sejumlah 57% telah merubah harga produksinya (menjadi lebih rendah). Negara yang disurvei oleh GAIN dan WFP adalah Bangladesh, Kenya, Indonesia, Nigeria, Sri Lanka, Rwanda, Mozambique, Tanzania, Madagascar, Myanmar, Pakistan, Zambia, Malawi, Ethiopia, Lao PDR, Burundi dan Cambodia.

Kasus di Indonesia tidak jauh berbeda dengan hasil survey tersebut di atas. Menurut Farhanah (2020) dalam laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2020) ada 50% UMKM menutup usahanya selama masa pandemic Covid-19. Selanjutnya menurut LIPI (2020) ada 85,42% dari UMKM yang ada mampu bertahan selama satu tahun saja apabila pandemic Covid-19 tidak segera membaik. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian Koperasi dan UKM (2020) bahwa sejumlah 98% UMKM terkena dampak pandemic Covid-19 (Lestari, 2020).

Kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan kondisi umum secara nasional. Hasil survey Dinas Koperasi dan UKM di DIY menurut Ginting (2020) menyebutkan bahwa mayoritas sektor perdagangan dan industri pengolahan terdampak dengan adanya pandemic Covid-19. Pendapatan UMKM sejak Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 80%.

Milzam, Mahardika dan Amalia (2020) melakukan penelitian tentang pendapatan penjualan UKM sebelum dan sesudah Pandemi Corona-19 di Kota Pekalongan dengan sampel 282 pengusaha UKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan penjualan sebesar 53,5%. Berdasarkan sampel yang ada maka pengusaha UKM dengan sektor usaha fashion mengalami penurunan penjualan paling besar yaitu sejumlah

76%. Hal ini disebabkan oleh konsumen lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membeli kebutuhan yang lebih penting seperti makanan pokok dan kesehatan. Sektor selanjutnya yang terdampak adalah sektor makanan dengan penurunan penjualan sejumlah 65%. Hal ini terjadi karena konsumen lebih memilih mengkonsumsi makanan yang tahan lama daripada makanan cepat saji. Sementara itu untuk UKM dengan produk kerajinan dan penyedia jasa terjadi penurunan penjualan sejumlah 43%. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah tentang PSBB.

Pendapat dari Apresian (2020) tentang Covid-19 dan kondisi ekonomi di Indonesia diantaranya adalah kemampuan Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi selama pandemic tergantung pada sifat dasar masyarakat Indonesia sendiri yaitu sifat bergotong royong. Ketika pemerintah tidak mampu memberikan *supply* bantuan secara cepat maka masyarakat sekitar dapat membantu dengan sikap peduli dan gotong royong. Selain itu, kebijakan ekonomi atau strategi bisnis yang dilakukan di negara lain kemungkinan tidak cocok dengan situasi di Indonesia yang unik. Misalnya kebijakan di Inggris yang memberikan bantuan seperti memberikan 80% gajinya pada warganya yang terdampak Covid-19 tidak sesuai dengan Indonesia karena jumlah populasi di Indonesia yang jauh lebih banyak.

Hal senada diungkapkan oleh Shafi, Liu dan Ren (2020) yang melakukan penelitian tentang efek pandemi covid-19 pada UKM. Penelitiannya dilakukan pada 184 perusahaan SME di Pakistan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas responden terdampak dengan adanya pandemi covid-19 dan memiliki masalah pada keuangan, *supply chain*, penurunan permintaan, dan penurunan laba penjualan. Apabila *lockdown* dilakukan lebih dari 2 bulan, maka 2/3 dari SME tersebut tidak akan bisa bertahan lagi. Lebih dari 83% SME tidak memiliki rencana untuk menghadapi situasi seperti ini. Ganaie dan Zafar (2020) melaporkan hal yang sama bahwa di Pakistan terjadi penurunan produksi sejumlah 95%, sejumlah 23% kehilangan order ekspor, 92% kesulitan dalam *supply chain*, 8% sudah merumahkan karyawannya, dan 89% kesulitan keuangan. Responden yang digunakan dalam penelitiannya sejumlah 920 pengusaha UKM di Pakistan.

Penelitian yang dilakukan pada negara maju seperti Bartik, Bertrand, Culle, Glaeser, Luca dan Stanton (2020) melakukan survey pada 5800 SME di US tentang dampak pandemi covid-19 pada SME. Hasil survey menunjukkan bahwa 43% bisnis ditutup, pengurangan tenaga kerja sejumlah 39% dan penurunan yang lebih tajam terjadi di wilayah Mid Atlantic termasuk kota New York sejumlah 54% bisnis telah ditutup dan sejumlah 47% pekerja sudah dirumahkan. Dampak ini bervariasi pada jenis industri yang berbeda seperti retail, seni dan hiburan, jasa personal, makanan, *hospitality business* mengalami penurunan lebih dari 50% pada tenaga kerja. Sebaliknya untuk jasa keuangan, jasa profesional dan *real estate* memiliki kondisi yang sedikit lebih baik. Hal serupa dilaporkan oleh Juergensen, Guimon dan Narula (2020) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di Eropa dengan membagi efek pandemi Covid-19 menjadi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek, pandemi Covid-19 memberikan efek pada kesulitan *supply* kaitannya dengan logistik dan penurunan *demand*. Pada jangka panjang efek pandemi Covid-19 tergantung pada jenis SME-nya.

Penelitian tersebut di atas dikuatkan oleh survey *International Trade Centre* pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Negara-negara seperti di Africa terjadi penurunan penjualan sejumlah 76% dan kesulitan dalam mendapatkan input sejumlah 54%. Survey dilakukan pada 86 negara di dunia.

Selanjutnya *IOM UN Migration* pada tahun 2020 melaporkan pula bahwa di Iraq terjadi penurunan produksi sampai Bulan April 2020 sejumlah 52%, pengurangan rata-rata penjualan sejumlah 71%, pengurangan tenaga kerja sejumlah 40%, pengurangan gaji karyawan sejumlah 36% dan kerugian pendapatan sampai Bulan Juni 2020 sejumlah 18540 dollar US. Industri yang terpengaruh di Iraq adalah konstruksi dan produksi sejumlah 30%, makanan dan pertanian 28%, jasa 18%, dan retail 24%.

Menurut Cumbie (2017) dalam *Carolina Small Business Fund* (2020) menyebutkan bahwa tantangan bagi SME untuk pemulihan jangka pendek dan jangka panjang adalah kurangnya sumber keuangan. Farrel dan Wheat (2016) menyebutkan bahwa kurang dari separuh perusahaan hanya memiliki uang kas sebesar satu bulan sebelum mereka akhirnya

mengurangi tenaga kerjanya dan mengurangi biayanya. Di samping adanya kebutuhan pada cadangan kas, beberapa variabel kunci lainnya untuk memprediksi kemungkinan pemulihan adalah (Runyan 2006; Webb, Tierney, and Dahlhamer 2002; Xiao and Nilawar 2013) dalam Carolina Small Business Fund (2020):

**Tabel 2 Variabel Kunci Prediktor *Recovery***

Terkait dengan Tingginya Peluang <i>Recovery</i>	Terkait dengan Rendahnya Peluang <i>Recovery</i>
Akses tepat waktu ke pembiayaan yang terjangkau	Sensitif terhadap gangguan arus kas
Kondisi keuangan yang baik sebelum pandemic	Bisnis yang orientasinya retail dan jasa
Meminimalkan penutupan bisnis	Sebelumnya pernah terkena bencana
Dukungan dari komunitas institusi	Konsumen utamanya adalah lokal

Watkins et al. (2007) dalam Turner dan Akinremi (2020) melakukan penelitian tentang asosiasi persepsi individu dan kesiapan dalam menghadapi pandemic influenza pada pemilik dan manajer usaha kecil dan menengah di Australia. Data diperoleh dari 201 wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan *semi-structured* dan selanjutnya menggunakan analisis regresi logistik binomial untuk mengidentifikasi prediktor pertimbangan pengaruh, kesiapan perencanaan, dan kebutuhan adanya bantuan untuk menghadapi pandemic. Sejumlah 6% dari usaha kecil dan menengah melaporkan bahwa mereka memiliki perencanaan dalam menghadapi pandemic influenza, 39% melaporkan bahwa mereka tidak berpikir pandemic akan mempengaruhi bisnisnya, dan lebih dari 60% menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam menghadapi pandemic. Hasil temuan tersebut menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah di Australia tidak siap dalam menghadapi pandemi, dan kepercayaan pada risiko dan kemampuan untuk merespon secara efektif pada tantangan pandemic merupakan prediktor penting dari kesiapan. Hasil temuan ini didukung oleh Watkins et al (2008) dalam Turner dan Akinremi (2020) yang menyatakan bahwa persiapan dan rencana menghadapi pandemic bagi SME dihambat oleh persepsi bahwa risiko seperti itu rendah, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi respon yang

efektif selama pandemic dan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mempersiapkan planning. (ERC, 2020)

Tulisan ini selanjutnya memberikan kontribusi dengan memberikan solusi alternatif bagi UMKM di Indonesia supaya dapat bertahan pada saat pandemi Covid-19 melalui strategi di bidang marketing dan keuangan. Perbedaan artikel ini dengan artikel sejenis adalah adanya hasil survey yang dilakukan untuk UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Definisi UMKM

Pengertian UMKM berdasarkan UU No 20 Tahun 2008, mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

**Tabel 3 Pengelompokan UMKM berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 adalah:**

No	Usaha	Aset	Omset
1	Mikro	Maks Rp 50 jt	Maks Rp 300 juta
2	Kecil	Rp 50 jt - Rp500 jt	Rp 300jt-Rp2,5 M
3	Menengah	Rp 500 jt - Rp10 M	Rp 2,5M -Rp50 M

*Sumber: UU No 20 Tahun 2008*

## Karakteristik UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4 Karakteristik UMKM di Indonesia**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
1. Tahan banting	1. Informal
2. Fleksibel	2. Modal usaha yang minimal
3. Mandiri	3. Pendidikan dan keahlian terbatas
4. Dikerjakan seluruh keluarga	

*Sumber: diolah dari beberapa sumber jurnal*

Karakteristik yang dimiliki oleh UMKM tersebut memunculkan permasalahan sebagai berikut:

a. Skala usaha yang rendah

UKM masih memiliki modal yang terbatas sehingga usahanya sulit untuk berkembang dan sulit mencapai skala ekonomi yang efisien.

b. Belum tahu caranya berbisnis

Karena rata-rata pengusaha UMKM memiliki pendidikan yang rendah sehingga belum tahu bagaimana caranya melakukan bisnis.

c. Kurang inovasi produk

Produk yang dihasilkan oleh UMKM kurang inovasi produk dan tidak mengikuti selera pasar yang ada. UMKM terkadang hanya mengikuti apa yang sudah ada di pasaran namun ide kreatifnya masih terbatas.

d. Kesulitan dalam distribusi barang

Setelah sebuah produk dibuat selanjutnya produk tersebut didistribusikan ke pasar. Ada beberapa chanel distribusi yaitu ke pedagang besar dan pedagang ecer atau langsung ke pedagang ecer (retail). Rata-rata UMKM belum memiliki jaringan yang luas sehingga masih kesulitan dalam mendistribusikan barangnya.

- e. Belum memaksimalkan pemasaran *online*  
Pemasaran yang biasanya dilakukan oleh UMKM adalah pemasaran manual yang hanya diketahui orang di sekelilingnya saja atau lingkungannya saja sehingga konsumen menjadi terbatas.
- f. Tidak adanya *branding*  
Usaha UMKM biasanya belum memiliki *brand* sehingga sulit dikenal. *Brand* diperlukan supaya konsumen dan pelanggan mudah dalam mengingat produk UMKM tersebut. Hal ini juga memudahkan dalam melakukan pemasaran.
- g. Tidak memiliki program loyalitas pelanggan  
Rata-rata usaha UMKM dikelola dengan program *marketing* yang masih sederhana sehingga belum mengenal program untuk loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan dengan memberikan diskon khusus bagi member, tambahan fitur pelayanan yang akan menambah kepuasan pelanggan dan produk *gimmick* atau souvenir bagi pelanggan yang loyal biasanya diberikan oleh perusahaan besar pada pelanggannya.
- h. Pembukuan dilakukan manual  
Pengusaha UMKM rata-rata hanya memiliki pembukuan manual dan belum terkomputerisasi. Sebagian pengusaha UMKM lainnya belum melakukan pembukuan sama sekali, sehingga keuangan usaha bercampur dengan keuangan rumah tangga atau keluarga.
- i. Tidak memiliki mentor  
Kebanyakan usaha UMKM tidak memiliki mentor bagaimana seharusnya atau sebaiknya yang dilakukan supaya bisnisnya bisa berkembang. Hal ini berkaitan pula dengan jaringan pertemanan dan modal yang dimiliki.
- j. Tidak memiliki izin resmi  
Mayoritas UMKM merupakan usaha rumah tangga sehingga banyak sekali usaha yang belum memiliki perizinan yang memadai.

- k. Belum memiliki rencana strategi yang akan dilakukan  
Rata-rata pengusaha UMKM memiliki pendidikan yang tidak tinggi dan belum memiliki visi ke depan usahanya akan dibawa ke mana. Dengan demikian pemahaman akan strategi bisnis menjadi kurang.

### Teori

Teori yang digunakan untuk membahas UMKM di sini adalah teori manajemen strategi dengan menggunakan analisis SWOT dalam menentukan strategi yang digunakan. Analisis SWOT ini dengan mempertimbangkan analisis eksternal yaitu melihat peluang dan ancaman serta analisis internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan analisis SWOT maka selanjutnya adalah menyesuaikan faktor eksternal dengan faktor internalnya untuk menentukan strategi yang digunakan dengan memasukkan dalam matriks TOWS.



	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (W)</b>
<b>Opportunities (O)</b>	Strategi – SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi – WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<b>Threat (T)</b>	Strategi – ST Gunakan kekuatan untuk hindari ancaman	Strategi – WT Minimalikan kelemahan dan hindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2016)

Strategi *Strength-Opportunity* (SO) merupakan strategi yang menggunakan semua kekuatan atau sesuatu hal yang positif yang dimiliki perusahaan untuk mencari peluang yang ada. Strategi SO ini bersifat agresif (*expansion*) ditandai dengan adanya *market penetration, market development, product development, integration, merger, acquisition, joint venture*, dan *strategic business alliance*. Contohnya adalah beberapa hotel di negara lain karena sepi pengunjung mengubah segmennya menjadi hotel untuk isolasi penderita Covid-19.

Strategi *Weakness-Opportunity* (WO) merupakan strategi untuk menutupi kekurangan yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO bersifat *stability*, yaitu strategi yang bertujuan untuk menyeimbangkan situasi dan kondisi di organisasinya yang ditandai dengan adanya *market penetration, market development*, dan *product development*. Contohnya adalah munculnya trend konsumsi minuman berempah yang dulu identik dengan selera tua dan non milineal sekarang menjadi trend minuman kesehatan pencegah virus Covid-19 baik untuk kalangan tua maupun muda.

Strategi *Strength-Threat* (ST) merupakan strategi yang bertumpu pada kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi untuk mengurangi ancaman yang datang dari luar. Penggunaan strategi ST bersifat *combination* dengan melakukan diversifikasi produk yang dihasilkan. Contohnya adalah perusahaan transportasi Grab menggunakan pengaman bagi penumpangnya berupa sekat di motor dan mobil sehingga penumpang

merasa aman dengan pengemudi. Ancaman dalam hal ini adalah factor eksternal berupa virus Covid-19.

Strategi *Weakness-Threat* (WT) merupakan strategi bersifat *defensive*, dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman. Misalnya usaha makanan waralaba dan *coffee shop*.

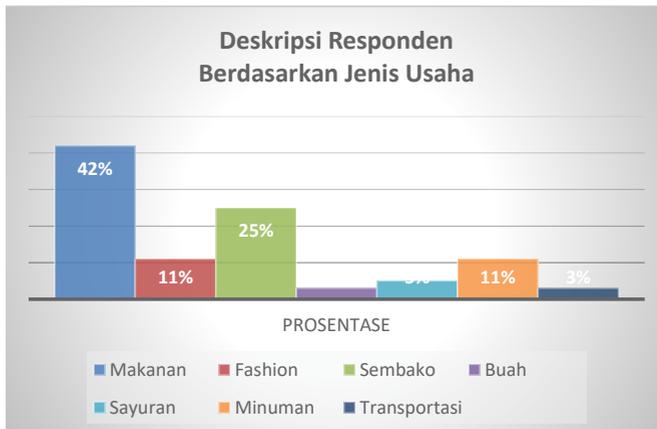
### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan survey dengan kuesioner yang dibagikan dalam bentuk *google form* kepada UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan pada Bulan Agustus-September 2020 secara acak. Jumlah sampel yang digunakan dalam survey ini 150 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

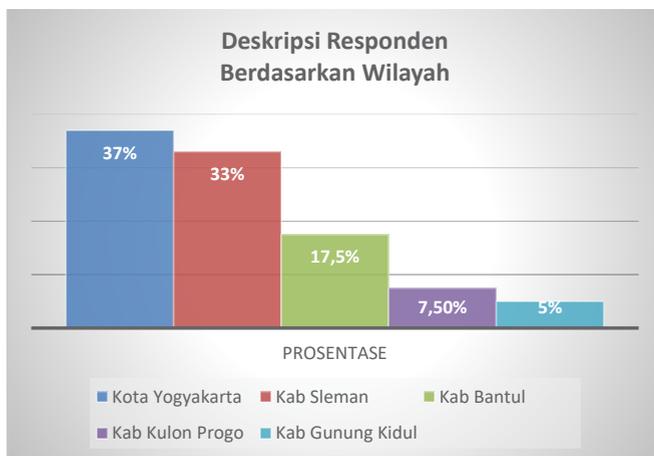
Survey pada UMKM ini dimaksudkan untuk mengetahui deksripsi responden (jenis usaha, wilayah, omset per bulan, jenjang pendidikan, jenis kelamin), dampak pandemic Covid-19 pada usahanya (omset per bulan, tenaga kerja) serta apa yang mereka butuhkan selama masa pandemic Covid-19.

#### **1. Analisis Hasil Survey UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada pelaku UMKM di DIY maka didapatkan deskripsi responden menurut jenis usaha, wilayah, jenis kelamin, jenjang pendidikan dan omset bersih. Menurut jenis usahanya, responden yang mengikuti survey mayoritas memiliki jenis usaha makanan (42%) dan selanjutnya pedagang sembako (25%). Jenis usaha makanan yang dimaksud di sini termasuk warung makan, reseller *frozen food*, snack dan *catering* serta penjual oleh-oleh makanan.

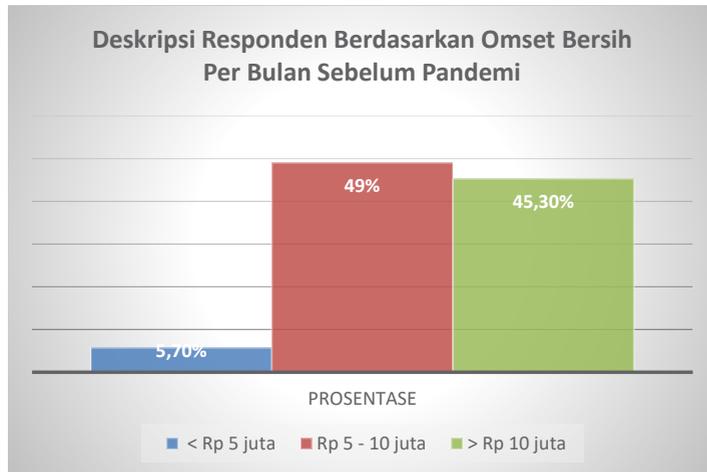


**Gambar 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha**



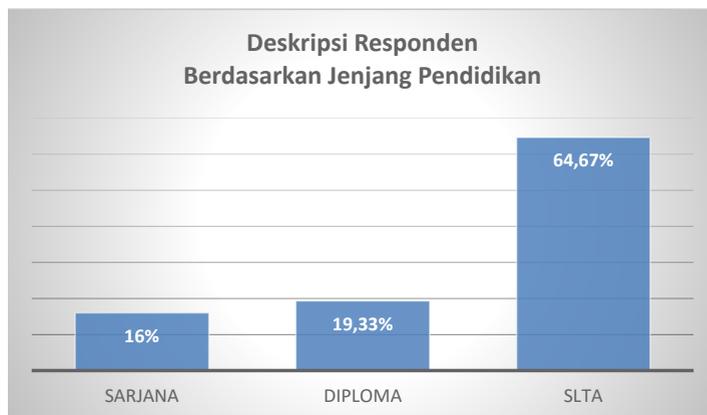
**Gambar 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Wilayah**

Berdasarkan Gambar 2 tersebut di atas diketahui bahwa responden mayoritas berdomisili di Kota Yogyakarta sejumlah 37%, selanjutnya Kabupaten Sleman sejumlah 33%, Kabupaten Bantul sejumlah 17.5%, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 7.5% dan yang terakhir Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 5%.



**Gambar 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Omset Bersih Per Bulan Sebelum Pandemi**

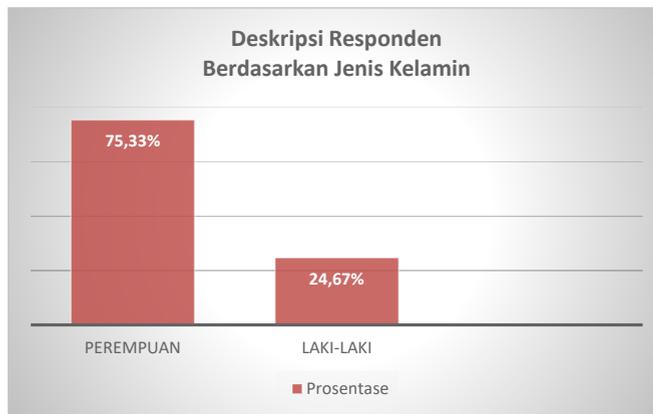
Berdasarkan Gambar 3 tersebut di atas mayoritas responden memiliki omset bersih per bulan sebelum pandemic Covid-19 antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- sejumlah 49% dan diikuti oleh omset di atas Rp. 10.000.000,- sejumlah 45.3% dan sisanya sejumlah 5.7% merupakan responden dengan omset bersih sejumlah kurang dari Rp. 5.000.000,-



**Gambar 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

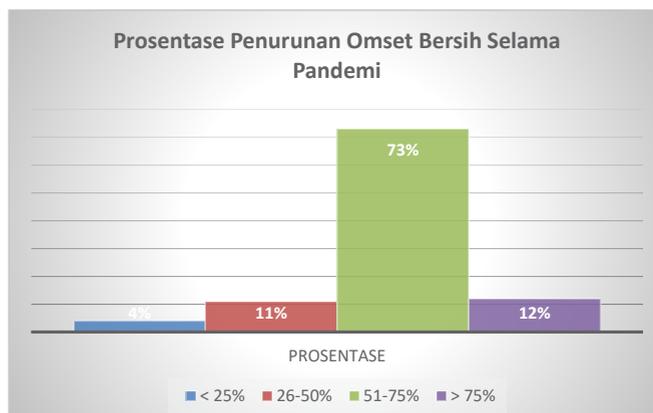
Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas mayoritas responden memiliki Pendidikan SLTA sejumlah 64.67% diikuti oleh responden dengan pendidikan jenjang diploma dan yang terakhir sarjana dengan jumlah

16%. Dengan melihat data ini maka pengusaha UMKM perlu diperkuat keahliannya untuk menopang pendidikan yang masih kurang misalnya dengan pelatihan.



**Gambar 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan Gambar 5 tersebut di atas mayoritas responden adalah perempuan sejumlah 75.33% dan sisanya merupakan responden laki-laki dengan jumlah 24.67%. Berdasarkan survey ini pula diketahui bahwa rata-rata pekerjaan sebagai pengusaha UMKM merupakan pekerjaan sampingan sebagai ibu rumah tangga atau pekerjaan kedua untuk menambah penghasilan utama. Setelah terjadinya pandemic Covid-19, maka pekerjaan ini sebagian beralih menjadi sumber penghasilan utama.



**Gambar 6 Prosentase Penurunan Omset Bersih Selama Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Gambar 6 tersebut di atas mayoritas responden menurun omset bersih selama pandemic Covid-19 sebesar 73% pada kisaran penurunan 51%-75%. Selanjutnya 12% dari responden melaporkan bahwa terjadi penurunan omset bersih sebesar > 75%. Penurunan omset bersih sejumlah 26%-50% terjadi pada 11% responden dan 4% responden mengalami penurunan < 25%. Penurunan omset terjadi karena rendahnya permintaan yang disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu dengan adanya pandemic Covid-19 pengusaha makanan mengalami penurunan omset karena mayoritas mahasiswa yang ada di Yogyakarta pulang ke daerah asalnya.

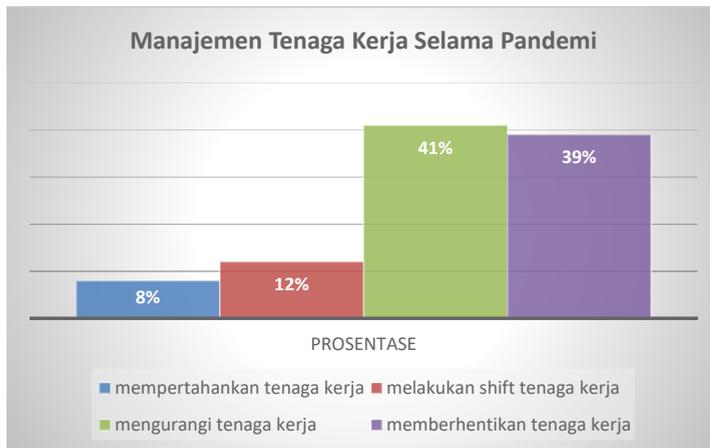


Gambar 7 Welcome to the New Normal: Enter the Survival Mode

Sumber: [mondayreview.com](http://mondayreview.com)

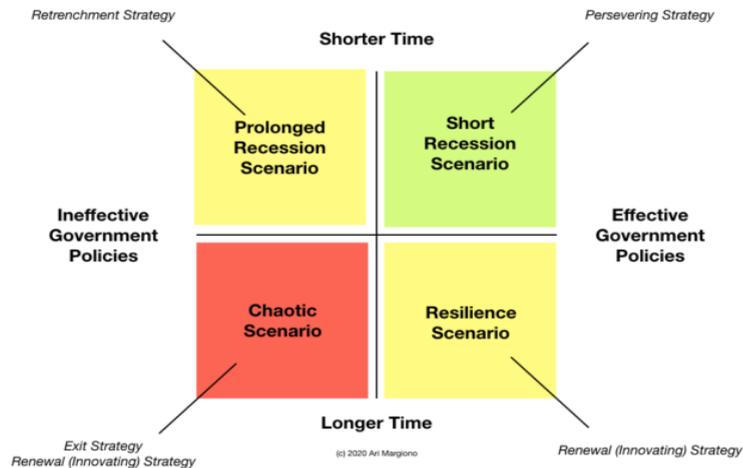
Pada saat sekarang, kita sedang berada pada tahapan *survival mode* dari pandemic Corona-19. *Survival mode* menurut artikel *survival tactics during COVID-19 crisis* yang ada dalam [www.mondayreview.com](http://www.mondayreview.com) (2020) adalah masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari yang diperlukan dengan tetap melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya sampai obat virus ditemukan. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah kemampuan

beradaptasi dengan situasi yang ada. Pada gambar tersebut di atas penjualan mengalami penurunan yang signifikan dan akan kembali bergerak naik saat *recovery and growth mode*.



**Gambar 8 Manajemen Tenaga Kerja Selama Pandemi Covid-19**

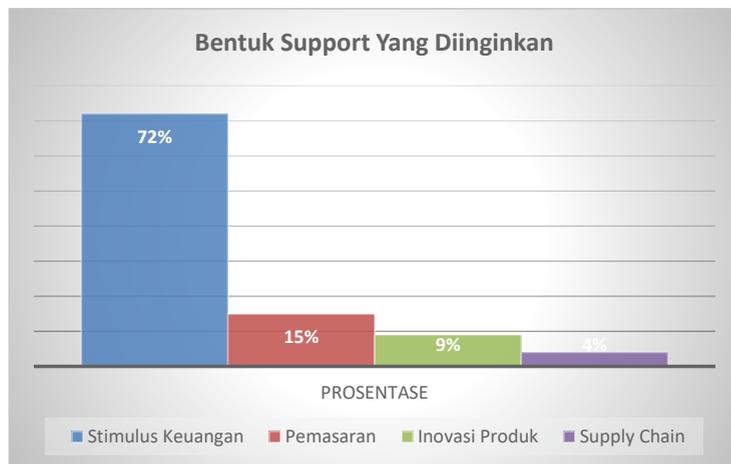
Berdasarkan Gambar 8 tersebut di atas dapat diketahui bahwa UMKM yang mempekerjakan karyawan selama masa pandemic Covid-19 telah mengurangi tenaga kerjanya. Hal ini dilaporkan oleh 41% responden yang ada. Selanjutnya sejumlah 39% responden menyatakan telah memberhentikan karyawannya. Hal lain yang dilaporkan oleh responden adalah mereka telah melakukan shift (pengurangan jam kerja dan hari kerja) bagi karyawan dan Sebagian kecil saja yaitu 8% yang berusaha mempertahankan karyawannya. Apa yang sudah dilakukan pengusaha UMKM sesuai dengan Margiono (2020) yaitu berada pada fase kedua *prolonged recession scenario*, dimana perusahaan banyak melakukan *downsizing* (pengurangan tenaga kerja).



**Gambar 9 Skenario dan Strategi Bisnis**

*Sumber: Margiono (2020)*

*Prolonged recession scenario* adalah masa di mana tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak efektif dan penanganan masalah ekonomi dan politik berjalan lambat. Dengan kondisi seperti itu, pengusaha mungkin perlu untuk mengadopsi *retrenchment strategy*. Strategi ini meminta pengusaha untuk melakukan pengurangan biaya dan *downsizing* usahanya. Strategi ini akan membantu pengusaha bertahan sampai situasi normal kembali.



**Gambar 10 Bentuk Support yang Diinginkan UMKM**

Berdasarkan Gambar 10 tersebut di atas mayoritas responden yaitu 72% menginginkan adanya stimulus keuangan baik berupa dana tunai (hibah) maupun pinjaman lunak. Sejumlah 15% dari responden selanjutnya menginginkan bantuan pemasaran produknya dan selebihnya menginginkan bantuan untuk dapat melakukan inovasi pada produk dan bantuan kelancaran pasokan bahan (input mentah).

Solusi alternatif dari perspektif marketing yang dapat ditawarkan bagi UMKM selama masa pandemic Covid-19 adalah:

1. Mental pengusaha tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada  
Pada kondisi pandemic covid-19 dibutuhkan pengusaha dengan mental tidak mudah menyerah, terbuka menerima kritik dan saran, tidak mudah merasa malu dan gengsi dan siap menerima perubahan (tantangan). Misalnya untuk jasa hotel karena sepi pengunjung dan wisatawan, maka pengusaha hotel dapat beralih pada *hotel for isolation pandemic covid-19*.
2. Pengusaha wajib memiliki *business plan* (perencanaan usaha)  
Pengusaha memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang pada bisnis yang digelutinya. Misalnya rencana jangka pendek mempertahankan pelanggan dengan berbagai program promosi seperti *membership pricing* dan pembelian paket (*bundle*) dan mengubah ukuran produk dan kemasan. Untuk rencana jangka panjang dengan melakukan inovasi produk misalnya menambah jenis produk, menambah jenis rasa produk dan melakukan ekspansi usaha.
3. Pengusaha terus melakukan inovasi secara berkelanjutan dan berkreasi pada level produk, usaha, dan jasa dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Misalnya produk makanan bakpia melakukan inovasi dengan rasa dan ukuran serta kemasan. Pemerintah dapat mensosialisasikan bahwa pandemic ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan bisnis UMKM. Jaringan yang ada dapat membantu pemilik UMKM untuk mengambil langkah perlindungan selama pandemic. Keberlanjutan suatu bisnis menjadi sangat penting. Dengan melakukan diversifikasi *platforms* bisnis, sebagai contoh *platforms* berbasis online dan penyedia jasa virtual dapat membantu selama masa karantina dan

pelarangan bepergian. Selain itu, bantuan finansial yang dilakukan melalui kebijakan dan bimbingan teknis akan membantu UMKM merestrukturisasi operasi bisnisnya dan agar terus dapat beroperasi (Turner dan Akinremi, 2020).

4. Pengusaha peka dan mampu membaca situasi pasar

Pengusaha diharapkan dapat membaca situasi pasar seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar pada masa pandemic covid-19 misalnya untuk usaha kuliner yaitu makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh.

5. Pengusaha menjaga hubungan yang baik dan memiliki timbal balik yang baik dengan *vendor*, distributor dan *supplier*.

6. Pengusaha melakukan pemasaran *online*

Pemasaran *online* atau *digital* dibutuhkan untuk mencapai tujuan usaha dan kemampuan bersaing dengan pebisnis yang lain. Keunggulan kompetitif ini dikaitkan dengan pluralitas, diversitas budaya dan motivasi sosial (Fitriasari, 2020). Pemasaran secara online dapat menggunakan berbagai media sosial dan *platform* bisnis yang ada. Hal ini termasuk dalam karakter utama dalam kondisi new normal yaitu pada aspek digital. Pada saat setelah terjadi pandemic covid-19, telah terjadi pergeseran ekonomi pada *digital platform* seperti terjadinya *e-commerce*, *teleconference*, *teleworking*, *remote learning*, *online health services* dan *digital payment*. Selanjutnya dengan berjalannya waktu, *digital platform* sudah bukan merupakan suatu pilihan namun menjadi suatu kebutuhan. Karena itu *technical assistance*, pengembangan keahlian dan dukungan infrastruktur sangat diperlukan (ITC, 2020).

7. Pengusaha melakukan kolaborasi dengan pihak lain

Pengusaha UMKM melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain seperti dengan konsumen, distributor, pemasok bahan, pemerintah dan masyarakat secara umum. Misalnya dengan membuka peluang untuk menjadi *reseller* dan membuat kerjasama dengan instansi untuk mendukung permintaan produk.

8. Menggunakan konten online pada saat pemasaran online  
Konten online yang dimaksud misalnya UMKM memiliki usaha makanan, maka pengusaha dapat membuat konten tentang makanan yang sehat pada masa pandemic covid-19.
9. Menggunakan kata kunci (*keyword*) yang disukai konsumen  
Kata kunci yang dimaksud adalah kata kunci pencarian yang sedang trend di kalangan social media. Kata kunci itu dimasukkan dalam produk sehingga ketika search akan ikut ditampilkan.
10. Menunjukkan keamanan produk pada saat pemasaran  
Pada saat pandemic seperti ini penting bagi pengusaha untuk meyakinkan pada konsumennya bahwa produk yang dihasilkannya aman dari virus corona-19. Misalnya dengan menunjukkan video atau foto pengemasan produk dan higienitas pengolahan produk. Dengan adanya edukasi seperti itu, maka konsumen menjadi tidak memiliki keraguan pada produk yang dihasilkan.
11. Memberikan support pada konsumen  
Pengusaha tidak hanya memikirkan tentang keuntungan penjualan, namun juga dapat memberikan kontribusi bantuan pada konsumen yang membutuhkan. Misalnya dengan memberikan secangkir minuman rempah-rempah bagi setiap konsumen yang melakukan pembelian produk makanannya.
12. Memiliki target pada pelanggan yang loyal  
Pengusaha memiliki data yang akurat kaitannya dengan pelanggan yang setia. Hal ini dapat digunakan untuk reminding produk dan memberikan diskon atau produk promosi lainnya.
13. Penjualan produk dengan menggunakan program *bundle* atau paket pembelian  
Beberapa produk dapat dijual dengan program paket seperti *make up*, mainan, buku, *consumer goods product*, dan makanan.

14. Menetapkan harga produk dengan menggunakan *membership pricing*  
Konsumen yang merupakan pelanggan setia dapat memperoleh kartu membership sehingga memiliki harga khusus yang lebih murah.

Keuntungan program pemasaran tersebut adalah:

1. Mengurangi biaya

Pemasaran online lebih hemat jika dibandingkan dengan pemasaran melalui media televisi, radio, koran maupun cetak flyer. Sebagai contoh, televisi nasional TRANS TV menetapkan tarif iklan yang dipasang di acara-acara prime time (jam utama di atas pukul 17.00 WIB) berkisar di antara Rp 30 juta hingga Rp 45 juta per 30 detik. Tarif iklan di radio untuk yang spot berkisar antara Rp. 875.000 - 250.000,- tergantung durasinya. Iklan baris di koran dengan jumlah baris minimal sekitar Rp. 200.000,- Biaya iklan dengan cetak flyer berkisar Rp. 500.000 - 115.000,- Sementara itu untuk cetak iklan dengan konsep baliho berkisar pada Rp. 300.000,- dengan harga paling murah.

2. Jangkauan luas

Dengan menggunakan media sosial dan internet maka pengusaha dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah dengan murah dan cepat.

3. Membangun hubungan

Hal ini dapat dideteksi melalui berapa banyak pengunjung situs atau website, seberapa sering pengunjung kembali, seberapa banyak pengunjung yang kembali dan melakukan pembelian

4. Mengubah prospek menjadi pelanggan

Pengusaha dapat mengubah konsumen yang awalnya merupakan konsumen yang layak untuk diprospek menjadi pelanggan setia dengan meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan.

Solusi alternatif yang dapat diberikan pada UMKM dari perspektif keuangan adalah:

1. Memperhatikan aliran kas

Pengusaha UMKM wajib memperhatikan aliran kas yang ada dengan melihat indikator keuangan sehat dan tidak sehat pada Tabel 5 di bawah ini dan Tabel 6 tentang kesehatan keuangan keluarga.

**Tabel 5. Indikator Keuangan Sehat dan Tidak Sehat**

No	Indikator	Penjelasan	Sehat	Tidak Sehat
1	Berapa banyak uang tunai yang kita miliki?	Memiliki dana cadangan atau dana darurat dalam bentuk kas tunai dan tabungan	Saldonya mencapai 4 kali pengeluaran rutin bulanan atau bahkan lebih	Jumlah tabungan kurang dari 4 kali pengeluaran rutin
2	Berapa banyak cicilan hutang setiap bulan?	Setiap bulan hanya memiliki komitmen membayar cicilan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Seperti cicilan rumah, kendaraan, koperasi, utang kartu kredit dan pinjaman lainnya.	Maksimal 35% dari penghasilan setiap bulan	Lebih besar dari 35% penghasilan setiap bulan atau bahkan lebih dari 50% penghasilan bulanan
3	Sudahkah menabung?	Setiap bulan mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung	Setidaknya 10% dari penghasilan tiap bulan	Kurang dari 10% setiap bulan atau sama sekali tidak dapat menabung

*Sumber: OJK (2020)*

**Tabel 6 Kesehatan Keuangan Keluarga**

Ukuran perbandingan	Nilai Ukuran Keluarga	Nilai Ukuran Ideal	Kesimpulan
Ukuran uang tunai	..... bulan	4 bulan	Jika hasil lebih dari 4 bulan = SEHAT
Ukuran cicilan hutang	.....%	35%	Jika hasil di bawah 35% = SEHAT
Ukuran menabung	.....%	10%	Jika hasil di atas 10% = SEHAT

*Sumber: OJK (2020)*

2. Efisiensi produk

Efisiensi produk yang dimaksudkan berkaitan dengan produksi barang dan jasa dengan kombinasi input (bahan baku, sumber daya manusia, modal, keahlian) yang optimal untuk menghasilkan output maksimum dengan biaya tertentu. Sebuah perusahaan secara teknis efisien saat mampu memadukan kombinasi optimal antara tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan produk. Efisiensi terjadi dengan mengelola persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, mengetahui di mana letak keborosan dan kebocoran terjadi berikut dengan alasannya, membuat periode pemeliharaan dan monitoring, membagi beberapa pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil-kecil, dan melakukan analisis pada proses yang dikerjakan karyawan.

3. Stabilitas omset penjualan

Omset penjualan yang stabil didapatkan dari pelanggan yang setia dan memiliki keuangan yang kuat seperti kerjasama dengan instansi atau kementerian milik pemerintah dan jenis usaha milik swasta yang masih dapat bertahan pada masa pandemic.

4. Melakukan relaksasi hutang

Relaksasi hutang dilakukan setelah muncul aturan dari pemerintah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020

tentang stimulus perekonomian nasional. Aturan ini berkaitan dengan pemberian relaksasi kredit atau pembiayaan bagi nasabah terdampak covid-19 di Indonesia. Relaksasi hutang adalah pelonggaran syarat kredit baik secara finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Dengan adanya relaksasi ini diharapkan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan syarat yang lebih mudah.

5. Melakukan restrukturisasi hutang

Restrukturisasi hutang adalah perubahan struktur pada perjanjian kredit. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan jatuh tempo kredit namun bisa berkaitan pula dengan tingkat suku bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan nasabah.

6. Melakukan *rescheduling* hutang

*Rescheduling* hutang dilakukan dengan menjadwalkan kembali hutang yang jatuh tempo dan masa berakhirnya perjanjian. Misalnya hutang yang akan jatuh tempo dalam 6-12 bulan dijadwalkan ulang sampai dua tahun yang akan datang. Hal ini akan mengurangi kebutuhan akan dana kas perusahaan.

7. Menyiapkan dana darurat

Dana darurat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan penting.

8. Melakukan investasi

Pengusaha UMKM dapat melakukan investasi real pada usaha yang masih memiliki prospek pada masa pandemic seperti usaha kos-kosan dan bisnis kebutuhan bahan pokok. Investasi lainnya menanamkan dana pada beberapa asset tetap seperti rumah dan bangunan serta emas batangan atau perhiasan.

9. Memiliki tabungan

Dalam ilmu ekonomi tabungan adalah kelebihan pendapatan setelah dikurangi dengan semua pengeluaran. Pada masa tidak terjadi krisis, diharapkan pengusaha memiliki dana tabungan dalam bentuk dana

jangka pendek maupun jangka panjang. Pada masa pandemic covid-19, tabungan dilakukan dengan melakukan pemangkasan pengeluaran yang tidak penting dan tidak wajib.

#### 10. Melakukan perencanaan bisnis

Perencanaan bisnis meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perbedaan term waktu mengacu pada seberapa lama periode yang digunakan. Untuk jangka pendek dengan kurun waktu kurang dari satu tahun. Untuk jangka menengah antara satu sampai lima tahun dan untuk jangka panjang dengan kurun waktu lebih dari lima tahun.

#### 11. Melakukan perencanaan keuangan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perencanaan keuangan adalah:

1. Melakukan pengelompokan pemasukan (pendapatan) dan pengeluaran
2. Melakukan pengelompokan pemasukan (pendapatan) rutin dan tidak rutin  
Pendapatan rutin seperti gaji (kalau sebagai karyawan), pendapatan penjualan dan pendapatan bagi hasil usaha. Pendapatan yang tidak rutin seperti pendapatan lain-lain misalnya hasil investasi.
3. Melakukan pengelompokan pengeluaran rutin dan tidak rutin  
Pengeluaran rutin seperti gaji karyawan usaha, pembayaran pajak, pembayaran asuransi karyawan dan pembelian ATK. Pengeluaran yang tidak rutin seperti pembayaran THR, pembayaran bonus atau komisi.
4. Melakukan penghitungan pemasukan dan pengeluaran rutin dalam kurun waktu enam bulan ke depan
5. Melakukan penghitungan pemasukan dan pengeluaran tidak rutin dalam kurun waktu dua belas bulan ke depan

6. Memperhitungkan utang piutang  
Pengusaha perlu menghitung hutang jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi kewajibannya dan memperhitungkan kapan jatuh temponya. Piutang perusahaan perlu dihitung kapan jatuh tempo dan melakukan *reminding* pada pelanggan.
7. Memperhitungkan risiko bisnis  
Risiko bisnis dapat berasal dari kondisi ekonomi makro dan kondisi internal perusahaan. Kondisi ekonomi makro merupakan risiko yang tidak dapat dikendalikan oleh pengusaha sementara kondisi internal perusahaan merupakan risiko yang dapat dikendalikan pengusaha. Risiko ekonomi makro diantaranya adalah suku bunga, inflasi, pendapatan per kapita. Risiko yang berasal dari internal seperti kecukupan modal dan aliran kas perusahaan.
8. Melakukan perhitungan dana darurat  
Berdasarkan perhitungan pendapatan dan pengeluaran tersebut di atas, maka dapat dilakukan perhitungan dana darurat yang diperlukan oleh pengusaha.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa responden UMKM di DIY mengalami penurunan omset yang signifikan selama masa pandemic Covid-19 dan menginginkan bantuan dalam hal keuangan, pemasaran, inovasi produk dan *supply chain* (berkaitan dengan kelancaran distribusi supplier bahan). Hal ini serupa dengan hasil survey yang dilakukan secara nasional maupun internasional. Dengan demikian mayoritas pengusaha UMKM tidak siap dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Strategi bertahan di masa pandemic Covid-19 bagi UMKM dari perspektif marketing yang dapat ditawarkan adalah melakukan digitalisasi pemasaran. Pemasaran *online* seperti menggunakan platform yang berbeda, menggunakan *content media*, menggunakan kata kunci yang menarik, *membership pricing*, program *bundle* dan menjelaskan tentang keamanan produk serta memiliki perencanaan bisnis.

Selain itu dari perspektif keuangan, beberapa hal yang dapat dilakukan UMKM di masa pandemic Covid-19 adalah melakukan restrukturisasi, *rescheduling* dan relaksasi hutang, memperhatikan arus kas dengan melihat kesehatan keuangan dan melakukan perencanaan keuangan. Dengan melakukan perencanaan keuangan pengusaha dapat menghitung seberapa besar kebutuhan dana darurat dan melakukan pengendalian pengeluaran dengan cermat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apresian, Stanislaus Risadi. 2020. Responding to the COVID-19 Outbreak in Indonesia: Lessons from European Countries and South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1: 53-57.
- Bartik, Alexander W. Bertrand, Marianne. Cullen, Zoe. Glaeser, Edward L. Luca, Michael. Stanton, Christopher. 2020. The impact of Covid-19 on small business outcomes and expectations. *PNAS*, Vol 117 (30): 17656-17666.
- Farhanah. 2020. UMKM Terdampak Pandemi, Pemerintah dan Swasta Gotong Royong Dorong pertumbuhan Ekonomi. *www.money.kompas.com*. Diunduh pada 10 September 2020.
- Fitriasari, Fika. 2020. How Do Small and Medium Enterprise (SME) Survive the COVID-19 Outbreak? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol 5 (2): 53-62.
- Ganaie, Maryam Anas. Zafar, Farhan. 2020. Impact of Covid-19 (Coronavirus) on Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan. *www.researchgate.net*. Diunduh pada 1 September 2020.
- Ginting, Nanda Sagita. 2020. Hasil Survei Dinas Koperasi dan UKM DIY: UMKM Perdagangan Paling Banyak Terdampak Pandemi Corona. *www.TribunJogja.com*. Diunduh pada 29 September 2020.
- Juergensen, Jill. Guimon, Jose. Narula, Rajneesh. 2020. European SMEs Amidst the Covid-19 Crisis: Assessing Impact and Policy Responses. *Journal of Industrial and Business Economics*, 47: 499-510.

- Lestari, Novi Puji. 2020. Masa Depan UMKM di Tengah Covid-19. *www.harianbhirawa.co.id*. Diunduh pada 22 September 2020.
- Margiono, Muhammad Ariono. 2020. What Might Post Covid-19 Business Strategies Look Like. *www.bbs.binus.ac.id*. Didownload pada 4 September 2020.
- Milzam, Muhammad. Mahardika, Aditia dan Amalia, Rizka. 2020. Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekalongan City, Indonesia. *Journal of Vocational Studies on Applied Research*, Vol 2 (1): 7-10.
- Rangkuti, Freddy. 2019. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Shafi, Mohsin. Liu, Junrong dan Ren, Wenju. 2020. Impact of Covid-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Operating in Pakistan. *Research in Globalization*, 2: 1-14.
- Tuner, dan Akinremi. 2020. The business effects of pandemics-a rapid literature review. *www.enterpriseresearch.ac.uk*. Didownload pada 1 September 2020.
- .....2020. *Buku Perencanaan Keuangan Keluarga*. Jakarta: OJK.
- .....2019. Peran UMKM dalam Perekonomian. *www.kompas.com*. Diunduh pada 20 September 2020
- .....2020. Impacts of Covid-19 on Small - and Medium-Sized Enterprises in the Food System. Global Alliance for Improved Nutrition and World Food Programme. *www.gainhealth.org*. Didownload pada 6 September 2020.
- .....2020. Impact of Covid-19 on Small Medium Sized Enterprises in Iraq. IOM UN Migration and Enterprise Development Fund. *www.reliefweb.int*. Didownload pada 6 September 2020.
- .....2020. COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business. International Trade Centre (ITC). *http://www.intracen.org*. Didownload pada 6 September 2020.

- .....2008. Undang-Undang No 20 Tahun 2008. <https://peraturan.bpk.go.id>.  
Didownload pada 6 September 2020.
- .....2020. POJK No. 11/POJK.03/2020. [www.OJK.co.id](http://www.OJK.co.id). Diunduh pada 1  
September 2020.
- .....2020. Research and Policy Analysis Program on Economic and  
Community Development. [carolinasmallbusiness.org](http://carolinasmallbusiness.org). Didownload  
pada 6 September 2020.
- .....2020. Menuju Tatanan Baru New Normal [www.mondayreview.com](http://www.mondayreview.com).  
Diunduh pada 3 September 2020.

# SINERGITAS ANTAR AKTOR: KOLABORASI PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19

Rahadiyand Aditya & Istiqomah

## Pendahuluan

Kajian ini perlu diawali dengan sebuah pertanyaan mendasar yang semestinya menjadi pemahaman bersama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bencana? Jika ditinjau dari segi istilah menurut dua lembaga global: *Pertama*, World Health Organization (WHO) menyatakan bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal dan menyebabkan kerusakan ekologis, kerugian kehidupan manusia, memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. *Kedua*, menurut Asian Disaster Reduction Center bencana adalah gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dampak ditimbulkan melebihi kemampuan manusia dalam mengatasinya (Khambali, 2017:1). Indonesia sendiri saat ini telah memiliki regulasi terkait kebencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (BNPB, 2017).

Pengertian bencana menurut undang-undang tersebut adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, maupun manusia. Pada kasus pandemi ini jika merujuk pada undang-

undang tersebut, maka termasuk dalam bencana yang disebabkan oleh kondisi non alam. Sejarah mencatat bahwa bencana yang disebabkan oleh kondisi non alam sudah pernah dialami oleh penduduk dunia. Beberapa kasus pandemi yang pernah dialami dunia antara lain adalah pandemi *bubon plague* atau *black death* pada pertengahan tahun 1347 dan baru selesai tiga tahun kemudian, *Spanish Influenza*, *Asian Influenza*, hingga yang terakhir terjadi pada tahun 2015 yaitu *zika virus* yang telah teridentifikasi di 76 negara.

### **Covid-19: Makhluk Tak Kasat Mata yang Merubah Tatanan Dunia**

Virus adalah sebuah organisme ultramikroskopis (Kusnadi, 2014:1). Secara bahasa virus berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun. Makhluk yang dapat dikatakan baik sebagai benda mati karena bisa dikristalkan ataupun benda hidup karena dapat memperbanyak diri dalam tubuh inang ini berukuran antara 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Benda kecil yang bahkan tidak bisa hidup tanpa sebuah inang ini dapat menggemparkan dunia. Pada awal tahun 2020 masyarakat luas heboh dengan penyakit yang mewabah di dunia yaitu Covid-19. Tetapi, masyarakat tidak cukup familiar dengan istilah SARS-CoV-2 (Wibawa, 2020). Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah nama penyakitnya, sedangkan SARS-CoV-2 adalah nama virus yang menyebabkan penyakit tersebut. Perbedaan ini sebenarnya lazim terjadi, seperti halnya virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS.

Covid-19 berasal dari Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Sebagai wilayah episentrum atau *ground zero* persebaran penyakit Covid-19 menjadikan kota ini dilabeli stigma negatif oleh media-media internasional. Untuk menekan penyebarannya, pemerintah mengisolasi kota dengan tujuan memperlambat penyebaran wabah. Pada tanggal 30 Januari WHO telah menetapkan bahwa dunia dilanda pandemi Covid-19. Setelah itu disusul beberapa negara juga mengkonfirmasi adanya penduduk yang positif terpapar penyakit Covid-19. Tidak berselang lama, setelah 'merasa aman' beberapa waktu dari wabah tersebut akhirnya melalui Keppres

Nomor 12 Tahun 2020, tertanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi bencana nasional.

Pandemi Covid-19 saat ini sudah bukan lagi permasalahan kesehatan saja, tetapi berdampak luas pada bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Bahkan beberapa negara sudah mengkonfirmasi bahwa kondisi dinegaranya sedang terjadi resesi. Pandemi ini menurut International Labour Organization (ILO) telah menciptakan pengangguran global hingga mencapai 195 juta orang. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dengan alasan kondisi perekonomian yang belum stabil. Bahkan Bank Dunia mengumumkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya (IMF, 2020). Sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini adalah industri makanan, akomodasi, retail, jasa, dan manufaktur (News, 2020).

### **Komparasi Kebijakan Global: Dinamika Respon Beberapa Negara**

Pada era pandemi ini kita dapat melihat strategi yang dilakukan oleh beberapa negara (Mas'udi & Winanti, 2020:22-29) berdasarkan pada komponen rekomendasi WHO dalam manajemen krisis. Berikut beberapa contoh penanggulangan yang dilakukan oleh negara lain: *Pertama*, keberhasilan Taiwan dengan sistem *preparedness*. Di negara Taiwan kelembagaan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah adalah Central Epidemic Command and Center (CECC) for Severe Special Infectious Pneumonia yang dibentuk pada tanggal 20 Januari 2020, sesaat setelah kasus pertama terdeteksi. *Kedua*, kesiapsiagaan Singapura dengan sistem kesehatan yang efektif. Singapura memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan untuk menangani permasalahan ini. Kasus terkonfirmasi pertama di negara ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2020. *Ketiga*, Korea Selatan dengan sistem deteksi berbasis teknologi. Membentuk sebuah lembaga Korea Centers for Disease Control and Prevention yang berada di bawah pengawasan langsung Ministry of Health and Welfare. *Keempat*, kegagalan yang terjadi pada negara *superpower* Amerika Serikat. Negara adidaya ini membentuk sebuah lembaga yang diberinama White

House Coronavirus Task Force yang dibentuk sembilan hari setelah terdapat satu warganya yang terkonfirmasi pada tanggal 20 Januari 2020.

Setiap negara memiliki pertimbangan dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya. Indonesia sendiri menjadikan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tanggap Bencana sebagai dasar. Bencana pada undang-undang tersebut dibagi menjadi empat siklus. Empat siklus tersebut antara lain adalah prabencana, bencana, tanggap darurat, dan pascabencana dengan pola aktivitas yang berbeda-beda. Siklus pertama adalah prabencana, dimana kondisi suatu masyarakat atau wilayah ketika tidak atau belum terjadi bencana. fokus aktivitas pada tahap ini adalah perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Siklus kedua adalah bencana, dimana kondisi masyarakat atau suatu wilayah berpotensi atau sedang menghadapi bencana. Fokus aktivitas pada tahap ini adalah mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan. Siklus ketiga adalah tanggap darurat. Fokus aktivitas pada tahap ini adalah kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan. Siklus keempat adalah pascabencana. Fokus aktivitas pada tahap ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan ketertiban, dan lingkungan.

Pada tahapan yang lebih aplikatif, undang-undang di atas dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan pemerintah ini berisikan pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tiga tahapan penanggulangan bencana, pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah *“rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”*. Keseluruhan rangkaian tersebut terbagi menjadi tiga siklus yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Sedangkan terdapat beberapa regulasi yang berbentuk implementatif. Indonesia sendiri mengeluarkan sembilan produk hukum terkait penanganan pandemi Covid-19 (Mas’udi & Winanti, 2020:48), yakni

empat Keputusan Presiden (Keppres), dua Peraturan Presiden (Perpres), satu Peraturan Pemerintah (PP), satu Instruksi Presiden (Inpres) dan satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Keseluruhan regulasi tersebut berisikan tentang penanggulangan pandemi Covid-19.

Sebagai bentuk respon dari situasi saat ini setiap daerah diarahkan untuk menentukan langkah yang akan diambil dengan tetap memperhatikan regulasi dan instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pusat. Sembilan produk hukum tersebut dapat dijadikan dasar pemerintah daerah menentukan sikap. Selain itu juga memperhatikan aspek-aspek yang berada pada manajemen krisis menghadapi pandemi yaitu mencakup aspek risiko, dampak, dan mitigasi (Jamison *et al.*, 2018). Yang menjadi menarik adalah, meskipun regulasi yang dilihat sama tetapi sikap yang diambil kepala daerah berbeda satu dengan yang lain. Penulis tidak akan menghakimi sikap tersebut, tetapi kita akan melihat sikap apa saja yang sudah diambil oleh beberapa pemerintah daerah.

Surakarta yang merupakan kota asal Presiden Jokowi adalah salah satu daerah yang menentukan sikap cukup awal. Tertanggal 14 Maret 2020, Walikota Surakarta menggunakan istilah Kejadian Luar Biasa atau KLB (Antara, 2020) sebagai tanggapan atas kondisi Pandemi Covid-19. Berikutnya, Wali Kota Tegal merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan istilah *lockdown* yang sebenarnya berbanding terbalik dengan instruksi pusat. Belakangan, istilah tersebut diganti menjadi isolasi wilayah (Firdaus, 2020). Sikap tersebut diambil oleh Walikota Tegal sejak 30 Maret hingga 30 Juli 2020. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki resep sendiri, menggunakan frase jawa *Sapa Arah: Cobaan Gusti Allah* dengan penjelasan lebih rinci yaitu anjuran untuk *calm down* dan *slow down* (Firdaus, 2020). Pengertian dari *calm down* adalah menenangkan batin dan *slow down* bermakna memperlambat penyebaran dengan membersihkan diri dan lingkungan. DKI Jakarta dengan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sikap ini dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (BBC, 2020). Perbedaan sikap yang diambil menunjukkan bentuk kepedulian pemimpin daerah dan juga dapat mencerminkan bahwa wilayah memiliki otoritas lebih dalam menentukan langkah apa yang akan diambil.

## **Bencana Melanda, Tanggung Jawab Siapa?**

Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan baik dari alam, non alam, atau manusia. Dari situ muncul pertanyaan klasik, ini tanggung jawab siapa? Semua elemen di masyarakat memiliki peran dalam menaggulangi terjadinya bencana. Setidaknya, menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, terdapat tiga aktor yang berperan dalam penanggulangan bencana yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan lembaga usaha atau lembaga internasional. Pada Bab III Pasal 5 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang menyatakan bahwa “*Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam peganggunaan penanggulangan bencana*”. Secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah berperan untuk mengcover biaya yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Teknis penganggaran di era desentralisasi ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran yang ingin dikeluarkan dengan tetap memperhatikan regulasi-regulasi yang ada. Bahkan pada kasus penanganan bencana Covid-19 ini diarahkan untuk mengalokasikan dananya dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah seberapa besar pemerintah memimiliki keberanian mengambil risiko secara terukur agar tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap keputusan yang telah diambil (Farazmand, 2019). Hal ini penting diperhatikan, karena jika pemerintah tidak berani mengambil risiko, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar yaitu krisis kepercayaan atas apa saja sikap yang diambil oleh pemerintah.

Selanjutnya, pada Bab V tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 26 ayat 2-3 mengatur tentang hak yaitu “(2) *setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, (3) setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi*”. Sedangkan untuk kewajiban masyarakat berada pada Pasal 27 dengan bunyi “*Setiap orang berkewajiban (a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasanm dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, (b) melakukan kegiatan penanggulangan becana, dan (c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan*

*bencana*”. Setiap hak pasti akan beriringan dengan kewajiban. Penjelasan di atas memberikan hak kepada masyarakat bahwa kebutuhan dasar masyarakat ditanggung oleh pemerintah, sedangkan terdapat juga beberapa kewajiban yang harus dilakukan.

Aktor terakhir adalah lembaga usaha atau lembaga internasional. Penjelasan peran aktor terakhir ini tertuang dalam Bab VI tentang Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional Pasal 28 “*Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain*”. Pasal 29 “(1) *lembaga usaha menyelesaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, (2) Lembaga usaha berkewajiban menyemapaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara tranparan, dan (3) lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penaggulangan bencana*”. Setidaknya tiga aktor ini yang akan menjadi pembahasan pada tulisan ini. Penulis akan menyampaikan praktik baik yang menghasilkan turunan baik atas langkah-langkah yang sudah diambil oleh ketiga aktor tersebut. Sehingga dapat menjadi ‘perisai’ masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana pandemi Covid-19 ini.

### **Modal Sosial: Secercah Cahaya dalam Pusaran Kegelapan**

Sebelum wabah ini sampai di Indonesia, hampir seluruh masyarakat merasa tenang. Bahkan beberapa pejabat publik menyampaikan bahwa Indonesia “kebal” terhadap wabah dengan beberapa alasan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan wilayah tropis yang bersuhu panas, ataupun alasan bahwa virus ini sama dengan virus influenza pada umumnya yang bisa dilawan dengan imun tubuh yang kuat. Nyatanya, setelah satu orang terkonfirmasi positif di bulan Maret hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan kasus yang signifikan. Kondisi ini membuat panik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah menolak menerapkan langkah yang diambil negara lain yaitu *lockdown* dengan berbagai macam pertimbangan. Tetapi, Pemerintah memberlakukan PSBB guna menekan angka penularan. Perubahan kondisi ini harus direspon oleh masyarakat (Padmawati &

Nichter, 2008:31-51). Respon yang dianalogikan oleh Padmawati dan Nichter sebagai respon imun tubuh juga linier dengan dikemukakan oleh Adger dimana sikap adaptif masyarakat dalam merespon perubahan dalam lingkungan hidupnya, atau biasa dikenal dengan istilah modal sosial (Adger, 2003:387-404).

Baru-baru ini juga terdapat tulisan yang mengelompokkan bahwa setidaknya terdapat dua jenis respon yang ada di masyarakat (Mas'udi & Winanti, 2020:180). *Pertama*, respon peningkatan daya literasi digital masyarakat sebagai usaha bertahan terhadap pandemi Covid-19. Peningkatan daya literasi adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan literasi digital untuk mencari informasi bahaya Covid-19, cara pencegahan, penanganan hingga pola hidup sehat. *Kedua*, penguatan modal sosial melalui aksi solidaritas sosial. Secara umum aksi sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu karitatif (*charity*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Aksi *charity* pada dasarnya merupakan kegiatan membagikan uang atau barang kepada sekelompok orang yang membutuhkan yang bersifat memenuhi kebutuhan sesaat (Marquis & Tilcsik, 2016). Aksi ini dapat diprakarsai oleh personal maupun ataupun kolektif dengan memanfaatkan jejaring sosial (*social network*). Sedangkan aksi *empowerment* memiliki tujuan *beyond charity* sebagai bentuk upaya memberikan kekuasaan atau kekuatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang ada memenuhi kebutuhan sendiri (Adams, 2008).

Seluruh respon yang dilakukan oleh lintas pihak telah mencerminkan tiga prinsip dari modal sosial. Prinsip pertama adalah rasa saling percaya antara pemberi dan penerima dan seluruh aktor yang terlibat. Prinsip kedua adalah komitmen yaitu perasaan sepenanggungan dan rasa kebersamaan. Prinsip ketiga yaitu hubungan timbal balik dan saling menguntungkan bagi semua aktor yang terlibat. Prinsip-prinsip ini dirasa menjadi dasar dari munculnya aksi-aksi nyata di masyarakat. Pembahasan selanjutnya, penulis akan memperlihatkan bahwa tiga aktor yang tergambarkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 memiliki peran dan fungsi berbeda dengan tujuan yang sama. Pemerintah, masyarakat, swasta bahu-membahu dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Maka dari itu, agaknya penting bagi

kita agar tidak mengutuk kegelapan, tetapi menjaga secercah cahaya dengan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana ini.

### **Pemerintah Sebagai *Leading Sector* dalam Menciptakan Kepekaan Sosial**

Pada masa pandemi seperti ini, peran pemerintah cukup penting. mengapa demikian? Karena kepanikan masyarakat dapat ditekan dengan adanya kebijakan yang tegas dan menciptakan rasa aman. Seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya, bahwa Presiden Indonesia saat ini sudah mengeluarkan setidaknya semibilan ‘jurus’ terkait penanggulangan pandemi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan bertambah pada bulan-bulan setelah tulisan ini diterbitkan. Terlepas dari pro-kontra sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut, penulis melihat adanya inisiatif pemerintah daerah yang cukup layak dijadikan sebagai percontohan. Tulisan ini akan menjabarkan terkait Satgas *Jogo Tonggo* oleh Pemprov Jawa Tengah dan Kebijakan Panggung Tanggap Covid-19 oleh Pemerintah Desa Panggung Harjo.

*“Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah, menjaga lingkungan dengan siskamling. Spriti ini kita ambil karena basis kekuatan utama Tanah Jawa adalah desa”*. Itulah statemen singkat Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo ketika menjelaskan mengapa sikap yang diambil adalah dengan membentuk Satgas *Jogo Tonggo*. Secara teknis *Jogo Tonggo* merupakan satuan tugas yang dipimpin oleh struktur pimpinan terkecil kedua setelah Rukun Tetangga (RT) di masyarakat yaitu Ketua Rukun Warga (RW). Setiap Ketua RW di wilayah Jawa Tengah di himbau untuk membentuk tim yang berisikan empat bidang antara lain bidang kesehatan, bidang sosial dan keamanan, bidang ekonomi dan bidang hiburan. Gubernur Jawa Tengah mengharapkan Tim Satuan Tugas melibatkan institusi yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, Linmas, Masyarakat setempat hingga organisasi lain yang ada di masyarakat.

Setiap bidang memiliki fokus sendiri-sendiri, seperti bidang kesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kordinasi dengan petugas desa jika kondisi darurat, update data OTG, ODP dan PDP, memastikan penerapan jaga jarak 1,5-2 meter menggunakan masker,

penyemprotan rutin desinfektan, dan lokasi strategis cuci tangan, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat kepada warga. Bidang ekonomi memiliki tugas untuk mendata kebutuhan dasar masyarakat, mendata warga yang tidak mampu, mengupayakan penuh warga agar bisa dibantu, memastikan bantuan tepat sasaran, memastikan kegiatan bertani, berkebun dan berdagang tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan, melayani kebutuhan makanan warga yang karantina, mendorong terbangunnya lumbung pangan. Bidang sosial dan keamanan memiliki tugas untuk mendata orang masuk dan keluar pada lingkup RW, membuat jadwal giliran ronda, menghindari kerumuman, memastikan ODP dan OTG tidak keluar rumah, menyiapkan data pilah penerima bantuan memastikan kelompok lansia, difabel, ibu hamil dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak, memastikan kegiatan sosial secara gotong royong, meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan *rembugan* atau musyawarah, memastikan kesepakatan warga terkait jam bertamu, memastikan setiap rumah punya alat komunikasi manual seperti kentongan, memberi pemahaman bahwa jenazah tidak menularkan Covid-19, dan pengamanan warung-warung sembako. Bidang hiburan bertugas untuk mengurangi kejenuhan warga dengan melaksanakan hiburan mandiri sesuai kearifan lokal masing-masing. Prinsipnya Satgas *Jogo Tonggo* mencakup dua hal yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan serta jaring ekonomi. Satgas ini memanfaatkan modal sosial yang ada dengan memastikan bahwa warga secara bergotong-royong melawan penyebaran Covid-19 di wilayahnya serta memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan Covid-19 tepat sasaran dan tepat guna. Inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Jawa Tengah dapat diapresiasi, memanfaatkan potensi dari dalam diri masyarakat agar tetap dapat bertahan. Hemat penulis setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga peran pemerintah adalah menjaga agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Beralih ke arah timur-selatan dari Jawa Tengah, salah satu desa kecil di Kabupaten Bantul yaitu Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon merupakan sebuah desa yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait sikap yang diambil dalam penanggulangan bencana ini. Beberapa sikap

yang diambil oleh pemerintah desa adalah dengan menciptakan ruang literasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dengan membuat kanal informasi terpusat bertajuk Liputan Khusus Panggung Tanggap Covid-19. Pada era *social distancing* ataupun *physical distancing* pembatasan pertemuan luring menyebabkan perlu adanya pendekatan baru dalam menyebarkan informasi terkait wabah ini. Oleh sebab itu, penyebaran informasi secara daring menjadi pilihan yang tak dapat dihindari. Pemerintah desa menyikapi permasalahan ini dengan memanfaatkan media website desa sebagai media *call center*, jalur donasi, cek kesehatan, hingga pendataan ketersediaan masyarakat menjadi relawan. Selain membuat kanal informasi terpusat, pemerintah desa juga membuat aplikasi website mitigasi klinis yang diberi nama “Panggung Tanggap Covid-19”. Aplikasi website ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi interaktif pengganti komunikasi luring. Sehingga nantinya, meskipun tidak ada pertemuan luring masyarakat juga dapat mendapatkan informasi secara daring.

Masih dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa melakukan terobosan lain. Berdasarkan keresahaan perputaran perekonomian masyarakat yang terhambat dengan adanya larangan keluar rumah, maka pemerintah desa menciptakan aplikasi guna menjembatani anatara kebutuhan dengan permintaan masyarakat. Sederhananya, pemerintah desa ingin menciptakan sebuah pasar digital wilayah Desa Panggungharjo. Alokasi website tersebut bernama pasar desa.id. Website ini diharapkan dapat menjadi wadah pertemuan konsumen dengan produsen terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Strategi ini memudahkan masyarakat desa dalam memperoleh barang dan kebutuhan pokok baik yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, kesehatan maupun keperluan rumah tangga tanpa harus melanggar protokol.

Pemerintah dituntut untuk mengambil tindakan tegas dalam penanganan bencana ini, meskipun demikian ketegasan tersebut perlu diimbangi dengan inovasi. Secara teknis memang masih perlu dikaji lebih mendalam terkait keberhasilan program-program yang sudah dijalankan. Tetapi, langkah inovatif tersebut perlu diapresiasi. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa tetap memperhatikan modal sosial yang dimiliki

oleh masyarakat. Catatan yang perlu diperhatikan adalah ketegasan pemerintah dalam menegakan peraturan-peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan bencana ini. Kemudian, Pemerintah juga perlu menambahkan nilai-nilai yang bersifat inovatif dalam menentukan langkah dengan memperhatikan modal yang dimiliki oleh masyarakat (Mas'udi & Astrina, 2020). Sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasa dimudahkan dengan inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah.

### **Gotong Royong sebagai Jaring Pengaman Sosial Masyarakat**

Munculnya gagasan ini merupakan bentuk kesadaran bersama bahwa Pandemi Covid-19 adalah musuh bersama. *Sense of Community* berperan dalam menumbuhkan inovasi guna merespon kebutuhan masyarakat. Sehingga terciptanya *risk-sharing* sebagai bagian dari mitigasi pandemi Covid-19. Bentuk kesadaran tersebut merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia atau lebih familiar dikalangan masyarakat dengan istilah gotong royong (Effendy, 2013). Semangat gotong royong menciptakan inisiatif pada masyarakat dalam melakukan aksi nyata. Inisiasi ini bisa dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, inisiasi yang dilakukan oleh internal masyarakat. *Kedua*, inisiasi yang tercipta atas dorongan eksternal masyarakat. Inisiasi internal maupun eksternal ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kontribusi terhadap penanggulangan pandemi Covid-19. Inisiasi yang dilakukan oleh internal masyarakat dapat berupa kegiatan atau sebuah program yang digagas dan dilaksanakan oleh kesadaran masyarakat sendiri. Kegiatan dilakukan pada lingkup terkecil sebuah entitas seperti rukun tetangga, rukun warga, dukuh atau dusun. Hemat penulis inisiasi yang dilakukan oleh internal masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pencegahan penyebaran, jaring pengamana sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

*Pertama*, peran masyarakat pada jenis pencegahan penyebaran sebagai refleksi dari kekhawatiran akan menyebarnya virus di wilayah tempat tinggal masyarakat. Kegiatan ini kerap terlihat pada awal-awal pemerintah Indonesia mengumumkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Beberapa bentuk kegiatan yang muncul adalah: (1) Portal mandiri atau ada juga

yang menggunakan istilah posko siaga pintu masuk desa. Fungsi kegiatan ini adalah sebagai wadah *screening* awal kepada siapapun yang hendak masuk sebuah wilayah. Bahkan di beberapa wilayah menolak kedatangan masyarakat pendatang yang bukan penduduk wilayah tersebut. Salah satu contohnya adalah warga Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Tugas Posko Siaga di pintu ini adalah mengawal aktivitas keluar masuk desa dan memeriksa orang yang datang ke desa. (2) Rumah isolasi swadaya. Merasa sukarnya menolak kedatangan perantau menuju wilayah asal maka masyarakat setempat melakukan inisiasi untuk mengalih fungsikan rumah ataupun gedung pada sebuah wilayah untuk dijadikan sebagai rumah isolasi. Desa Kadilanggon, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, adalah salah satu wilayah yang menerapkan hal tersebut menjadikan rumah kosong, kantor, gedung pemerintah sebagai rumah isolasi swadaya. Terdapat setidaknya 15 rumah isolasi di wilayah tersebut. (3) Penyediaan tempat cuci tangan di wilayah strategis. Beberapa wilayah membuat sarana cuci tangan pada wilayah-wilayah startageis. Salah satunya adalah Desa Klagensrampat, Kecamatan Madura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menyediakan sarana cuci tangan tepat di pinggir jalan akses utama masuk sebuah wilayah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan ajakan hidup sehat setidaknya memastikan masyarakat untuk rutin mencuci tangan ketika beraktivitas di luar. (4) Penyemprotan disinfektan mandiri. hampir dilakukan oleh wilayah yang sudah menerapkan beberapa bagian sebelumnya. Penyemprotan disinfektan setidaknya dilakukan di beberapa sarana-prasarana umum seperti masjid, mushola, atau jalan-jalan umum lainnya. Semua dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Terkadang disinfektan yang disemprotkan merupakan hasil buatan mandiri sesuai anjuran tenaga kesehatan.

*Kedua*, peran masyarakat pada jenis jaring pengaman sosial menurut hemat penulis memiliki tiga kegiatan: (1) Mendata masyarakat rentan baru. Kegiatan ini sangat bersinggungan dengan pemerintah tingkat desa dalam melakukannya. Pendataan diperlukan agar nantinya setiap distribusi bantuan baik dari internal masyarakat ataupun dari pemerintah dapat tepat sasaran. (2) Pembagian sembako kepada kelompok rentan. Di tengah kondisi pandemi banyak masyarakat yang merasakan akibatnya, dampak terburuk

adalah kehilangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan untuk beraktifitas diluar atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Salah satu praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik adalah pembagian sembako *door to door* ke seluruh warga yang terdampak. (3) *Sharing* kebutuhan dasar. Banyak cara yang dilakukan pada kegiatan ini, baik secara individu maupun kelompok. Beberapa individu yang merasa berkecukupan menggantungkan bantuan di depan rumahnya untuk diambil oleh siapapun masyarakat yang berkenan. Ada juga masyarakat yang memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk *sharing* kebutuhan satu dengan yang lain.

*Ketiga*, peran masyarakat pada jenis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dimaksud antara lain adalah melibatkan warga desa yang memiliki keahlian menjahit untuk membuat masker kain. Pembuatan masker ini selain akan diberikan kepada masyarakat luas juga berdampak pada peningkatan pendapatan penjahit. Kegiatan ini dilakukan di banyak wilayah, salah satunya adalah di Desa Klagensrampat, Kecamatan Madura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tiga jenis inisiasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat merupakan buah dari kemampuan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Bentuk mobilisasi masyarakat dapat berupa voluntarisme, filantropi, dan timbulnya solidaritas sosial yang luas (Simsa, Ramender, Aghamanoukjan, & Totter, 2019). Bentuk mobilisasi sumber daya yang bersifat organik ini menjadi sebuah refleksi bahwa sistem sosial masyarakat masih ada dan dapat menggambarkan cerminan *citizenship*. Kegagalan mobilisasi sumber daya akan melahirkan *vulnerability* semakin dalam. Maka dari itu, hemat penulis masyarakat sendiri telah berkontribusi terhadap penanganan pandemi ini.

### **Kolaborasi Perusahaan dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat**

Setelah resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non alam, perusahaan juga dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Empat jenis bantuan antara lain yaitu: karitatif, infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan pemberdayaan masyarakat. Karitatif adalah pemberian

bantuan secara cuma-cuma dan tidak ada kelanjutan dari bantuan tersebut. Infrastruktur adalah bantuan pembangunan fisik yang monumental dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas adalah bantuan pelatihan yang difasilitasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah bantuan berupa rangkaian kegiatan dapat berupa gabungan dari bantuan langsung, bantuan fisik dan pelatihan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan dilakukan monitoring evaluasi berkala.

Bantuan berjenis kariatatif adalah bantuan yang sering dilakukan oleh perusahaan. Bantuan ini berupa pemberian langsung secara cuma-cuma kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan. Terdapat beberapa pertimbangan perusahaan melakukan ini seperti: (1) kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh masyarakat, maka solusi yang diberikan juga harus cepat sesuai kebutuhan dasar. (2) Penyebaran virus yang cukup masif, sehingga perputaran ekonomi berjalan lambat. Mengapa demikian, pertama disebabkan oleh adanya kebiasaan baru yang berbeda dari sebelumnya. Seperti mengurangi aktivitas di luar, mengurangi pertemuan dengan khalayak ramai, tidak berpergian jauh terlebih dahulu, hingga ada anjuran untuk bekerja dari rumah. Sektor makanan, transportasi, pariwisata menjadi yang terdampak cukup besar. Kondisi saat ini berimbas pada terjadinya gelombang PHK dan perputaran ekonomi yang berjalan lambat. Maka solusi yang diberikan memang sewajarnya adalah bantuan kebutuhan dasar yang bersifat karitatif. (3) Anjuran pola hidup sehat kepada masyarakat. Seperti menggunakan masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas menjadikan kebutuhan masker dan *hand sainitaizer* atau sabun cuci tangan meningkat. Kebutuhan yang meningkat sedangkan pasokan yang ada sudah habis nanti akan menimbulkan kelangkaan di pasar atau melambungnya harga barang-barang maka perlu kiranya perusahaan melalui dana sosialnya menyediakan barang-barang tersebut. (4) APD bagi tenaga medis dalam pandemi seperti ini memang lebih lengkap dan spesifik. Perlu kiranya pemberian APD guna membantu tenaga medis dalam merawat masyarakat yang terkonfirmasi.

Beberapa perusahaan yang berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 antara lain: (1) Wings Group melalui Yayasan Peduli Kasih,

dengan nominal bantuan sebesar 25 miliar. Bentuk bantuan berupa 25 ribu set APD yang di dalamnya berisikan alat bantu pernafasan, *hand sanitizer*, *hand wash*, cairan disinfektan, detergen, shampo, serta makanan pokok. (2) IKEA Indonesia memberikan bantuan berupa *higine kit*, selimut, seprei, handuk, dan troli. (3) Unilever Indonesia memberikan bantuan berupa *hand sanitizer*, produk makanan dan minuman, produk perawatan higienitas rumah sakit, serta paket makanan bagi tenaga medis. (4) PT Pertamina (Persero) MOR II Area Sumbagsel memberikan 1.800 buah APD, 450 liter *hand sainitizer*, 1.900 buah sarung tangan, 103 kacamata medis dan *thermo gun*, 100 buah *pace shield*, dan 8.400 buah masker medis dan masker kain. Serta masih banyak lagi perusahaan yang memberikan bantuan berjenis karitatif. Pada jenis ini, seluruh bantuan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat dan kelompok yang membutuhkan.

### **Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas, dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dua jenis bantuan ini memang tidak semasih jenis bantuan karitatif selain karena memakan waktu yang lama jenis bantuan ini sukar untuk dikuantitatifkan keberhasilannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perusahaan yang juga melakukan ini. beberapa yang dijadikan pertimbangan adalah kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat maupun perusahaan. Bantuan berjenis infrastruktur dapat dilihat dari peran PT Pertamina (Persero) yang menjadikan rumah sakitnya sebagai rujukan pasien Covid-19. Bantuan yang dilakukan berupa pembuatan ruangan khusus pasien Covid-19 serta menambah alat-alat modern yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam merawat pasien Covid-19. Bahkan saat ini PT Pertamina (Persero) sedang membuka rumah sakit khusus pasien Covid-19 dengan memanfaatkan GOR Simprug Jakarta sebagai lokasi pembangunan. Jenis bantuan ini dilakukan melihat semakin meningkatnya angka masyarakat yang terjangkit virus ini sedangkan kapasitas ruang isolasi pasien di rumah sakit terbatas.

Bantuan selanjutnya adalah jenis peningkatan kapasitas. Perusahaan perlu menganalisis terlebih dahulu masalah dan kebutuhan masyarakat saat ini. penulis mengambil contoh *hand sainitizer* dan cairan *disinfektan*.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa masyarakat diresahkan dengan harga *hand sainitizer* yang melambung tinggi karena meningkatnya permintaan di pasar. Menyikapi kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat dengan memepitimbangan potensi yang ada beberapa perusahaan melakukan inovasi kegiatan dengan menciptakan cairan *hand sainitizer* dan *disinfektan* secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan oleh hampir di seluruh perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, mengapa demikian karena perusahaan akan lebih leluasa dalam menyesuaikan anggaran. Beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan ini adalah PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, PT Pertamina (Persero) RU III Plaju, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan melibatkan mitra binaan yang sudah ada sebelumnya. PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning melakukan pelatihan bekerjasama dengan dosen salah satu kampus swasta di Riau dengan memanfaatkan sosial media.

Jenis bantuan terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Jenis ini memerlukan sensitifitas yang lebih oleh pihak perusahaan. Karena perlu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu dan selanjutnya baru menyusun program. Pada realitanya, banyak program yang sudah menginisiasi bantuan dengan jenis ini. Seperti perusahaan memanfaatkan mitra binaan yang memiliki kemampuan menjahit untuk memproduksi masker kain secara masal. Masker yang dibuat dibeli oleh perusahaan dan dapat menjadi pemasukan bagi penjahit. Kemudian masker tersebut di bagi-bagikan ke khalayak luas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ada juga perusahaan yang memanfaatkan kelangkaan *hand sainitizer* untuk memproduksinya dan memperjualbelikannya. Masyarakat diberikan pelatihan cara pembuatannya kemudian hasil produknya di jual secara umum sehingga hasil penjualan produk tersebut dapat memberikan pemasukan bagi masyarakat.

Ada kasus menarik, data menunjukkan bahwa Indonesia diperikarakan akan memerlukan 29.877 ventilator untuk menangani pasien Covid-19 (TGPP Covid-19, 2020). Padahal hingga Maret 2020 baru tersedia 8.141 ventilator di seluruh Indonesia. Kekhawatiran yang muncul seperti sikap dilematis dokter yang terjadi di Italia, juga akan terjadi di Indonesia (Rosenbaum, 2020). Maka perusahaan dapat mengambil sikap di sini.

Perusahaan dengan sumber dana tanggung jawab sosial yang tidak sedikit dapat menjadi katalisator atas kebutuhan dan kendala ini. perusahaan bisa memberikan sumbangan untuk pemenuhan ventilator kepada instansi kesehatan dengan memberdayakan beberapa masyarakat atau pengrajin yang bisa memproduksi ventilator. Keseluruhan kegiatan tersebut dirasa memberikan sumbangsih yang tidak sedikit dalam upaya penanggulangan pandemi ini. tidak hanya pencegahan dengan pemberian yang bersifat karitatif saja, bahkan perusahaan juga dapat berkontribusi dalam menjaga kestabilan perekonomian masyarakat disekitar perusahaan dengan memberikan pekerjaan tambahan seperti pembuatan masker, *hand sainitaizer*, maupun *desinfektan*.

### **Penutup: Refleksi Peluang dan Tantangan**

Indonesia merupakan masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) yang diikat oleh hubungan batin yang murni serta bersifat nyata dan organis perlu pendekatan yang berbeda dengan negara-negara maju lain dalam penanganan pandemi ini. Sebagai negara dengan masyarakat *gemeinshaft* Indonesia memiliki kearifan lokal yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain yaitu gotong royong. Selain sebagai masyarakat paguyuban, ditambah lagi dengan konsep *risk society* dimana *personal safety and healthy* menjadi agenda sosial kolektif. (Beck, 1992). Kedua hal tersebut dapat menjadi peluang yang dimiliki oleh Indonesia. Masyarakat memiliki modal hubungan batin yang nyata ditambah saat ini dihadapkan dengan kondisi risiko kesehatan yang perlu ditanggung bersama menyebabkan potensi yang perlu dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Meskipun demikian, peluang yang dimiliki oleh Indonesia harus diimbangi dengan memperhatikan tantangan yang ada secara realistis. Penulis menggarisbawahi akan pentingnya sinergitas antar aktor dalam menangani krisis. Penanggulangan membutuhkan keterlibatan dan sinergi antar aktor (Cristensen, Laegreid, & Rykkja, 2016). Meskipun saat ini setiap aktor telah memberikan kontribusinya tetapi perlu kiranya membangun kolaborasi yang lebih strategis antar aktor dalam menentukan langkah yang akan diambil. Sehingga nantinya akan dapat menentukan langkah besar bersama. Tidak perlu mengedepankan ego sektoral karena nantinya jika

terjadi kegagalan sinergi dan koordinasi antar elemen akan menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendalam (McConnell, 2011). Sinergitas antar aktor tak akan membawa kerugian sedikitpun, melainkan justru himpunan kekuatan yang lebih besar.

### **Daftar Pustaka**

- Adams, R. (2008). *Empowerment Participant and Social Work*. New York: Palgrave Macmillian.
- Adger, W. N. (2003). *Social Capital, Collective Action and Adaption to Climate Change*. Econ Gegorg.
- Antara. (2020). Solo KLB Corona Covid-19, Sekolah Diliburkan 14 Hari. Diambil 24 September 2020, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/solo-klb-corona-covid-19-sekolah-diliburkan-14-hari-eE1c>
- BBC. (2020). Virus Corona: Anis Baswedan Rilis Pergub Soal PSBB di Jakarta, dari WFH sampai Ojek. Diambil 24 September 2020, dari bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52240034>
- BNPB. (2017). Definisi Bencana. Diambil 23 September 2020, dari bnpb.go.id website: <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>
- COVID-19, G. T. P. P. (2020). Laporan Mingguan 13 April 2020. Jakarta.
- Cristensen, T., Laegreid, P., & Rykkja, L. H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy. *Public Administration Review*, 76(6).
- Effendy, T. . (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1).
- Farazmand, A. (2019). Hurricane Katrina, The Crisis of Leadership, and Choas Management: Time for Trying the “Surprise Management Theory in Action.” *Public Organization Review*, 9(4).
- Firdaus, F. (2020). Diminta Ganjar, Walikota Tegal Ganti Istilah Lockdown. Diambil 24 September 2020, dari Gatra.com website: <https://www.gatra.com/detail/news/473659/kebencanaan/diminta-ganjar-wali-kota-tegal-ganti-istilah-local-lockdown>

- Firdaus, H. (2020). Jalan Kultural Sultan HB Melawan Penularan Virus Corona. Diambil 24 September 2020, dari Kompas.com website: <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/03/24/jalan-kultural-sultan-hb-x-melawan-penularan-virus-korona/>
- IMF. (2020). Global Financial Stability Report.
- Jamison, D. T., Gelband, H., Horton, S., Jha, P., Laxminarayan, R., Mock, C. N., & Nugent, R. (Ed.). (2018). Disease Control Priorities Improving Health and Reducing Poverty. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0527-1>
- Khambali. (2017). Manajemen Penanggulangan Bencana. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kusnadi. (2014). Virus. Diambil dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR.\\_PEND.\\_BIOLOGI/196805091994031-KUSNADI/BAb\\_V\\_I\\_\\_R\\_U\\_S.OK.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/196805091994031-KUSNADI/BAb_V_I__R_U_S.OK.pdf)
- Mas'ud, W., & Astrina, A. (2020). Problematika Kebijakan Krisis: Penanganan COVID-19 di Indonesia (No. 1). Yogyakarta.
- Mas'ud, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McConnell, A. (2011). Success? Failure? Something in-between? A Framework for Evaluating Crisis Management. *Policy and Society*, 30(2).
- News, U. (2020). Covid-19: Impact Could Cause Equivalent of 195 Million Job Losses. Diambil 24 September 2020, dari news.un.org website: [news.un.org/en/story/2020/04/1061322](https://news.un.org/en/story/2020/04/1061322)
- Padmawati, S., & Nichter, M. (2008). Community Response to Avian Flu in Central Java, Indonesia. <https://doi.org/10.1080/1364847081919032>
- Rosenbaum, L. (2020). Facing COVID-19 in Italy- Ethnicity, Logistics, and Therapeutics on the Epidemic's Front Line.

- Simsa, R., Ramender, P., Aghamanoukjan, A., & Totter, M. (2019). Spontaneous Volunteering in Social Crises: Self-Organization and Coordination. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(2).
- Wibawa, S. W. (2020). Nama Virus Corona Wuhan Sekarang SARS-CoV-2, Ini Bedanya dengan Covid-19. Diambil 26 September 2020, dari Kompas.com website: <https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19?page=all>

# MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUMBUHKAN KETAHANAN KELUARAGA DI BIDANG PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Irfai Muslim, M. Si.

## Pendahuluan

Sejak covid-19 ditetapkan sebagai wabah pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menjadi isu global, semua akses ruang pergerakan masyarakat dunia menjadi terbatas. Banyak negara beramai-ramai menutup diri dari negara lain dan menerapkan kebijakan *lockdown* untuk menutup semua akses keluar masuk negara tersebut. Adanya juga satu daerah menutup akses keluar masuk ke daerah lain. Hingga ada beberapa kampung atau perdesaan menerapkan kebijakan buka tutup masuk perkampungannya. Masyarakat pun dipaksa untuk tidak beraktifitas di luar rumah dan wajib berdiam diri di rumah selama kebijakan tersebut berlangsung.

Banyak negara menghentikan kegiatan yang bersifat kerumunan. Kegiatan perekonomian pun lumpuh seketika demi menghambat laju pertumbuhan virus covid-19 yang bisa menyebar begitu cepat. Kebijakan-kebijakan tersebut otomatis berimbas kepada daya beli masyarakat. Apalagi ada banyak masyarakat yang pendapatan ekonominya bersifat harian. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi keluarga dan masyarakat yang terdampak. Melakukan kegiatan usaha setiap hari saja sepi pembeli, ditambah dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mau tidak mau

harus diikuti karena alasan prosedur kesehatan dan keselamatan jiwa. Hal tersebut pasti berdampak pada pendapatan perekonomian menengah ke bawah.

Adanya pandemi wabah covid 19 ini, keluarga menjadi bagian terkecil dari masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah setempat yang memaksa masyarakat harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, semisal peraturan pembatasan sosial berskala besar, atau diberlakukannya jam malam, dan sebagainya. Implikasi dari dampak tersebut, membuat adanya sebuah dorongan pemikiran bahwa keluarga atau masyarakat harus memiliki ketahanan di berbagai sektor dalam menghadapi pandemi wabah covid 19 ini.

Ketahanan keluarga menjadi penting untuk didiskusikan terkait problematika-problematika yang muncul dengan adanya pandemi wabah covid 19 ini. Karena pada masa-masa sulit ini, jelas lah keluarga akan menjadi sasaran empuk bagi keberlangsungan eksistensinya di masa yang akan datang. Di samping itu pula ketahanan keluarga menjadi isu yang menarik untuk diangkat ke permukaan terkait persoalan-persoalan yang muncul sebelum wabah pandemi ini datang. Euis Sunarti (2015) menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi akar masalah dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia, di antaranya; 1) program pembangunan keluarga masih belum serius dan tuntas karena belum memahami bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang bisa mempengaruhi arah kebijakan pembangunan. 2) belum terpadu dan terintegrasinya program dari pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait kesejahteraan keluarga. 3) kurang tepatnya pendekatan, metode, dan kecukupan pembinaan dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga. 4) belum memadainya riset-riset yang membangkitkan program-program ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia.

Sejak pandemi wabah covid 19 menjadi momok yang menebar ketakutan di tengah-tengah masyarakat, ketahanan keluarga dari berbagai sisi ikut diuji keberlangsungannya. Ujian ketahanan keluarga itu dimulai dari bagaimana keluarga bisa memiliki ketahanan dalam dunia pendidikan

bagi anak-anaknya, keluarga bisa menjadi penopang dan tetap eksis dalam memenuhi kebutuhannya, keluarga menjadi perantara menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, dan juga bagaimana sebuah keluarga merespon dengan baik praktik keagamaan di masa pandemi yang serba terbatas.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 52 tahun 2019 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam Undang-Undang tersebut ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan dengan sangat jelas. Menurut Undang-undang, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dari definisi tersebut, terlihat sangat jelas, bahwa ketahanan keluarga salah satunya menjadi indikator dari kesejahteraan lahir dan batin. Tinggal bagaimana kemampuan implementasi di lapangan dalam merealisasikan maksud dan tujuan dari definisi yang diutarakan oleh undang-undang tersebut.

Definisi lain tentang ketahanan keluarga dari para pakar tidak jauh berbeda dari definisi yang dikonsepsi dari undang-undang. Merujuk pada pendekatan sistem, Euis Sunarti (2015), mengatakan bahwa definisi ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga mengelola sumber daya keluarga, mengelola dan menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi untuk mencapai sebuah tujuan kesejahteraan keluarga. Masih menurut Euis Sunarti (2015) ada tiga faktor laten dalam ketahanan keluarga, yaitu: ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Dari sini patut menjadi perhatian yang sangat serius bahwa di era pandemi ini, keluarga harus bisa mengatasi persoalan-persoalan yang menyimpannya di tengah-tengah pandemi wabah covid 19 yang sudah menyebar di tengah masyarakat dunia. Artinya ketahanan keluarga juga harus bisa menjawab berbagai macam masalah dan tantangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga keagamaan.

Perhatian terhadap keempat bidang ini (pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan) menjadi sebuah magnet dalam merancang dan membangun sebuah ketahanan keluarga. Dalam bahasa agama, membangun keluarga yang dinaungi dengan penuh rasa ketenangan (*Sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan juga saling kasih mengasihi (*warohmah*). Keluarga merupakan miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menjadi salah satu kualitas masyarakat karena keluarga mencerminkan kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan menjadi institusi pertama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari situ lah lahir pribadi-pribadi yang tumbuh dan berkembang, juga bisa menjadi penentu kualitas kehidupan ke depan. Keluarga menjadi garda terdepan dalam menjalankan nilai-nilai dasar dalam membangun keluarga yang berkualitas dan harmonis. Keluarga juga memiliki peran dan fungsi yang mesti dijalankan dalam praktek berkeluarga. Menurut Euis Sunarti (2015), keluarga memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan emosi dan perkembangan seperti sosialisasi anak, loyalitas, dan juga moral. Adapun keluarga pada fungsi instrumental berhubungan dengan perolehan pemenuhan kebutuhan sumber daya ekonomi dan juga pengelolaan untuk mencapai berbagai macam tujuan dari suatu keluarga. Dari kedua fungsi tersebut jelaslah bahwa keluarga menjadi salah satu faktor kunci membangun pribadi yang unggul, penuh kharismatik, berkarakter, berdaya saing, memiliki etos kerja, dan juga kemampuan menjadi calon pemimpin bangsa atau masyarakat.

Selain fungsi di atas, ada juga fungsi lain yang mesti dijalankan oleh keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2018), ada 8 (delapan) fungsi keluarga, yaitu (a) fungsi keagamaan, (b) sosial budaya, (c) cinta kasih, (d) ekonomi, (e) melindungi, (f) sosialisasi dan Pendidikan, (g) reproduksi, (h) pembinaan lingkungan. Keberfungsian keluarga ini akan berlangsung sepanjang kehidupannya. Karenanya ketahanan keluarga sangat penting sekali bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Masih menurut Euis Sunarti (2015), bahwa keluarga punya tugas untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat

manusia. Di antara tugas tersebut yaitu: 1) pemeliharaan kebutuhan fisik, 2) alokasi sumber daya, 3) pembagian tugas, 4) sosialisasi anggota keluarga, 5) reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga, 6) pemeliharaan tata tertib, 7) penempatan anggota di masyarakat luas, dan 8) pemeliharaan moral dan motivasi. Dari tugas-tugas keluarga ini, bisa menjadi barometer tantangan ketahanan keluarga di masa depan agar tetap terjaga eksistensinya.

Dari beberapa fungsi dan tugas keluarga tersebut, mengelola sumber daya manusia dalam keluarga tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu membangun ketahanan keluarga dalam berbagai bidang, seperti ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan. Tujuan utama tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa keterlibatan dari berbagai pihak, khususnya para anggota keluarga. Dari sini lah kemudian timbul satu ide, bagaimana mengelola sumber daya manusia yang unggul yang tumbuh dari sebuah keluarga yang memiliki ketahanan di berbagai bidang. Sedarmayanti (2007) menyatakan, bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia unggul ada beberapa sifat keunggulan yang bisa diterapkan, yaitu, kepemimpinan, otonomi, pengendalian, keterlibatan, pembaharuan, dan juga integritas. Ketahanan keluarga akan menjadi modal penting dalam upaya menciptakan keberlangsungan dan keberlanjutan keluarga unggul di masa depan. Hal ini juga akan sangat berkorelasi dan turut serta membantu untuk kemajuan bangsa dan negara yang berbudaya dan memiliki peradaban.

### **Ketahanan Keluarga Bidang Pendidikan**

Pendidikan menjadi perhatian yang sangat serius dalam rutinitas kegiatan keluarga di masa wabah pandemi ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberhentikan pembelajaran tatap muka di kelas pada semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, pendidikan formal maupun non formal. Karena mereka (baca: Lembaga Pendidikan) harus mampu membentuk dan menciptakan satu metode pembelajaran yang berbasis teknologi

informasi untuk mengurangi pembelajaran tatap muka secara langsung. Selain itu kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi juga mesti ditingkatkan demi kelancaran program tersebut.

Pendidikan di masa pandemi ini memiliki tantangannya sendiri bagi semua orang. Tantangan ini tidak hanya dialami oleh praktisi pendidikan yang harus beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, namun juga orang tua di rumah yang menjadi penggerak keluarga harus punya strategi tersendiri dalam mengatasi problematika yang dihadapi pada saat anak-anaknya belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (*on line*). Rutinitas pendidikan anak-anak yang awalnya diserahkan sepenuhnya di sekolah, harus pindah ke rumah. Hal ini menjadi tantangan yang menarik bagi para orang tua, karena walau bagaimana pun, keluarga menjadi titik balik bagi pendidikan anak-anaknya.

Hatimah (2016) menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, akan tetapi orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Subarto (2020), peran pendidikan yang selama ini dilaksanakan di satuan Pendidikan, kini beralih fungsi perannya pada satuan keluarga. Di sinilah peran orang tua dalam menjawab tantangan pendidikan keluarganya untuk menerapkan *self-regulating* pada anak-anaknya agar mereka memiliki karakter kuat dalam berdisiplin pada dirinya.

Menurut Subarto (2020), ada beberapa strategi orang tua dalam membangun *self-regulating* di dalam keluarganya. Tentu strategi ini bersifat gradual untuk diaplikasikan dalam keluarga, melihat dari situasi dan kondisi internal keluarga tersebut. Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam memberlakukan *self-regulating*, di antaranya yaitu:

- a) Mendiskusikan aturan-aturan yang perlu diterapkan di rumah;
- b) Memberikan masukan kepada anak-anak perilaku apa saja yang harus menjadi teladan baginya untuk mencapai prestasi yang diinginkan;
- c) Memberikan teladan bagaimana anak-anak tetap berhubungan baik dengan guru dan teman-temannya selama di rumah;

- d) Mengajarkan anak-anak untuk bisa mengontrol emosinya, dan memberitahukan dampak dari sikap tersebut;
- e) Menjadi seorang sahabat bagi anak-anaknya dalam menghadapi tugas belajarnya, teman diskusi, dan memecahkan masalah Bersama;
- f) Memberikan strategi yang konkret bagi anak-anak agar mereka bisa mempertahankan kemampuan belajarnya;
- g) Memberikan arahan kepada anak-anak bagaimana mempraktekkan cara belajar yang efektif dengan mencari literatur yang diinginkan;
- h) Memberikan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada anak-anak untuk mengerjakannya secara mandiri dengan diberikan satu panduan arah untuk menyelesaikannya.

Strategi membuat *self-regulating* di atas setidaknya mengajarkan kepada keluarga, agar menjadi pribadi yang konsisten terhadap apa yang menjadi komitmen bersama dalam hubungan personal keluarga. Tentu Ketika aturan-aturan tersebut dibangun dalam keluarga, ini menjadi awal dari ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan kepada anak-anaknya. Karena sejatinya pendidikan itu tidak lain adalah pembiasaan dalam perilaku. Ketika komitmen-komitmen keluarga dalam membangun pendidikan melalui *self-regulating* tersebut terlaksana dengan baik, maka ini menjadi titik awal dalam proses mendidik bagi anak-anaknya. Sehingga ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan menjadi nyata dengan proses tersebut. Tinggal setelah itu proses-proses selanjutnya dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak berhenti hanya pada masa pandemic covid 19.

Oleh karenanya, ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh para wali murid. Keluarga bisa menjamin berjalannya proses pendidikan dan transfer ilmu pengetahuan bisa terlaksana dengan baik. Wali murid tidak harus bergantung dengan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan dalam hal ini kepada para guru, guru hanya memandu atau menjadi fasilitator dari luar rumah. Meskipun faktanya, proses pendidikan dan transfer ilmu yang dirasakan peserta didik di rumah tidak semulus dan semudah ketika di Sekolah. Butuh *effort* lebih bagi para orang tua dan juga guru untuk mengatasi kejenuhan

belajar peserta didik. Mungkin Ketika peserta didiknya sudah sampai pada level sekolah menengah ke atas hingga perguruan tinggi yang dirasa cukup punya banyak solusi dalam mengatasi kejenuhan belajar, namun peserta didik pada level sekolah menengah pertama, hingga pendidikan anak usia dini barangkali akan lebih banyak menemukan kesulitan, karena stabilitas belajarnya belum mapan layaknya mahasiswa.

Dengan adanya ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan, anggota keluarga memiliki kemandirian dalam bidang pendidikan. Mereka mampu mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Boleh jadi ke depan, sekolah formal hanya sebagai pelengkap dan pemanis saja, sama halnya seperti praktek pendidikan yang sudah terlaksana sebelumnya semisal *homeschooling*. Di mana praktek pendidikan ini dilaksanakan di rumah, namun memiliki semangat legalitas layaknya seperti sekolah formal pada umumnya.

### **Ketahanan Keluarga Bidang Ekonomi**

Selain ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan diuji di masa pandemi ini, bidang ekonomi juga menjadi sorotan yang sangat serius bagi keluarga. Tentu hal ini berkelindan dengan penerapan kebijakan pemerintah untuk membatasi bahkan memberhentikan aktifitas ekonomi masyarakat untuk tidak berkerumun dalam jumlah besar. Tidak hanya aktifitas ekonomi masyarakat yang diberhentikan, tetapi seluruh aktifitas kegiatan perekonomian yang ada hubungannya bertemu dengan banyak orang diberhentikan, hingga banyak perkantoran dan perusahaan, pegawai dan karyawannya di rumahkan.

Semua orang bekerja yang mendatangkan kerumunan dihentikan. Pasti semua akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya perusahaan besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga kena dampak yang luar biasa. Sangat mungkin terjadi UMKM menjadi garda terdepan dalam guncangan besar wabah pandemi covid 19. Survei yang dilakukan oleh Abdurrahman FT (2020), bahwa 50 % para pelaku UMKM dalam beberapa tahun ke depan akan banyak yang gulung tikar karena terdampak kebijakan pemerintah dalam menangani wabah pandemi covid 19.

Menurunnya pendapatan dari sektor ekonomi ini, menurut pemerintah akan terjadi resesi ekonomi besar-besaran. Maka harus diantisipasi oleh setiap keluarga dengan membangun ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Bagaimana sebuah keluarga mengolah tantangan yang ada menjadi peluang usaha yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Karena walau bagaimanapun, kemandirian ekonomi sangat diperlukan bagi setiap keluarga untuk menjaga keberlangsungan hidupnya di muka bumi.

Untuk menciptakan *sustainability* atau keberlanjutan usaha kecil dan menengah, harus memperhatikan beberapa hal. Menurut *Chartered Institute of Personnel and Development* (CIPD, 2011), yang disitasi oleh Muhammad Irfai Muslim *et al* (2017), ada 8 hal yang harus diperhatikan dalam keberlanjutan usaha kecil dan menengah, yaitu:

- 1) *Alignment*; Keselarasan visi dan misi antara pimpinan dan anggotanya. Tujuannya untuk menciptakan persepsi yang sama agar tujuan yang diinginkan tercapai.
- 2) *Shared purpose*; Memiliki tujuan bersama yang mudah dipahami dan bisa dijalankan oleh seluruh anggota. Semua bisa berperan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 3) *Leadership*; Kepemimpinan menjadi modal utama bagi pemilik usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik. Kepemimpinan juga harus menerapkan gaya yang tepat, sehingga bisa membawa dampak perubahan baik yang signifikan bagi perkembangan usaha.
- 4) *Locus of engagement*; Melibatkan seluruh tim yang menjadi bagian usaha tersebut. Keterlibatan langsung oleh semua anggota usaha, memiliki efek bagi keberlanjutan usaha. Karena semua merasa dihargai dan punya kontribusi terhadap usaha tersebut.
- 5) *Assessment and evaluation*; Penilaian dan evaluasi menjadi hal penting bagi kegiatan usaha. Poin ini menjadi sebuah data yang dibutuhkan untuk mengambil satu keputusan yang tepat bagi keberlangsungan usaha di masa depan. Penilaian dan evaluasi harus menjadi proses yang terus menerus dilakukan, hal ini dilakukan untuk memudahkan membuat Langkah-langkah terobosan dalam pengembangan usaha kedepan.

- 6) *Balancing short and long-term horizon*; Merespon perubahan yang semakin cepat dengan penerapan kebijakan yang fleksibel. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan tujuan yang bersifat jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Prioritas tujuan jangka panjang menjadi utama dalam pengelolaan suatu usaha.
- 7) *Agility*; Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro di era saat ini harus terbuka dan proaktif terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Keterbukaan ini akan membantu pemimpin dan anggotanya agar cekatan dalam merespon perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk pola pikir yang terus bergerak, berubah dan siap beradaptasi.
- 8) *Capability building*; Membangun keterampilan bagi yang terlibat dalam semua kegiatan organisasi dalam hal ini adalah unit usaha mikro kecil dan menengah. Membangun keterampilan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pengembangan usaha di masa depan agar tetap *sustainable*. Organisasi memastikan bahwa kemampuan anggota hari ini bisa menjawab tantangan perubahan usaha kedepan.

Di masa pandemi ini, seiring kebijakan pemerintah yang tidak menentu, kiranya setiap keluarga mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Tentu ini bukan jalan yang mudah untuk ditempuh dalam menciptakan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Namun upaya-upaya tersebut bisa menjadi modal setiap keluarga untuk bisa menjadi pelaku usaha sebagai benteng mempersiapkan keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keluarga yang memiliki kemandirian ekonomi, tidak akan tergantung dengan bantuan pemerintah. Mereka bisa menciptakan peluangnya sendiri di masa pandemi ini.

Ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi ini bisa diawali dengan memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan oleh media sosial. Tentunya, untuk menjalin relasi ekonomi yang pertama kali dilakukan adalah memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Semisal produk-produk lokal yang bisa kita kampanyekan untuk dipasarkan di platform digital. Kreatifitas dan inovasi dalam menjalankan usaha kecil dan

menengah sangat diperlukan. Sekecil apapun barang yang ditawarkan, kalau pandai mempromosikan dan menarik perhatian banyak orang di media sosial, itu bisa jadi awal dari proses ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi covid 19. Ini artinya, kegiatan membangun ketahanan ekonomi keluarga bisa dimulai dengan membangun usaha sendiri dari rumah. Setiap orang, memiliki sisi jiwa kewirausahaan yang bisa dipraktekkan dengan keterbatasan ruang gerak yang dialami. Ada satu adagium mengatakan, ada kemauan, pasti ada jalan terang yang membentang. Dengan kondisi serba terbatas ini, nyatanya kita bisa keluar dan bebas tidak terjerat oleh keterpurukan.

### **Ketahanan Keluarga Bidang Sosial**

Pada situasi sekarang, ruang sosial kita sangat dibatasi. Dalam hal ini yang paling terasa adalah keterbatasan ruang sosial yang sifatnya bertemu fisik secara langsung. Bagaimanapun, pertemuan fisik itu punya nilai yang sangat bermakna dan berarti bagi setiap orang, terlebih bertemu dengan orang-orang yang dicintai dan diharapkan kehadirannya. Namun ruang sosial itu menjadi ujian yang nyata bagi kita demi menjamin keselamatan orang-orang yang kita cintai dan sayangi.

Keterbatasan ruang gerak dan ruang sosial kita, tidak menyulutkan masyarakat untuk tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Ruang sosial yang dulu bisa digunakan sebelum masa pandemi untuk kegiatan silaturahmi dan juga berinteraksi dengan orang banyak, sekarang menjadi aktifitas yang harus dikurangi. Tujuannya cuma satu, hanya untuk menjaga keselamatan jiwa setiap orang.

Di masa pandemi ini, ketahanan keluarga dalam bidang sosial juga bisa dibangun tidak hanya sebatas di ruang nyata. Namun juga bisa dibangun melalui dunia maya. Boleh jadi, persepsi sebagian orang sebelum masa pandemi datang, orang yang banyak beraktifitas melalui dunia maya, dan kurang bergaul di dunia nyata dianggap individualis, tetapi sekarang boleh jadi anggapan itu bisa berubah. Karena nyatanya kebutuhan interaksi untuk saat ini harus lebih banyak bersifat *online*. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan komunitas setiap orang.

Masyarakat Indonesia yang memiliki kultur sosial yang sangat baik, sangat mampu untuk tetap bersosialisasi di dunia maya. Ditambah lagi tradisi *local wisdom* yang dimiliki masyarakat sangat membantu untuk tetap membangun ketahanan sosial dengan saling membantu satu sama lain. Berdasarkan survei dan melihat beberapa fenomena sebagian masyarakat yang tetangganya dinyatakan positif, mereka tetap membantu dan memberikan dukungan kepada keluarga tersebut untuk kuat dan kembali sehat. Keharmonisan masyarakat pun dibuktikan dengan membantu menyuplai kebutuhan sehari-hari tetangganya selama 14 hari masa isolasi mandiri di rumah. Dari contoh perilaku masyarakat tersebut di masa pandemi ini, membuktikan bahwa masyarakat atau keluarga masih memiliki ketahanan sosial. Artinya, di masa pandemi ini, tidak merubah secara signifikan kultur masyarakat menjadi individualis. Masyarakat masih memiliki rasa empati terhadap masyarakat lainnya.

Modal sosial bagi setiap keluarga sangat penting untuk menciptakan ketahanan keluarga dalam bidang sosial. Menurut Ali Imron dan Muhammad Syafaat (2020), modal sosial merupakan seperangkat norma dan nilai yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Menurutnya, modal sosial ini menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi kesulitan yang dialaminya. Modal sosial yang diimplementasikan dalam sebuah kelompok akan membentuk polanya sendiri dan menumbuhkan suatu kepercayaan di sekitarnya. Sehingga dengan modal sosial dalam mengimplementasikan norma-norma seperti saling percaya, menjaga kejujuran dapat membentuk jaringan sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kondisi terpuruk. Karena dengan modal sosial itu masyarakat menjadi saling bahu membahu, tidak adanya sifat eksklusif di antara kelompok, tidak adanya sifat saling curiga. Hal ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan ketahanan keluarga dalam bidang sosial.

Coleman (1988), yang disitasi oleh Rusydi Syahara (2003) mengungkapkan bahwa modal sosial sangat berperan terhadap modal manusia dengan proses yang berlangsung di dalam keluarga dan masyarakat. Menurutnya ada tiga unsur utama yang menjadi pilar dari modal sosial. Pertama, harapan dan kewajiban yang timbul dari rasa kepercayaan pada lingkungan sosial. Artinya bahwa rasa kepercayaan yang sudah tertanam

dalam diri sanubari seseorang menimbulkan rasa peduli akan hak-hak yang harus dipenuhinya. Interaksi pun menjadi mudah dan bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pilar kedua dari modal sosial yaitu adanya pola komunikasi yang nyaman dan lancar dari berbagai struktur sosial yang ada. Dengan pilar ini akan mendorong perkembangan kegiatan di masyarakat karena tidak adanya gap dalam berkomunikasi. Pilar ketiga modal sosial yaitu mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan kejelasan dan efektifitas penerapan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen di dalam masyarakat untuk saling menghormati nilai-nilai yang telah diterapkan.

Dari beberapa pilar modal sosial tersebut, sebuah keluarga bisa memulai membangun ketahanan bidang sosialnya dari rumah dengan pilar-pilar modal sosial tersebut. Di masa pandemi ini yang mana kita tidak tahu ujung berhentinya sampai kapan, tidak menutup kemungkinan dapat merubah kondisi tatanan sosial masyarakat yang sudah mapan. Hal ini, boleh jadi karena dampak aktifitas yang selalu menggunakan pola komunikasi lewat *online* dan jarang nya bertemu secara fisik, sehingga bisa jadi merenggangkan rasa empati, *tepo seliro* atau tenggang rasa, dan juga gotong royong. Dengan begitu, jangan sampai dengan adanya pandemi wabah covid 19 ini melemahkan sisi sosial dan kepedulian antar sesama manusia.

Djamaludin Ancok (2003), juga memperkuat pembagian dari ketiga pilar di atas dengan beberapa kategori. Menurutnya ada dua kategori dalam membangun modal sosial di tengah masyarakat. *Pertama*, modal sosial yang titik tekannya ada pada membangun jaringan sosial. Dari kategori ini, bahwa modal sosial akan semakin kuat jika suatu masyarakat memiliki jaringan kerjasama baik itu secara internal komunitas sosial maupun jaringan hubungan antar komunitas sosial yang lain. Jaringan kerjasama yang saling bersinergi akan menimbulkan efek kebermanfaatn bagi masyarakat secara lebih luas. *Kedua*, pada kategori ini, modal sosial dimaknai sebagai serangkaian nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki setiap anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya suatu hubungan kerjasama yang baik. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada

kategori yang kedua ini menurut Schwartz (1994) yang disitasi Djamaludin Ancok (2003), yaitu:

- 1) *Universalism*. Nilai-nilai yang digunakan untuk memahami orang lain seperti mengapresiasi, toleransi, serta melindungi manusia dan makhluk lainnya.
- 2) *Benevolence*. Nilai-nilai yang dibangun untuk kesejahteraan dan pemeliharaan orang lain.
- 3) *Tradition*. Nilai-nilai yang mengandung unsur terhadap penghargaan, komitmen, dan menerima terhadap tradisi dan gagasan ataupun ide yang dibangun dari budaya tradisional.
- 4) *Conformity*. Nilai-nilai yang berkaitan dengan menahan diri terhadap tindakan dan perilaku yang bisa menyebabkan kerugian atau merugikan pada orang lain.
- 5) *Security*. Nilai-nilai yang mengandung keamanan, keselamatan, dan juga stabilitas masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dari keterangan di atas, patut dipahami bahwa modal sosial menjadi bagian dari modal insani bagi masyarakat. Di masa pandemi ini, ketahanan sosial sebuah keluarga bisa tercipta dengan baik manakala proses-proses dari beberapa kategori dan pilar-pilar modal sosial diimplementasikan secara nyata di lingkungan keluarga. Artinya walau pun pola komunikasi saat ini lebih cenderung kebanyakan menggunakan media *online*, namun wujud dari nilai-nilai sosial kemanusiaan harus tetap menjadi landasan dalam berhubungan sosial, sehingga ketahanan keluarga di bidang sosial tetap terpelihara dengan baik.

### **Ketahanan Keluarga Bidang Keagamaan**

Di era digital, pengetahuan apapun bisa kita cari di mesin pencari. Sebagian ada yang sesuai dengan yang diharapkan, sebagian lagi tidak. Namun, seberapa pun kita dapatkan informasi pengetahuan tersebut, tidak serta merta diterima mentah-mentah secara langsung, tetapi harus diolah dan didiskusikan terlebih dahulu agar menjadi informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan.

Penggunaan media sosial khususnya di masa pandemi ini semakin meningkat, ditambah hampir seluruh kegiatan baik dalam bentuk sosial, pendidikan, juga dakwah dikemas dalam bentuk digital. Masyarakat begitu mudah untuk mengakses berbagai informasi melalui berbagai platform media digital. Hal ini juga berkorelasi dengan informasi terkait tentang keberagaman masyarakat. Dengan berkembangnya media dakwah digital yang kadang tidak mengedukasi masyarakat dengan baik, atau bahkan malah menyalah-nyalahkan praktek keagamaan masyarakat lain.

Dalam konteks ini, khususnya di masa pandemi ini, ketahanan keluarga bidang keagamaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena ini juga imbas dari dibatasinya kegiatan yang mengundang banyak orang. Pengajian-pengajian di majlis taklim dibatasi, kegiatan dakwah dibatasi, dan lain-lainnya. Ini artinya untuk menjawab problematika tersebut, masyarakat butuh ruang digital tersendiri untuk mengisi jiwa-jiwa mereka dengan ajaran-ajaran agama yang baik dan benar. Menurut M Jamil Yusuf (2020), di masa pandemi ini, harus bisa mengambil hikmah terutama kaitannya dengan dakwah. Menurutnya, dunia dakwah saat ini harus lebih inovatif, kreatif, dan juga bersifat kolaboratif.

Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat religius. Oleh karenanya kebermasyarakatan kita sarat akan makna nilai-nilai filosofi, semisal gotong royong, tenggang rasa dan lain sebagainya. Berangkat dari sini, pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi prioritas di masa pandemi. Bagaimana masyarakat yang beragama mengetahui ajaran agamanya dan bisa mempraktekkannya dengan baik dan benar di masa pandemi ini. Ketahanan keluarga bidang keagamaan ini bertujuan agar setiap kepala keluarga dan anggotanya mengetahui dengan baik ajaran agama yang dianutnya. Semisal pemeluk agama Islam, mereka harus memiliki konsep pengetahuan agama yang harus dipraktekkan dalam keseharian. Pemahaman mereka tentang fikih di masa pandemi menjadi sesuatu yang serius untuk dilakukan oleh setiap anggota keluarga.

Fariied F Saenong *et al* (2020), mengatakan bahwa adanya pandemi ini mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk menjalankan ibadah. Di masa pandemi ini fikih memandang fleksibilitas dalam mempraktekkan ajaran Agama Islam. Masih menurut Fariied F

Saenong *et al* (2020), menyatakan bahwa fikih pada dasarnya bersifat fleksibel dan sangat terbuka terhadap perubahan. Kapan pun dan di mana pun bahaya datang, atau ada potensi madharat kepada orang lain, maka ibadah yang dilaksanakan secara normal dapat berubah sedemikian rupa sesuai tuntunan syariat Islam. Semisal, jika seseorang beribadah tidak mampu berdiri, maka dapat dilakukan dengan duduk, berbaring dan seterusnya. Selain itu semisal masalah haji. Dalam syaratnya perjalanan ibadah haji harus dijamin keamanannya. Jika ada peperangan di suatu wilayah yang menghalangi menuju Mekah, maka kewajibannya menjadi gugur. Karena itu pula, haji ditiadakan di masa pandemi karena adanya potensi bahaya yang mengancam para jamaah.

Hal-hal semacam persoalan ibadah tersebut, bagi masyarakat awam sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, ketahanan keluarga dalam persoalan keagamaan ini, menjadi satu fondasi kuat bagi keluarga untuk melaksanakan ibadah dengan tetap dituntun oleh syariat Islam yang benar. Seperti halnya saat hari raya Idul Fitri tiba, masyarakat muslim dipaksa untuk melaksanakan shalat 'id dari rumahnya masing-masing. Persoalannya adalah, bagaimana tata cara melaksanakan shalat id tersebut ketika dilakukan di rumah. Kepala keluarga dan anggota keluarga sangat minim akan pengetahuan agama yang dimiliki. Di sini lah problem keluarga, yaitu pengetahuan agama yang minim. Rasanya tidak berlebihan jika ketahanan keluarga bidang keagamaan sangat penting untuk diupayakan. Agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan agama bisa diatasi dengan baik. Tentunya ini menjadi catatan sebuah keluarga, bahwa pengetahuan agama harus dimiliki, agar paling tidak bisa menjawab persoalan-persoalan sederhana yang setiap hari dilakukan oleh sebuah keluarga.

Keluarga yang memiliki pengetahuan agama yang baik, akan memiliki ketahanan keluarga bidang keagamaan. Artinya, bahwa setiap anggota keluarga harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Hal ini, selain untuk bekal hidupnya, juga agar memahami persoalan-persoalan kehidupan yang akan datang yang berkaitan dengan keagamaan. Meskipun pemahaman agama yang dimiliki tidak mendalam, minimal substansinya dipahami dengan baik. Kelebihannya ketika memiliki

ketahanan keluarga dalam hal keagamaan, paling tidak seseorang bisa menjadi pemimpin agama di rumahnya.

## **Penutup**

Keluarga merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi kemajuan suatu negara. Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia bagi bangsanya. Di masa wabah pandemi ini, ketahanan keluarga sedang diuji. Boleh jadi ketahanan keluarga menghadapi pandemi ini menjadi isu nasional yang harus dicarikan solusinya. Bagaimana pun keluarga itu menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan suatu negara.

Ketahanan keluarga dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan pada masa sulit ini menjadi hal yang dipertaruhkan. Apalagi jika sebelumnya peran keluarga pada ke empat bidang tersebut sangat lemah dan minim modal insani. Keluarga merupakan salah satu benteng bangsa, maka ketahanan keluarga dari ke empat bidang tersebut mesti diupayakan dengan baik. Salah langkah mengelola keluarga bisa jadi preseden buruk bagi kemajuan masyarakat. Oleh karenanya di masa pandemi ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun dan menyadarkan masyarakat kembali akan kemandirian keluarga secara penuh dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Di manapun anda berperan, pasti akan Kembali kepada keluarga. Sesulit apapun kondisi anda, seberapa banyak masalah anda, barangkali tempat ternyaman untuk Kembali adalah kepada keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap insan yang lahir dari kedua orang tuanya.

Mengelola sumber daya manusia unggul bisa dimulai dari ketahanan keluarga dalam berbagai bidang. Hal ini sebagai sebuah upaya bahwa di masa pandemi yang begitu sulit ini, keluarga masih bisa tetap eksis bergerak walau pun dibatasi ruang dan waktu. Keterbatasan ruang tersebut bukan menjadi persoalan di era digital ini, ada ruang lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu ruang kreatifitas, ruang inovasi dalam menciptakan ketahanan keluarga agar tidak terkikis habis oleh wabah virus sars covid 19. Ketahanan keluarga pada ke empat bidang ini, bisa menjadi program prioritas ke depan menuju keluarga yang sejahtera sesuai dengan pedoman undang-

undang. Di masa pandemi ini, mengelola sumber daya manusia dalam rangka menumbuhkan ketahanan keluarga bidang Pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan menjadi sebuah jihad tersendiri. Karena pandemi ini berdampak kepada berbagai sektor yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman Firdaus Thaha. 2020. *Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal Brand 2 (1). 147-153.
- Ali Imron dan Muhammad Syafaat. 2020. *Revitalisasi Home Industry Berbasis Modal Sosial Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Menghadapi Pandemi Covid 19*. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid 19. 97-101.
- Alimin Alwi. 2020. *Solidaritas Masyarakat Multikultural dalam Menghadapi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19, Indonesian Journal of Social and Environmental Issues. 33-36.
- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2018. *Kuatkan 8 Fungsi Keluarga untuk Kesejahteraan Indonesia* [Internet]. Diakses 30 September 2020 pada <https://www.bkkbn.go.id/>
- Djamaludin Ancok. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Jurnal Psikologika Vol. 8 (15). 1-11.
- Eka Sri Apriliana. 2020. *Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 (1). 19-28.
- Euis Sunarti. 2015. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*. Bogor: IPB Press.
- Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri, Hamka Hasan, et al. 2020. *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Pandemi*. Jakarta Selatan: NUO Publishing.
- Ihat Hatimah. 2016. *Keterlibatan Keluarga di Sekolah dalam Kegiatan di Sekolah dalam Perspektif Kemitraan*. Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 16 (2). 290-297.

- Muhammad Irfai Muslim, Anggraini Sukmawati, Utami Dyah Syafitri. 2017. *Implementasi Organisasi Pembelajaran bagi Keberlanjutan UKM Klaster Kerajinan Batik di Cirebon*. Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 16 (3). 294-309.
- M. Jamil Yusuf. 2020. *Hikmah Virus Corona dalam Perspektif Dakwah Islam*. Jurnal Al Bayan Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah Vol. 26 (1). 23-42.
- Rusydi Syahara. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 (1). 1-22.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarto. 2020. *Momentum Keluarga Mengembangkan Kemampuan Belajar Peserta Didik di Tengah Wabah Pandemi Covid 19*. 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 (1). 13-18.
- Undang-undang No. 52 Tahun 2019.

# ANTARA TRANSFORMASI KONGREGASI KEAGAMAAN DAN KONSOLIDASI NEGARA KESEJAHTERAAN: EKSPLORASI PENGALAMAN KANADA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

Muhammad Izzul Haq

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau sering disebut virus Corona. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia (WHO, 2020). Pandemi Covid-19 yang menyebarluas ke seantero dunia dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak merebak mulai akhir tahun 2019 telah memberikan pelajaran yang berharga bagi banyak negara. Sampai 30 September 2020 ini, Covid-19 telah menginfeksi 33.842.281 penduduk bumi yang tersebar di 235 negara/area/teritori di dunia dengan jumlah kematian sebanyak 1.010.634 jiwa (WHO, 2020). Dengan status pandemi yang disandang, kini telah tersedia katalog pelajaran Covid-19 lintas negara yang merujuk pada pengalaman baik itu kegagalan ataupun keberhasilan berbagai negara dalam menanggulangi Covid-19 serta tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya, termasuk langkah dalam merespon dampaknya.

Artikel ini ditulis dalam situasi kewaspadaan dibayangi gelombang kedua Covid-19 yang telah menghampiri Kanada mulai September 2020, dimulai dari metropolitan Montreal di Propinsi Quebec yang menjadi propinsi terparah dari segi jumlah korban jiwa meninggal. Gelombang

pertama sendiri dimulai sejak pertengahan Maret dan mulai menurun di penghujung Juni 2020. Dua provinsi terpadat di Kanada pada hari Senin 21 September 2020 telah mengumumkan dimulainya gelombang kedua. Quebec dan Ontario melaporkan lebih dari 1.000 kasus di antara mereka, dimana ada lonjakan 586 kasus di Quebec, meningkat 100 dibandingkan dengan Minggu. Sedangkan di Ontario, jumlah kasus menjadi 425, meningkat dari 365 di hari sebelumnya (Remiorz, 2020). Khusus untuk Montreal, per 1 Oktober 2020, resmi dinaikkan statusnya dari zona jingga menjadi zona merah yang berarti level kewaspadaan tertinggi yang berpotensi mengulang suasana *lockdown* sebagaimana di periode gelombang pertama.

Meski demikian, situasi kewaspadaan ini juga diiringi mulai berkembangnya pertanyaan dan keraguan sebagian kecil publik Kanada akan kebenaran Covid-19, berbagai spekulasi yang merebak di jagad maya bahwa Covid-19 adalah bagian dari konspirasi kalangan globalis, dan segala skeptisisme lainnya itu berpuncak dengan adanya demo menentang kewajiban bermasker di ruang publik seperti di Montreal pada 12 September 2020. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana Kanada meniti langkah dalam pandemi Covid-19 dengan melihat dua konteks yang dinamis dan berubah sebagai lensa membaca Kanada, yaitu kehidupan beragama masyarakat Kanada yang beragam, dan implementasi negara kesejahteraan Kanada, yang mana kedua konteks ini masing-masing mengalami redefinisi, untuk selanjutnya melakukan transformasi dan konsolidasi, yang itu menjadi penanda adaptasi menyosong *new normal* di era pandemi ini.

### **Selayang Pandang Kanada**

Kanada yang berpenduduk 37,59 juta jiwa berdasar sensus 2019, merupakan negara terluas kedua di dunia setelah Rusia, dengan luas 9,98 juta kilometer persegi, yang terbentang dalam 6 zona waktu dan terbagi dalam 10 propinsi dan 3 teritori, serta diapit oleh dua samudera Pasifik di barat dan Atlantik di timur serta laut Arktik di utara. Sebagaimana tetangga di belahan selatannya, Amerika Serikat, Kanada merupakan negara yang dibangun oleh para imigran yang mulai datang berbondong-bondong,

utamanya dari Inggris dan Prancis, yang mendirikan koloni di wilayah yang selama ribuan tahun dihuni penduduk pribumi asli, bangsa Aborigin atau Indian, yang kini baku dengan sebutan *Indigenous People* yang mencakup kelompok First Nations, Inuit, dan Metis. Kini, Kanada merupakan salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultural yang paling beragam di dunia dengan resepsi imigran berskala besar dibanding negara lainnya.

Kanada merupakan negara bilingual yang menjadikan Bahasa Inggris dan Bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlementer federal yang mengacu pada sistem monarki konstitusional, Ratu Elizabeth II dari Inggris menjadi kepala negara yang dalam praktiknya diwakili oleh Gubernur Jenderal. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum di tingkat federal yang dijabat oleh Justin Trudeau sejak 2015. Setelah lebih dari satu abad Kanada berada dibawah Inggris, akhirnya pada tahun 1982 Kanada menjadi negara yang berdaulat penuh dengan memiliki konstitusi sendiri. Hal penting lainnya yaitu ditambahkan Piagam Hak dan Kebebasan ke dalam konstitusi Kanada. Komitmen Kanada untuk melarang diskriminasi atas dasar agama, etnis, atau jenis kelamin semakin terpatri dalam konstitusi. Pada tahun 1985 Undang-Undang Multikulturalisme Kanada disahkan sebagai upaya pelestarian dan peningkatan multikulturalisme di Kanada dengan memastikan bahwa semua warga negara dapat menjaga, memelihara dan mengembangkan identitas mereka, baik itu identitas bawaan dari negara asal/atau keturunan. Hal demikian ini memberi jaminan kesetaraan semua warga Kanada. Identitas yang dimaksud tidak hanya menyangkut etnis tetapi juga bahasa dan agama.

### **Konteks Keragaman Kehidupan Beragama di Kanada**

Dalam lagu kebangsaan “O Kanada”, ada lirik yang berbunyi “Tuhan Jaga Tanah Kita Mulia dan Merdeka.” Versi resmi Bahasa Prancis dari lagu tersebut juga berisi refrein religius, yang menyatakan bahwa bangsa tersebut siap untuk memikul pedang dan “salib”. Hal ini menunjukkan betapa ada dimensi ketuhanan dalam jati diri bangsa Kanada. Namun, meski bait-bait lagu itu telah dinyanyikan selama beberapa dekade, lanskap religius Kanada

telah berubah. Memang dua pertiga penduduk Kanada (termasuk orang dewasa dan anak-anak) masih mengidentifikasi diri sebagai Katolik atau Protestan, tetapi kedua kelompok Kristen tersebut telah mengalami erosi substansial dalam publik Kanada. Data survei terbaru menemukan bahwa kini lebih banyak orang Kanada menganut agama minoritas daripada sebelumnya. Menurut analisis Forum Pew Research Center tentang Agama dan Kehidupan Publik, telah terjadi penurunan persentase orang Kanada yang mengidentifikasi diri sebagai Katolik dari 47% menjadi 39% selama empat dekade terakhir. Sementara persentase yang mengidentifikasi sebagai Protestan turun lebih tajam, dari 41% menjadi 27%.

Selain itu, terjadi peningkatan jumlah orang Kanada yang tidak memiliki afiliasi keagamaan. Data sensus Kanada menunjukkan bahwa persentase orang Kanada dalam kategori “tidak berafiliasi secara agama” naik dari 4% pada tahun 1971 menjadi 24% pada tahun 2011. Sementara itu, kehadiran mereka di acara keagamaan juga dilaporkan telah menurun. Menurut data dari Survei Sosial Umum Kanada, tingkat kehadiran pada layanan keagamaan telah turun secara signifikan di Kanada dalam beberapa dekade terakhir. Penurunan paling tajam terjadi pada periode 1980-an dan 1990-an, yang terus berlanjut hingga dekade terakhir. Penurunan jumlah kehadiran di gereja yang dilaporkan sendiri di Kanada ternyata lebih besar daripada di Amerika Serikat, di mana ukuran kehadiran di publik secara keseluruhan tetap relatif stabil atau sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Sekitar 20% populasi Kanada saat ini lahir di negara lain. Dengan jumlah kedatangan yang begitu besar, keberadaan imigran mengubah lanskap keagamaan Kanada. Pada 1970-an dan 1980-an, populasi kelahiran asing bagi warga Kanada lebih kecil, sebagian besar berasal dari Eropa. Mayoritas imigran (56%) yang tiba pada tahun 1970-an adalah Katolik atau Protestan, sementara sekitar seperempatnya berafiliasi dengan tradisi agama lain, termasuk Kristen Ortodoks Timur, Islam, Budha, Sikh, Hindu, dan Yahudi. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, peningkatan jumlah imigran - hampir setengah dari populasi imigran Kanada - datang dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah dan beragama non-Kristen. Sejak 2001, sekitar empat dari sepuluh (39%) imigran baru Kanada telah menjadi bagian

dari agama minoritas tersebut diatas, sama dengan imigran baru (juga 39%) yang mengidentifikasi diri sebagai Katolik atau Protestan. Karena imigran mencakup lebih dari seperlima populasi Kanada, meningkatnya jumlah imigran yang termasuk agama minoritas berdampak besar pada komposisi agama dari keseluruhan populasi. Karena asal-usul geografis imigran Kanada telah bergeser, begitu pula susunan agama mereka. Survei Pew Research Center pada 2018 menemukan bahwa kelima kelompok ini bersama-sama membentuk 8% penduduk dewasa Kanada. Menurut Survei Rumah Tangga Nasional Kanada 2011, terdapat 1.053.945 Muslim di Kanada, atau sekitar 3,2% penduduk Kanada. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di negara itu setelah Kristen. Di Greater Toronto Area (GTA), 7,7% populasi adalah Muslim, dan di Greater Montreal, 6% populasi adalah Muslim. Mayoritas populasi Muslim Kanada mengikuti Islam Sunni, sementara minoritas yang signifikan menganut aliran Syiah dan Ahmadiyah (Enviroics, 2016).

Meskipun agama minoritas terus berkembang, situasinya berbeda antar kota se-antero Kanada. Meningkatnya jumlah imigran di wilayah metropolitan seperti Toronto, Vancouver, dan Montreal telah membuat kota-kota ini (dan provinsi mereka, Ontario, British Columbia dan Quebec) menjadi sangat beragam secara agama. Begitupun dengan regulasi yang ada, salah satu yang mencolok dan tampak berbeda adalah Propinsi Quebec yang pada tahun 2019 memberlakukan undang-undang (dikenal dengan Bill 21) yang melarang dikenakannya simbol agama (seperti hijab, kalung salib, kippah, dan turban) oleh pegawai publik - termasuk guru, petugas polisi, dan hakim - di tempat kerja. Disahkannya Bill 21 ini membuat publik Quebec dan Kanada terbelah. Para pendukung Bill 21 mengatakan tindakan itu mendorong pemisahan gereja dan negara sekaligus menyempurnakan sekulerisme, adapun para penentangannya yang menantang undang-undang tersebut di pengadilan berargumen bahwa Bill 21 itu menargetkan wanita Muslim selain bakal mengikis kebebasan beragama. Tindakan Quebec ini seakan mengikuti langkah Perancis, yang dulu pernah mendirikan koloni di Quebec yang dikenal pula dengan julukan 'Perancis Baru/New French', yang melarang jilbab dan simbol agama lainnya di sekolah umum pada

tahun 2004, dan melarang cadar di semua tempat umum pada tahun 2011 (Lipka, 2019).

Berdasarkan survei Pew Research Center, ditemukan bahwa kebanyakan penduduk Kanada mengatakan pengaruh agama dalam kehidupan publik memudar di negara mereka. Sekitar dua pertiga orang dewasa Kanada (64%) mengatakan agama memiliki peran yang kurang penting di negara mereka dibandingkan dengan 20 tahun lalu. Meskipun mengakui pengaruh agama memudar di ruang publik, dalam praktek individual orang Kanada lebih religius daripada orang Prancis dan Inggris. Lebih dari setengah dari semua orang Kanada (55%) dalam survei Pew Research diatas mengatakan agama setidaknya tetap penting dalam hidup mereka, termasuk sekitar tiga dari sepuluh (29%) yang mengatakan itu sangat penting bagi mereka - lebih tinggi dari bagian yang mengatakan ini di Inggris, Prancis, dan sebagian besar negara Eropa Barat lainnya (Paras, 2020).

Sebelumnya, dalam Survei Rumah Tangga Nasional tahun 2011, sekitar 76 persen orang Kanada mengklaim memiliki identitas agama atau menganggap diri mereka sebagai anggota gereja atau denominasi tertentu. Jajak pendapat Angus Reid tahun 2017 juga menemukan mayoritas orang Kanada mengklaim percaya pada konsep fundamental agama seperti keberadaan Tuhan, intervensi ilahi, dan surga. Demikian halnya, meskipun sebagian besar orang Kanada beragama Kristen, meningkatnya imigrasi dari negara-negara di luar Eropa telah membuat Kanada tumbuh jauh lebih beragam secara agama dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyak orang Kanada yang mengklaim memiliki kepatuhan pada agama tradisional di Asia dan Timur Tengah.

Terlepas dari pilihan personal penduduk Kanada yang secara pribadi religius, sebagian besar orang Kanada menjunjung prinsip sekularisme dengan kuat. Adanya keragaman pemikiran tentang Tuhan dan moralitas agama, menjadikan penghormatan terhadap keyakinan orang lain sambil tetap memelihara keyakinan pribadi telah lama menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kanada sebagai negara yang damai dan kooperatif dalam hal toleransi antar umat beragama. Mayoritas orang Kanada menerima begitu saja gagasan bahwa agama adalah urusan privat yang bersifat personal. Secara politis, dukungan untuk konsep sekulerisme yang

ditandai dengan pemisahan gereja dan negara masih kuat diadopsi berbagai kekuatan di masyarakat. Berkembang pula gagasan bahwa politisi tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk mempromosikan nilai-nilai satu agama tertentu saat menjabat, begitu pula sebaliknya, pemimpin agama tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses politik.

### **Konteks Kanada sebagai Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan adalah sistem di mana negara melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya terutama yang membutuhkan bantuan sosial dan keuangan. (Hick, 2014). Negara kesejahteraan di Kanada sebagai suatu sistem intervensi kesejahteraan sosial yang menghimpun beragam program pemerintah mulai banyak diperluas pada tahun 1960-an - yang mentransfer uang dan layanan untuk menangani berbagai problem sosial, seperti kemiskinan, gelandangan, pengangguran, imigrasi, penuaan, kecelakaan kerja, disabilitas dan perlindungan anak-anak dan perempuan, serta pengakuan hak LGBT. Program utama negara kesejahteraan Kanada mencakup Bantuan Sosial (*Social Benefit*), Tunjangan Anak (*Child Benefit*), Jaminan Hari Tua (*Old Age Security*) dan Jaminan Penambahan Pendapatan (*Guaranteed Income Supplement*), Asuransi Kerja (*Employment Insurance*), Rencana Pensiun (*Retirement Plans*), Kompensasi Pekerja (*Employee's Compensation*), pendidikan publik, pengobatan, perumahan sosial dan layanan sosial. Program didanai dan disediakan oleh pemerintah federal, provinsi, dan kota dengan bertumpu pada pembiayaan berbasis pajak.

Menurut Asa Briggs (1961), definisi klasik negara kesejahteraan mencakup tiga kegiatan: adanya jaminan pendapatan minimum, berkurangnya kerawanan ekonomi akibat "risiko" seperti penyakit, penuaan dan pengangguran, dan tersedianya berbagai layanan sosial bagi semua anggota masyarakat. Dengan mengacu pada definisi tersebut, Kanada menjadi negara kesejahteraan setelah melalui serangkaian reformasi kesejahteraan sosial pada tahun 1960-an. Meskipun demikian, negara kesejahteraan di Kanada terus mengalami penyesuaian dan adaptasi seiring tekanan finansial dan berkembangnya beban masyarakat yang semakin menua (*aging society*). Periode ini diawali sejak tahun 1975 akibat adanya

perubahan program pelayanan sosial dan program dukungan pendapatan, kesejahteraan sosial yang tergerus. Salah satu indikasi lain yaitu adalah meningkatnya jumlah dapur umum dan bank makanan yang muncul sejak tahun 1980-an di seluruh Kanada, seiring juga dengan mulai meningkatnya jumlah tunawisma. Tanpa program perumahan yang memadai bagi penyandang gangguan jiwa, juga berkurangnya pembangunan perumahan sosial yang memadai, jumlah orang yang tinggal di shelter dan menjadi gelandangan di jalan-jalan telah meningkat. Meski demikian, sisi lain perkembangan positif adalah munculnya program-program Housing First di Toronto dan kota lain di Kanada, dengan fokus membantu para tunawisma untuk kembali ke lingkungan pemukiman mereka dan berintegrasi dengan sistem bantuan yang tersedia di lingkungan masing-masing.

Penuaan populasi juga menjadi salah satu masalah besar di Kanada. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kanada menambah beban kebutuhan yang lebih besar untuk perawatan lansia di rumah (*home care*) dan perawatan jangka panjang (*long term care*). Membantu warga Kanada untuk menabung lebih banyak demi masa depan pensiun mereka sendiri juga menjadi salah satu isu tersendiri. Meskipun program Jaminan Hari Tua (*Old Age Security*) dan Jaminan Penambahan Pendapatan (*Guaranteed Income Supplement*) telah membantu banyak orang keluar dari kemiskinan, masih ada kebutuhan untuk memperluas program Rencana Pensiun Kanada / Québec (*Canada/Quebec Pension Plan*) untuk memberikan pendapatan pengganti yang lebih besar di masa depan. Kredit pajak (*Tax Credit*) dan rencana tabungan yang ditanggihkan seperti Rencana Tabungan Pensiun Terdaftar (*Registered Pension Savings Plan*) telah memberikan manfaat yang cukup besar terutama bagi rumah tangga berpenghasilan tinggi, namun program tabungan individu semacam itu tidak membantu sebagian besar penduduk. Selain itu, seiring dengan semakin berkembangnya penyelesaian gugatan klaim tanah Indigenous People, meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan, air bersih, dan perumahan bagi komunitas Indigenous People menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah Kanada di masa depan. Begitupun, penyediaan bantuan bagi Indigenous People yang tinggal di luar kawasan reservasi menjadi tantangan lebih lanjut.

## **Konteks Kesejarahan Kanada menghadapi Pandemi Flu**

Philip Guedalla (1889-1944), sejarawan dan esais pop kultur asal Inggris, pernah berkata “Sejarah berulang dengan sendirinya. Sejarawan saling mengulang satu sama lain.” Pepatah lain dari Perancis mengatakan, *L’Histoire se Répète*, sejarah mengulang dirinya sendiri. Demikianlah ungkapan untuk menegaskan bagaimana seabad silam, Kanada juga pernah mengalami pandemi sakit pernapasan, yaitu Flu Spanyol. Wabah ini melanda Kanada antara 1918 dan 1920, menewaskan sekitar 55.000 orang dari populasi delapan juta penduduk Kanada. Kebanyakan korban adalah orang dewasa muda antara usia 20 dan 40 tahun. Pandemi flu tersebut tiba di Kanada berbarengan dengan kembalinya tentara Kanada dari front Perang Dunia 1, lantas para prajurit tersebut menyebarkan flu ini ke komunitas yang paling terpencil. Beberapa desa di Labrador dan Quebec begitu terdampak oleh penyakit itu, termasuk kalangan First Nations. Di Labrador, flu membunuh hampir sepertiga populasi Inuit dan memusnahkan beberapa komunitas *Indigenous People*.

Karena kemiskinan dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, angka kematian di kalangan penduduk Indigenous di Australia, Selandia Baru, Kanada dan Amerika Serikat akibat pandemi Flu Spanyol empat kali lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di perkotaan. Hal lain yang memperparah situasi adalah ketidakmampuan beberapa daerah dalam melakukan karantina. Semua fasilitas dan personel medis segera terbebani dengan membludaknya pasien akibat merebaknya wabah itu. Namun, wabah Flu Spanyol dalam sejarah kebijakan kesehatan di Kanada menjadi titik krusial penting dalam evolusi kesehatan masyarakat di Kanada. Warisan kebijakan dari pandemi ini adalah pembentukan Departemen Kesehatan di level federal pada tahun 1919, yang membentuk kemitraan antara berbagai tingkat pemerintahan dan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama di mana negara memainkan peran penting (Gismondi, 2020). Ini merupakan terobosan baru yang penting karena pemerintah federal memiliki otoritas untuk mengkoordinasikan dan mensupervisi kebijakan kesehatan masyarakat yang sebelumnya menjadi tanggung jawab otoritas propinsi dan pemerintah lokal.

Selain pembentukan Departemen Kesehatan federal, pemerintah Kanada menyusun draf pertama rencana pandemi Kanada. Lima pilar inti dari respons kesehatan masyarakat yang dimiliki Kanada saat ini merupakan warisan dari kebijakan penanganan pandemi Flu Spanyol pada masa itu, yaitu memastikan respons yang seragam dan terkoordinasi, mengeluarkan peringatan, menyebarkan informasi berbasis bukti, memantau penyakit sambil menyusun statistik, dan melacak pola pergerakan pandemi di seluruh dunia. Pelajaran penting dari pandemi Flu Spanyol pada masa itu mengingatkan akan pentingnya jalinan integrasi informasi kesehatan lintas propinsi dan teritori dalam federalism Kanada sekaligus dukungan untuk terbentuknya sistem perawatan kesehatan universal.

### **Menapak Jejak Kanada dalam Merespon Covid-19**

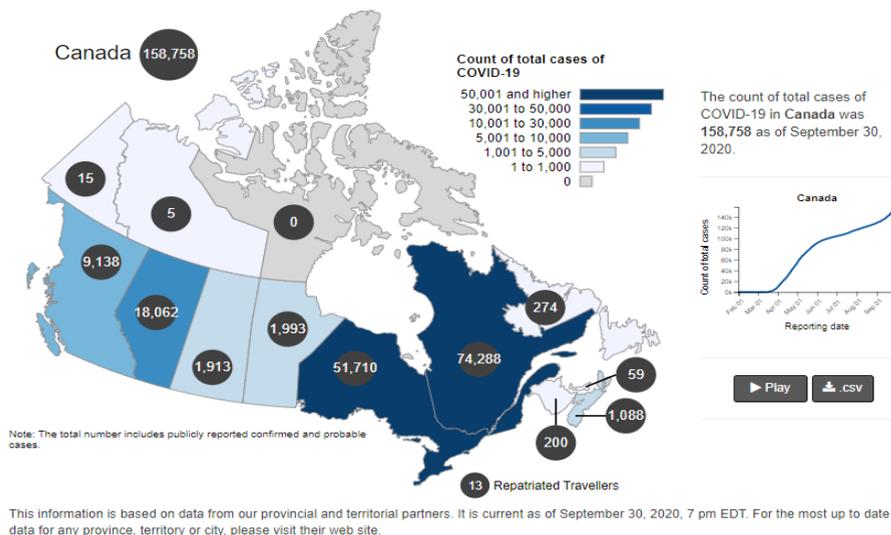
Covid-19 telah menjadi merek global yang menyebar luas ke segala penjuru dunia, tak terkecuali Kanada yang turut terdampak serius. Covid-19 dipastikan mencapai Kanada pada 27 Januari 2020, setelah seseorang yang kembali ke Toronto dari Wuhan, Hubei, Tiongkok, dinyatakan positif. Hingga artikel ini ditulis, sebagaimana tabel 1 dan gambar 1 berikut, data per 30 September 2020 menunjukkan total kasus Covid-19 seantero Kanada sebanyak 158.758 orang dengan jumlah meninggal 9297 jiwa. Dari total kasus itu, 74.288 orang berasal dari Propinsi Quebec dengan jumlah meninggal 5834 jiwa. Adapun metropolitan Montreal sendiri menyumbang angka kasus sebesar 33.736 orang dengan korban meninggal 3480 jiwa atau lebih dari 1/3 jumlah kematian akibat Covid-19 se Kanada berasal dari metropolitan ini.

**Tabel 1. Sebaran Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Propinsi dan Teritori  
(Data Hingga 30 September 2020)**

COVID-19 pandemic in Canada by province and territory, 30 September 2020, 2340 UTC (v·t·e)										
Province	Population	Tests	Per.k	Cases	Per.m	Recov.	Deaths	Per.m	Active	Ref.
British Columbia	5,110,917	544,271	106.5	9,138	1,788	7,485	234	45.6	1,284	[21]
Alberta	4,413,146	1,350,800	306.1	18,062	4,093	16,213	267	60.5	1,582	[22]
Saskatchewan	1,181,666	190,795	161.6	1,913	1,619	1,750	24	20.3	139	[23]
Manitoba	1,377,517	184,491	134	1,993	1,447	1,374	20	14.5	599	[24]
Ontario	14,711,827	3,923,465	266.7	51,710	3,515	43,907	2,848	193.6	4,955	[25]
Quebec	8,537,674	1,530,567	179.3	74,288	8,702	62,564	5,834	683.4	5,890	[26][27]
New Brunswick	779,993	77,042	98.8	200	256	192	2	2.6	6	[28]
Prince Edward Island	158,158	35,376	223.7	59	373	57	0	0	2	[29]
Nova Scotia	977,457	95,502	97.7	1,088	1,112	1,021	65	66.5	2	[30]
Newfoundland and Labrador	521,365	42,007	80.6	274	526	269	3	5.8	2	[31]
Yukon	41,078	3,402	82.8	15	340	15	0	0	0	[32]
Northwest Territories	44,904	5,256	117	5	111	5	0	0	0	[33]
Nunavut	39,097	2,981	76.2	0	0	0	0	0	0	[34]
Repatriated travellers	N/A	N/A	N/A	13	N/A	13	0	N/A	0	[35][36][37]
Canada	37,894,806	7,985,955	210.7	158,758	4,190	134,971	9,297	245.3	14,461	

Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19-19\\_pandemi\\_in\\_Canada](https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19-19_pandemi_in_Canada)

**Gambar 1. Peta Pandemi Covid-19 Berdasarkan Propinsi dan Teritori  
(Data Hingga 30 September 2020)**



Sumber: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?topic=tilelink>

Untuk merespon dampak Covid-19 tersebut, pemerintah Kanada harus menguras budget lebih dalam lagi, dengan prediksi mengalami defisit anggaran hingga \$343 milyar dan bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi sudah dipastikan minus akibat Covid-19. Ekonomi Kanada mengalami kontraksi dan akan sulit kembali normal seperti pra-Covid-19.

Pada pertengahan Maret 2020, saat kasus penularan dari komunitas dikonfirmasi, semua propinsi dan teritori di Kanada menyatakan keadaan darurat. Situasi demikian disusul dengan langkah masing-masing propinsi dan teritori, dengan derajat yang berbeda-beda, untuk menerapkan penutupan sekolah dan tempat penitipan anak (*day care*), larangan pertemuan, penutupan segala aktivitas bisnis non-esensial, pembatasan masuk, dan kewajiban isolasi diri bagi pelancong. Pada 24 Maret 2020, parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang Karantina yang secara hukum mewajibkan semua pelancong (tidak termasuk pekerja esensial) yang kembali ke Kanada untuk mengisolasi diri selama 14 hari.

Pada masa gelombang pertama, Covid-19 di Kanada menimbulkan dampak disruptif yang luar biasa, sama seperti halnya banyak negara lain di dunia. Ada tiga kelompok berisiko Covid-19 di Kanada, yaitu orang lansia (65 tahun ke atas), mereka yang berisiko karena kondisi medis yang dialami (misal penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit pernapasan kronis, kanker), dan mereka yang berisiko karena kondisi sistem kekebalan yang terganggu atau sedang menjalani perawatan medis (misal kemoterapi). Dari sekian kelompok itu, kategori terparah menimpa para lansia, khususnya yang memiliki komorbid, yang tinggal di panti perawatan jompo. Sekitar 400.000 penduduk lansia (atau 1% dari total populasi) Kanada saat ini tinggal di panti perawatan jompo. Jelang dua bulan sejak pengumuman pandemi, pada 6 Mei 2020, dilaporkan tercatat 3.436 kasus kematian karena Covid-19, berasal dari panti perawatan jompo, mewakili 82 persen dari 4.167 kematian yang dilaporkan pada 7 Mei 2020 (National Institute of Aging). Kanada memiliki proporsi kematian tertinggi dari Covid-19 dalam panti perawatan jompo di antara 14 negara.

Di Kanada, otoritas propinsi bertanggung jawab atas layanan kesehatan dan panti perawatan jompo warga lansia. Panti tersebut tidak dicakup oleh Undang-Undang Kesehatan Kanada (*The Canada Health Act/CHA*)

sehingga tidak ada standar atau pedoman federal atau nasional yang berlaku sama antar semua propinsi. Kelompok rentan terdampak Covid-19 di Kanada lainnya mencakup mereka yang mengalami hambatan ekonomi, kesulitan mengakses transportasi, kesulitan mengakses perawatan medis atau nasihat kesehatan, pekerjaan yang tidak stabil atau kondisi kerja yang tidak fleksibel, kondisi perumahan yang tidak aman, tidak memadai, atau tidak ada, mereka yang sedang menjalani perawatan medis khusus atau membutuhkan persediaan medis khusus, mereka yang mengalami isolasi sosial atau geografis, seperti di komunitas terpencil dan terisolasi, mereka yang kesulitan membaca, berbicara, memahami atau berkomunikasi, mereka yang memiliki kebutuhan pengawasan berkelanjutan atau dukungan untuk menjaga independensi, serta mereka yang kesulitan melakukan kegiatan pencegahan, seperti sering mencuci tangan dan menutupi batuk dan bersin.

### **Dinamika Kehidupan Keagamaan terkait Covid-19 di Kanada**

Adanya pandemi Covid-19 yang kemudian menutup tempat ibadah sejak pertengahan Maret sampai akhir Juni 2020, dilanjutkan dengan pembatasan jumlah pengunjungnya, memberikan dampak yang luar biasa dalam ekspresi ritual beragama. Berbagai perayaan keagamaan seperti Passover (Yahudi), Paskah (Kristen/Katolik), Ramadan (Islam), Khalsa (Sikh), dan Waisak (Hindu) pada kurun periode itu akhirnya dirayakan secara virtual dan online (Zimonjic, 2020). Namun, adanya Covid-19 ini juga membuat para pemimpin agama menggali kembali nilai dan narasi agama untuk meneguhkan semangat dan kekuatan para jamaah menghadapi momen Covid-19 dengan mengambil cerita dari teks agama (McKenzie-Sutter, 2020). Para pemimpin agama menyadari pentingnya memahami faktor yang meningkatkan ketahanan individu dan komunitas dalam suasana ketidakpastian.

Komunitas agama telah menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga turut terlibat di garis depan dalam merespon Covid-19 ini dengan membentuk kerangka kerja, memberikan pedoman berbasis kekuatan spiritual bagi warga Kanada dalam melalui pandemi ini. Ada keyakinan yang berkembang bahwa selama masa krisis ini, orang akan kembali menemukan kekuatan, harapan dan tujuan melalui koneksi mereka dengan

komunitas agama (Paras, 2020). Berbeda halnya dengan beberapa kasus di negara dimana insitusi atau kegiatan keagamaan atau tempat ibadah menyumbang klaster penyebaran Covid-19 di masyarakat, hal demikian tidak banyak terjadi di Kanada. Menurut Neustater (2020), tempat ibadah hanya menyumbang 1 angka kasus penyebaran Covid-19 yang itu relatif jauh lebih berisiko kecil dibandingkan 7 angka kasus di sekolah atau 30 angka kasus di restoran dan bar, adapun tempat paling berisiko adalah toko grosir dengan 46 angka kasus.

Demikian halnya dengan maraknya kalangan agamawan yang memprotes pembatasan atau penutupan tempat ibadah oleh pemerintah sebagaimana dilakukan kelompok agamawan di Amerika Serikat, situasi tersebut tidak terjadi di Kanada. Hal demikian bukan berarti kalangan gereja atau kelompok agama lainnya takut kepada pemerintah, karena kalangan gereja juga cukup vokal dan kritis. Namun, bentuk protes oleh gereja misalnya, lebih cenderung menyoroti kekurangan dana sistemik perawatan jangka panjang dan tempat penampungan tunawisma atau kurangnya infrastruktur medis dan air yang memadai di komunitas Indigenous (Klassen, 2020). Adanya tanggapan yang kontras terhadap Covid-19 di Kanada dan Amerika Serikat berakar pada sikap nasional yang sangat berbeda tentang tanggung jawab individu dan kolektif untuk kesehatan masyarakat (Klassen, 2020), dimana Amerika Serikat lebih kuat dengan tradisi individualismnya, sedangkan Kanada memiliki tradisi solidaritas yang terbangun melalui negara kesejahteraan.

Sebaliknya, narasi yang berkembang di Kanada sebagian besar adalah tentang keterlibatan berbagai macam organisasi keagamaan, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, belum terdengar ada institusi keagamaan, gereja misalnya, yang menolak baik arahan kesehatan masyarakat maupun undang-undang dari pemerintah (Klassen, 2020). Meskipun demikian, dalam merespon situasi Covid-19 terbaru, para pemimpin agama di Quebec akhirnya melakukan protes keras. Namun komplain ini tidak menyoroti aspek pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah propinsi Quebec seiring peningkatan level waspada dari kuning menuju jingga pada 21 September, melainkan berbicara tentang keadilan. Per tanggal itu, pemerintah propinsi

mengumumkan batasan baru untuk jumlah orang yang dapat berkumpul di tempat umum, termasuk tempat ibadah, dari 250 orang menjadi 50 orang yang berlaku di zona hijau atau kuning, dan menjadi 25 orang boleh berkumpul di tempat ibadah seperti gereja, masjid dan sinagog pada waktu yang sama, hal ini berlaku di zona merah. Namun, dalam pengaturan yang melibatkan duduk dan sedikit berbicara, seperti bioskop atau ruang konser, batas 250 orang saat ini tetap berlaku (Loewen, 2020). Dalam pernyataannya keesokan harinya, Senin 23 September, sekelompok pemimpin dari berbagai agama menyuarakan aspirasi agar rumah ibadah dimasukkan dalam kategori sebagaimana bioskop atau ruang konser. Kardinal Gérald Cyprien Lacroix ingin pemerintah meninjau kembali keputusannya yang “keliru”. “Mereka menempatkan kami dalam kategori palang,” kata Lacroix, wakil presiden Majelis Uskup Katolik Quebec dan juru bicara Kelompok Kerja Antar Agama Quebec. “Orang-orang benar-benar merasa ini adalah diskriminasi terhadap keyakinan; terhadap ibadah.” Sedangkan sejauh ini, tidak ada wabah yang terkait dengan layanan keagamaan di Quebec, dan banyak tempat ibadah melampaui langkah-langkah kebersihan pemerintah. Namun, seiring dengan lonjakan kasus yang demikian pesat, per 1 Oktober 2020, bioskop atau ruang konser kembali ditutup, adapun rumah ibadah tetap diijinkan dibuka dengan tetap mempertahankan batasan maksimal 25 orang per ruang sekali waktu.

Dampak berat lainnya yang dialami oleh kalangan agama adalah berkurangnya pemasukan bagi rumah ibadah yang hampir semuanya bertumpu pada donasi jamaah dimana donasi adalah sumber pendapatan terbesar tempat ibadah. Hal ini berpengaruh pada manajemen keuangan rumah ibadah dimana memiliki pos rutin untuk gaji para pengelolanya seperti pendeta di gereja, imam di masjid, dan rabbi di sinagog. Minimnya sumbangan berarti berkurangnya dana untuk memberikan layanan keagamaan dan komunitas. Salah satu yang terdampak akibat pandemi yang kemudian berujung pada penutupan rumah ibadah dari Maret sampai Juni 2020 adalah masjid. Penutupan masjid itu bersamaan dengan jelang masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriyah. Bulan puasa merupakan bulan terbesar untuk sumbangan ketika jamaah berkumpul untuk berbuka puasa dan sholat. Akibat Covid-19, bulan puasa 2020 menjadi sangat

berbeda karena dilaksanakan dalam suasana penuh dengan keprihatinan, Penutupan masjid di (Ramadhan) akan menjadi kerugian terbesar bagi banyak organisasi.” demikian kata Imam Abdul Hai Patel dari Toronto. Diantara imbas dari menyusutnya pemasukan itu adalah beberapa staf masjid harus merelakan gajinya ditunda, sementara yang lain dibantu untuk melengkapi syarat agar bisa mengajukan tunjangan federal. Beberapa masjid yang tidak mampu lagi membayar imam pun melakukan seperti itu.

Dalam teknisnya, pimpinan rumah ibadah diperintahkan untuk mengidentifikasi satu atau dua staf penting yang akan tetap digaji dengan nominal 90 persen dari gaji mereka. Sedangkan sisa yang lain akan dilepaskan sehingga mereka dapat mengajukan aplikasi tunjangan federal, tetapi menerima top-up hingga 75 persen dari gaji mereka. Sedangkan untuk para pendeta akan mengambil potongan 30 persen untuk gaji mereka sendiri. Pemerintah federal Kanada sendiri sudah menyiapkan program subsidi upah dengan total anggaran \$ 73 miliar, yang mana \$2.5 miliar diperuntukkan bagi lembaga amal (*charity*) di Kanada. Kongregasi keagamaan termasuk di dalamnya seperti gereja, masjid dan sinagog selama terdaftar sebagai organisasi amal atau nirlaba maka bisa mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Adanya program subsidi upah federal ini akan membantu menjaga staf atau figur penting rumah ibadah seperti pendeta, imam, dan rabbi akan tetap menerima gaji selama pandemi. “Kami telah membuat semua orang dalam daftar gaji kami dan itu adalah pemerintah federal yang membantu kami,” kata Jim Milway, kanselir urusan temporal untuk Keuskupan Agung Toronto.

### ***Emergency Benefits: Wajah Negara Kesejahteraan yang Hadir***

Sebagaimana disinggung di paragraf sebelumnya, Kanada memiliki pondasi negara kesejahteraan yang sudah menjadi tradisi kebijakan sosial sejak tahun 1960an. Meski mengalami berbagai tantangan dan kontraksi di kurun 1980-1990 an dan dilanjutkan dengan berbagai penyesuaian hingga kini, hadirnya negara kesejahteraan dalam situasi kedaruratan dan kebencanaan kini semakin menemukan relevansinya. Untuk merespon pandemi Covid-19 yang berimbas pada berkurangnya dan hilangnya pendapatan finansial warga Kanada, pemerintah federal mengucurkan

anggaran bantuan dengan menggulirkan serangkaian program manfaat kedaruratan atau *emergency benefits* yang sudah dimulai sejak Maret 2020:

*Pertama*, Manfaat Tanggap Darurat Kanada (*Canada Emergency Response Benefit/CERB*) yang memberikan dukungan keuangan kepada warga Kanada yang bekerja atau wiraswasta yang secara langsung terdampak oleh Covid-19. Penerima manfaat akan mendapatkan \$2000 untuk periode 4 minggu (sama dengan \$ 500 seminggu) dan bisa diperpanjang hingga 6 bulan. Untuk bisa menerima CERB, penerima manfaat harus berdomisili di Kanada, berusia minimal 15 tahun, telah berhenti kerja karena alasan terkait Covid-19, sebelumnya telah bekerja atau sebagai wiraswasta mendapatkan penghasilan setidaknya \$5000 pada 2019 atau dalam 12 bulan sebelum tanggal aplikasi program.

*Kedua*, Manfaat Siswa Darurat Kanada (*Canada Emergency Student Benefit/CESB*) memberikan dukungan keuangan kepada siswa pasca-sekolah menengah, dan lulusan sekolah menengah dan atas yang baru-baru ini yang tidak dapat menemukan pekerjaan karena Covid-19. Manfaat ini diberikan hanya kepada siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh Manfaat Tanggap Darurat Kanada (CERB) atau Asuransi Kerja (*Employment Insurance/EI*). Dari Mei hingga Agustus 2020, CESB memberikan pembayaran kepada siswa yang memenuhi syarat untuk: \$ 1.250 selama periode 4 minggu atau sebesar \$ 2.000 untuk setiap periode 4 minggu jika penerima manfaat memiliki tanggungan keluarga atau disabilitas.

*Ketiga*, Subsidi Upah Darurat Kanada (*Canada Emergency Wage Subsidy*) memberikan bantuan subsidi upah kepada pemberi kerja yang telah mengalami penurunan pendapatan karena Covid-19, subsidi itu digunakan untuk menutupi sebagian dari gaji karyawan, berlaku surut hingga 15 Maret atau awal pandemi berlaku. Subsidi ini akan memungkinkan majikan untuk mempekerjakan kembali karyawannya, membantu mencegah pengangguran lebih lanjut, dan memudahkan majikan kembali menormalkan bisnisnya. Pemerintah Kanada mengambil tindakan segera, signifikan, dan tegas untuk mendukung warga Kanada dan bisnisnya yang menghadapi kesulitan akibat wabah Covid-19.

Selain ketiga program manfaat diatas, ketika artikel ini ditulis, pemerintah federal Kanada saat ini sedang menggodok tambahan program jaminan manfaat yang masih berstatus pending karena masih menunggu pengesahan oleh Senat dan House of Common Parlemen Kanada, yaitu: CRB (*Canada Recovery Benefit*) berupa bantuan \$500 per minggu sampai 26 minggu untuk pekerja mandiri dan tidak memiliki Asuransi Kerja (*Employment Insurance*), CRSB (*Canada Recovery Sickness Benefit*) berupa bantuan \$500 selama 2 minggu untuk pekerja yang sakit atau harus mengisolasi diri karena alasan terkait Covid-19, dan CRCB (*Canada Recovery Caregiving Benefit*) berupa bantuan \$500 per minggu sampai 26 minggu per rumah tangga yang diberikan kepada pekerja yang tidak bisa bekerja karena harus mengasuh anak atau anggota keluarganya karena penutupan sekolah atau fasilitas perawatan. Berbagai program sosial diatas yang demikian cepat diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah Kanada dalam hitungan hari sejak awal pandemi, dengan menyasar jutaan warga Kanada terdampak Covid-19, semakin menegaskan bahwa negara kesejahteraan di Kanada masih hadir, dan dengan karakter intervensionisme negara yang dominan semakin mengukuhkan konsolidasi negara kesejahteraan yang sebelumnya begitu cair.

### **Penutup: Refleksi Pelajaran dari Kanada**

Dari pemaparan diatas, ada beberapa catatan yang bisa merangkum pelajaran penting yang bisa diambil dari Kanada. *Pertama*, adanya kepatuhan dan ketaatan kelompok agama terhadap regulasi kesehatan pemerintah telah menjadikan kongregasi agama menjadi tempat berisiko rendah dalam penularan Covid-19, hal ini sekaligus membebaskan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan dari potensi kambing hitam klaster penyebaran Covid-19. Adaptasi dalam pelayanan keagamaan menunjukkan transformasi keberagamaan yang terjadi secara kreatif dan alternatif seperti melalui digitalisasi ceramah, *virtual sermon*, registrasi atau cek-in sebelum masuk rumah ibadah. Selain itu, ketaatan komunitas agama terhadap petunjuk otoritas kesehatan telah mengubah kongregasi agama

menjadi kelompok yang paling taat terhadap regulasi pemerintah Kanada, misal dalam hal kewajiban bermasker ketika masuk rumah ibadah, batasan jumlah jamaah yang boleh masuk tempat ibadah, juga aturan jaga jarak (*social distancing*) yang diterapkan dengan ketat.

*Kedua*, tradisi negara kesejahteraan yang sudah berjalan menemukan kembali relevansinya dengan dominannya peran negara yang begitu tampak, dimana pemerintah sebagai representasi negara dalam waktu cepat mengkonsolidasikan potensinya untuk menjadi penyedia manfaat dan pelindung pendapatan warga Kanada melalui serangkaian program seperti CERB, CESB, CEWS dan sebagainya. Meski pemerintah harus mengalami defisit namun pilihan itu berpotensi menjadi investasi sosial demi stabilitas sosial ekonomi Kanada yang terdampak Covid-19. Meskipun demikian, langkah invasive pemerintah menyisakan beberapa kritik seperti kurang mencakup pekerja migran temporer yang dan pelajar/mahasiswa internasional yang memiliki kerentanan dalam menghadapi eksese gejala Covid-19.

*Ketiga*, sebuah jalinan simbiosis telah ditemukan dimana intervensi negara pada suatu titik tertentu berpotensi membantu menyelamatkan kelompok agama atau kongregasi keagamaan dari kolaps finansial, begitu pun sebaliknya, kelompok agama atau kongregasi keagamaan membantu memback-up, mensupport dan mendukung langkah kebijakan dan program pemerintah. Adanya program CEWS bisa membantu gereja, masjid, dan sinagog yang kesulitan menggaji pendeta, imam, dan rabbi, begitupula CERB bisa membantu membebaskan komunitas kongregasi agama dari kewajiban menyiapkan daftar gaji staf rumah ibadah. Situasi sebaliknya pun berlaku, kelompok agama di Kanada dengan ketaatannya pada protokol kesehatan dan kedisiplinannya mendukung langkah preventif penyebaran virus Corona akan membantu upaya pemerintah menurunkan kurva kasus Covid-19 di Kanada. Selain juga keterlibatan kalangan kongregasi agama dalam mendorong terjaganya solidaritas gotong royong yang akan merawat kultur kerelawanan yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa Kanada yang beragama.

## Daftar Pustaka

- Beaman, L. G., & Beyer, P. (2008). *Religion and diversity in Canada* (Ser. Religion and the social order, v. 16). Brill. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004170155.i-228>
- Beattie, S. (2020). The Coronavirus Crisis Exposed Gaps In Canada's Social Programs. Now's The Time To Fill Them. Sumber: [https://www.huffingtonpost.ca/entry/canada-social-programs-coronavirus\\_ca\\_5ed516dfc5b63bc4db6bd017](https://www.huffingtonpost.ca/entry/canada-social-programs-coronavirus_ca_5ed516dfc5b63bc4db6bd017)
- Briggs A. (1961): The welfare state in historical perspective. *European Journal of Sociology* 2: 221-258.
- Environics Institute. (2016). *Survey of Muslims in Canada*. Retrieved from <https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/survey-of-muslims-in-canada-2016>
- Gismondi, A. (2020, 30 Maret). Canada's response to Spanish Flu drove health care reforms. *Daily Commercial News*. <https://canada.constructconnect.com/dcn/news/government/2020/03/canadas-response-to-spanish-flu-drove-health-care-reforms>
- Hick, S. F. (2014). *Social welfare in Canada : understanding income security* (3rd ed.). Thompson Educational Pub.
- Klassen, P. E. (2020, 4 Mei). Why religious freedom stokes coronavirus protests in the U.S., but not Canada. *The Conversation*. Sumber: <https://theconversation.com/why-religious-freedom-stokes-coronavirus-protests-in-the-u-s-but-not-canada-136557>
- Lipka, M. (2019). 5 facts about religion in Canada. *Pew Research Center*. Sumber: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/01/5-facts-about-religion-in-canada/>
- Loewen, C. (2020, 22 September). Religious leaders ask Quebec to ease restrictions even as new COVID-19 cases jump. *CBC News*, Sumber: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/places-of-worship-religious-COVID-191.5733798>

- McKenzie-Sutter, Holly. (2020, 22 Maret). How Canadian religious groups are adapting to COVID-19. *CTV News*. Sumber: <https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/how-canadian-religious-groups-are-adapting-to-COVID-19-1.4863270>
- Montpetit, J. & MacFarlane, J. (2020, 12 September). Anti-mask protest in Montreal draws large crowd, propelled by U.S. conspiracy theories. *CBC News*. Sumber: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/anti-mask-protest-montreal-1.5722033>
- Neustaeter, B. (2020, 10 Agustus). More than 500 COVID-19 infections in Canada linked to exposures at public places, new data suggests. *CTV News*. Sumber: <https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/more-than-500-COVID-19-infections-in-canada-linked-to-exposures-at-public-places-new-data-suggests-1.5058227>
- Paras, A. (2020, 9 April). How faith communities are responding to the coronavirus pandemi. *The Conversation*. Sumber: <https://theconversation.com/how-faith-communities-are-responding-to-the-coronavirus-pandemi-135281>
- Remiorz, R. (2020, 21 September). Quebec declares beginning of second wave as COVID-19- cases surge in Canada's two most populous provinces. *The Globe and Mail*. Sumber: <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-and-quebec-report-surge-in-COVID-19-infections/>
- WHO (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemi <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Zimonjic, P. (2020, 30 Maret). Keeping the faith during the COVID-19 pandemi — by praying at home and staying connected online. *CBC*. Sumber: <https://www.cbc.ca/news/politics/pandemi-religion-islam-jewish-christian-1.5515588>

## Sumber Lainnya

<https://www.ottawamatters.com/national-news/quebec-raises-alert-levels-in-large-cities-ontario-declares-second-COVID-19-wave-2748352>

<https://projectpandemi.concordia.ca/>

<https://www.pewforum.org/2013/06/27/canadas-changing-religious-landscape/>

<https://www.statista.com/statistics/271212/religions-in-canada/>

<https://nationalpost.com/news/wage-subsidy-program-to-help-fund-faith-as-congregations-face-COVID-19-19-crunch>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kanada>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Religion\\_in\\_Canada](https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Canada)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Islam\\_in\\_Canada](https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Canada)

[https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19-19\\_pandemi\\_in\\_Canada](https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19-19_pandemi_in_Canada)

<https://www.canada.ca/en/services/benefits/COVID-1919-emergency-benefits.html>

<https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html>

<https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/emergency-student-benefit.html>

<https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-subsidy.html>

<https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html>

<https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infectio>

# ORIENTASI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Casmini

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang dimulai dari Wuhan di China pada akhir Desember 2019 (Zhu et al., 2019), menyebar secara eksponensial ke seluruh dunia di awal 2020 (Guo et al., 2020) seiring terjadinya perjalanan internasional (Alirol et al., 2011) ke lebih dari 188 negara (Toquero, 2020). Tercatat pada 4 Juli 2020 berumlah 11.049.505 pasien terinfeksi dan lebih dari 524.677 mengalami kematian (Resource Center, 2020). Jumlah kasus yang dilaporkan di seluruh dunia melewati 5 juta, dengan 215 negara yang terkena dampak (Worldometers.Info, 2020). Di Amerika Serikat, kasus pertama yang dilaporkan pada 20 Januari 2020 (Holshue et al., 2020), dan di Inggris terdeteksi pada 31 Januari (Moss et al., 2020). Organisasi Kesehatan Dunia menyebut penyakit yang disebabkan oleh coronavirus 2 sindrom pernapasan akut (SARS-CoV-2) ini sebagai Covid-19 pada 11 Februari (WHO, 2020a), dan kemudian menandainya sebagai pandemi pada 11 Maret (WHO, 2020b).

Penyebaran Covid-19 di Indonesia tercatat mulai tanggal 2 Maret 2020 dengan diketahuinya dua orang warga Depok yang terinfeksi (Djalante et al., 2020; Martha, 2020). Berawal dari masalah kesehatan fisik (Byass, 2020) berimplikasi pada aspek lain dari kehidupan, seperti ekonomi (Fernandes, 2020; Halimatussa'diah 2020; McKibbin and Fernando 2020; Nicola et al. 2020; Ozili and Arun 2020), pariwisata (Gössling et al., 2020), pendidikan (Abidah, Hidaayatullaah, Simamora, Fehabutar, & Mutakinati, 2020; Sahu

2020; UNESCO, 2020; Van Lancker and Parolin 2020), serta psikologis dan kesehatan mental (Jiang et al., 2020).

Pandemi covid-19 juga berimplikasi persoalan keagamaan dengan berbagai sikap keberagaman yang beragam (Darmawan et al., 2020). Proses perubahan keagamaan dipengaruhi oleh suasana ekonomi dan sekaligus berpengaruh pada etika ekonomi. Peringatan pemerintah untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah berimplikasi pada salah satunya perilaku keberagaman personal atau masyarakat Indonesia. Perubahan kentara pada perilaku keberagaman terlihat dari maraknya peribadahan di tempat ibadah, majelis ta'lim, majelis dzikir, jamaah haji dan umrah berubah untuk perilaku peribadahan di rumah masing-masing. Shalat 'Tedul Fitri dan Shalat 'Tedul Adha dilakukan dirumah masing-masing, jika di lakukan di luar bukan di lapangan namun di pecah di berbagai masjid dan mushalla. Perilaku keberagaman juga terjadi pada perubahan kalimat pada sebagian kata dalam azan hingga pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Transformasi tradisi keagamaan dan perilaku beragama masyarakat secara umum mengalami perubahan (Ghofur & Subahri, 2020). Perilaku keagamaan mengalami transformasi oleh karena situasi dan kondisi yang mengharuskan berubah. Namun demikian, berbagai respon masyarakat terhadap keharusan transformasi ini.

Secara psikologis, keragaman respon terkait dengan keberagaman masyarakat menjadi persoalan tersendiri, yang menjadikan sebagian masyarakat mengalami stress (Prabha, 2020). Perubahan keberagaman yang terjadi secara sporadic memicu terjadinya kerentanan suasana psikologis individu (Van Bavel et al., 2020). Kecemasan, kekhawatiran, stres dan bahkan psikosomatis mewabah beriringan dengan kondisi yang terjadi (Taylor, 2019). Problem kesehatan fisik dan mental menjadi bagian dari dampak yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara luas. Yang salah satunya disebabkan oleh orientasi keberagaman. Tulisan ini memaparkan bagaimana individu menempatkan diri dalam situasi transformasi keberagaman dan implikasi psikologis apa saja yang dialami oleh masyarakat dalam mensikapi transformasi keberagaman. Hasil analisis ini sebagai prediktor perilaku keberagaman di masa yang akan datang.

## **Kajian Transformasi Keberagamaan Personal dan Sosial**

Agama berpengaruh terhadap perubahan sosial sepanjang sejarah umat manusia. Agama sebagai kausa varaibel bermakna bahwa agama menjadi sebab terjadinya suatu perubahan dalam sebuah masyarakat. Perubahan yang diakibatkan oleh agama tidak selamanya mengarah pada kemajuan umat manusia, namun juga perubahan yang mengarah pada kemunduran umat manusia. Fonemona wabah Covid-19 membuat manusia membatasi segala aktivitasnya yang berhubungan dengan manusia lain yang membuat pemeluk agama tidak lagi bisa melakukan berbagai ritual keagamaan dan kegiatan lainnya secara berkelompok. Adanya batasan keagamaan, menghadirkan pola keagamaan yang lebih fleksibel dan mengedepankan kepentingan bersama yang kebersamaan kesehatan masyarakat. (Kustana et al., 2020).

Transformasi keberagamaan adalah perubahan pandangan keagamaan, kontekstualisasi ajaran agama serta pembentukan lembaga yang mendorong adanya sebuah perubahan. Transformasi keberagamaan adalah bentuk pergeseran perilaku keagamaan masyarakat, transformasi disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan sosio-kultural (Handayani, 2011:76). Proses transformasi membutuhkan tahapan meliputi; 1) invensi yaitu suatu proses penciptaan ide-ide baru, 2) difusi yaitu proses pengkomunikasian nilai-nilai tersebut ke dalam masyarakat (sosialisasi), 3) konsekuensi perubahan yang terjadi.

Dalam konteks makna perubahan keberagamaan di masa pandemi ini, memuat klasifikasi dari sikap masyarakat dalam merespon perubahan keberagamaan yang terdiri dari oposisi, akomodasi, dan modifikasi terhadap perubahan. Invensi, difusi dan konsekuensi perubahan menjadi fase yang dialami oleh masyarakat dalam merespon dan bersikap terhadap perubahan keagamaan yang terjadi dimasa pandemi covid-19. Proses transformasi inilah yang menimbulkan ragam orientasi keberagamaan di masyarakat. Pijakan umat Islam adalah al Quran adalah Sunnah Nabi SAW yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip pelaksanaan di era kebaruan agar tetap memperhatikan prosedur Covid-19 bagi kelangsungan ibadah, kesehatan, dan perekonomian (Darmalaksana, 2020).

Berbagai temuan hasil penelitian tentang proses transformasi keberagamaan misalnya tentang klasifikasi cara konstruksi keberagamaan (Islam) di tengah pandemi Covid-19. Klasifikasi cara konstruksi keberagamaan terdiri dari kelompok konservatif dan 'anti-sains'. Pada kelompok keberagamaan yang ignore terhadap Covid-19 menggunakan agama untuk melindungi dirinya agar kepentingan survival-nya berada pada level eksistensial dari represi discourse modern kapitalisme. Penelitian ini menandakan bahwa pentingnya penghayatan keberagamaan yang dimulai dengan disiplin ketat dalam mempelajari agama secara bertahan, tidak serampangan dan melompat-lompat atau terus belajar kepada para ahlinya, bukan dengan 'demokratisasi' agama (Maliki, 2020).

Penelitian tentang covid-19 dan mengkaitkan dengan agama atau keagamaan telah banyak dilakukan. Penelitian yang fokus membahas upaya mencari bentuk treatment dengan mengkaji nilai-nilai hijrah Nabi dilakukan oleh Casmimi (2020). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hijrah Nabi dapat dijadikan treatment pada tataran spiritualitas manusia di tengah menghadapi covid-19. Penelitian (Alkaf, 2020) mengemukakan bahwa ada titik dialogis antara sains dan agama. Wabah adalah hukuman atau cobaan dari Tuhan sehingga menjadi anti sains, sedangkan yang lain meyakini bahwa agama dapat bertahan karena modal institusi dan tradisi spiritualitas di tengah kuatnya Covid-19.

Penelitian berkaitan dengan sikap keberagamaan yang membahas tentang manajemen pengelolaan masjid ditengah covid 19, mengalami perubahan fungsi yang tidak hanya berprinsip pada fungsi masjid sebagai tempat dakwah, namun juga tempat edukasi, dan tempat sosialisasi dan informasi pencegahan dan penyebaran COVID-19 (Nasution & Wijaya, 2020). Hasil penelitian literatur dan analisis teoritis oleh (Saebani et al., 2020) tentang kesadaran teologis keberagamaan dalam menghadapi wabah Covid-19 menyimpulkan bahwa eksistensi agama merupakan kesadaran teologis dalam menghadapi musibah virus corona. Perwujudan dari agama sebagai kesadaran teologis ini diimplementasikan melalui pelbagai pelaksanaan upacara keagamaan secara formal dan informal yang secara antropologis akan membentuk spiritualitas normatif disebabkan oleh

adanya kebutuhan yang sama terhadap ketenangan batin dan pemecahan masalah berlandaskan kepada keyakinan dalam beragama.

### **Pembacaan Tipologi Orientasi Keberagamaan Masyarakat**

Kajian Psikologi Sosial sejak 1945 membicarakan dua tipe cara seorang beragama, yaitu tipe keberagamaan berorientasi “intrinsik” dan “ekstrinsik” (Allport & Ross, 1967). Dalam konteks ragam transformasi keberagamaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia juga dapat dibaca dalam dua tipologi keberagamaan yang dipengaruhi oleh orientasi keberagamaannya. Orientasi merupakan kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya dalam kenyataan atau lingkungan yang berpedoman pada keyakinan dirinya. Orientasi keberagamaan bermakna cara pandang individu mengenai agamanya dan bagaimana individu tersebut menggunakan agama atau keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari (Chaplin, 2006), yang menyentuh seluruh aspek kepribadian, baik batiniah (mental atau spiritual) maupun tingkah laku fisik (Everly Jr., G. S., & Lating, 2019; Koenig, 2009; Tuck, I., Alleyne, R., & Thinganjana, 2006). Orientasi keberagamaan di dalamnya memuat motivasi intrinsik maupun ekstrinsik individu terhadap agama yang diyakininya (Allport, G. W., and Ross, 1967; Muhamad, N., & Mizerski, 2010).

Tipologi sikap dan perilaku keberagamaan dalam masyarakat dalam merespon kondisi covid-19 ini terbagi berdasarkan orientasi keberagamaan intrinsik (OKI) dan ekstrinsik (OKE). OKI menempatkan agama sebagai penghayatan yang bernilai bagi dirinya serta membutuhkan keterlibatan untuk mengatasi kepentingan dirinya. OKI menjadikan agama sebagai motif primer yang menginternalisasikannya melalui praktik agama sebagai cara hidup, sedangkan individu dengan OKE memandang agama sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan, dan bukan untuk kehidupan. Orang dengan ciri OKE menggunakan agama sebagai penunjang motif-motif lain seperti kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri.

#### **1. Tipe Orientasi Keberagamaan OKI di Tengah Pandemi Covid-19**

Orientasi keberagamaan yang bersifat intrinsik diindikasikan oleh komitmen menyeluruh terhadap keyakinan agama yang

dianut dan bagaimana dampak keberagaman tersebut menetap dalam setiap aspek kehidupan yang dijalani. Tipologi keberagaman OKI menjadikan agama adalah hal yang dipikirkan secara seksama dan diperlakukan dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan akhir (Wulff, 1997:231 dalam Spilka, 2002). Individu yang bercirikan OKI bercirikan menjunjung tinggi kemurnian hati, visi, pengertian dan komitmen yang memberikan makna pada ritual-ritual keagamaan yang dilakukan (Wulff, 1991).

Pada situasi pandemi covid-19 ini, bagi individu OKI agama memiliki kekuatan bagi dirinya serta memberi arah dalam hidup. Perubahan keberagaman saat menyesuaikan situasi covid-19 melalui pemikiran secara seksama dengan mengkaji doktrin teks yang melandasi perilakunya. Bentuk keberagaman baru yang menjadi sikap dan perilakunya menjadi kebiasaan baru yang dibangun dari proses pemahaman ajaran, sehingga individu tetap berkomitmen serta tetap memberikan makna dari setiap ritual yang dijalaninya. Contoh perubahan keberagaman di era covid-19 adalah menseyogyakan shalat di rumah, bentuk saf dalam shalat berjamaah yang sebelumnya rapat berubah menjadi berjarak dan berselang pada saf berikutnya dilakukan atas proses memahami teks ajaran. Ibadah haji yang ditiadakan pada 2020 tetap bermakna bagi tipe OKI dalam menjalankan agamanya.

Individu OKI di tengah pandemi covid-19 tetap memiliki harga diri karena mampu mengikuti perubahan nilai norma dan moral yang diyakini olehnya berdasarkan proses pemahaman serta bertukar pendapat dengan orang berilmu. Meskipun terjadi perubahan, namun dirinya tetap penuh percaya diri, memiliki kemampuan menerima kritik dan mempunyai keyakinan mengatasi masalah dalam kehidupan. Kehidupan yang berpegang pada komitmen yang kuat sehingga menjadikan dirinya memiliki prinsip dalam menjalankan agamanya. Fitrah adalah hal mendasar bagi harga diri seseorang, dan yang dapat menimbulkan perasaan sukses adalah ketaatan kepada norma dan moral (Coopersmith, 1967:38). Kesadaran terhadap nilai dan norma agama memastikan bahwa individu telah menghayati, menginternalisasikan

dan mengintegrasikan nilai dan norma menjadi diri pribadinya sehingga menjadi bagian dari hati nurani dan kepribadiannya.

## 2. Tipologi OKE di Tengah Pandemi Covid-19

Individu dengan OKE memandang agama sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan, dan bukan untuk kehidupan. Dirinya berpaling kepada Tuhan, akan tetapi tidak berpaling dari dirinya sendiri. Individu yang berorientasi keberagamaan ekstrinsik menggunakan agama sebagai penunjang motif-motif lain seperti kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri. Orang yang beragama dengan cara ini, melaksanakan bentuk-bentuk luar dari agama, seperti berpuasa, shalat, haji, dan sebagainya namun mereka tidak terinternalisasi di dalamnya (Barrett et al., 2005). Berbeda dengan OKI, OKE menggunakan agama semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai tujuan serta mempraktikkan agama untuk mendapatkan keuntungan spesifik (Allport, G. W., and Ross, 1967; King, J. E., & Crowther, 2004).

Orientasi keberagamaan ekstrinsik (OKE) mengacu pada perilaku individu yang menggunakan agama sebagai kekuasaan melalui partisipasi dalam kelompok. Individu OKE diindikasikan melalui perilaku yang menggunakan agama sebagai pelindung (*protection*), pelarian, status sosial, partisipasi dalam kelompok keagamaan, dan *ego defence* (Allport & Ross, 1967). Individu memisahkan secara kaku antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Individu OKE pada ciri agama sebagai pelindung, menjadikan agama sebagai perlindungan dalam upaya memperoleh kondisi emosional yang diinginkannya. Dalam situasi pandemi covid-19 agama muncul menjadi perlindungan, sehingga seseorang bertambah rajin berdoa, dzikir, atau menjalankan ibadah dalam upaya agar dirinya terhindar dari kegelisahan, kekhawatiran akibat covid-19.

Agama sebagai penghiburan (*consolation*) dimaksudkan, bahwa agama memiliki berbagai kemungkinan di tangan para pemeluknya. Individu OKE, menjadikan agama sebagai penghibur pada saat memperoleh musibah atau kesusahan. Semua kesusahan

akibat pandemi covid-19 merupakan bentuk penebusan dari ujian Tuhan, sehingga ia merasa lebih kuat untuk menjalaninya, meskipun persoalan yang dihadapi sangat kompleks dari berbagai aspek kehidupan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan agama.

Individu OKE memposisikan agama sebagai mekanisme untuk mempertahankan egonya. Dalam situasi pandemi covid-19, individu menjadikan agama sebagai alat untuk merepresi berbagai pengalaman negatif yang dimiliki dan permasalahan nyata yang dihadapi. Kegamangan atas perubahan keberagamaan karena pandemi covid-19 pada sebagian individu OKE merasa status sosial ada yang lepas dalam dirinya. Misalnya *Mbah Kaum* yang sebelumnya diyakini sebagai ahli spiritualitas pada masyarakat yang dipercaya memimpin doa, menjadi imam di masjid berubah karena sebab situasi dan kondisi hilang saat ini, karena berbagai kegiatan keagamaan kelompok dipaksakan tidak boleh dilakukan untuk menghadang penyebaran covid-19. Status sosial dalam simbolik keberagamaan sebagai *Mbah Kaum* sangat berkurang karena aturan *physical distancing* atau *sosial-distancing*. Ekspresi diri dan keagamaan dalam situasi covid-19 sangat terbatas pada kegiatan kelompok keagamaan.

Dalam situasi pandemi covid-19, transformasi keberagamaan bagi individu yang memiliki OKE memiliki keengganan untuk mendalami ajaran dan sejarah agama yang diyakininya secara mendalam. Dirinya memegang teguh doktrin yang diterima sejak lama, meskipun dalam kondisi berubah karena keadaan. Dalam situasi covid-19 bagi individu OKE misalnya aktifitas pergi ke masjid yang telah menjadi rutinitas, perubahan penataan saf dalam shalat menjadi berjarak sesuai protokol kesehatan kurang bisa diterima, karena tidak berupaya mendalami sumber ajaran yang membolehkan mengatur jarak shalat dalam situasi tertentu. Keyakinan bahwa masjid adalah tempat yang suci dan tidak terkena oleh virus merupakan orientasi dirinya yang menekankan pada perolehan ego atas keberagamaan yang dijalannya.

Individu OKE terkesan beragama adalah perilaku ritual semata bukan didorong oleh kekuatan intrinsik. Sikap keberagamaan OKE

fokus pada pelaksanaan ritual dalam agama seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya yang semua itu digunakan hanya sebagai alat yang menunjang motif-motifnya yang lain. Rasa kasih sayang kepada sesama tidak diperoleh, karena keberagamaannya mementingkan sisi formalitas yang mengedepankan kelompok, bukan pengahayatan.

### **3. Tipologi Orientasi Keberagamaan pada Pencarian (quest) (OKP)**

Tipologi OKP dikembangkan oleh (Batson et al., 1993) yang disebut juga sebagai orientasi petualangan dalam beragama. OKP memandang agama sebagai proses yang terbuka dan mempertanyakan berbagai dasar yang membangun keyakinan atas suatu agama. Pada situasi covid-19, individu dengan tipe ini berupaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan eksistensial terkait dengan persoalan keberagamaan yang muncul. Mereka melihat skeptisme sebagai sesuatu yang penting dan positif serta cara pandang terhadap solusi agama sebagai sesuatu yang tentative dan kontekstual dari perubahan keberagamaan akibat covid-19.

Aspek kejujuran dilibatkan dalam aspek kehidupan dalam menghadapi masalah transformasi keberagamaan yang terjadi. Individu OKP terus mencari, karena kebenaran sejati tak diketahui dari setiap permasalahan atau persoalan. Masalah transformasi keberagamaan pada situasi covid-19 itu penting meskipun untuk berubah mengalami kesulitan, yang terpenting adalah mencari jawabannya. Terdapat realitas transsendental yang diyakini dengan keseimbangan aspek agama menjadi pegangan dalam kehidupan hidup mereka.

### **Implikasi Psikologis Keberagamaan di Masa Pandemi Covid-19**

Agama memiliki relevansi terhadap permasalahan kehidupan manusia. Agama ditempatkan pada bagian dari struktur sosial yang membentuk sumber nilai bagi tatanan masyarakat serta mendukung terpenuhinya kebutuhan batin seseorang (Hamali, 2017). Seseorang yang orientasi keberagamaan intrinsik diasosiasikan dengan bebas dari keragu-raguan, mampu meminimalisasi kecemasan, kegigihan berusaha dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan kehidupan. Bagi orang yang

beragama, kesukaran atau rintangan apapun akan dihadapinya dengan kesabaran, karena merupakan bagian dari cobaan Allah SWT yang harus dilaluinya. Halangan atau ancaman yang datang pada dirinya tidak dipandang negatif, melainkan menjadi spirit untuk terus melangkah dengan mencari hikmah dan harapan dari sebab yang terjadi pada dirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi keberagamaan berimplikasi psikologis pada masing-masing perilaku keberagamaan. Seakan keberagamaan seseorang tersekat dalam peta keberagamaan dalam tiga tipologi intrinsik, ekstrinsik dan pencarian. Namun dalam realitanya aplikasi keberagamaan dalam diri dalam konteks covid-19 bisa saja dirinya berproses yang dilalui dalam merespon transformasi keberagamaan saat ini untuk memperoleh kebermaknaan. Meskipun dalam studi yang dikembangkan oleh Baker & Gorsuch (Lewis et al., 2005) menunjukkan bahwa orang yang memiliki orientasi keberagamaan ekstrinsik cenderung merasa cemas dibandingkan orang yang memiliki OKI. Demikian juga orang dengan OKE memiliki skor depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki OKI.

Secara riil di lapangan, masing-masing individu dalam perilaku keberagamaannya terjadi konflik jiwa antara doktrin yang sebelumnya dipahami dan yakini sebagai sebuah keabsahan dalam beragama dan telah menjadi kebiasaan beradu dengan berbagai penafsiran baru yang disampaikan oleh berbagai organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah atau MUI membuat kegamangan beragama pada sebagian umat Islam di Indonesia. Meskipun ini lebih dekat pada tipe OKP, namun bagi OKI dan OKE juga akan tetap melihat dan membaca sebagai sebuah fenomena keberagamaan baru yang terjadi saat pandemi covid-19 meskipun selanjutnya cara merespon yang berbeda antara ketiga tipe (OKI, OKE dan OKP)

Realitas bagi individu untuk menjadikan orientasi keberagamaan yang integratif antara intrinsik, ekstrinsik dan pencarian tentunya mengalami sebuah proses tahapan yang menjadi perilaku dalam diri. Contoh dalam ibadah puasa Ramadhan dipraktikkan sebagai sarana terapeutik dan protilaksis untuk beberapa kondisi dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Elmajnoun et al., 2020). Kesan praktik ibadah puasa

Ramadhan ini berorientasi pada ekstrinsik karena ada emosional untuk mendapatkan terapi, namun bisa juga itu bersifat intrinsik ketika dalam pelaksanaannya ada sebuah pemaknaan dari perilaku berpuasa. Demikian juga ketika mencari berbagai argumentasi alasan berpuasa dalam doktrin al Quran maupun Sunnah menunjukkan bahwa dirinya ada sebuah upaya pencarian informasi dan esensi yang menguatkan keyakinan beribadah puasa.

Sebagai contoh seorang pasien yang mengalami permasalahan kesehatan di masa covid-19 dan mengalami keresahan, bagi mereka yang punya orientasi keberagamaan bertipe intrinsik, pasien tersebut memiliki keberagamaan yang kental maka penjelasan keagamaan dari pihak rumah sakitpun menyertakan logika penjelasan pada pasien, termasuk tentang Covid-19. Keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan dalam perawatan klinis pasien perlu hidup berdampingan dengan penjelasan agama. Penjelasan keagamaan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan informasi sehingga komunikasi antara pihak rumah sakit dengan keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 dapat dirasakan dengan baik (Muhyiddin et al., 2020).

Keberagamaan individu ketika dijalankan dapat membentengi diri untuk terhindar dari gangguan jiwa, serta dapat mengembalikan kesehatan jiwa bagi individu yang mengalami kecemasan dan kegelisahan. Keberagamaan dapat menjadi penolong atas ketidaknyamanan atau kekecewaan atas suatu keadaan untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Apapun tipologi orientasi keberagamaan bagi individu, disitulah agama mempunyai peran untuk pemberian solusi atas problem permasalahan kehidupan manusia.

## **Simpulan**

Respon atas transformasi keberagamaan pada pandemi covid-19 dipengaruhi oleh orientasi keberagamaan, yaitu orientasi keberagamaan intrinsik, orientasi keberagamaan ekstrinsik dan orientasi keberagamaan pencarian. Masing-masing tipe orientasi keberagamaan berkontribusi pada kesehatan psikologis dengan corak sesuai kondisi individu dalam merespon transformasi keberagamaan yang terjadi pada saat pandemi

covid-19. Individu dapat melakukan penyesuaian diri terhadap transformasi keberagaman yang terjadi dengan tingkatan keimanan yang dimiliki masing-masing berdasarkan tipe orientasi keberagamaannya. Keberagaman memberikan kenyamanan individu dan masyarakat meskipun terjadi beberapa perubahan ritual namun bukan tataran hakikat peribadahan, akan tetapi lebih pada tata cara peribadahan.

### Daftar Pustaka

- Abidah, A., Hidayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9)
- Alirol, E., Getaz, L., Stoll, B., Chappuis, F., & Loutan, L. (2011). Urbanisation and infectious diseases in a globalised world. *Lancet Infect Dis*, 11, 131–141. [https://doi.org/doi: 10.1016/S1473-3099\(10\)70223-1](https://doi.org/doi:10.1016/S1473-3099(10)70223-1).
- Alkaf, M. (2020). Agama, Sains, Dan Covid-19: Perspektif Sosial-Agama. *MAARIF Journal*, 15(1), 93–108.
- Allport, G. W., and Ross, M. J. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 32–443.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Barrett, D. W., Patock-Peckham, J. A., Hutchinson, G. T., & Nagoshi, C. T. (2005). Cognitive motivation and religious orientation. *Personality and Individual Differences*, 38(2), 461–474.
- Batson, C. D., Schoenrade, P., & Ventis, W. L. (1993). *Religion and the individual: A social-psychological perspective*. Oxford University Press.
- Byass, P. (2020). Eco-epidemiological assessment of the COVID-19 epidemic in China, January–February 2020. *Global Health Action*, 13(1), 1760490. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1760490>

- Casmini, C. (2020). Memaknai spiritualitas hijrah Rasullullah dalam problem solving di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(1), 121–131. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29080%2Fjbki.v10i1.144>
- Chaplin, J. P. (2006). *Kamus lengkap Psikologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Darmalaksana, W. (2020). New Normal Perspektif Sunnah Nabi Saw. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Darmawan, D., MIharja, D., Waluyajati, R. S. R., & Isnaeniah, E. (2020). Sikap keberagamaan masyarakat menghadapi wabah COVID-19. *Religious; Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(2), 116–125.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Mahfud, C., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Sinapoy, M. S., Rafliana, I., & Djalante, S. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Elmajnoun, H., Elhag, M., Mohamed, H., Haris, P., & Abu-Median, A.-B. (2020). Ramadan 2020 and Beyond in the Midst of the COVID-19 Pandemic: Challenges and Scientific Evidence For Action. *Sudan Journal of Medical Sciences (SJMS)*, 85–110. <https://doi.org/10.18502/sjms.v15i5.7147>
- Everly Jr., G. S., & Lating, J. M. (2019). *Religion, spirituality, and stress. In A Clinical Guide to the Treatment of Human Stress Response*. Springer Link.
- Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. *Available at SSRN 3557504*, 1–33.
- Ghofur, A., & Subahri, B. (2020). Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6(2), 281–301. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>

- Guo, Y.-R., Cao, Q.-D., Hong, Z.-S., Tan, Y.-Y., Chen, S.-D., Jin, H.-J., Tan, K.-S., Wang, D.-Y., & Yan, Y. (2020). The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak—an update on the status. *Military Medical Research*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40779-020-00240-0>
- Halimatussādhiah, H. (2020). *Mengenal Makna Bela Negara di Masa Pandemi Virus Corona (Know the Meaning of Defending the Country in the Corona Virus Pandemic Period) (April 14, 2020)*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3575683> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3575683>
- Hamali, S. (2017). Agama dalam Perspektif Sosiologis. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 223–244. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2111>
- Holshue, M. L., DeBolt, C., Lindquist, S., Lofy, K. H., Wiesman, J., Bruce, H., Spitters, C., Ericson, K., Wilkerson, S., & Tural, A. (2020). First case of 2019 novel coronavirus in the United States. *New England Journal of Medicine*, 382, 929–936. <https://doi.org/DOI: 10.1056/NEJMoa2001191>
- Jiang, H.-J., Nan, J., Zhi-yue Lv, & Yang, J. (2020). Psychological impacts of the COVID-19 epidemic on Chinese people: Exposure, post traumatic stress symptom, and emotion regulation. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 13, 1–8. <https://doi.org/DOI: 10.4103/1995-7645.281614>
- King, J. E., & Crowther, M. R. (2004). The measurement of religiosity and spirituality. *Journal of Organizational Change Management*, 17(1), 83–101. <https://doi.org/10.1108/09534810410511314>
- Koenig, H. G. (2009). Research on Religion, Spirituality, and Mental Health: A Review. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 54(5), 283–291. <https://doi.org/10.1177/070674370905400502>
- Kustana, K., Jamaludin, A. N., Zuldin, M., & Nuramin, H. (2020). Analisis kritis pola keberagamaan dalam perubahan sosial ditengah wabah ovid-19. *LP2M*.

- Lewis, C. A., Maltby, J., & Day, L. (2005). Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults. *Personality and Individual Differences*, 38(5), 1193–1202.
- Maliki, M. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. *MAARIF Journal*, 15(1), 60–92.
- Martha, J. (2020). Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 121–130. <https://doi.org/>. DOI: <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. *CAMA (Center for Applied Macroeconomic Analysis)*. SSRN-id3547729
- Moss, P., Barlow, G., Easom, N., Lillie, P., & Samson, A. (2020). Lessons for managing high-consequence infections from first COVID-19 cases in the UK. *The Lancet*, 395(10227), e46. <https://doi.org/> DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30463-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30463-3)
- Muhamad, N., & Mizerski, D. (2010). The constructs mediating religions "influence on buyers and consumers. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 124–135. <https://doi.org/10.1108/17590831011055860>
- Muhyiddin, A., Rosyad, R., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2020). Urgensi penjelasan keagamaan terhadap keluarga suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. *Karya Tulis Ilmiah UIN SGD Bandung*, 1–12.
- Nasution, N. H., & Wijaya. (2020). Manajemen masjid pada masa pandemi COVID-19. *YONETIM: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 84–104.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery (London, England)*, 78, 185.
- Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. Available at SSRN 3562570, 1–27. <https://doi.org/> Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3562570> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3562570>

- Prabha, M. R. (2020). The trauma of being quarantined and its coping strategies. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(4), 32–35. <https://doi.org/DOI: 10.9790/0837-2504033235>
- Resource Center, C. (2020). *Coronavirus COVID-19 global cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)* [Map]. Johns Hopkins University (JHU). <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>
- Saebani, B. A., Nadjib, M., Kamal, M., & Sutiana, Y. (2020). Kesadaran teologis keberagamaan umat manusia dalam menghadapi wabah Covid-19. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Sahu, P. (2020). Closure of universities due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. *Cureus*, 12(4), e7541. <https://doi.org/doi: 10.7759/cureus.7541>
- Spilka, B. (2002). Psychology of religion: Empirical approaches. In *Religion and Psychology* (pp. 42–54). Routledge.
- Taylor, S. (2019). *The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of infectious disease*. Cambridge Scholars Publishing.
- Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. *Pedagogical Research*, 5(4), em0063. <https://doi.org/10.29333/pr/7947>
- Tuck, I., Alleyne, R., & Thinganjana, W. (2006). Spirituality and stress management in healthy adults. *Journal of Holistic Nursing*, 4, 245–253.
- UNESCO. (2020). *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. COVID-19 Educational Disruption and Response*. UNESCO, Paris, France. URL: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N. D., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J.

- H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., ... Willer, R. (2020). (In press) *Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response*. *Nature Human Behavior*. 10.31234/osf.io/y38m9
- Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. *The Lancet Public Health*, 5(5), e243–e244. [https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30084-0](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0)
- WHO. (2020a). *World Health Organization. WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. World Health Organization, Geneva, Switzerland. URL: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- WHO. (2020b). *World Health Organization. WHO Director-General's Remarks at the Media Briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020*. World Health Organization, Geneva, Switzerland. URL: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>
- Worldometers.Info. (2020). *Covid-19 Coronavirus Pandemic. Worldometer Information Technology & Services, Geneva, Switzerland*. [https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdUOA?Si](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si),
- Wulff, D. M. (1991). *Psychology of religion: Classic and contemporary views*. John Wiley & Sons.
- Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., & Lu, R. (2019). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *New England Journal of Medicine*, 382, 727–733. <https://doi.org/DOI: 10.1056/NEJMoa2001017>

# HAK BERAGAMA, KEBIJAKAN ASIMETRIS, DAN *SENSE OF CRISIS* DI MASA PANDEMI COVID-19

Bayu Mitra A. Kusuma & Theresia Octastefani

Peradaban umat manusia terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Salah satu pencapaian penting yang lahir dari proses peradaban tersebut adalah munculnya pemahaman dan pengakuan atas hak asasi manusia atau HAM. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM (Situmorang, 2019:58). Mengacu pada hukum yang mengatur HAM di Indonesia, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Dalam hal ini negara memiliki tiga kewajiban generik terkait HAM, yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*). Di sisi lain, individu juga diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya (Soetjipto, 2015). Sebagai pijakan awal, penulis ingin mengatakan bahwa menurut perspektif penulis konsep HAM sangatlah luhur dalam menjaga harkat dan martabat manusia, namun dalam realitanya HAM juga jamak disalahgunakan sebagai jurus untuk berkelit dari hukum maupun dimanipulasi untuk menyerang pihak lain yang berseberangan. Hal tersebut menyebabkan tafsir atas HAM terkadang menjadi bias di kalangan masyarakat awam.

Pada kajian ini kita tidak akan membahas HAM secara luas, melainkan menitikberatkan pada aspek hak atas kebebasan beragama saja, terutama terkait dengan pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah pada

masa pandemi Covid-19. Dalam setiap kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai upaya penanganan Covid-19, agama menjadi salah satu isu yang penting bahkan terkadang cenderung sensitif. Di satu sisi, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak survei global, secara umum masyarakat Indonesia memandang penting agama dan tingkat praktik agamanya juga sangat tinggi. Di sisi lain, wabah sebagai peristiwa kesehatan masyarakat memiliki implikasi amat luas yang menyentuh banyak sektor kehidupan, tak terkecuali dalam keberagamaan warga negaranya (Suhadi *et al.*, 2020:32). Berdasarkan fakta tersebut, maka penanggulangan Covid-19 tidak bisa menggunakan kesehatan sebagai dimensi tunggal, namun juga dimensi-dimensi lain seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama.

Kita mungkin memandang bahwa penanganan Covid-19 di beberapa negara maju telah berjalan dengan baik dan kemudian menginginkannya untuk diterapkan di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dimana mayoritas penduduk hidup dengan relasi kolektif, komunal atau paguyuban (*gemeinschaft*). Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas dan Pekerti (2003) bahwa *Indonesian people are a society that embraces a culture of collectivism*. Salah satu manifestasi dari budaya kolektivitas tersebut adalah dengan gemarnya masyarakat kita berkumpul atau membuat kerumunan. Di samping itu perlu diingat bahwa sebagian masyarakat Indonesia lainnya juga ada yang hidup secara patembayan (*gesellschaft*), terutama bagi mereka yang hidup di kawasan urban. Oleh karena kemajemukan itulah maka pola penanganan di suatu negara belum tentu cocok bila diaplikasikan di Indonesia. Mengingat kondisi pada setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing yang harus disikapi secara proporsional, maka pemerintah tidak boleh *gebyah uyah* dalam menentukan kebijakan yang dipandang tepat, atau dengan kata lain kondisi ini menuntut pemerintah untuk menciptakan kebijakan asimetris yang fleksibel dan adaptif.

### **Kebijakan Asimetris: Jalan Tengah Hak dan Risiko**

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, fokus pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangatlah kompleks. Tidak hanya di sektor kesehatan

saja, tetapi juga sektor terdampak lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus memahami bahwa mereka yang paling memahami kerentanan dan risiko di sekitarnya adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena itu, mereka harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan (Patterson *et al.*, 2010). Sebelum berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana pemerintah menegosiasikan hak beribadah setiap pemeluk agama dengan risiko penyebaran wabah Covid-19 ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan asimetris atau *asymmetric policy*. Hal ini karena banyak kalangan masih awam ataupun salah paham dengan konsep tersebut. Shafritz dan Russell (2005:52) dalam buku karyanya *Introducing Public Administration* mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan memperhatikan suatu masalah atau kondisi tertentu. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asimetris diartikan sebagai ketidaksamaan atau ketidakseimbangan. Apabila dikaitkan maka akan memunculkan definisi awal bahwa kebijakan asimetris adalah apa yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah secara tidak sama, tidak merata, atau tidak seimbang. Namun apakah definisi tersebut selesai sampai disitu?

Pemaknaan ketidaksamaan atau ketidakseimbangan ini kerap membuat pemikiran seseorang terjebak pada prasangka yang negatif. Prasangka tersebut memang bisa saja benar jika kebijakan asimetris diterapkan dengan sengaja untuk merugikan kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok lain. Namun, konsep kebijakan asimetris itu sendiri pada hakikatnya tidak selalu berkonotasi negatif. Dalam kondisi tertentu, kebijakan asimetris justru sangat diperlukan. Misalnya dalam membangun infrastruktur, tentu alokasi untuk kebutuhan di ibu kota tidak bisa disamaratakan dengan di kawasan pedesaan. Contoh lain dalam proses penganggaran pembangunan sumber daya manusia misalnya, wilayah dengan jumlah penduduk besar maka lazimnya akan lebih besar alokasinya daripada wilayah dengan penduduk yang kecil, tidak bisa dipukul rata begitu saja sekalipun jika secara luas wilayah sama (Kusuma, 2017:37-38). Pemahaman tersebut juga berlaku di bidang kehidupan lainnya, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak untuk menjalankan ritual ibadah. Oleh karena itu, definisi yang lebih tepat

dari kebijakan asimetris adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah secara berbeda pada kasus yang satu dengan kasus yang lain dalam koridor proporsionalitas menyesuaikan dengan situasi, kondisi, toleransi, dan adaptasi.

Awalnya kebijakan pembatasan hak menjalankan ritual peribadatan di rumah ibadah pada masa pandemi Covid-19 ini cukup ramai dari pro kontra sehingga memicu perdebatan dan kontroversi. Sejumlah pihak yang menentang kebijakan pembatasan itu mengajukan pandangan antara lain bahwa kegiatan peribadatan sama pentingnya dengan akses ke kebutuhan dasar, bahwa menghadiri acara ibadah tidak lebih berisiko daripada mengunjungi tempat perbelanjaan, dan bahwa dalam pembatasan ada pelanggaran hak atas praktik beragama (Saraswati, 2020). Perlu dipahami bahwa pembatasan beribadah di rumah ibadah bukan hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan Bumi lainnya, tak peduli negara agama maupun negara sekuler. Pembatasan tersebut juga tidak dilakukan kepada umat Islam semata, namun kepada seluruh manusia yang mengaku beragama dan berkeyakinan. Tanggapan penduduk dunia pun beragam. Secara umum, pada dua minggu awal sejak kebijakan tersebut diterapkan di negara atau wilayah masing-masing belum menunjukkan dampak psikologis yang berarti. Akan tetapi ketika memasuki pekan ketiga, mulai muncul banyak komentar terkait kondisi saat itu. Salah satunya mengatakan bahwa beribadah di rumah mencerminkan ketakutan pada sesuatu yang non-Ilahi. Kemudian mereka juga mulai menakar keimanan orang lain yang masih merasa tidak ada masalah dengan beribadah di rumah (Sihotang, 2020).

Di Indonesia sendiri, sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat dua orang Indonesia yang telah positif terjangkit Covid-19 dari warga negara asing, segera pemerintah Indonesia menekankan agar warganya melakukan *social distancing* – yang kemudian direvisi menjadi *physical distancing* – dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah sebagai langkah preventif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 agar tak semakin masif. Kebijakan inilah kemudian dirangkum dan diterjemahkan dalam tagar viral #StayAtHome, #WorkFromHome, #TetapDiRumah, atau #DiRumahAja

(Widaningrum & Mas'udi, 2020:52). Kebijakan tersebut bisa dibilang cukup menyulitkan karena berlawanan dengan masyarakat kita yang pola hidupnya kebanyakan gemar berkumpul dan berkerumun. Nah, sebagai lembaga negara yang berkaitan langsung dengan ritual peribadatan umat beragama, pada periode tersebut Kementerian Agama mengaku banyak menerima protes dari masyarakat lantaran penutupan rumah ibadah. Alasan sebagian masyarakat melayangkan protes karena merasa wilayahnya waktu itu belum terjangkit virus corona dan aman-aman saja. Padahal penutupan rumah ibadah selama pandemi dilakukan lantaran berisiko tinggi terjadi penularan yang harus disikapi secara preventif, bukan reaktif. Hal ini tak lepas karena ibadah di masjid, gereja, vihara, pura, ataupun klenteng ketika situasi normal dilakukan tanpa menjaga jarak fisik, sementara hal tersebut tidak bisa dilakukan di situasi yang abnormal ini dan perubahan kebiasaan juga membutuhkan waktu.

Selain penutupan rumah ibadah, acara keagamaan yang mengundang berkumpulnya massa dalam jumlah yang besar juga dilarang. Namun dalam implementasinya, beberapa pihak justru memberikan respon yang kontra produktif. Sebagai contoh, adanya acara keagamaan seperti Ijtima Jamaah Tabligh Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan yang tetap melaksanakan kegiatannya di tengah pandemi corona. Dengan dalih mereka tak takut corona, hanya takut kepada Allah semata. Mereka percaya bahwa hidup dan mati ada ditangan Allah (Mutashim, 2020). Prinsip yang mereka pegang tersebut berakibat fatal, dimana meskipun kegiatan tersebut pada akhirnya dibatalkan, namun sejumlah kasus pasien Covid-19 dari eks peserta acara tersebut bermunculan di berbagai daerah bahkan hingga lintas pulau seperti yang terjadi di Jawa dan Kalimantan.

Harus diakui bahwa pada waktu itu masyarakat memang sempat terbelah pada pihak yang mau patuh dan enggan patuh pada intruksi pemerintah, dimana alasan agama kerap dijadikan pembenaran. Kondisi tersebut masih diperparah dengan sengkabut pemberitaan di media yang menambah panik masyarakat. Lanskap media berada pada pergulatan besar antara kebenaran dan kepalsuan, fakta dan informasi yang salah, berita benar dan berita palsu. Dalam drama ini, musuh-musuh kebenaran hadir. Kemudian para ahli terkepung oleh *buzzer*, kaum populis, dan *influencer*

bayaran (Maqin, 2020:iii). Penulis sendiri punya sebuah pengalaman yang membuktikan situasi tersebut, ketika di periode tersebut penulis membeli suatu keperluan di luar rumah dengan menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer*, sebagian orang memasang pandangan yang mencolok dan sempat terdengar sebuah kalimat rasan-rasan lirih *koyo ra duwe Gusti wae* atau seperti tidak punya Tuhan saja.

Dari protes warga masyarakat tersebut, kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini melanggar HAM? Pertanyaan tersebut muncul karena protes masyarakat kerap juga menyeret-nyeret isu HAM yang sebagaimana pendapat penulis di awal kajian ini bahwa terkadang menimbulkan bias tafsir. Tentu kita tidak bisa memandang fenomena ini dengan kacamata yang subyektif, melainkan harus berbasis regulasi sehingga argumen kita memiliki *legal standing* yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan Komnas HAM, pembatasan ritual peribadatan di tempat ibadah itu dalam konteks HAM dibolehkan. Salah satu Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan bahwa dalam hal mengekspresikan ibadah boleh dikelola, dibatasi dan diatur, tapi bukan esensi agama. Yang dimaksud tidak keluar dari esensi beragama, contohnya tindakan mengurangi rakaat dalam sholat dalam konteks ibadah umat lain (Azzahra, 2020). Lebih dari itu, salah satu instrumen HAM internasional juga telah memuat ketentuan tersebut melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara termasuk Indonesia. Dalam Pasal 18 ayat 3 dinyatakan bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Berdasarkan argumen di atas, dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah dalam membatasi ritual peribadatan di rumah ibadah tersebut memiliki dasar yang kuat dan bukan termasuk pelanggaran HAM. Hal tersebut karena kebijakan yang dibuat bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup warga negara dari ancaman wabah Covid-19. Dalam hal ini kita juga perlu percaya bahwa tidak ada negara yang ingin

mencelakakan warga negaranya di tengah pandemi yang hingga buku ini ditulis masih belum terlihat ujungnya. Namun demikian, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, maka kita tidak dapat memaksakan bahwa setiap orang harus memiliki pemikiran dan pandangan yang seragam. Perbedaan pandangan tersebut bisa terjadi karena setiap orang memiliki preferensi berbeda yang bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu negara kemudian tidak kaku dan bersedia menegosiasikan kondisi tersebut. Memasuki masa *new normal*, pemerintah pusat mulai membuka rumah ibadah dengan mengaturnya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 tahun 2020 Tentang Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah agar Terhindar dari Penyebaran Covid-19. Dalam regulasi itu diatur mengenai prosedur operasional standar peribadatan di rumah ibadah seperti pola pengaturan jarak, penyediaan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh bagi jamaah, dan lain sebagainya.

Pemerintah pusat juga sepakat untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan untuk mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan tempat ibadah agar protes semacam ini tidak lagi terjadi. Kebijakan asimetris tersebut dilakukan dengan mengacu pada zonasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apakah suatu wilayah tergolong zona merah, oranye, atau hijau. Zonasi tersebut bahkan kini telah mencapai tingkat dusun sehingga menjadi semakin presisi meskipun dalam setiap harinya bisa sangat dinamis. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan asimetris mampu menjadi jalan tengah antara pemenuhan hak beribadah masyarakat dengan tetap meminimalisasi risiko penularan wabah sesuai kondisi daerah atau wilayah masing-masing. Meski demikian harus kita akui bahwa mekanisme tersebut bukan tanpa cela, karena seringkali respons kepala daerah cenderung proteksionis dengan memasang garis demarkasi yang jelas atas batas wilayah administrasinya yang kemudian dapat disebut sebagai *administration distancing* (Budi & Anshari, 2020:65). Akibatnya terkadang kebijakan pemerintah daerah kurang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan justru membingungkan masyarakat di akar rumput.

Apabila dikembalikan pada tiga kewajiban generik terkait HAM, maka pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga aspek tersebut. *Pertama*, dengan kebijakan asimetris pemerintah menghormati (*respect*) hak setiap warga negara untuk menjalankan ritual peribadatan. Pemerintah sama sekali tidak melarang, melainkan meminta masyarakat menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan risiko penularan dan mengutamakan keselamatan bersama. *Kedua*, dengan kebijakan asimetris pemerintah melindungi (*protect*) hak beribadah warga negaranya secara proporsional. Tata cara pelaksanaan ritual peribadatan di rumah ibadah pada wilayah dengan potensi penularan Covid-19 yang lebih besar tentu berbeda dengan wilayah yang potensi penularannya lebih kecil sembari sama-sama mengedepankan upaya preventif. *Ketiga*, dengan kebijakan asimetris pemerintah memenuhi (*fulfill*) hak warga negara untuk menjalankan ritual peribadatan di rumah ibadah. Apabila situasi telah memungkinkan maka masyarakat dipersilahkan beribadah di rumah ibadah, sedangkan bila situasi masih belum memungkinkan maka masyarakat diminta tetap beribadah di rumah. Pada posisi ini, pemerintah sebagai *duty bearer* telah berusaha menjalankan fungsinya, selanjutnya masyarakat sebagai *rights holder* juga semestinya menjalankan kewajibannya untuk tidak mengganggu hak individu lainnya. Dengan kata lain, setiap warga negara dipersilahkan menjalankan haknya dengan tetap mempertimbangkan risiko baik atas diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai keinginan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan lewat ritual peribadatan justru berubah menjadi mendekatkan diri dengan Tuhan lewat tragedi kematian, terlebih bila tindakan tersebut berdampak pada orang lain secara massal.

### **Umat Beragama dan *Sense of Crisis***

Covid-19 bukanlah pandemi pertama yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk sekalipun pandemi telah muncul silih berganti. Sejarah mencatat bahwa pada masa Hindia Belanda, telah diketahui bahwa negara ini mempunyai berbagai pintu masuk untuk berjangkitnya wabah yang berasal dari negara lain, seperti pandemi influenza 1918 yang lebih dikenal dengan istilah *Spanish*

*Influenza* (Wibowo *et al.*, 2009:v). Pengetahuan masyarakat yang masih minim, tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya media komunikasi, dan respon pemerintah kolonial yang juga lamban menyebabkan pandemi ini semakin mematikan dan menelan banyak korban. Memasuki Indonesia modern, dalam kurun waktu 2003-2014 atau kurang dari dua dekade saja, beberapa wabah global pernah menyerang seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) tahun 2003, *Avian Influenza* (H5N1) atau Flu Burung tahun 2007, *Swain Influenza* (H1N1) atau Flu Babi tahun 2009, *Middle East Respirator Syndrome* (MERS) tahun 2012, *New Avian Influenza* (H7N9) tahun 2013, dan Ebola tahun 2014. Secara umum enam wabah tersebut dapat tertangani dengan cepat oleh pemerintah Indonesia, hingga pada akhirnya tahun 2020 datanglah Covid-19 yang memporak-porandakan dunia.

Namun apabila diperhatikan, sikap segelintir masyarakat Indonesia di tahun 2020 masih ada saja yang tak jauh beda dengan tahun 1918. Dengan kata lain respon yang ditunjukkan segelintir masyarakat tersebut saat menghadapi Covid-19 tidak berbeda dengan masyarakat Hindia Belanda di masa pandemi Flu Spanyol. Padahal perbedaan rentang waktunya adalah 102 tahun, lebih dari satu abad dan kondisi sosial ekonomi juga pasti sudah sangat berbeda. Sikap segelintir orang yang terkesan meremehkan kegentingan yang telah menjangkiti seluruh dunia tersebut dapat dikategorikan sebagai penganut fatalisme. Fatalisme merujuk kepada sebuah paham dimana seseorang cenderung menyerah pada keadaan dalam menghadapi persoalan hidup tanpa usaha. Pemahaman ini menganggap bahwa manusia seperti benda mati yang tak memiliki daya dan upaya sedikitpun (Yusuf, 2014:65). Mereka menyerah begitu saja pada garis takdir dan meyakini tidak akan bisa mengubahnya kecuali bila Tuhan berkehendak saja. Sekilas nampak religius memang, karena mereka menyandarkan apapun kepada Tuhan. Namun faktanya orang dalam kategori paham fatalisme ini hidupnya sangat datar, tidak peduli pada situasi dan kondisi sekitarnya, serta tidak mau berikhtiar untuk merubah keadaan. Padahal bagi seorang Muslim, dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11 jelas disebutkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Bukan

hanya dalam ajaran Islam, penulis meyakini bahwa dalam ajaran semua agama, umatnya diperintahkan untuk terus berupaya sekuat tenaga terlebih dahulu sebelum menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.

Bagi masyarakat yang belum memiliki *sense of crisis*, mereka umumnya akan terlihat sangat fatalistik dimana hanya pasrah ketika bencana itu datang sambil berharap bantuan orang lain (Prihatin, 2018:235). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bagi seorang Muslim paham fatalisme sangat bertentangan dengan pesan dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang meminta umat Muslim untuk selalu berikhtiar dalam menghadapi berbagai situasi. Jika sudah demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dengan *mindset* sebagian umat beragama dalam mengartikan kepasrahan kepada Tuhan. Hal inilah yang perlu dirubah untuk peradaban yang lebih baik di masa depan dimana manusia harus lebih *aware* dalam menghadapi berbagai bencana. Dalam hal ini, kita perlu membentuk umat beragama yang memiliki *sense of crisis*. Adanya *sense of crisis* dalam diri umat beragama memiliki peran penting karena akan mempengaruhi pola pikir dan penyikapannya dalam semua aspek kehidupan, terutama di tengah kondisi bencana seperti pandemi Covid-19 ini.

Masyarakat yang memiliki *sense of crisis* dicirikan dengan mereka yang menjalankan kesadaran untuk meminimalisasi atau mengelola risiko bencana (*disaster risk management*). Menurut Bank Dunia dalam United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009:2), manajemen risiko bencana mengacu pada proses sistematis dalam menggunakan keputusan administratif, organisasi, keterampilan operasional, dan kapasitas untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan kapasitas penanganan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak bahaya alam, bencana lingkungan, dan teknologi terkait. Kesadaran ini mencakup semua bentuk kegiatan, termasuk tindakan struktural dan non-struktural untuk mencegah atau membatasi (mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons) efek merugikan dari bahaya. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa kepekaan akan bahaya dari suatu bencana bukan hanya menjadi domain tunggal dari pemerintah, tapi juga menjadi tanggungjawab kolektif masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya adalah partisipasi umat beragama. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa Covid-19 tidak bisa disikapi dengan dimensi tunggal, misalnya

kesehatan saja atau agama saja, melainkan harus disikapi dengan pandangan yang multidimensi meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian maka antara sains dan agama menjadi saling melengkapi.

Seorang umat beragama yang memiliki *sense of crisis* dalam dirinya akan memahami bahwa dalam kondisi wabah seperti ini dia tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah atau pihak-pihak terkait tanpa memberi sumbangsih solusi. Lebih lanjut dia juga memiliki kesadaran bahwa apabila belum bisa membantu, maka dia tidak akan menghalangi atau mengganggu. Dia paham bahwa fokus pemerintah bukan hanya memastikan masyarakat dalam kondisi sehat secara fisik, namun juga berupaya untuk mencegah ekonomi negara semakin terjerembab pada resesi yang nantinya akan semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dalam situasi ini masyarakat bukan hanya diintai kematian dari virus yang bergentayangan, tapi juga dari ketiadaan pemasukan yang berakibat orang tidak bisa makan. Dalam situasi yang demikian, umat beragama yang memiliki *sense of crisis* akan memahami apa yang harus mereka lakukan, salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang perlu dicatat bahwa dalam hal ini umat beragama tetaplah boleh kritis pada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat. Kekurangan dalam sebuah kebijakan sangatlah mungkin terjadi mengingat proses pembuatan kebijakan sangatlah dinamis karena ada banyak aktor dan faktor yang saling berinteraksi. Apalagi dalam situasi ini pemerintah dituntut membuat kebijakan yang cepat, adaptif, responsif, dan menggunakan *evidence based* dalam meminimalkan resiko serta bermanfaat untuk jangka pendek, menengah, dan maupun panjang.

Kembali ke kebijakan pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah. Mengingat tujuan pemerintah adalah untuk melindungi kesehatan warganya, bukan untuk melanggar hak beragama, maka semestinya umat beragama yang memiliki *sense of crisis* cepat memahami tujuan tersebut. Namun faktanya kebijakan darurat tersebut masih belum bisa diterima oleh sebagian umat beragama, bahkan termasuk pemuka agama. Di awal masuknya Covid-19 di Indonesia, seorang pemuka dari salah satu agama dengan sembrono mengatakan bahwa Covid-19 adalah 'tentara Allah' untuk menyerang negara yang menurutnya telah merugikan kehidupan umat.

Pada akhirnya sang pemuka agama tak lagi bisa berkutik karena Covid-19 menyerang siapa saja tanpa 'mengecek KTP' seseorang untuk memastikan agama apa yang dianut. Ada juga kasus seorang pemimpin agama lain yang dengan berani tampil di salah satu aplikasi berbagi video dimana dia mengatakan bisa menghalau Covid-19 dengan imannya. Akibatnya tak berselang lama video itupun menimbulkan polemic di masyarakat.

Bagi penulis, sekalipun bisa saja niat para pemuka agama tersebut sebenarnya baik karena bertujuan untuk memberi kekuatan spiritual pada umat beragama, namun cara yang mereka gunakan sangatlah fatal karena di era digital ini berbagai informasi mudah sekali menyebar tanpa adanya saringan yang memadai. Penuturan dua pemuka agama tersebut sangat berbahaya bila ditelan begitu saja oleh penganutnya, apalagi bila kemudian pernyataan itu kembali disebarkan oleh penganutnya kepada orang lain dengan mengambil dalil agama secara serampangan untuk mempertahankan argumen yang tak bertanggungjawab tersebut. Sekali lagi, kritis pada kebijakan pemerintah dengan niat yang membangun sangat diperbolehkan, karena pada faktanya memang kita juga perlu mengkritisi statemen beberapa oknum pejabat pemerintah yang terkesan meremehkan bahaya Covid-19 dan menjadikannya lelucon. Namun tentu protes harus dilandasi argumen yang baik, bukan asal protes dengan mencaci maki atau menghujat sana sini tanpa solusi. Kritik boleh, mencaci jangan.

Yang pasti, sebagai umat beragama kita harus menyadari bahwa Covid-19 telah menyerang umat manusia di seluruh dunia tanpa pandang bulu sehingga ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Semua negara tanpa terkecuali berperang melawan musuh tak kasat mata tersebut. Suka tidak suka, sepakat tak sepakat, pemerintah Indonesia telah menerapkan protokol penanganan Covid-19 di berbagai lini kehidupan. Menurut hemat penulis, sebagai umat beragama yang memiliki *senses of crisis* maka menjaga diri dan orang sekitar semaksimal mungkin agar tidak terpapar, turut melawan penyebaran Covid-19, dan ikut merumuskan strategi untuk bertahan adalah ikhtiar yang harus dilakukan. Hal tersebut karena kita tidak mengetahui kapan datangnya atau bagaimana perwujudan dari sebuah takdir. Jika berikhtiar dengan terus menjaga kesehatan, berpikir positif, menghidupkan semangat,

serta menghindari potensi tertular sudah kita lakukan semaksimal mungkin namun Covid-19 tetap datang menghampiri, maka hidup kita akan tetap lebih bernilai dibandingkan tidak melakukan apapun. Begitulah idealnya umat beragama menyikapi datangnya ujian berupa pandemi Covid-19 ini.

Lalu dimanakah kita bisa menjumpai contoh masyarakat atau umat beragama yang telah menunjukkan bahwa mereka mempunyai *sense of crisis*? *Pertama*, apabila dilihat secara umum sebenarnya sudah cukup banyak gerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah dalam membentuk *sense of crisis* seperti pembentukan Kampung Siaga Bencana, Komunitas Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, dan lain sejenisnya. Di masa pandemi ini, perilaku tersebut tercermin dari tindakan masyarakat yang mengkarantina wilayahnya secara mandiri. Memang pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendorong pemerintah desa untuk membangun pos jaga di setiap gerbang masuk desa sebagai upaya pencegahan Covid-19 dimana pos jaga desa tersebut dapat dikelola oleh relawan desa yang dibentuk oleh masing-masing desa. Namun rupanya sebelum dorongan pemerintah itu dikemukakan kepada khalayak, kesadaran masyarakat di berbagai wilayah sudah lebih dahulu terbentuk, sekalipun itu dengan disertai kelucuan yang mengikuti seperti kesalahan penulisan kata *lockdown* menjadi *lokdon*, *lockdon't*, *lovedown*, hingga *laukdaun*.

Meskipun secara efektivitas masih dipertanyakan karena inisiatif ini juga punya kelemahan, namun paling tidak tindakan masyarakat tersebut cukup membantu dalam membendung penyebaran Covid-19 di masa awal pandemi tersebut masuk ke Indonesia. Tindakan tersebut jauh lebih baik daripada mereka yang tak peduli kemudian bersikap seenaknya dengan mengabaikan protokol kesehatan dan kemudian justru membahayakan orang lain. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat disebut dengan *self governing community*, yakni komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri (Arwani, 2020). Masyarakat yang demikian ini adalah komunitas lokal *beyond the state* yang mampu mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan kearifan lokal sebagai kepekaan kolektif. Namun sayangnya, setelah kebijakan *new normal* diberlakukan, harus diakui bahwa kesadaran masyarakat yang dimulai dengan cukup baik tersebut

perlahan memudar. Kini, pos-pos jaga tersebut sudah mulai dibongkar dan masyarakat bebas keluar masuk tanpa pemeriksaan. Karena itu, meskipun tidak harus seketat sebelumnya, spirit masyarakat dalam menjaga kewaspadaan wilayahnya perlu diperkuat kembali.

*Kedua*, contoh *sense of crisis* yang terkait dengan aktivitas umat beragama. Secara khusus penulis perlu memberikan apresiasi baik pada individu sebagai umat beragama, organisasi keagamaan, maupun komunitas lintas agama yang mau turun tangan dalam mendampingi masyarakat atau umat melewati masa pandemi Covid-19 ini. Kehadiran mereka sangat berarti untuk membangun resiliensi ketika masyarakat sempat limbung menghadapi situasi yang mendadak berubah drastis, ketika yang tadinya bisa menjadi tidak bisa, ketika yang tak lazim menjadi lazim, dan seterusnya. Dalam hal ini penulis akan menukil sebuah cerita yang tak jauh dari kehidupan penulis. Dalam kasat mata penulis, salah satu komunitas yang secara nyata berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk bertahan dan bangkit pasca pandemi Covid-19 mewabah adalah Srikandi Lintas Iman (Srili) yang berbasis di Yogyakarta. Srili percaya bahwa tidak ada satu agama pun yang bisa dengan jumawa menyombongkan diri terbebas dari pandemi ini. Pengalaman pandemi Covid-19 mengajarkan umat beragama dan penghayat kepercayaan menjalani kehidupan iman masing-masing dengan rendah hati, serta mau mengedepankan cinta kasih (Hehanusa, 2020:vi). Dengan memiliki *sense of crisis* kita tidak akan lagi merasa menjadi hamba yang paling benar, paling rajin beribadah, atau yang paling dekat dengan Tuhan.

Selama masa pandemi, anggota Srili memberikan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat. Karena Srili adalah komunitas lintas agama atau lintas iman, pendampingan yang mereka lakukan bisa menggunakan dua cara, yaitu mendampingi umat pada agama masing-masing dan kemudian membawa pengalaman tersebut pada pendampingan yang bersifat kerjasama lintas iman. Salah satu sasaran dari pendampingan Srili adalah kaum ibu-ibu yang kehilangan pekerjaannya untuk bangkit secara psikis maupun ekonomi melalui berbagai pelatihan yang bermanfaat seperti *online marketing*, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Pendampingan-pendampingan tersebut kemudian dibukukan dengan judul *Daya Juang*

*Perempuan Lintas Iman Menghadapi Pandemi* yang ditujukan sebagai referensi dalam mencari informasi terkait pandemi Covid-19, secara khusus terkait dengan kisah-kisah perempuan dan peran serta kiprahnya di masa lampau dan di masa pandemic Covid-19 berbasis tradisi dan ajaran enam agama resmi di Indonesia serta penghayat kepercayaan terkait, hikmah di balik pandemi, serta upaya untuk bangkit dari keterpurukan. Eksistensi Srili memberikan sebuah gambaran bahwa di masa sulit seperti ini, kita tidak boleh terus-terusan beragama dalam banyak sekat. Umat beragama bukan hanya ditantang untuk membangkitkan kehidupan umat di internal agamanya sendiri, tapi juga untuk lebih membangun relasi inklusif dengan pemeluk agama lainnya dalam semangat tolong menolong untuk kebaikan. Baik di masa pandemi atau tidak, memupuk keharmonisan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menyulut gesekan.

*Last but not least*, pada buku terbitan pertama PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Dakwah Milenial: Dari Kajian Doktrinal Menuju Transformasi Sosial*, penulis pernah mengemukakan sebuah pernyataan bahwa dakwah di era milenial ini idealnya mampu *bridging diversity* dan *enriching humanity*, mampu menjembatani keragaman dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan (Kusuma, 2017:103). Nah, membangun umat beragama yang memiliki *sense of crisis* adalah bagian nyata dari upaya tersebut. Kesadaran akan situasi krisis akan membawa kita menjadi umat beragama yang *aware* pada lingkungan sekitar dimana kita akan tolong menolong untuk menyelamatkan sesama tanpa membeda-bedakan lagi suku, agama, ras, ataupun golongan. Semua dilukis dengan berbagai warna bak pelangi indah dalam sebuah bingkai bernama kemanusiaan. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Bin Abi Thalib bahwa ‘jika mereka bukan saudaramu dalam iman, maka mereka saudaramu dalam kemanusiaan’. Sejalan pula dengan pesan dari Gus Dur yang menyatakan bahwa ‘kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu’.

### **Catatan Penutup**

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia, mulai dari relasi sosial hingga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas

di ruang publik membutuhkan adaptasi baru. Pada awal periode kita menghadapi pandemi ini, pemerintah mengintruksikan masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kebijakan tersebut disambut dengan reaksi beragam, ada yang total mengikuti arahan pemerintah tanpa banyak protes, ada yang setengah-setengah, bahkan ada juga yang secara terang-terangan menolak. Argumen yang dibangun oleh mereka yang menolak juga cukup beragam seperti seruan untuk tidak takut pada Covid-19 melainkan pada Allah sebagai penciptanya, tuduhan bahwa mereka yang beribadah di rumah adalah orang yang kurang kuat iman, hingga menyeret isu pelanggaran HAM. Perbedaan tersebut perlu disikapi secara bijak karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang beragam sehingga kita tidak bisa memaksakan respon yang seragam.

Kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas ritual peribadatan di rumah ibadah sama sekali bukanlah pelanggaran HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena pada dasarnya dalam kebijakan tersebut pemerintah tetap berusaha memenuhi tiga kewajiban generiknya yaitu *respect*, *protect*, dan *fulfill* atas hak-hak warga negara. Argumen tersebut telah diperkuat oleh Komnas HAM maupun ICCPR yang menyatakan bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dibatasi dengan alasan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lainnya. Dengan demikian pembatasan di kala pandemi Covid-19 ini memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi pemerintah pusat juga tidak seterusnya kaku dengan kebijakan tersebut dimana kemudian menerapkan kebijakan asimetris yang memungkinkan setiap daerah atau wilayah untuk melakukan pembatasan atau pelanggaran sesuai situasi, kondisi, toleransi, dan adaptasi masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan asimetris mampu memberikan jalan tengah antara hak warga negara untuk melakukan ritual peribadatan di rumah ibadah dan upaya meminimalisasi risiko penularan wabah Covid-19.

Perlu dipahami bahwa melakukan ritual peribadatan di rumah bukanlah metode yang baru dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Masyarakat terdahulu juga pernah melakukannya kala dunia

diterjang pandemi dan musibah lainnya. Adalah kurang tepat dan kurang bijak rasanya jika kemudian kita mengaitkan secara brutal hal tersebut dengan kualitas iman seseorang. Justru kebijaksanaan kita untuk menjaga diri dan orang lain pada situasi pandemi ini seharusnya dilihat sebagai respons keimanan yang tepat dan menjadi cerminan penggunaan akal sehat yang kita miliki. Hal tersebut karena pada hakikatnya Allah telah menganugerahkan pada kita akal pikiran dan di saat seperti inilah kita harus memaksimalkannya. Dalam kondisi normal, melakukan ritual peribadatan di rumah ibadah memang sangat mulia. Namun dalam kondisi abnormal, bisa saja alasan Allah mendesain skenario ini karena Allah ingin hadir di rumah kita masing masing untuk memberikan berkah dan kehangatan dalam keluarga. Sebuah penegasan bahwa tidak kemana-mana, tapi Allah ada dimana-mana.

Lalu ke depan apa yang harus kita kembangkan sebagai umat beragama? Jawabannya adalah menjadi umat beragama yang memiliki *sense of crisis*. Dengan menjadi umat beragama yang memiliki *sense of crisis* kita tidak akan lagi merasa menjadi hamba yang paling benar, paling rajin beribadah, ataupun paling dekat dengan Tuhan sehingga wabah tak akan berani menyentuh kita. Kita akan semakin menyadari bahwa agama dan sains adalah dua hal yang saling melengkapi. Faktanya adalah tidak ada satu agama pun di dunia ini yang bisa dengan angkuh mengatakan dirinya terbebas dari Covid-19. Oleh karena itu, *sense of crisis* akan menghindarkan kita dari sikap yang fatalis dimana seseorang cenderung menyerah pada keadaan dalam menghadapi persoalan hidup tanpa usaha, pasrah begitu saja pada garis takdir, dan meyakini tidak akan bisa mengubahnya kecuali bila Tuhan sendiri yang berkehendak. *Sense of crisis* juga akan mendorong kita untuk lebih menjaga diri sendiri dan orang di sekitar semaksimal mungkin agar tidak terpapar, memunculkan sifat proaktif dalam melawan penyebaran, dan yang tak kalah pentingnya adalah mau berpartisipasi dalam merumuskan strategi penanggulangan Covid-19. Atau minimal bila belum mampu berkontribusi maka kita tidak akan menghambat atau menghalangi. Pada akhirnya kesadaran akan situasi krisis akan membentuk

umat beragama yang responsif dan inklusif dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

### Daftar Pustaka

- Arwani, M. (2020). "Menakar New Normal Desa". *Tribun Jogja Online*. Diakses melalui <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/15/menakar-new-normal-desa?page=all> pada 25 September 2020.
- Azzahra, T. A. (2020). "Komnas HAM: Larangan Salat di Tempat Ibadah Saat Pandemi Corona Dbolehkan". *Detik.com*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5007500/komnas-ham-larangan-salat-di-tempat-ibadah-saat-pandemi-corona-dbolehkan> pada 16 September 2020.
- Budi, A. & Ansari, I. N. (2020). "Administration Distancing? Pemerintah Daerah dalam Pandemi Covid-19". Dalam Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (eds.). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hehanusa, M. (2020). "Pengantar". Dalam Kristi *et al.* (eds.). *Daya Juang Perempuan Lintas Iman Menghadapi Pandemi*. Yogyakarta: KAICIID dan Srikandi Lintas Iman.
- Kusuma, B. M. A. (2017). "Islam, Asymmetric Policy, and Social Conflict: The State's Role as a Root of Radicalism in the Philippines and Thailand". *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 1(1). doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27467.
- \_\_\_\_\_. (2017). "Kebijakan Publik Pro Dakwah: Strategi dalam Mengawal Transisi Masyarakat". Dalam Izudin, A. & Kusuma, B. M. A. (eds.). *Dakwah Milenial: Dari Kajian Doktrinal Menuju Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru dan PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga.
- Maqin, K. (2020). "Pengantar: Apa Sih Sebenarnya Pandemi Itu?". Dalam Maqin, K. *et al.* (eds.). *Wabah, Sains, dan Politik*. Yogyakarta: Antinomi.

- Mutashim, F. (2020). "Egoisme Beragama di Tengah Pandemi Corona". *Suaka Online*. Diakses melalui <https://suakaonline.com/egoisme-beragama-di-tengah-pandemi-corona/> pada 16 September 2020.
- Patterson, O. *et al.* (2010). "The Role of Community in Disaster Response: Conceptual Models". *Population Research and Policy Review* 29(2). doi.org/10.1007/s11113-009-9133-x.
- Prihatin, R. B. (2018). "Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9(2). doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084.
- Saraswati, A. A. A. N. (2020). "Membatasi Kebebasan Beragama di Masa Pandemi". *CRCS UGM*. Diakses melalui <https://cracs.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/> pada 16 September 2020.
- Shafritz, J. M. & Russel, E. W. (2005). *Introducing Public Administration*. New Jersey: Pearson Education.
- Sihotang, M. (2020). "Corona, Ibadah, dan Keimanan yang Diuji Kala Pandemi". *Jurnal Presisi Pikiran Rakyat*. Diakses melalui <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/opini/pr-15381534/corona-ibadah-dan-keimanan-yang-diuji-kala-pandemi-oleh-mikhael-sihotang> pada 16 September 2020.
- Situmorang, V. H. (2019). "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian HAM* 10(1). doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suhadi *et al.* (2020). "Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid-19". *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi I / Juni 2020*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Thomas, D. C. & Pekerti, A. A. (2003). "Effect of Culture on Situational Determinants of Exchange Behavior in Organizations: A Comparison of New Zealand and Indonesia". *Journal of Cross-Cultural Psychology* 34(3). doi.org/10.1177/0022022103034003002.

- United Nations International Strategy for Disaster Reduction. (2009). *The 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction*. Jenewa: UNISDR.
- Widaningrum, A. & Mas'udi, W. (2020). "Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19". Dalam Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (eds.). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wibowo, P. *et al.* (2009). *Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*. Jakarta: Departemen Sejarah FIB UI, UNICEF, dan Komnas FBPI.
- Yusuf, Y. (2014). *Alam Pemikiran: Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*. Jakarta: Prenadamedia.

# **DAMPAK FATWA AGAMA TENTANG COVID-19 PADA PERUBAHAN RUANG KULTURAL**

**(Studi Manajemen Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia)**

Aris Risdiana

## **Pendahuluan**

**T**iga lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia turut merespon pandemi Covid-19. Masing-masing lembaga mengeluarkan fatwa yang berdampak pada perubahan perilaku sosial keagamaan masyarakat, bahkan transformasi ruang kultural. Dimensi-dimensi kebudayaan menjadi kabur, dan pada akhirnya menuntut penyikapan baru dari masyarakat.

Surat Edaran dari PBNU bernomor 3953/C.I.034.04.3030 ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal H A Helmy Faishal Zaini. Surat edaran ini membicarakan shalat Tarawih selama bulan Ramadhan dan shalat Idul Fitri selama pandemi Covid-19 yang semestinya dilaksanakan di setiap rumah. PBNU berharap jamaah mau menaati protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ebelumnya PBNU telah menerbitkan Surat Instrukti Nomor 3945/C.I.34/03/2020 tentang Protokol NU Peduli Covid-19 dan Surat Instrukti Nomor 3952/C.I.34/03/2020 (Setiawan, 2020).

Muhammadiyah juga mengeluarkan surat edaran yang sama. Surat Edaran yang diterbitkan di Yogyakarta tanggal 20 Maret 2020 ditandatangani

oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Surat edaran itu berbunyi: “*Berkaitan dengan penyebaran wabah Covid-19, sesuai dengan prinsip kedaruratan yang dipedomani dari Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah serta merujuk pada maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar umat muslim dan warga Muhammadiyah menunaikan shalat dzuhur di kediaman masing-masing sebagai pengganti shalat Jumat di masjid. Para pengurus takmir masjid tidak perlu menyelenggarakan salat Jumat. Adapun salat fardu berjamaah dapat diselenggarakan di rumah masing-masing,*” (TribunJabar, 2020).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19. Surat edaran ini tertanggal 24 Maret 2020. Salah satu isi surat edaran tersebut berbunyi : “Dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya covid-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'i / social distancing*) maupun upaya *stay at home* atau *work from home* sebagai tindakan preventif, dengan tetap memperhatikan produktifitas kerja.”

Pesan lain yang tidak kalah penting berbunyi: “Dalam kondisi tersebarnya Covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan perenggangan sosial (*at-tabā'ud al-ijtimā'i / social distancing*), salat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat penularan Covid-19,” (Muhammadiyah, 2020).

Beberapa hari sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum, yang menghimbau penyelenggaraan ibadah selama masa pandemi Covid-19. Fatwa tersebut tercantum dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Komisi Fatwa MUI Pusat melaksanakan konferensi pers pada Senin tanggal 16 Maret 2020. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut di antaranya Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, Wakil Ketua Komisi Fatwa KH. Abdul Rahman

Dahlan, serta Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat KH. Hamdan Rasyid. Sementara pembacaan isi fatwa dilakukan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh (MUI, 2020).

Beberapa pesan penting dalam fatwa MUI tersebut berbunyi: *“Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar,”* (MUI, 2020)

Fatwa MUI dan Surat-surat Edaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut membawa perubahan perilaku sosial-keagamaan. Salah satunya dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) bernomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III dan Jamaah dalam The New Normal tertanggal 1 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal Imam Adduruqutni. seluruh jajaran pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, dan DKM/Takmir Masjid seluruh Indonesia. Salah satu bunyi poin dalam Surat Edaran itu: *“Jaga jarak minimal 1 meter antar-jamaah, kenakan masker dari rumah, bawa sajadah atau saputangan sendiri, atau kelengkapan lain yang diperlukan,”* (Wahyudi E. , 2020).

Sebelum memasuki era “new normal,” DMI juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 105-Khusus/PP-DMI/A/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 tentang tata cara sholat Jumat dua gelombang. Surat edaran tersebut mengatur jamaah shalat Jum’at sesuai aturan ganjil genap berdasarkan nomor HP jamaah. Ternyata, surat edaran itu juga sebagai respon atas Fatwa MUI DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020 tentang Hukum dan Panduan Sholat Jumat lebih dari satu kali pada saat Pandemi Covid-19 (Nashrullah, 2020).

Mengingat laju korban Covid-19 tetap saja tidak terkendali, sekalipun sudah ada fatwa dan surat-surat edaran dari berbagai ormas, maka DMI kembali mengeluarkan Surat Edaran Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Nomor 201/PP-DMI/AN/2020 tentang penutupan masjid. Jusuf Kalla mengatakan, “Agar DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan takmir masjid meminimalisasi atau menghentikan sementara kegiatan yang melibatkan jemaah. Termasuk salat Jumat sampai PSBB dicabut kembali.” Ucapan tersebut ditujukan kepada para takmir masjid di DKI Jakarta sebagai salah satu kota dengan angka korban Covid-19 paling tinggi (Kurniawan, 2020).

Jusuf Kalla (JK) juga menjelaskan tentang masjid-masjid yang berada di dalam kompleks perumahan. JK mengatakan, “*Untuk masjid di dalam kompleks perumahan, jemaah dibatasi hanya untuk warga setempat. Masjid kategori transit/persinggahan agar ditutup sementara untuk umum dan dibuka hanya untuk warga di lingkungan sekitar masjid.*” Sementara untuk jemaah dari luar kompleks, JK menambahkan, “*Untuk jemaah luar kompleks agar lebih aman sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah. DKM dan Ta’mir masjid meminimalisasi atau menghentikam sementara kegiatan yang melibatkan jemaah termasuk salat Jumat sampai PSBB dicabut kembali,*” (MediaIndonesia, 2020).

Berdasarkan fakta sosial keagamaan di atas, manajemen masjid yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) menunjukkan kuatnya pengaruh fatwa agama terhadap perubahan ruang kultural (*cultural space*) umat muslim. Surat-surat edaran DMI tidak terlepas dari fatwa agama maupun peraturan pemerintah, yang berdampak pada perubahan ruang kultural umat yang hendak menjalankan kewajiban agama dan ibadah (*islamic cultural space*). Edna Andrews mendefinisikan ruang kultural (*cultural space*) sebagai ruang yang mengandung kebudayaan dan bahasa, dimana prinsip fundamentalnya berupa konversi, perubahan, pengubahan (*conversion*) atau penerjemahan (*translation*) dari sebuah non-informasi ke informasi (Andrews, 2003:14).

Ruang kultural ini menurut Edna Andrews dibentuk oleh bahasa manusia. Namun, bahasa tidak saja menciptakan ruang kultural melainkan juga membentuk sebuah model sistem, dimana sistem ini dibentuk oleh kebudayaan (Andrews, 2003:16). Dengan kata lain, sistem sosial dibentuk oleh bahasa dalam porsi kecil sekaligus oleh kebudayaan dalam porsi lebih besar. Dalam konteks manajemen masjid oleh DMI selama masa

pandemi ini, ruang kultural terbentuk oleh bahasa-bahasa yang dirilis melalui undang-undang, peraturan, fatwa, surat edaran, dan semacamnya. Namun, ruang kultural tersebut juga mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, yakni ajaran-ajaran Islam terkait pedoman hidup manusia secara umum dan terkait kondisi krisis seperti pandemi Covid-19 pada khususnya.

Selain faktor bahasa dan kultur, emosi psikologis juga turut serta dalam membentuk ruang kultural. Pengaturan-pengaturan hubungan partikular dan makna-makna yang membangun berlangsungnya hubungan tersebut turut melanggengkan ruang kultural. Dengan kata lain, ruang kultural merupakan interaksi psikologis antara satu orang dengan orang lain. Emosi memiliki hubungan yang sangat relevan dengan berbagai kesempatan, momentum, dan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak hanya itu, di dalam ruang kultural ini, emosi memotivasi manusia untuk menentukan langkah-langkah efektif dan paling pas (Kitayama, 2007:734). Dengan kata lain, aspek emosi manusia menentukan bagi terciptanya ruang kultural. Ruang kultural terbentuk dari aksi dan relasi emosional antar manusia.

Namun, dimensi kultural ini menyimpan masalahnya sendiri, yakni persoalan anomali. Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, sementara manusia sangat mudah mengaksesnya, maka anomali kebudayaan (*cultural anomaly*) tercipta. Yakni, anomali kultural ini didefinisikan sebagai teknik-teknik baru dalam komunikasi yang membuat setiap orang mampu terserap ke dalam arus mainstream (Marvin, 1988:191). Artinya, ruang kultural yang tercipta oleh bahasa, kebudayaan, dan emosi manusia pun akan terancam oleh model komunikasi teknologi mutakhir.

Penelitian ini membahas dampak fatwa agama (seperti fatwa dan surat edaran dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI) terhadap perubahan ruang kultural dalam kasus pengelolaan/manajemen masjid oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dengan menggunakan sudut pandang kajian ruang kultural, penelitian ini melihat tata kelola masjid oleh DMI dipengaruhi oleh bahasa agama sekaligus kultur masyarakat yang berkembang.

## Hubungan Fatwa Agama dan Manajemen Masjid

Kata '*manajemen*' secara literlek terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yakni *Manus* dan *Agere*. Kata *Manus* berarti tangan, sedangkan *Agere* berarti melakukan. Dua suku kata tersebut digabung menjadi *managere*, yang dalam bahasa Inggris menjadi *management*. Dalam bahasa Indonesia, *management* diterjemahkan menjadi pengelolaan atau manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen cenderung variatif, di antaranya: proses interaksi sumber-sumber daya dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan; proses optimasi sumber daya manusia, material dan keuangan yang memberikan sumbangan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi; kordinasi dan pengintegrasian semua sumber daya untuk menyelesaikan hasil-hasil khusus dan variatif (Ismainar, 2018:48-49).

Dengan demikian, manajemen masjid berarti adalah pengelolaan masjid yang tidak dipisahkan dari tuntutan AL-Quran dan As-Sunnah, dan model manajemen masjid dikembangkan sesuai bimbingan Rasulullah saw. Namun, manajemen masjid tetap dilaksanakan secara profesional dan diarahkan pada sistem manajemen modern, sehingga manajemen masjid mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Salah satu unsur penting dalam manajemen masjid adalah unsur ta'mir. Ta'mir ini adalah struktur kepengurusan masjid, yang biasanya menjabat sekitar tiga sampai lima tahun (Nashar & Abadi, 2018:74-75).

Manajemen masjid ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan fatwa-fatwa agama. Fatwa itu sendiri adalah secara etimologi adalah memberikan jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Kata fatwa diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Secara terminologi, fatwa menerangkan hukum syariat terkait satu persoalan tertentu sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya atau tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Fatwa juga diartikan sebagai pendapat atau keputusan yang berkenaan dengan doktrin atau hukum agama, yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui, yakni mufti. Fatwa ini tidak saja dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, yang biasanya disebut seorang mufti dan

diangkat oleh negara. Tetapi, fatwa juga bisa dikeluarkan oleh ulama yang terkenal di satu kawasan yang juga dapat mengeluarkan fatwa (Nasution & Nasution, 2020:7-8).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah adalah organisasi-organisasi berbasis masyarakat (Wahyudi C. , 2015:152). Lembaga-lembaga ini mengeluarkan fatwa, sekalipun terbatas di lingkungan dan kalangan sendiri, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Misalnya, Sovia Hasanah mengatakan bahwa Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam (Hasanah, 2016). Bahkan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siraj, menyebut bahwa di Indonesia tidak ada fatwa yang mengikat selain Mahkamah Agung (MA). Siapapun, termasuk MUI , boleh berfatwa tetapi tidak mengikat (CNNIndonesia, 2019).

Terkait manajemen masjid di masa pandemi Covid-19 ini, masing-masing dari MUI, NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa keagamaan, khususnya terkait pelaksanaan ibadah di masjid. Fatwa-fatwa agama yang tidak mengikat ini mengambil peran penting karena mengangkat beberapa poin-poin utama dalam kajian manajemen majlis atau tata kelola masjid. Dengan kata lain, fatwa-fatwa MUI, surat-surat edaran dari NU dan Muhammadiyah, merepresentasikan spirit keagamaan terkait manajemen masjid.

Terkait manajemen masjid, MUI mengeluarkan fatwa yang berbunyi: *“Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar;”* (MUI, 2020)

Fatwa MUI di atas mengatur agar ruangan masjid maupun ruang-ruangan publik difatwa haram apabila digunakan untuk melakukan aktifitas ibadah sunnah oleh orang yang terdampak Covid-19. Ruangan masjid diatur sedemikian rupa, dengan dilabeli haram, apabila akan digunakan oleh orang-orang yang terbukti telah terpapar virus Covid-19. Dengan kata lain, fatwa MUI yang tidak mengikat tersebut telah menganggap manajemen masjid yang dijalankan oleh takmir harus diarahkan untuk melarang orang-orang yang positif terpapar virus. Jadi, fatwa MUI tersebut tidak saja berlaku kepada jamaah melainkan juga berlaku pada takmir masjid, supaya para takmir mencegah jamaah melakukan perbuatan haram, yakni mengerjakan ibadah di masjid dalam kondisi positif virus corona.

Sementara PP Muhammadiyah memiliki bahasa yang lebih halus. Dalam Surat Edarannya, PP Muhammadiyah mengatakan: *“Dalam kondisi tersebarnya Covid-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan perenggangan sosial (at-tabā‘ud al-ijtimā‘i/ social distancing), salat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musala, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang, agar terhindar dari mudarat penularan Covid-19,”* (Muhammadiyah, 2020).

Bahasa Surat Edaran dari Muhammadiyah jauh lebih “halus” dibanding bahasa MUI, yakni pelaksanaan shalat lima waktu di masjid dan musala tidak diperlukan. Sekalipun Muhammadiyah dan MUI sama-sama membicarakan tentang ruang masjid dan ruang musala bagi pelaksanaan ibadah seperti shalat lima waktu, tetapi Muhammadiyah lebih memilih diksi “tidak perlu”, sedangkan MUI lebih memilih diksi “haram”. Dengan demikian, hukum mengerjakan ibadah di ruang masjid adalah “tidak perlu” menurut Muhammadiyah dan “haram” menurut MUI dengan syarat jamaah tersebut terpapar Covid-19. Terlepas dari hukum haram dan tidak perlu, Muhammadiyah maupun MUI sama-sama telah membangun satu pandangan hukum Islam tentang model ideal bagi manajemen masjid pada masa pandemi.

Fatwa hukum Islam tentang manajemen masjid pada masa pandemi Covid-19 tersebut selaras dan mempengaruhi munculnya Surat Edaran Dewan Masjid Indonesia (DMI). Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah mengumumkan Surat Edaran Kedua untuk

Mencegah Penyebaran COVID-19 Nomor: 061/PP DMI/A/III/2020 pada Kamis (19/3) sore. Salah satu landasan berpikir dari Surat Edaran PP DMI tersebut adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.

Beberapa poin dalam Surat Edaran PP DMI sebagai berikut: “*shalat jama'ah terbatas dengan jarak minimum 1 meter tiap jamaah; Di Kota-Kota atau Wilayah yang terjadi penularan virus corona dengan potensi tinggi/ zona merah yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka shalat Jumat di Masjid ditiadakan dan masing-masing mengganti dengan shalat Dhuhur di rumah (Fatwa MUI); Apabila kondisi penularan virus corona telah menurun, Shalat dapat dilakukan di Masjid dengan tetap menjaga jarak dan menghindari salaman; Berbagai acara keagamaan yang menghadirkan jamaah ditiadakan,*” (DMI, 2020).

Dalam Surat Edarannya, PP DMI menyebutkan secara terbuka bahwa salah satu dasar pertimbangan surat edaran tersebut diterbitkan adalah fatwa MUI. Bahkan, pasal dalam surat edaran PP DMI merujuk pada fatwa MUI. Dengan kata lain, hubungan kebahasaan antara fatwa MUI dan surat edaran DMI yang menjadi standar baku bagi pelaksanaan manajemen masjid, sangat erat dan kuat. Bahasa fatwa menjadi medan penghubung antara fatwa agama dan manajemen masjid. Ketersambungan secara linguistik atau kebahasaan ini diikuti oleh aktifitas konkrit jamaah dalam menjalankan protokol kesehatan selama pandemi.

Bahasan hukum yang terdapat di dalam fatwa MUI, NU, Muhammadiyah, dan surat edaran PP DMI menurut Edna Andrews menciptakan ruang kultural (Andrews, 2003:14). Terciptanya ruang kultural yang notabene cukup baru secara usia ditandai dengan aktifitas sosial-keagamaan yang baru pula, yakni jamaah masjid yang taat pada protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah Masjid Al Riyadh Kwitang yang menerapkan protokol kesehatan (Republika, 2020). Artinya, masjid-masjid tertentu sudah menciptakan kebudayaan baru, praktik keagamaan baru, yakni pengerjaan ibadah sesuai protokol kesehatan. Di sinilah terciptanya ruang kultural baru beserta aktifitas sosial-keagamaannya yang juga baru.

## **Pengaruh Perkembangan Masyarakat terhadap Manajemen Masjid**

Terciptanya ruang kultural bukan semata-mata disebabkan oleh bahasa. Dalam hal ini, manajemen masjid yang mengatur agar jamaah shalat mengikuti protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 tidak semata-mata dipengaruhi oleh surat edaran DMI, fatwa MUI, dan disempurnakan oleh surat-surat edaran NU dan Muhammadiyah. Lebih dari itu, Edna Andrews mengatakan bahwa ruang kultural juga dipengaruhi oleh kultur itu sendiri (Andrews, 2003:16). Artinya, pengaruh perkembangan situasi pandemi yang dinamis dan kondisi keterancaman kesehatan masyarakat di kota zona merah, hijau, kuning, dan hitam juga turut membentuk ruang kultural dan mempengaruhi sistem manajemen masjid.

Disebabkan perkembangan situasi pandemi bersifat dinamis, penerbitan surat edaran dari PP DMI juga dinamis. Dinamika manajemen masjid oleh DMI tercermin dari banyaknya penerbitan surat-surat edaran terkait teknis-teknis penanganan Covid-19. Pertama, Surat Edaran dengan Nomor: 041/PP-DMI/A/II/2020 tentang Himbauan Sanitasi Siaga Masjid/Mushalla tertanggal 2 Maret 2020. Dalam surat edaran ini tercermin bahwa tindakan sanitasi oleh para takmir masjid dan mushalla sebagai perkara sangat penting. Di antara perkara-perkara sanitasi tersebut adalah menjaga kebersihan lantai masjid/mushalla dengan cairan disinfektan; menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan disinfektan; menjaga kebersihan karpet dan alas shalat lainnya; mengimbau jamaah shalat membawa sajadah/sapu tangan/kain bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing; meminta jamaah yang sedang batuk, demam dan mengalami gejala sakit seperti flu/salesma agar melaksanakan shalat di rumah hingga sembuh; dan ikut mengawasi penyebaran Covid-19 dan tanggal dengan melaporkan jika ada warga masyarakat yang dicurigai terdampak, khususnya di sekitar masjid/mushalla (DMI, 2020).

Kedua, Surat Edaran dengan Nomor: 061/PP DMI/A/III/2020 untuk Mencegah Penyebaran COVID-19. Pada surat edaran kali ini, perhatian DMI sudah tidak lagi pada urusan sanitasi, melainkan lebih pada teknis pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Poin-poin yang disampaikan dalam surat edaran kali ini antara lain: “tingkatkan Doa dan Qunut Nadzilah; Adzan tetap dikumandangkan sesuai waktu shalat, dan shalat jama’ah

terbatas dengan jarak minimum 1 meter tiap jamaah; setiap hari agar Masjid tetap dibersihkan dengan karbol atau sejenisnya, dan yang memakai karpet agar digulung; di Kota-Kota atau Wilayah yang terjadi penularan virus corona dengan potensi tinggi/ zona merah yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka shalat Jumat di Masjid ditiadakan dan masing-masing mengganti dengan shalat Dhuhur di rumah (Fatwa MUI). Begitu pula Shalat 5 waktu dan Shalat Tarawih pada bulan Ramadhan nanti, dilaksanakan di rumah masing-masing; apabila kondisi penularan virus corona telah menurun, shalat dapat dilakukan di Masjid dengan tetap menjaga jarak dan menghindari salaman, serta tetap membawa sajadah masing-masing; berbagai acara keagamaan yang menghadirkan jamaah ditiadakan; Demikianlah petunjuk ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, demi kemaslahatan kita semua,” (DMI, 2020).

Ketiga, Surat Edaran dengan Nomor: 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III Masjid dan Jamaah dalam The New Normal. Pada surat edaran kali ini, DMI mengarahkan manajemen masjid lebih sebagai kordinator pencegahan covid-19, mengupayakan donasi, dan pengaturan teknis shalat Jum'at dengan distribusi jamaah. Poin-poin penting dalam surat edaran kali ini antara lain: “membuka masjid untuk jamaah baik shalat wajib lima waktu maupun jum'atan dengan tetap mengikuti perkembangan informasi penularan Covid-19 di daerah setempat; memanfaatkan pengeras suara masjid sebagai media siar yang efektif untuk informasi penting dan bersifat darurat terkait cegah-tangkal Covid-19; menampung zakat, infaq, dan shadaqah baik uang lump sum ataupun sembako serta mendayagunakannya semaksimal mungkin untuk peningkatan imunitas kesehatan jamaah baik vitamin C dan E maupun pangan/bahan pangan bergizi lainnya; siagakan masjid sebagai Pos Reaksi Cepat (PRC) jika terdapat jamaah tertular Covid-19; pelaksanaan shalat Jum'at diatur dengan (didistribusikan ke) masjid-masjid, mushalla-mushalla, dan tempat-tempat umum, serta shalat jum'at dilaksanakan dua gelombang (KoranPangkep, 2020).

Keempat, Surat Edaran dengan Nomor: 105-Khusus /PP-DMI/A/VI/2020, tertanggal 16 Juni 2020. Surat Edaran kali ini lebih banyak mengevaluasi efektifitas surat-surat edaran sebelumnya. Hanya saja, kali

ini menambahkan pengaturan pelaksanaan shalat Jumat dengan sistem dua gelombang, dimana jamaah akan diatur berdasarkan nomor handphone ganjil genap mereka. Berikut tambahan yang mencolok dalam surat edaran kali ini: “apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil (contoh: 19 Juni 2020) maka Jamaah yang memiliki nomor handphone (HP) ujungnya ganjil (contoh 081 31 ), maka shalat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya genap mendapat kesempatan Shalat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00; begitu pula sebaliknya apabila hari Jumat bertepatan dengan tanggal genap (contoh: 26 Juni 2020) maka jamaah yang memiliki ujung nomor handphone (HP) genap (contoh 081 ..... 40), maka Shalat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya ganjil mendapat kesempatan shalat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00; khusus untuk kantor atau gedung bertingkat, shalat Jumat dapat dilaksanakan berdasarkan pengaturan lantai. Contoh gedung bertingkat 20 lantai, maka gelombang/shift pertama adalah lantai 1-10 dan gelombang/shift kedua adalah lantai 11-20,” (Lampung.co, 2020).

Dengan berkaca pada dinamika surat edaran DMI yang mengikuti perkembangan mutakhir pandemi Covid-19, pengaturan-pengaturan teknis manajemen masjid pun bersifat dinamis. Dengan kata lain, manajemen masjid pada masa pandemi mengikuti persoalan-persoalan yang timbul tenggelam dari masyarakat. Sesuatu yang baru muncul akan segera diatur dalam surat edaran baru, terlebih pada surat edaran sebelumnya belum diatur, seperti pengaturan shalat Jum'at dengan sistem genap-ganjil pada Surat Edaran dengan Nomor: 105-Khusus /PP-DMI/A/VI/2020; atau tugas tambahan masjid untuk menggalang donasi dari umat seperti dalam Surat Edaran dengan Nomor: 104/PP-DMI/A/V/2020; atau peniadaan shalat Jum'at di wilayah zona merah seperti dalam Surat Edaran dengan Nomor: 061/PP DMI/A/III/2020.

Pengaruh perkembangan masyarakat terhadap manajemen masjid ini menciptakan ruang-ruang kultural yang berbeda-beda. Karena itulah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat dalam setiap surat edaran DMI berbeda-beda, dimana setiap surat edaran mempengaruhi terciptanya

ruang kultural dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam bahasa Edna Andrews, ruang kultural ini tercipta bukan saja oleh bahasa melainkan oleh sistem yang dibentuk oleh kultur masyarakat itu sendiri. Dari kultur yang berbeda tersebut, manajemen masjid menjadi berbeda. Misalnya, pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang hanya dapat terjadi di masjid-masjid yang padat penduduk, dengan jamaah yang membeludak. Begitu pun, manajemen masjid yang berorientasi pada penggalangan dana hanya bisa efektif di lokasi-lokasi yang jamaahnya banyak terdampak covid-19.

Terciptanya ruang kultural sebagai dampak dari manajemen masjid pada masa pandemi ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan emosi antar manusia (Kitayama, 2007:734). Karena itulah, sejak pada surat edaran Nomor: 041/PP-DMI/A/II/2020, DMI telah menaruh perhatian serius terhadap aspek sanitasi dan kebersihan diri maupun lingkungan. Sebab, DMI menyadari bahwa virus Covid-19 akan menimpa manusia yang tidak memberlakukan hidup bersih. Untuk itu pula, manajemen masjid harus mengutamakan aspek sanitasi.

Setelah aspek sanitasi itu tercapai, DMI melihat pentingnya manajemen kegiatan di dalam masjid yang pasti melibatkan massa banyak, agar lebih sesuai dengan protokol kesehatan. Perhatian itu tercermin pada Surat Edaran dengan Nomor: 061/PP DMI/A/III/2020. Hal ini menegaskan bahwa sebersih apapun ruang ibadah, tetapi tidak didukung oleh kegiatan yang taat protokol kesehatan, maka akan berakhir dengan sia-sia. Berikutnya, setelah aktivitas keagamaan di dalam tempat ibadah, masjid, mushalla, mulai bisa terkendali, perhatian DMI beralih pada kemungkinan adanya korban terdampak virus corona. Manajemen masjid diarahkan agar memiliki orientasi penggalangan dana, yang nantinya bisa digunakan untuk kepentingan jamaah masjid, khususnya mereka yang terdampak. Perhatian ini terlihat pada Surat Edaran dengan Nomor: 104/PP-DMI/A/V/2020.

Pengelolaan kegiatan keagamaan dan ruang-ruang masjid-mushalla oleh DMI sepenuhnya berbasis pada kepentingan jamaah, perhatian yang serius atas keselamatan dan kesehatan jamaah, supaya pelaksanaan ibadah berjalan aman dan nyaman. Pengaturan-pengaturan ruang kultural semacam ini, dalam istilah Shinobu Kitayama, berbasis pada makna-

makna, nilai-nilai, yang menopang hubungan emosional antara masjid dan jamaah terjalin tetap hangat (Kitayama, 2007:734).

### **Anomali Manajemen Masjid**

Hanya saja, ruang kultural yang tercipta oleh bahasa, perkembangan budaya, dan emosi masyarakat tidak bisa dibebaskan dari anomali kultural. Sehingga manajemen masjid yang diarahkan pada upaya stabilisasi ruang-ruang kultural baru untuk melaksanakan ibadah selama pandemi Covid-19 tampak “rapuh” dan tidak seragam. Salah satu faktor penyebab anomali tersebut juga bisa berupa persoalan komunikasi (Marvin, 1988:191). Hal itu bisa terlihat pada fenomena sosial yang terjadi di kepengurusan Masjid Jami’ Sumenep, Madura.

Ketua Takmir Masjid Jami’ Sumenep, Madura, Husen Satriawawan, menolak Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang hendak melaksanakan tes cepat atau rapid test kepada jamaah masjid yang baru saja menunaikan shalat Jum’at. Penolakan Ketua Takmir tersebut adalah perasaan tersinggung karena Tim Gugus Tugas tidak melakukan kordinasi lebih dulu dengan pihak takmir, dan secara tiba-tiba datang mengenakan alat pelindung diri (APD) dan mau bertindak tanpa izin. Husen Satriawawan mengatakan, “saya sebagai ketua takmir terkejut, tersinggung, terhina, oleh perbuatan tim dan bupati yang bertugas, karena tanpa kordinasi dengan saya,” (CNNIndonesia, 2020).

Anomali lain akibat komunikasi tidak saja terjadi di satu lokasi, melainkan di banyak lokasi. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Kecamatan Muara Badak mengeluarkan surat pernyataan penolakan untuk menjalani rapid test, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara. Surat pernyataan tersebut bernomor 001/FSTMM/VI-20 (Adha, 2020). Ada lagi, takmir masjid di Joyotakan, Serengan, Solo juga menolak himbuan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan shalat taraweh di masjid. Sekalipun satu jamaah terpapar covid-19, takmir masjid Joyotakan tetap menolak menghentikan pelaksanaan shalat taraweh di masjid secara berjamaah. Alasan sang takmir, selain telah menerapkan protokol kesehatan, kehendak itu juga datang dari jamaah sendiri (Ariefana, 2020).

Adanya anomali-anomali semacam itu menunjukkan bahwa ruang kultural sebagai ruang komunikasi yang independen, dengan peran bahasa yang sangat penting. Ketergelinciran bahasa dan komunikasi menyebabkan ruang kultural ini berbalik arah dari orientasi yang semestinya, seperti yang terjadi pada masjid-masjid yang menolak rapid test atau menolak himbuan pemerintah, fatwa MUI, surat-surat edaran dari NU dan Muhammadiyah. Sebagai konsekuensinya, pola manajemen masjid untuk ruang-ruang kultural yang anomali semacam itu berada di luar garis mainstream. Dengan kata lain, ketika sebagian takmir mengelola masjid sesuai dengan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, realitas sosial keagamaan yang tampak di masyarakat memperlihatkan fenomena lain yang anomali; yakni, takmir masjid mempersilahkan jamaah menggunakan masjid sebagaimana biasanya, seperti sediakala sebelum adanya Covid-19.

Anomali kultural tersebut pun terjadi pada institusi Dewan Masjid Indonesia (DMI) sendiri. Karena itulah, dalam satu kasus, sejumlah pihak melayangkan kritik atas kinerja DMI Sulawesi Utara yang dinilai tanpa progres. Fakta di lapangan menunjukkan, sudah 25 tahun (5 periode DMI Sulut) tidak nampak program kerjanya. Bahkan, hanya memiliki 7 pengurus daerah DMI Kabupaten dan Kota (Kadir, 2020).

Bukan saja ditingkat lokal, DMI Pusat pun mendapatkan kritik. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan bahwa sudah saatnya Dewan Masjid membuat sistem aturan panduan yang komprehensif, sehingga bisa mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang bisa menutup celah-celah agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari (Detikcom, 2020). Kritikan ini ditujukan kepada Dewan Masjid setelah adanya oknum ASN yang diduga menggelapkan uang milik negara dan umat bernilai lebih dari Rp. 1,5 miliar. Artinya, Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan melihat ada manajemen DMI yang belum sehat. Ketua Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Barat, Duski Samad, mengaku kecewa dengan perbuatan ASN dan meminta kepolisian mengusut tuntas masalah tersebut (Republika, 2020).

Anomali lain DMI terlihat dalam hubungannya dengan perkara politik. Di satu sisi, DMI menyatakan tidak terlibat aktivitas politik. Wakil Ketua

Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Syafruddin, menegaskan bahwa DMI merupakan organisasi independen dan tidak terlibat aktivitas politik. Syafruddin menambahkan, “visi DMI jelas untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid,” (Jingga, 2019).

Di sisi lain, secara tidak langsung, DMI terlibat aktivitas politik. Yakni, dengan menyebut dirinya tidak punya kewenangan melarang dan mengatur apa yang ada di masjid. Sementara politik praktis yang dilakukan masyarakat dipasrahkan ke tangan masyarakat sendiri, apakah mau diselenggarakan di masjid atau tidak. Intinya, Dewan Masjid mengakui tidak berwenang melarang kampanye politik di masjid (Briantika, 2018).

Anomali-anomali DMI berawal dari bahasa dan komunikasi, sehingga selalu terbuka ruang-ruang kultural yang ambivalen, baik terkait Covid-19 maupun dimensi-dimensi yang lebih luas seperti korupsi dan kampanye politik. Dalam persoalan Covid-19, takmir masjid tampak tidak terkordinasi dengan DMI sehingga muncul sikap penolakan terhadap penerapan protokol kesehatan. Dalam hal korupsi, Dewan Masjid dikritik oleh anggota DPR karena dinilai tidak memiliki sistem yang baik, sementara pengurus DMI balas mengkritik ASN yang menilap keuangan umat. Dalam hal kampanye politik, suara DMI menegaskan menolak politik praktik. Di lain kesempatan, mengaku dirinya tidak berhak melarang kampanye politik dan keputusan berkampanye atau tidak di masjid ada di tangan rakyat, bukan di tangan DMI. Semua anomali-anomali ini terjadi di lingkaran DMI.

## **Penutup**

Fatwa-fatwa agama tentang Covid-19 baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia merupakan representasi bahasa hukum yang memiliki konsekuensi-konsekuensi kebudayaan, salah satunya berupa terbentuknya ruang kultural (*cultural space*) dalam hal ini pengelolaan masjid. Di dalam ruang kultural ini berlangsung segala macam fenomena sosial keagamaan, aktivitas dan rutinitas ibadah, yang sesuai dengan spirit dalam fatwa-fatwa agama tersebut. Hal itu tercermin kuat dalam surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang berbicara tentang manajemen masjid selama masa pandemi Covid-19. Manajemen masjid ala DMI bisa disebut sebagai derivasi atau

turunan dari fatwa-fatwa agama. Bahkan, dalam salah satu surat edaran DMI disebutkan bahwa salah satu pertimbangan penerbitan surat edaran DMI tersebut adalah fatwa MUI.

Pengaruh bahasa hukum/agama dalam kasus manajemen masjid oleh DMI selama masa Covid-19 sangat besar. Namun begitu, faktor lain di luar agama yang turut serta mempengaruhi pola manajemen masjid oleh DMI adalah persoalan-persoalan masyarakat yang situasional, faktual, dan dinamis. Perkembangan realitas sosial masyarakat dalam hubungannya dengan pencegahan Covid-19 menjadi pertimbangan lain bagi DMI untuk mengevaluasi, mempertahankan dan mengubah model manajemen masjid yang lebih ideal, supaya pelayanan pada masjid dan umat semakin optimal. Dengan kata lain, kebutuhan real-konkrit masyarakat menjadi faktor kedua setelah bahasa agama yang mempengaruhi manajemen masjid oleh DMI, terlebih dalam menciptakan ruang-ruang kultural tersebut.

Persoalan lain yang muncul adalah anomali. Ketika DMI mengupayakan pola dan model manajemen masjid yang ideal selama pandemi Covid-19, anomali-anomali muncul. Salah satu bentuk anomali yang paling mencolok adalah disintegrasi para takmir masjid. Pada saat sebagian takmir menaati protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah, fatwa MUI, dan surat-surat edaran dari NU dan Muhammadiyah, sebagian takmir masjid di beberapa lokasi melakukan penolakan. Anomali ini menunjukkan adanya persoalan akut di dalam tubuh DMI secara umum dan dalam manajemen masjid secara khusus.

### **Daftar Pustaka**

- Adha, F. (2020, Juni 9). *Takmir Masjid dan Musala Muara Badak Tolak Rapid Test, Bupati: Kita Dahulukan yang Mau Saja*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.selasar.co](http://www.selasar.co)
- Andrews, E. (2003:14). *Conversations with Lotman: Cultural Semiotics in Language, Literature, and Cognition*. Toronto: University of Toronto Press.
- Ariefana, P. (2020, Mei 14). *Satu Jamaah Positif Corona, Masjid di Joyotakan Solo Nekat Gelar Tarawih*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.jateng.suara.com](http://www.jateng.suara.com)

- Briantika, A. (2018, Agustus 3). *Dewan Masjid Akui Tak Berwenang Larang Kampanye Politik di Masjid*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.tirto.id](http://www.tirto.id)
- CNNIndonesia. (2019, Januari 31). *Said Aqil Sebut Kecuali Fatwa MA yang Lain Tak Mengikat*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/>
- CNNIndonesia. (2020, Mei 23). *Takmir Masjid Tegur Bupati Sumenep dan Bubarkan Rapid Test*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Detikcom. (2020, Februari 27). *ASN Diduga Gelapkan Dana Masjid Raya Sumbar, MUI Minta Diusut Tuntas*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.detik.com](http://www.detik.com)
- DMI. (2020, Maret 19). *CEGAH PENYEBARAN COVID-19, DMI MENGUMUMKAN SURAT EDARAN KEDUA*. Dipetik September 30, 2020, dari <http://dmi.or.id/>
- DMI. (2020). *Imbauan Dewan Masjid Indonesia terkait Covid-19 Sesuai Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia No 041/PP-DMI/A/II/2020*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://corona.jakarta.go.id/>
- Hasanah, S. (2016, Desember 30). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.hukumonline.com/>
- Ismainar, H. (2018:48-49). *Manajemen Unit Kerja: Untuk Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jingga, R. P. (2019, Januari 11). *Dewan Masjid Indonesia Tegaskan Tidak Terlibat Aktivitas Politik*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)
- Kadir, S. (2020, Agustus 8). *DMI Sulut: Kritik atas Kinerja Jadi Ghirah Pengurus Makmurkan Masjid*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.kliknews.net](http://www.kliknews.net)
- Kitayama, S. (2007:734). *Handbook of Cultural Psychology*. New York: The Guilford Press.

- KoranPangkep. (2020, Juni 1). *Alhamdulillah, Dewan Masjid Indonesia Keluarkan Edaran Buka Kembali Masjid*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.koranpangkep.co.id/>
- Kurniawan, H. (2020, September 15). *Surat Edaran Dewan Masjid Indonesia: Masjid Tidak Gelar Salat Jumat Selama PSBB*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.kompas.tv/>
- Lampung.co. (2020, Juni 17). *Terbitkan Edaran Salat Jumat, DMI: Bergelombang Berdasarkan Nomor Ponsel, ini Aturan Lengkapnya*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://lampungpro.co/>
- Marvin, C. (1988:191). *When Old Technologies Were New: Thinking About Electric Communication in the Late Nineteenth Century*. Oxford : Oxford University Press.
- MediaIndonesia. (2020, September 15). *Masjid di Lokasi Padat Penduduk Harus Ditutup Sementara*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://mediaindonesia.com/>
- Muhammadiyah. (2020, Maret 24). *Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19*. Dipetik September 30, 2020, dari <http://www.muhammadiyah.or.id/>
- MUI. (2020, Maret 16). *FATWA NO 14 TAHUN 2020 – PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://mui.or.id/>
- Nashar, & Abadi, M. M. (2018:74-75). *WAJAH-WAJAH MASJID DI MADURA (Studi Historis dan Sosiologis Dinamika Manajemen Masjid dalam Pemberdayaan Ummat*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nashrullah, N. (2020, Juni 16). *Sholat Jumat 2 Gelombang DMI: Ganjil-Genap Nomor Ponsel*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.msn.com/>
- Nasution, M. S., & Nasution, R. H. (2020:7-8). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Republika. (2020, Oktober 1). *DMI Minta Kasus Korupsi di Masjid Raya Sumbar Diusut Tuntas*. Dipetik Oktober 1, 2020, dari [www.republika.id](http://www.republika.id)

- Republika. (2020, Juni 5). *Masjid Al Riyadh Kwitang Terapkan Protokol Kesehatan*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://republika.co.id/>
- Setiawan, K. (2020, April 3). *PBNU Keluarkan Edaran terkait Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://www.nu.or.id/>
- TribunJabar. (2020, Maret 20). *Muhammadiyah Akhirnya Keluarkan Surat Edaran Salat di Rumah untuk Cegah Penyebaran Covid-19*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://jabar.tribunnews.com/>
- Wahyudi, C. (2015:152). *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Wahyudi, E. (2020, Juni 2). *New Normal Salat di Masjid, Ini Protokol DMI*. Dipetik September 30, 2020, dari <https://nasional.tempo.co/>

## BIOGRAFI PENULIS DAN EDITOR

### **Andy Dermawan**

Dosen Filsafat di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Jurusan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan Magister Agama (M.Ag) juga di bidang Filsafat dari Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun gelar Doktor (Dr.) didapatkan dari Program Doktor Politik Islam - Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia memiliki minat riset mencakup kajian filsafat ilmu, manajemen dakwah, manajemen politik, dan politik Islam.

### **Aris Risdiana**

Dosen di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) di institusi tempatnya saat ini mengabdikan. Kemudian dia meraih gelar Magister Manajemen (M.M) konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dari Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia dipercaya sebagai Sekretaris Pusat Admisi UIN Sunan Kalijaga. Di samping itu, saat buku ini disusun dia sedang bersiap untuk memulai studi Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Bayu Mitra A. Kusuma**

Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya dia pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Suchart Upatham International College, Burapha University, Thailand. Dia meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan minat riset di bidang politik kebijakan sosial. Adapun gelar Master of Political Science (M.Pol.Sc) in Security Resource Management didapatkan dari Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand. Saat penulisan buku ini dia sedang mempersiapkan keberangkatan untuk studi Doktor di Ph.D Program in Asia Pacific Regional Studies, College of Humanities and Social Science, National Dong Hwa University, Taiwan.

### **Casmini**

Dosen pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam serta Wakil Dekan II di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Jurusan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1995. Kemudian menyelesaikan gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2000 dan Doktor (Dr.) pada tahun 2011 di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam karirnya tercatat pernah menjadi Sekretaris Kopertais di tahun 2012, Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2012-2016, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020, dan Asesor BAN-PT dari 2015 sampai sekarang.

### **Hamdan Daulay**

Dosen dan Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengajar yang memiliki ketertarikan pada kajian Jurnalistik dan Kebebasan Pers ini menyelesaikan gelar Sarjana di Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian dia meraih gelar Magister Sains (M.Si) dari Prodi

Ketahanan Nasional dan Master of Arts (M.A) dari Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. Adapun gelar Doktor (Dr.) di bidang Ilmu Politik didapatkan dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Hikmah Endraswati**

Dosen dan Sekprodi di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan Magister Sains (M.Si) pada bidang Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun untuk gelar Doktor (Dr.) bidang Manajemen diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 2016. Sebelumnya dia telah berkarir di IAIN Salatiga selama hampir dua dekade dan telah dipercaya menempati beberapa posisi strategis seperti Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga menjadi Asesor BAN-PT. Bidang kajian yang ditekuninya berkaitan dengan ilmu keuangan, keuangan Islam, dan corporate governance pada lembaga keuangan Islam.

### **Irsyadunnas**

Dosen pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam serta Ketua Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia memiliki minat kajian di bidang Hermeneutika Feminis. Seluruh jenjang pendidikan tingginya ditempuh dalam bidang Tafsir Hadits. Dia menyelesaikan gelar sarjana (Drs.) pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995, Magister Agama (M.Ag) pada UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2001, dan Doktor (Dr.) pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013. Selain aktif mengajar, saat ini dia juga tercatat sebagai peneliti di Center for Teaching Staff Development (CTSD) serta pengelola Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Istiqomah**

Dosen di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. Di kampus yang sama dia juga dipercaya sebagai pengelola Jurnal Empower serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dia menyelesaikan gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan menjadi lulusan terbaik tercepat tahun 2015. Selanjutnya dia meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, konsentrasi Pekerjaan Sosial dan lulus dengan predikat cumlaude. Pada tahun 2016-2018 dia aktif bekerja sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tahun 2017 dia aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan LK3 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

### **Khoiro Ummatin**

Dosen pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam karirnya tercatat dia pernah menjabat sebagai Kaprodi S1 dan Sekprodi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam FDK UIN Sunan Kalijaga. Dia meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Magister Sains (M.Si) diperoleh tahun 2000 pada Jurusan Sosiologi (Konsentrasi Agama dan Perubahan Sosial), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini dia sedang menempuh studi pada Program Doktor Politik Islam - Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **Muhammad Irfai Muslim**

Dosen pada Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain aktif mengajar, dia juga Peneliti pada Pusat Studi Kecerdasan Digital (PSKD) FDK UIN Sunan Kalijaga. Dia meraih gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dari

Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimana pada kampus yang sama dia juga pernah menjadi volunteer Pusat Studi Gender dan Anak. Adapun gelar Magister Sains (M.Si) di bidang Manajemen didapatkan dari School of Business, Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Forum akademik yang pernah diikutinya antara lain adalah menjadi pembicara pada the 2<sup>nd</sup> International Conference on Pesantren Studies (ICPS) on Islam, Local Wisdom, and Contemporary Challenges yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2018.

### **Mikhriani**

Dosen Manajemen Lembaga Keuangan Islam di Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia meraih gelar Diploma III (A.Md) Administrasi Keuangan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan gelar Sarjana Muda (B.A) serta Sarjana Lengkap (Dra.) di Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dia kemudian melanjutkan studi Magister Manajemen (M.M) bidang Marketing di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta. Dia meraih gelar Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam karirnya dia juga tercatat pernah menjadi Ketua STIE IEUpaweda Yogyakarta.

### **Muhammad Izzul Haq**

Dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Setelah sempat mengabdikan sebagai Sekretaris Prodi IKS (2013-2015) serta Ketua Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (2016-2018), dia memulai studi Doktor di School of Social Work, McGill University, Montreal, Kanada. Di McGill University, dia juga dipercaya sebagai Sessional Lecturer pada tiga mata kuliah meliputi Approaches to Community and Group Practices, Seminar on Child Protection, dan Public Social Services in Canada. Sebelumnya dia tercatat meraih gelar Master of Science (M.Sc) in Social Policy and

Development, London School of Economics and Political Science (LSE) dengan beasiswa British Chevening. Adapun gelar Sarjana Sosial (S.Sos) diraih dari Jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Rahadiyand Aditya**

Dosen pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di institusi tempat kini dia mengabdikan tersebut, dia berhasil meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada tahun 2014. Dia kemudian melanjutkan studi program magister di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Master of Arts (M.A) pada tahun 2016 sebagai wisudawan termuda level fakultas. Pada tahun 2016-2018, dia menjadi Community Development Officer di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju, Palembang. Di samping sebagai seorang akademisi, dia juga berprestasi di bidang non akademik dengan menekuni futsal. Salah satu ajang bertaraf internasional yang pernah diikutinya adalah Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sport 2015 di Malaysia.

### **Theresia Octastefani**

Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di kampus yang sama dia juga menjadi peneliti pada Youth Studies Center (YouSure) dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT). Sempat menjadi Graduate Research Fellow di Department of Political Science, University of Oslo, Norwegia. Dia meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Adapun gelar Master of Political Science (M.Pol.Sc) in Security Resource Management didapatkan dari Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand. Saat penulisan buku ini dia sedang mempersiapkan keberangkatan untuk studi Doktorat di Department of Business Administration, School of Management, National Central University, Taiwan.

### **Zaen Musyrifin**

Lahir di Purbalingga Jawa Tengah pada tahun 1990. Pada tahun 2008-2012 menempuh pendidikan S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 2012-2014 menempuh pendidikan S2 Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 2015 sampai saat ini menjadi dosen tetap di Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Penulis pernah aktif di kegiatan Sekolah Lintas Iman pada tahun 2015-2018. Penulis sangat tertarik dan ingin mengembangkan tema riset tentang Bimbingan dan Konseling Spiritual.